



# BUPATI TAPANULI UTARA

## PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi *perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan*, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran, Dimana Terdapat Penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 /Pmk.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) TA.2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/189/KPTS/2022 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
27. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

*Dengan Persetujuan Bersama*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp. 1.300.195.776.206
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>31.378.735.478</u>
<i>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</i>	Rp.1.331.574.511.684

2. Belanja :

a. Semula	Rp. 1.369.870.099.393
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>135.583.226.854</u>
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>	Rp.1.505.453.326.247
<i>(Defisit) setelah Perubahan</i>	Rp.(104.204.491.376)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

1)Semula	Rp.93.080.323.187
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>99.256.140.071</u>
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>	Rp.192.336.463.258

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :

1)Semula	Rp.23.406.000.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>(4.948.351.305)</u>
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>	Rp.18.457.648.695

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp.173.878.814.563

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0,00

#### Pasal 3

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1)Semula	Rp. 140.441.969.888
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>29.337.803.977</u>
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 169.779.773.865

b. Pendapatan Transfer :

1)Semula	Rp. 1.143.007.863.636
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 2.040.931.501</u>
<i>Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan</i>	Rp. 1.145.048.795.137

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1)Semula	Rp.16.745.942.682
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.0</u>
<i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan</i>	Rp. 16.745.942.682

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1)Semula	Rp.27.091.047.443
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 1.007.749.908</u>
<i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 28.098.797.351

b. Retribusi Daerah :

1)Semula	Rp.6.901.860.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.2.266.000.000</u>
<i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 9.167.860.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

1)Semula	Rp.8.607.286.366
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (124.239.908)</u>
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</i>	Rp. 8.483.046.458

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

1)Semula	Rp.97.841.776.079
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.26.188.293.977</u>
<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan</i>	Rp. 124.030.070.056

3. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1)Semula	Rp.1.095.501.013.000
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (220.945.810)</u>
<i>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan</i>	Rp. 1.095.280.067.190

b. Transfer Antar Daerah :

1)Semula	Rp.47.506.850.636
2)Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 2.261.877.311</u>
<i>Jumlah Transfer Antar Daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 49.768.727.947

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah :
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1)Semula   | Rp. 16.745.942.682 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | <u>Rp. 0</u>       |
| <i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i> | Rp. 16.745.942.682 |

Pasal 4

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi :
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1)Semula  | Rp. 970.630.303.950       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                        | <u>Rp. 15.832.430.791</u> |
| <i>Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan</i> | Rp. 986.462.734.741       |
- b. Belanja Modal :
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. 131.389.345.199        |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | <u>Rp. 116.947.876.163</u> |
| <i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i> | Rp. 248.337.221.362        |
- c. Belanja Tidak Terduga:
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1)Semula  | Rp. 11.520.000.000       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                              | <u>Rp. 2.802.919.900</u> |
| <i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i> | Rp. 14.322.919.900       |
- d. Belanja Transfer:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1)Semula   | Rp. 256.330.450.244 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                         | <u>Rp. 0</u>        |
| <i>Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan</i> | Rp. 256.330.450.244 |
2. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1)Semula  | Rp. 578.819.409.116         |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                        | <u>Rp. (28.527.465.553)</u> |
| <i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i> | Rp. 550.291.943.563         |
- b. Belanja Barang dan Jasa :
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1)Semula  | Rp. 307.596.056.585       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                                | <u>Rp. 41.156.166.344</u> |
| <i>Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i> | Rp. 348.752.222.929       |
- c. Belanja Hibah :
- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. 78.536.854.063       |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | <u>Rp. 2.091.845.000</u> |
| <i>Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan</i> | Rp. 80.628.699.063       |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1)Semula   | Rp. 1.527.506.186        |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                               | <u>Rp. 1.111.885.000</u> |
| <i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i> | Rp. 2.639.391.186        |

- e Belanja Bunga
- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. 4.150.478.000 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | <u>Rp. 0</u>      |                   |
| <i>Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan</i> |                   | Rp. 4.150.478.000 |
3. Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Modal Tanah :
- |   |                          |                   |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1)Semula                                      | Rp. 1.461.929.000        |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                      | <u>Rp. (267.034.658)</u> |                   |
| <i>Jumlah belanja Tanah setelah Perubahan</i> |                          | Rp. 1.194.894.342 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :
- |   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. 29.131.727.103       |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                            | <u>Rp. 4.184.841.498</u> |                    |
| <i>Jumlah Peralatan dan Mesin setelah Perubahan</i> |                          | Rp. 33.316.568.601 |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung :
- |   |                           |                    |
|---|---------------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. 27.073.288.373        |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                                    | <u>Rp. 12.508.171.444</u> |                    |
| <i>Jumlah belanja Bangunan dan Gedung setelah Perubahan</i> |                           | Rp. 39.581.459.817 |
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan:
- |   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1)Semula  | Rp. 73.660.900.723         |                     |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | <u>Rp. 100.136.295.879</u> |                     |
| <i>Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah Perubahan</i> |                            | Rp. 173.797.196.602 |
- e. Belanja Aset Tetap Lainnya:
- |  |                        |                 |
|--|------------------------|-----------------|
| 1)Semula   | Rp. 61.500.000         |                 |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                                   | <u>Rp. 385.602.000</u> |                 |
| <i>Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan</i> |                        | Rp. 447.102.000 |
4. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga :
- |   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| 1)Semula  | Rp. 11.520.000.000       |                    |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)                              | <u>Rp. 2.802.919.900</u> |                    |
| <i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i> |                          | Rp. 14.322.919.900 |
5. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa :
- |   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| 1)Semula  | Rp. 3.299.290.744 |                   |
| 2)Bertambah/ (Berkurang)  | <u>Rp. 0</u>      |                   |
| <i>Jumlah Belanja Bagi Hasil bagi Pemerintah Desa setelah Perubahan</i> |                   | Rp. 3.299.290.744 |



b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa:	
1) Semula	Rp. 253.031.159.500
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan</i>	Rp. 253.031.159.500

#### Pasal 5

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan :
 

1) Semula	Rp. 93.080.323.187
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 99.256.140.071</u>
<i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i>	Rp. 192.336.463.258
  - b. Pengeluaran Pembiayaan :
 

1) Semula	Rp. 23.406.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (4.948.351.305)</u>
<i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i>	Rp. 18.457.648.695
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
 

1) Semula	Rp. 72.678.813.587
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 99.256.140.071</u>
<i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i>	Rp. 171.934.953.658
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah :
 

1) Semula	Rp. 20.401.509.600
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
<i>Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 20.401.509.600
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :
 

1) Semula	Rp. 8.000.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. (4.948.351.305)</u>
<i>Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan</i>	Rp. 3.051.648.695
  - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
 

1) Semula	Rp. 15.406.000.000
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
<i>Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan</i>	Rp. 15.406.000.000

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years)
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

NIKSON NABABAN

**DAFTAR LAMPIRAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2022**

	<b>URAIAN</b>	<b>HALAMAN</b>
LAMPIRAN I	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	1
LAMPIRAN II	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	2
LAMPIRAN III	RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	25
2	DINAS KESEHATAN	37
3	RSU DAERAH TARUTUNG	53
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	55
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	65
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	75
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	80
8	DINAS SOSIAL	85
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	92
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	97
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	107
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	115
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	121
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	127
15	DINAS PERHUBUNGAN	137
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	144
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	151
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	157
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	166
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	173
21	DINAS PERPUSTAKAAN	179
22	DINAS PARIWISATA	184
23	DINAS PERTANIAN	190
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	199
25	SEKRETARIAT DAERAH	207
26	SEKRETARIAT DPRD	218
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	226
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	235
29	BADAN PENDAPATAN DAERAH	249
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	256
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	267
32	INSPEKTORAT	274
33	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	281
34	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	286
35	KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	290
36	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	294
37	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	300
38	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	304
39	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	308
40	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	312
41	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	316
42	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	320
43	KANTOR KECAMATAN GAROGA	324
44	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	329

**DAFTAR LAMPIRAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA.2022**

	<b>URAIAN</b>	<b>HALAMAN</b>
45	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	333
46	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	337
47	KANTOR KECAMATAN MUARA	340
48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	344
LAMPIRAN IV	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN;	350
LAMPIRAN V	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA;	406
LAMPIRAN VI	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM;	406
LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD;	413
LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD;	420
LAMPIRAN IX	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN;	542
LAMPIRAN X	LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021;	543
LAMPIRAN XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH	746
LAMPIRAN XII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	747
LAMPIRAN XIII	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH	748
LAMPIRAN XIV	DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS)	749
LAMPIRAN XV	DAFTAR DANA CADANGAN	752
LAMPIRAN XVI	DAFTAR PINJAMAN DAERAH	753

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>140.441.969.888</b>	<b>169.779.773.865</b>	<b>29.337.803.977</b>	<b>21 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	27.091.047.443	28.098.797.351	1.007.749.908	4 %
4.1.02	Retribusi Daerah	6.901.860.000	9.167.860.000	2.266.000.000	33 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366	8.483.046.458	(124.239.908)	1 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	97.841.776.079	124.030.070.056	26.188.293.977	27 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.143.007.863.636</b>	<b>1.145.048.795.137</b>	<b>2.040.931.501</b>	<b>0 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.095.501.013.000	1.095.280.067.190	(220.945.810)	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.506.850.636	49.768.727.947	2.261.877.311	5 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.745.942.682</b>	<b>16.745.942.682</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	16.745.942.682	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.300.195.776.206</b>	<b>1.331.574.511.684</b>	<b>31.378.735.478</b>	<b>2 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>970.630.303.950</b>	<b>986.462.734.741</b>	<b>15.832.430.791</b>	<b>2 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	578.819.409.116	550.291.943.563	(28.527.465.553)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.596.056.585	348.752.222.929	41.156.166.344	13 %
5.1.03	Belanja Bunga	4.150.478.000	4.150.478.000	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	78.536.854.063	80.628.699.063	2.091.845.000	3 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.527.506.186	2.639.391.186	1.111.885.000	73 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131.389.345.199</b>	<b>248.337.221.362</b>	<b>116.947.876.163</b>	<b>89 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.461.929.000	1.194.894.342	(267.034.658)	18 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.131.727.103	33.316.568.601	4.184.841.498	14 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.073.288.373	39.581.459.817	12.508.171.444	46 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	73.660.900.723	173.797.196.602	100.136.295.879	136 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61.500.000	447.102.000	385.602.000	627 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.520.000.000</b>	<b>14.322.919.900</b>	<b>2.802.919.900</b>	<b>24 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.520.000.000	14.322.919.900	2.802.919.900	24 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744	3.299.290.744	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500	253.031.159.500	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.369.870.099.393</b>	<b>1.505.453.326.247</b>	<b>135.583.226.854</b>	<b>10 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(69.674.323.187)</b>	<b>(173.878.814.563)</b>	<b>(104.204.491.376)</b>	<b>-150 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>93.080.323.187</b>	<b>192.336.463.258</b>	<b>99.256.140.071</b>	<b>107 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.678.813.587	171.934.953.658	99.256.140.071	137 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600	20.401.509.600	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>93.080.323.187</b>	<b>192.336.463.258</b>	<b>99.256.140.071</b>	<b>107 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.406.000.000</b>	<b>18.457.648.695</b>	<b>(4.948.351.305)</b>	<b>21 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	3.051.648.695	(4.948.351.305)	62 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	15.406.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>23.406.000.000</b>	<b>18.457.648.695</b>	<b>(4.948.351.305)</b>	<b>21 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>69.674.323.187</b>	<b>173.878.814.563</b>	<b>104.204.491.376</b>	<b>150 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250 %</b>

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1		87.215.776.079	685.423.155.062	108.966.245.176	0	0	794.389.400.238	101.553.287.256	697.984.094.004	227.165.650.583	-	-	925.149.744.587	
1	1		411.816.808.324	20.130.678.437	0	0	431.947.486.761	-	407.002.024.447	27.173.010.063	-	-	434.175.034.510	
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000		411.816.808.324	20.130.678.437	0	0	431.947.486.761	-	407.002.024.447	27.173.010.063			434.175.034.510
1	2		86.101.776.079	219.132.141.219	12.359.337.203	0	0	231.491.478.422	100.428.287.256	232.495.498.838	16.324.241.703	-	-	248.819.740.541
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0000		114.291.194.954	8.034.309.203	0	0	122.325.504.157	13.893.000.000	110.786.705.778	7.895.271.703			118.681.977.481
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0001		655.197.000	3.600.000	0	0	658.797.000	-	655.197.000	3.600.000			658.797.000
1	2	1.02.0.00.0.00.01.0002		669.877.000	0	0	0	669.877.000	-	669.877.000	0			669.877.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1.2.02.00.0.00.01.0003	PUSKESMAS GAROGA	0	770.066.000	91.600.000	0	0	861.666.000	-	861.666.000					861.666.000
1.2.02.00.0.00.01.0004	PUSKESMAS HUTABAGINDA	0	925.946.000	0	0	0	925.946.000	-	925.946.000					925.946.000
1.2.02.00.0.00.01.0005	PUSKESMAS JANJI ANGKOLA	0	716.403.000	0	0	0	716.403.000	-	716.403.000					716.403.000
1.2.02.00.0.00.01.0006	PUSKESMAS LUMBAN SINAGA	0	703.167.000	58.600.000	0	0	761.767.000	-	703.167.000	58.600.000				761.767.000
1.2.02.00.0.00.01.0007	PUSKESMAS MUARA	0	815.167.000	0	0	0	815.167.000	-	815.167.000					815.167.000
1.2.02.00.0.00.01.0008	PUSKESMAS ONAN HASANG	0	681.910.000	114.850.000	0	0	796.760.000	-	681.910.000	114.850.000				796.760.000
1.2.02.00.0.00.01.0009	PUSKESMAS PANGARIBUAN	0	786.160.000	0	0	0	786.160.000	-	786.160.000					786.160.000



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1.2.102.0.00.0.00.01.0010	PUSKESMAS PANJARAN	0	528.160.000	0	0	0	528.160.000	-	528.160.000					528.160.000
1.2.102.0.00.0.00.01.0011	PUSKESMAS PARMONANGAN	0	782.856.000	0	0	0	782.856.000	-	782.856.000					782.856.000
1.2.102.0.00.0.00.01.0012	PUSKESMAS PARSINGKAMAN	0	815.083.000	0	0	0	815.083.000	-	815.083.000					815.083.000
1.2.102.0.00.0.00.01.0013	PUSKESMAS SARULLA	0	711.443.000	61.920.000	0	0	773.363.000	-	711.443.000	61.920.000				773.363.000
1.2.102.0.00.0.00.01.0014	PUSKESMAS SIATAS BARITA	0	751.008.000	0	0	0	751.008.000	-	751.008.000					751.008.000
1.2.102.0.00.0.00.01.0015	PUSKESMAS SIBORONGBORONG	0	828.803.000	0	0	0	828.803.000	-	828.803.000					828.803.000
1.2.102.0.00.0.00.01.0016	PUSKESMAS SILANGIT	0	683.246.000	0	0	0	683.246.000	-	683.246.000					683.246.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1.2	1.02.0.00.0.00.01.0017	PUSKESMAS SIMANGUMBAN	0	689.218.000	20.000.000	0	0	709.218.000	-	689.218.000	20.000.000			709.218.000
1.2	1.02.0.00.0.00.01.0018	PUSKESMAS SIPAHUTAR	0	790.081.000	58.800.000	0	0	848.881.000	-	790.081.000	58.800.000			848.881.000
1.2	1.02.0.00.0.00.01.0019	PUSKESMAS SIPULTAK	0	644.941.000	0	0	0	644.941.000	-	644.941.000				644.941.000
1.2	1.02.0.00.0.00.01.0020	PUSKESMAS SITADATADA	0	655.093.000	11.200.000	0	0	666.293.000	-	655.093.000	11.200.000			666.293.000
1.2	1.02.0.00.0.00.01.0021	PUSKESMAS SITUMEANG HABINSARAN	0	762.262.000	0	0	0	762.262.000	-	762.262.000				762.262.000
1.2	1.02.0.00.0.00.02.0000	RSU DAERAH TARUTUNG	72.128.776.079	89.474.859.265	3.904.458.000	0	0	93.379.317.265	86.535.287.256	106.251.106.060	8.100.000.000			114.351.106.060
1.3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.100.000.000	21.387.297.551	69.638.710.052	0	0	91.026.007.603	1.100.000.000	24.137.414.542	168.049.243.350	-	-	192.186.657.892

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1.3.103.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	1.100.000.000	13.829.611.517	69.241.233.331	0	0	83.070.844.848	1.100.000.000	14.132.974.707	161.945.382.559			176.078.357.266
1.3.104.2.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	7.557.686.034	397.476.721	0	0	7.955.162.755	-	10.004.439.835	6.103.860.791			16.108.300.626
1.4.104.2.10.1.03.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.000.000	16.198.185.040	4.266.426.144	0	0	20.464.611.184	25.000.000	15.689.617.158	10.685.407.427	-	-	26.375.024.585
1.4.104.2.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.000.000	16.198.185.040	4.266.426.144	0	0	20.464.611.184	25.000.000	15.689.617.158	10.685.407.427			26.375.024.585
1.5.105.0.00.0.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0	12.704.744.942	2.559.287.540	0	0	15.264.032.482	-	13.758.483.966	4.854.179.740	-	-	18.612.663.706
1.5.105.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	8.798.131.192	2.556.721.640	0	0	11.354.852.832	-	10.534.168.126	2.564.321.640			13.098.489.766
1.5.105.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	3.906.613.750	2.565.900	0	0	3.909.179.650	-	3.224.315.840	2.289.858.100			5.514.173.940

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	4.183.977.986	11.805.800	0	0	4.195.783.786	-	4.901.055.053	79.568.300	-	-	4.980.623.353
1 6 106.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	0	4.183.977.986	11.805.800	0	0	4.195.783.786	-	4.901.055.053	79.568.300	-	-	4.980.623.353
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.599.000.000	68.324.274.976	4.794.608.157	0	0	73.118.883.133	6.739.000.000	74.735.196.771	5.301.925.700	-	-	80.037.122.471
2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	3.905.116.805	27.100.700	0	0	3.932.217.505	-	3.685.748.084	16.948.700	-	-	3.702.696.784
2 7 207.3.32.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN	0	3.905.116.805	27.100.700	0	0	3.932.217.505	-	3.685.748.084	16.948.700	-	-	3.702.696.784
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	380.025.500	0	0	0	380.025.500	-	523.380.200	-	-	-	523.380.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan										
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja									
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja				
2	8	2.142.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	380.025.500	0	0	0	0	380.025.500	-	523.380.200					523.380.200
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	6.251.744.254	52.943.200	0	0	0	6.304.687.454	-	6.768.834.036	77.890.800	-	-	-	6.846.724.836
2	9	2.093.253.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN	0	6.251.744.254	52.943.200	0	0	0	6.304.687.454	-	6.768.834.036	77.890.800				6.846.724.836
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	926.217.800	1.461.929.000	0	0	0	2.388.146.800	-	882.718.800	1.194.894.342	-	-	-	2.077.613.142
2	10	1.042.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	926.217.800	1.461.929.000	0	0	0	2.388.146.800	-	882.718.800	1.194.894.342				2.077.613.142
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000	7.850.374.150	782.655.200	0	0	0	8.633.029.350	170.000.000	7.874.882.122	878.243.200	-	-	-	8.753.125.322
2	11	2.110.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	170.000.000	7.850.374.150	782.655.200	0	0	0	8.633.029.350	170.000.000	7.874.882.122	878.243.200				8.753.125.322

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.274.761.970	249.909.600	0	0	4.524.671.570	-	3.877.519.945	545.559.000	-	-	4.423.078.945
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	4.274.761.970	249.909.600	0	0	4.524.671.570	-	3.877.519.945	545.559.000	-	-	4.423.078.945
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	4.940.004.765	0	0	0	4.940.004.765	-	5.268.138.405	32.371.400	-	-	5.300.509.805
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	4.940.004.765	0	0	0	4.940.004.765	-	5.268.138.405	32.371.400	-	-	5.300.509.805
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	0	10.976.085.700	200.000.035	0	0	11.176.085.735	-	11.098.356.346	218.000.036	-	-	11.316.356.382
2 14 2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	10.976.085.700	200.000.035	0	0	11.176.085.735	-	11.098.356.346	218.000.036	-	-	11.316.356.382
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	458.000.000	4.423.272.688	491.000.000	0	0	4.914.272.688	478.000.000	5.452.818.854	552.940.200	-	-	6.005.759.054

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.0.00.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	458.000.000	4.423.272.688	491.000.000	0	0	4.914.272.688	478.000.000	5.452.818.854	552.940.200				6.005.759.054
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000	8.019.576.300	156.052.900	0	0	8.175.629.200	580.000.000	8.910.645.465	480.219.600	-	-	-	9.390.865.065
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	580.000.000	8.019.576.300	156.052.900	0	0	8.175.629.200	580.000.000	8.910.645.465	480.219.600				9.390.865.065
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	4.290.092.006	0	0	0	4.290.092.006	1.900.000.000	7.555.852.298	-	-	-	-	7.555.852.298
2 17 2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	4.290.092.006	0	0	0	4.290.092.006	-	1.117.277.195					1.117.277.195
2 17 2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	1.900.000.000	6.438.575.103					6.438.575.103
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	1.315.000.000	3.963.972.292	337.195.000	0	0	4.301.167.292	3.535.000.000	3.598.185.280	333.575.900	-	-	-	3.931.761.180

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan				
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
218.0.00.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.315.000.000	3.963.972.292	337.195.000	0	0	4.301.167.292	3.535.000.000	3.598.185.280	333.575.900			3.931.761.180
219.0.00.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	76.000.000	4.303.364.496	539.469.922	0	0	4.842.834.418	76.000.000	5.398.776.426	541.569.922	-	-	5.940.346.348
219.0.00.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	76.000.000	4.303.364.496	539.469.922	0	0	4.842.834.418	76.000.000	5.398.776.426	541.569.922			5.940.346.348
220.0.00.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	195.976.000	0	0	0	195.976.000	-					
220.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	195.976.000	0	0	0	195.976.000	-					
221.0.00.00.01.0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	0	0	0	0	0	-	198.473.000	-	-	-	198.473.000
221.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	0	0	0	0	0	-	198.473.000				198.473.000



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja								
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	219.999.900	0	0	0	0	219.999.900	-	619.999.900	-	-	-	619.999.900
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	219.999.900	0	0	0	0	219.999.900	-	619.999.900				619.999.900
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	3.316.974.350	496.352.600	0	0	0	3.813.326.950	-	3.004.634.010	-	-	-	3.004.634.010
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0	3.316.974.350	496.352.600	0	0	0	3.813.326.950	-	3.004.634.010				3.004.634.010
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	86.716.000	0	0	0	0	86.716.000	-	16.233.600	429.712.600	-	-	445.946.200
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN	0	86.716.000	0	0	0	0	86.716.000	-	16.233.600	429.712.600			445.946.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.750.000.000	50.121.236.827	4.578.315.132	0	0	54.699.551.959	925.000.000	54.774.469.256	1.710.306.232	-	-	56.484.775.488
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.362.018.900	45.552.532	0	0	1.407.571.432	-	1.574.382.500	23.188.932	-	-	1.597.571.432
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	0	1.362.018.900	45.552.532	0	0	1.407.571.432	-	1.574.382.500	23.188.932	-	-	1.597.571.432
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	400.000.000	6.641.572.875	3.517.488.600	0	0	10.159.061.475	600.000.000	7.729.869.424	965.801.400	-	-	8.695.670.824
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA	400.000.000	6.641.572.875	3.517.488.600	0	0	10.159.061.475	600.000.000	7.729.869.424	965.801.400	-	-	8.695.670.824
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	450.000.000	29.062.549.206	213.216.700	0	0	29.275.765.906	325.000.000	37.355.262.344	10.448.800	-	-	37.365.711.144
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	0	0	0	0	-	1.385.614.300	10.448.800	-	-	1.396.063.100

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 327.0.00.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	450.000.000	29.062.549.206	213.216.700	0	0	29.275.765.906	325.000.000	35.969.648.044					35.969.648.044
3 30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	0	7.616.792.446	802.057.300	0	0	8.418.849.746	-	2.676.651.588	-	-	-	-	2.676.651.588
3 30 217.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	-						-
3 30 217.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	-	454.255.383					454.255.383
3 30 331.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	7.616.792.446	802.057.300	0	0	8.418.849.746	-	2.222.396.205					2.222.396.205
3 31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	1.900.000.000	5.438.303.400	0	0	0	5.438.303.400	-	5.438.303.400	710.867.100	-	-	-	6.149.170.500
3 31 217.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	0	0	0	0	0	-						-

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3	31 2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	0	-	5.438.303.400	710.867.100			6.149.170.500
3	31 3.31.3.30.0.00.01.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.900.000.000	5.438.303.400	0	0	0	5.438.303.400	-					-
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	278.860.000	75.629.802.447	4.897.882.881	0	0	80.527.685.328	298.860.000	78.119.794.336	4.807.321.441	-	-	82.927.115.777
4	1	SEKRETARIAT DAERAH	278.860.000	38.476.799.691	4.458.694.300	0	0	42.935.493.991	298.860.000	41.159.857.444	4.226.491.460	-	-	45.386.348.904
4	1 4.01.0.00.0.00.01.0001	BAGIAN UMUM	0	15.735.031.989	4.448.147.300	0	0	20.183.179.289	-	18.454.805.589	4.084.147.300			22.538.952.889
4	1 4.01.0.00.0.00.01.0002	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	0	698.334.200	1.500.000	0	0	699.834.200	-	668.334.200	1.500.000			669.834.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja								
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0003	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	455.729.500	0	0	0	0	455.729.500	-	635.995.000				635.995.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0004	BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	0	3.455.350.600	0	0	0	0	3.455.350.600	-	4.954.520.100				4.954.520.100
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0005	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	0	348.886.000	0	0	0	0	348.886.000	-	398.886.000				398.886.000
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0006	BAGIAN HUKUM	0	1.600.499.000	0	0	0	0	1.600.499.000	-	1.448.962.400				1.448.962.400
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0007	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	0	417.599.500	0	0	0	0	417.599.500	-	417.443.900				417.443.900
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0008	BAGIAN ORGANISASI	0	700.000.200	0	0	0	0	700.000.200	-	782.425.400				782.425.400
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0009	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	14.127.578.202	0	0	0	0	14.127.578.202	-	12.185.560.097				12.185.560.097

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
4	1	4.01.0.00.0.00.01.0010	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0	937.790.500	9.047.000	0	0	946.837.500	-	1.212.924.758	140.844.160			1.353.768.918
4	2		SEKRETARIAT DPRD	0	37.153.002.756	439.188.581	0	0	37.592.191.337	-	36.959.936.892	580.829.981	-	-	37.540.766.873
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	0	37.153.002.756	439.188.581	0	0	37.592.191.337	-	36.959.936.892	580.829.981			37.540.766.873
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.207.152.140.127	31.879.530.127	734.198.933	11.520.000.000	256.330.450.244	300.464.179.304	1.221.858.364.428	32.378.697.456	1.028.102.389	14.322.919.900	256.330.450.244	304.060.169.989
5	1		PERENCANAAN	0	6.413.182.880	264.154.059	0	0	6.677.336.939	-	6.359.628.091	52.840.900	-	-	6.412.468.991
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	6.413.182.880	264.154.059	0	0	6.677.336.939	-	6.359.628.091	52.840.900			6.412.468.991

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
5	2		<b>KEUANGAN</b>	1.207.152.140.127	18.973.938.196	330.070.800	11.520.000.000	256.330.450.244	287.154.459.240	1.221.858.364.428	19.374.600.327	842.204.215	14.322.919.900	256.330.450.244	290.870.174.686
5	2	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1.207.152.140.127	18.973.938.196	330.070.800	11.520.000.000	256.330.450.244	287.154.459.240	-	4.448.460.723				4.448.460.723
5	2	5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	0	1.221.858.364.428	5.000.023.203	313.484.500			5.313.507.703
5	2	5.02.0.00.0.00.03.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	0	0	0	0	0	-	9.925.617.501	528.719.715	14.322.919.900	256.330.450.244	281.107.707.360
5	2	7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	0	0	0	0	0	0	-	498.900				498.900
5	3		<b>KEPEGAWAIAN</b>	0	4.813.701.551	139.974.074	0	0	4.953.675.625	-	4.921.808.738	133.057.274	-	-	5.054.866.012
5	3	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	4.813.701.551	139.974.074	0	0	4.953.675.625	-	4.921.808.738	133.057.274			5.054.866.012

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan									
		Pendapatan	Belanja				Pendapatan	Belanja								
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	1.416.356.000	0	0	0	0	1.416.356.000	-	1.410.308.800	-	-	-	1.410.308.800
5	4	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	1.416.356.000	0	0	0	0	1.416.356.000	-	1.410.308.800				1.410.308.800
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	262.351.500	0	0	0	0	262.351.500	-	312.351.500	-	-	-	312.351.500
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0	262.351.500	0	0	0	0	262.351.500	-	312.351.500				312.351.500
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	14.610.765.182	1.053.301.700	0	0	0	15.664.066.882	-	8.990.352.807	1.795.205.200	-	-	10.785.558.007
6	1		INSPEKTORAT DAERAH	0	14.610.765.182	1.053.301.700	0	0	0	15.664.066.882	-	8.990.352.807	1.795.205.200	-	-	10.785.558.007



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	0	14.610.765.182	1.053.301.700	0	0	15.664.066.882	-	8.990.352.807	1.795.205.200	-	-	10.785.558.007
7			UNSUR KEWILAYAHAN	200.000.000	39.487.105.266	6.320.098.820	0	0	45.807.204.086	200.000.000	34.492.244.185	6.484.015.417	-	-	40.976.259.602
7	1		KECAMATAN	200.000.000	39.487.105.266	6.320.098.820	0	0	45.807.204.086	200.000.000	34.492.244.185	6.484.015.417	-	-	40.976.259.602
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	96.605.390	6.710.394.350	15.464.000	0	0	6.725.858.350	96.605.390	5.783.475.817	17.606.000	-	-	5.801.081.817
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN HUTATORUAN V	0	226.422.800	547.536.693	0	0	773.959.493	-	202.937.800	570.937.906	-	-	773.875.706
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN HUTATORUAN VI	0	229.564.700	544.396.681	0	0	773.961.381	-	186.531.000	586.784.302	-	-	773.315.302

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN HUTATORUAN VII	0	302.376.900	472.584.547	0	0	774.961.447	-	207.017.900	567.942.752	-	-	774.960.652
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN HUTATORUAN IX	0	196.411.600	577.549.849	0	0	773.961.449	-	189.583.450	584.377.427	-	-	773.960.877
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN HUTATORUAN X	0	222.244.300	551.666.777	0	0	773.911.077	-	223.106.300	550.804.777	-	-	773.911.077
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0006	KELURAHAN HUTATORUAN XI	0	323.961.450	450.000.003	0	0	773.961.453	-	328.961.450	450.000.003	-	-	778.961.453
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0007	KELURAHAN PARTALI TORUAN	0	260.716.400	513.016.183	0	0	773.732.583	-	267.364.575	521.359.136	-	-	788.723.711
7	1	7.01.0.00.0.00.02.0000	KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	0	1.678.455.350	3.000.000	0	0	1.681.455.350	-	1.860.244.418	3.000.000	-	-	1.863.244.418
7	1	7.01.0.00.0.00.03.0000	KANTOR KECAMATAN ADJANKOTING	0	1.828.361.792	29.059.300	0	0	1.857.421.092	-	1.456.711.879	29.059.300	-	-	1.485.771.179

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja							
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0000	KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	0	2.952.864.840	40.990.000	0	0	0	2.993.854.840	-	2.269.752.932	40.990.000	-	-	2.310.742.932
7	1	7.01.0.00.0.00.04.0001	KELURAHAN SITUMEANG HABINSARAN	0	92.860.100	687.180.650	0	0	0	780.040.750	-	146.595.400	633.441.021	-	-	780.036.421
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	0	2.905.147.412	0	0	0	0	2.905.147.412	-	2.689.226.786	25.201.000	-	-	2.714.427.786
7	1	7.01.0.00.0.00.05.0001	KELURAHAN ONAN HASANG	0	137.058.000	613.676.873	0	0	0	750.734.873	-	129.338.500	621.396.326	-	-	750.734.826
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0000	KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	1.593.600	2.190.417.246	0	0	0	0	2.190.417.246	1.593.600	2.016.591.199	-	-	-	2.016.591.199
7	1	7.01.0.00.0.00.06.0001	KELURAHAN PASAR SARULLA	0	180.872.900	449.610.435	0	0	0	630.483.335	-	180.872.900	449.610.435	-	-	630.483.335
7	1	7.01.0.00.0.00.07.0000	KANTOR KECAMATAN PURBATUA	0	1.714.146.988	5.665.800	0	0	0	1.719.812.788	-	1.540.178.748	5.665.800	-	-	1.545.844.548

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja						
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
7	1	7.01.0.00.0.00.08.0000	KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	0	1.531.982.992	0	0	0	1.531.982.992	-	1.353.249.844	1.500.000	-	-	1.354.749.844
7	1	7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.938.500	2.737.940.796	0	0	2.737.940.796	2.938.500	2.243.585.022	60.465.000	-	-	2.304.050.022	
7	1	7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	7.113.100	2.143.184.050	1.500.000	0	0	2.144.684.050	7.113.100	1.726.961.309	-	-	-	1.726.961.309
7	1	7.01.0.00.0.00.11.0000	KANTOR KECAMATAN GAROGA	0	2.195.204.610	60.465.000	0	0	2.255.669.610	-	1.937.855.463	-	-	-	1.937.855.463
7	1	7.01.0.00.0.00.12.0000	KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	86.214.883	3.079.136.300	28.087.300	0	0	3.107.223.600	86.214.883	3.136.574.214	18.802.000	-	-	3.155.376.214
7	1	7.01.0.00.0.00.12.0001	KELURAHAN PASAR SIBORONGBORONG	0	99.999.400	682.000.129	0	0	781.999.529	-	117.712.298	664.287.232	-	-	781.999.530
7	1	7.01.0.00.0.00.13.0000	KANTOR KECAMATAN PAGARAN	0	1.700.831.450	32.198.600	0	0	1.733.030.050	-	1.559.163.749	38.725.400	-	-	1.597.889.149

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan							
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja							
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
7	1	7.01.0.00.0.00.14.0000	KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	0	1.624.584.300	6.000.000	0	0	0	1.630.584.300	-	1.066.105.917	20.959.600	-	-	1.087.065.517
7	1	7.01.0.00.0.00.15.0000	KANTOR KECAMATAN MUARA	5.534.527	2.221.964.240	8.450.000	0	0	2.230.414.240	5.534.527	1.672.545.315	21.100.000	-	-	1.693.645.315	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.154.434.063	44.694.400	0	0	5.199.128.463	-	4.987.885.926	44.694.400	-	-	5.032.580.326	
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.154.434.063	44.694.400	0	0	5.199.128.463	-	4.987.885.926	44.694.400	-	-	5.032.580.326	
8	1	8.01.0.00.0.00.02.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.154.434.063	44.694.400	0	0	5.199.128.463	-	4.987.885.926	44.694.400	-	-	5.032.580.326	
<b>TOTAL.....</b>				<b>1.300.195.776.206</b>	<b>970.630.303.950</b>	<b>131.389.345.199</b>	<b>11.520.000.000</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>1.369.870.099.393</b>	<b>1.331.574.511.684</b>	<b>986.462.734.741</b>	<b>248.337.221.362</b>	<b>14.322.919.900</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>1.505.453.326.247</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>431.947.486.761</b>	<b>434.175.034.510</b>	<b>2.227.547.749</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>102.191.845.114</b>	<b>109.268.871.906</b>	<b>7.077.026.792</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>63.222.894.575</b>	<b>67.643.170.487</b>	<b>4.420.275.912</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02		Penambahan Ruang Kelas Baru	150.000.000	325.000.000	175.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	0	12.000.000	12.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Pegawai	0	2.420.000	2.420.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	0	9.580.000	9.580.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA MODAL	150.000.000	313.000.000	163.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.000.000	313.000.000	163.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	233.212.000	587.820.000	354.608.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	11.115.000	27.720.000	16.605.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Pegawai	680.000	3.100.000	2.420.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	10.435.000	24.620.000	14.185.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA MODAL	222.097.000	560.100.000	338.003.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.097.000	560.100.000	338.003.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	445.104.000	458.740.000	13.636.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	BELANJA OPERASI	21.090.000	31.440.000	10.350.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	Belanja Pegawai	1.360.000	1.360.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	Belanja Barang dan Jasa	19.730.000	30.080.000	10.350.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	BELANJA MODAL	424.014.000	427.300.000	3.286.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	424.014.000	427.300.000	3.286.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	399.999.659	1.924.450.171	1.524.450.512				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	BELANJA OPERASI	0	63.259.659	63.259.659				
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	20.570.000	20.570.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	42.689.659	42.689.659	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	399.999.659	1.861.190.512	1.461.190.853	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.999.659	1.186.690.512	1.016.690.853	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	230.000.000	674.500.000	444.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.488.748.318	10.333.876.918	1.845.128.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1		BELANJA OPERASI	364.998.400	253.276.918	(111.721.482)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	01	Belanja Pegawai	12.750.000	33.320.000	20.570.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	352.248.400	219.956.918	(132.291.482)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2		BELANJA MODAL	8.123.749.918	10.080.600.000	1.956.850.082	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.123.749.918	10.080.600.000	1.956.850.082	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	139.801.000	148.470.000	8.669.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	6.650.000	15.370.000	8.720.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	530.000	530.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000	14.840.000	8.720.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2		BELANJA MODAL	133.151.000	133.100.000	(51.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.151.000	133.100.000	(51.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.198.900	31.330.000	9.131.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	1.794.900	10.530.000	8.735.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	01	Belanja Pegawai	530.000	530.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.900	10.000.000	8.735.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	20.404.000	20.800.000	396.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.404.000	20.800.000	396.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14				Pengadaan Mebel Sekolah	0	200.000.000	200.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1		BELANJA OPERASI	0	6.500.000	6.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.290.000	5.290.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2		BELANJA MODAL	0	193.500.000	193.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	193.500.000	193.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17				Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.556.773.000	4.600.602.000	43.829.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	40.796.200	69.999.000	29.202.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	01	Belanja Pegawai	4.560.000	3.350.000	(1.210.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.236.200	66.649.000	30.412.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	2		BELANJA MODAL	4.515.976.800	4.530.603.000	14.626.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.515.976.800	4.331.535.000	(184.441.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	199.068.000	199.068.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	173.242.400	173.242.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1		BELANJA OPERASI	173.242.400	173.242.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	173.242.400	173.242.400	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.718.163.798	6.663.456.998	(54.706.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1		BELANJA OPERASI	6.718.163.798	6.663.456.998	(54.706.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	01	Belanja Pegawai	996.534.000	996.534.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	27	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.721.629.798	5.666.922.998	(54.706.800)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	324.758.000	625.288.500	300.530.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5 1	BELANJA OPERASI	324.758.000	625.288.500	300.530.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	224.758.000	275.288.500	50.530.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	28	5 1 05	Belanja Hibah	100.000.000	350.000.000	250.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.570.893.500	41.570.893.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 1	BELANJA OPERASI	41.570.893.500	41.570.893.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.443.500	93.443.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	29	5 1 05	Belanja Hibah	41.477.450.000	41.477.450.000	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>32.433.750.539</b>	<b>35.155.501.407</b>	<b>2.721.750.868</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06		Pembangunan Laboratorium	1.079.248.800	1.051.549.000	(27.699.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1	BELANJA OPERASI	50.828.800	23.250.000	(27.578.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1 01	Belanja Pegawai	1.700.000	1.700.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.128.800	21.550.000	(27.578.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 2	BELANJA MODAL	1.028.420.000	1.028.299.000	(121.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.028.420.000	1.028.299.000	(121.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	320.000.000	320.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1	BELANJA OPERASI	0	10.500.000	10.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1 01	Belanja Pegawai	0	2.420.000	2.420.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.080.000	8.080.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 2	BELANJA MODAL	0	309.500.000	309.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	12	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	309.500.000	309.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.874.882.439	3.969.647.106	2.094.764.667	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1	BELANJA OPERASI	39.936.631	107.486.839	67.550.208	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1 01	Belanja Pegawai	3.060.000	16.750.000	13.690.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.876.631	90.736.839	53.860.208	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	BELANJA MODAL	1.834.945.808	3.862.160.267	2.027.214.459	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.834.945.808	3.862.160.267	2.027.214.459	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	583.370.100	584.108.500	738.400	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1	BELANJA OPERASI	34.890.100	19.240.000	(15.650.100)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1 01	Belanja Pegawai	1.360.000	1.360.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.530.100	17.880.000	(15.650.100)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2	BELANJA MODAL	548.480.000	564.868.500	16.388.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	548.480.000	564.868.500	16.388.500	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	16			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	49.536.800	57.393.000	7.856.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1	BELANJA OPERASI	2.559.800	9.166.800	6.607.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1 01	Belanja Pegawai	680.000	530.000	(150.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.879.800	8.636.800	6.757.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	2	BELANJA MODAL	46.977.000	48.226.200	1.249.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	16	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.977.000	48.226.200	1.249.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	17			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	575.840.000	573.448.300	(2.391.700)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1	BELANJA OPERASI	27.360.000	18.040.000	(9.320.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1 01	Belanja Pegawai	1.360.000	1.360.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000	16.680.000	(9.320.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	2	BELANJA MODAL	548.480.000	555.408.300	6.928.300	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	548.480.000	555.408.300	6.928.300	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	971.790.000	970.664.200	(1.125.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 1	BELANJA OPERASI	46.170.000	23.560.000	(22.610.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 1 01	Belanja Pegawai	45.960.000	2.040.000	(43.920.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.000	21.520.000	21.310.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 2	BELANJA MODAL	925.620.000	947.104.200	21.484.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	925.620.000	947.104.200	21.484.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	296.790.000	293.671.000	(3.119.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 1	BELANJA OPERASI	14.060.000	10.720.000	(3.340.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 1 01	Belanja Pegawai	680.000	680.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.380.000	10.040.000	(3.340.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 2	BELANJA MODAL	282.730.000	282.951.000	221.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	24	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	282.730.000	282.951.000	221.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25		Pengadaan Mebel Sekolah	0	158.635.033	158.635.033	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1	BELANJA OPERASI	0	4.135.033	4.135.033	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1 01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.925.033	2.925.033	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 2	BELANJA MODAL	0	154.500.000	154.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	25	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	154.500.000	154.500.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	28		Pengadaan Perlengkapan Siswa	0	181.668.568	181.668.568	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	28	5 2	BELANJA MODAL	0	181.668.568	181.668.568	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	28	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	181.668.568	181.668.568	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	550.157.300	542.581.600	(7.575.700)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5 1	BELANJA OPERASI	23.588.900	12.700.100	(10.888.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5 1 01	Belanja Pegawai	5.520.000	4.010.000	(1.510.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.068.900	8.690.100	(9.378.800)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2		BELANJA MODAL	526.568.400	529.881.500	3.313.100	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	526.568.400	430.347.500	(96.220.900)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	99.534.000	99.534.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	26.194.250.000	26.194.250.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1		BELANJA OPERASI	26.194.250.000	26.194.250.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	36	5	1	05	Belanja Hibah	26.194.250.000	26.194.250.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	257.885.100	257.885.100	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1		BELANJA OPERASI	255.485.100	255.485.100	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	255.485.100	255.485.100	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	2		BELANJA MODAL	2.400.000	2.400.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	38	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000	2.400.000	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>6.298.500.000</b>	<b>6.233.500.012</b>	<b>(64.999.988)</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	100.000.012	100.000.012	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.210.000	1.210.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	0	98.790.012	98.790.012	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	98.790.012	98.790.012	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	30.390.000	45.390.000	15.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1		BELANJA OPERASI	30.390.000	45.390.000	15.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.390.000	45.390.000	15.000.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.900.800.000	1.720.800.000	(180.000.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5 1	BELANJA OPERASI	1.900.800.000	1.720.800.000	(180.000.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.800.000	1.720.800.000	(180.000.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.367.310.000	4.367.310.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5 1	BELANJA OPERASI	4.367.310.000	4.367.310.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	18	5 1 05	Belanja Hibah	4.367.310.000	4.367.310.000	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>236.700.000</b>	<b>236.700.000</b>	<b>0</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	236.700.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5 1	BELANJA OPERASI	236.700.000	236.700.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	17	5 1 05	Belanja Hibah	236.700.000	236.700.000	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>329.755.641.647</b>	<b>324.906.162.604</b>	<b>(4.849.479.043)</b>	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>172.146.898</b>	<b>222.146.898</b>	<b>50.000.000</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.035.998	217.035.998	50.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	26.875.998	167.035.998	140.160.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.875.998	165.825.998	138.950.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 2	BELANJA MODAL	140.160.000	50.000.000	(90.160.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.160.000	50.000.000	(90.160.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.110.900	5.110.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.110.900	5.110.900	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.110.900	5.110.900	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>326.871.218.233</b>	<b>321.583.951.678</b>	<b>(5.287.266.555)</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	326.700.081.633	321.360.947.878	(5.339.133.755)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	326.700.081.633	321.360.947.878	(5.339.133.755)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	326.700.081.633	321.360.947.878	(5.339.133.755)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	165.607.600	217.474.800	51.867.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	165.607.600	217.474.800	51.867.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	165.607.600	217.474.800	51.867.200	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.529.000	5.529.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.529.000	5.529.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.529.000	5.529.000	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>124.452.118</b>	<b>124.452.118</b>	<b>0</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.452.118	124.452.118	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	124.452.118	124.452.118	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.452.118	124.452.118	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.306.311.446</b>	<b>1.595.483.306</b>	<b>289.171.860</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.821.500	34.821.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	34.821.500	34.821.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.821.500	34.821.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	698.385.599	798.385.499	99.999.900	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	698.385.599	798.385.499	99.999.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	698.385.599	798.385.499	99.999.900	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.923.500	26.921.660	(1.840)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	26.923.500	26.921.660	(1.840)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.923.500	26.921.660	(1.840)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.967.300	52.967.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	52.967.300	52.967.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.967.300	52.967.300	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.957.500	19.957.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.957.500	19.957.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.957.500	19.957.500	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	133.914.000	233.904.000	99.990.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	133.914.000	233.904.000	99.990.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.914.000	233.904.000	99.990.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.342.047	428.525.847	89.183.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	339.342.047	428.525.847	89.183.800	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	339.342.047	428.525.847	89.183.800	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>837.955.552</b>	<b>1.022.930.704</b>	<b>184.975.152</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.610.300	87.610.300	10.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	77.610.300	87.610.300	10.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.610.300	87.610.300	10.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.845.252	516.820.404	174.975.152	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1	BELANJA OPERASI	85.340.400	79.761.400	(5.579.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.340.400	79.761.400	(5.579.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	2	BELANJA MODAL	256.504.852	437.059.004	180.554.152	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.519.300	349.087.900	136.568.600	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.985.552	87.971.104	43.985.552	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.000.000	414.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	414.000.000	414.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	414.000.000	414.000.000	0	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>443.557.400</b>	<b>357.197.900</b>	<b>(86.359.500)</b>	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	443.557.400	357.197.900	(86.359.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	443.557.400	357.197.900	(86.359.500)	
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	443.557.400	357.197.900	(86.359.500)	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>219.999.900</b>	<b>619.999.900</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>219.999.900</b>	<b>619.999.900</b>	<b>400.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>119.999.900</b>	<b>119.999.900</b>	<b>0</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	119.999.900	119.999.900	0	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	119.999.900	119.999.900	0	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.999.900	119.999.900	0	
<b>2</b>	<b>22</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>400.000.000</b>	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	500.000.000	400.000.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000	500.000.000	400.000.000	
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1 05	Belanja Hibah	100.000.000	500.000.000	400.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>432.167.486.661</b>	<b>434.795.034.410</b>	<b>2.627.547.749</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(432.167.486.661)</b>	<b>(434.795.034.410)</b>	<b>(2.627.547.749)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.01.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>13.973.000.000</b>	<b>13.893.000.000</b>	<b>(80.000.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	100.000.000	20.000.000	(80.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	13.873.000.000	13.873.000.000	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>13.973.000.000</b>	<b>13.893.000.000</b>	<b>(80.000.000)</b>	
0	00	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>138.112.161.157</b>	<b>134.468.634.481</b>	<b>(3.643.526.676)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>63.923.517.100</b>	<b>65.830.294.885</b>	<b>1.906.777.785</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>13.372.102.000</b>	<b>12.127.523.000</b>	<b>(1.244.579.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	719.248.000	719.248.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	2			BELANJA MODAL	719.248.000	719.248.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	719.248.000	719.248.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.060.866.000	7.060.866.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1			BELANJA OPERASI	141.881.997	141.881.997	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	01		Belanja Pegawai	33.770.000	33.770.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	108.111.997	108.111.997	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2			BELANJA MODAL	6.918.984.003	6.918.984.003	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.918.984.003	6.918.984.003	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	92.050.000	92.050.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	5	1			BELANJA OPERASI	0	92.050.000	92.050.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	92.050.000	92.050.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16				Pengadaan Obat, Vaksin	1.950.997.000	1.950.997.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1		BELANJA OPERASI	1.950.997.000	1.950.997.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	01	Belanja Pegawai	3.680.000	3.680.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.947.317.000	1.947.317.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17				Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.489.203.000	2.152.574.000	(1.336.629.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1		BELANJA OPERASI	3.489.203.000	2.152.574.000	(1.336.629.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	01	Belanja Pegawai	3.070.000	3.070.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.486.133.000	2.149.504.000	(1.336.629.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	151.788.000	151.788.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	151.788.000	151.788.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	151.788.000	151.788.000	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.133.154.400</b>	<b>53.307.131.585</b>	<b>3.173.977.185</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	977.763.400	977.763.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	968.688.400	968.688.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	968.688.400	968.688.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2		BELANJA MODAL	9.075.000	9.075.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.075.000	9.075.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	712.664.400	2.155.564.400	1.442.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	699.160.800	2.142.060.800	1.442.900.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	699.160.800	2.142.060.800	1.442.900.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	13.503.600	13.503.600	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.503.600	13.503.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	276.022.100	292.272.100	16.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	276.022.100	292.272.100	16.250.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	276.022.100	292.272.100	16.250.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	420.861.200	503.861.200	83.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	414.783.400	476.950.200	62.166.800		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	414.783.400	476.950.200	62.166.800	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	BELANJA MODAL	6.077.800	26.911.000	20.833.200		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.077.800	26.911.000	20.833.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	385.069.600	385.069.600	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	385.069.600	385.069.600	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	385.069.600	385.069.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	95.000.000	95.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	95.000.000	95.000.000	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000	95.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	411.325.800	611.325.800	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	402.795.300	602.795.300	200.000.000		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.130.000	1.130.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	402.795.300	601.665.300	198.870.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	2	BELANJA MODAL	8.530.500	8.530.500	0		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.530.500	8.530.500	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	184.367.900	184.367.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1	BELANJA OPERASI	184.367.900	184.367.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.367.900	184.367.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	163.851.700	163.851.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1	BELANJA OPERASI	163.851.700	163.851.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.851.700	163.851.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	332.058.700	349.058.700	17.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1	BELANJA OPERASI	332.058.700	349.058.700	17.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	332.058.700	349.058.700	17.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	225.759.500	225.759.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	225.759.500	225.759.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.759.500	225.759.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	157.564.500	157.564.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1	BELANJA OPERASI	157.564.500	157.564.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.564.500	157.564.500	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.713.612.450	2.439.573.650	(274.038.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1	BELANJA OPERASI	2.598.262.450	2.439.573.650	(158.688.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.598.262.450	2.439.573.650	(158.688.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	2	BELANJA MODAL	115.350.000	0	(115.350.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.350.000	0	(115.350.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.094.765.600	2.046.784.400	(47.981.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5 1	BELANJA OPERASI	2.094.765.600	2.046.784.400	(47.981.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.094.765.600	2.046.784.400	(47.981.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	211.492.200	131.492.200	(80.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5 1	BELANJA OPERASI	210.278.000	131.492.200	(78.785.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.278.000	131.492.200	(78.785.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5 2	BELANJA MODAL	1.214.200	0	(1.214.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.214.200	0	(1.214.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.495.855.050	1.434.286.250	(61.568.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5 1	BELANJA OPERASI	1.495.855.050	1.434.286.250	(61.568.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.495.855.050	1.434.286.250	(61.568.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.500.166.400	1.500.166.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 1	BELANJA OPERASI	1.500.166.400	1.500.166.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.166.400	1.500.166.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.591.292.800	2.591.292.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5 1	BELANJA OPERASI	2.174.322.800	2.265.922.800	91.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.174.322.800	2.265.922.800	91.600.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5 2	BELANJA MODAL	416.970.000	325.370.000	(91.600.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.970.000	325.370.000	(91.600.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.064.000	58.064.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	5 1	BELANJA OPERASI	58.064.000	58.064.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	22	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.064.000	58.064.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	1	05	Belanja Hibah	35.000.000	35.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.085.373.700	1.085.373.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1		BELANJA OPERASI	1.085.373.700	1.085.373.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.373.700	1.085.373.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.678.467.000	32.561.270.985	1.882.803.985	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	1		BELANJA OPERASI	30.678.467.000	32.561.270.985	1.882.803.985	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.678.467.000	32.561.270.985	1.882.803.985	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33				Operasional Pelayanan Puskesmas	2.543.958.900	2.543.958.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	1		BELANJA OPERASI	2.540.358.900	2.540.358.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.358.900	2.540.358.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	2		BELANJA MODAL	3.600.000	3.600.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.600.000	3.600.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	192.897.500	188.509.500	(4.388.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1		BELANJA OPERASI	192.897.500	188.509.500	(4.388.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.897.500	188.509.500	(4.388.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	526.900.000	526.900.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1		BELANJA OPERASI	526.900.000	526.900.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	526.900.000	526.900.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.950.000	7.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5 1	BELANJA OPERASI	7.950.000	7.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000	7.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30.050.000	30.050.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5 1	BELANJA OPERASI	30.050.000	30.050.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	37	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.050.000	30.050.000	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>138.260.700</b>	<b>125.640.300</b>	<b>(12.620.400)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	74.785.300	70.536.600	(4.248.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	74.785.300	70.536.600	(4.248.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.785.300	70.536.600	(4.248.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.475.400	55.103.700	(8.371.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	63.475.400	55.103.700	(8.371.700)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.475.400	55.103.700	(8.371.700)	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>280.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	90.000.000	80.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5 1	BELANJA OPERASI	90.000.000	80.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	80.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	190.000.000	190.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5 1	BELANJA OPERASI	190.000.000	190.000.000	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	190.000.000	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>1.696.010.000</b>	<b>1.686.010.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>30.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	20.000.000	(10.000.000)	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.616.010.000</b>	<b>1.616.010.000</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.576.000.000	1.576.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.576.000.000	1.576.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.576.000.000	1.576.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.010.000	40.010.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	40.010.000	40.010.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.010.000	40.010.000	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>703.336.000</b>	<b>655.268.500</b>	<b>(48.067.500)</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>63.935.600</b>	<b>63.935.600</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.935.600	63.935.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	63.935.600	63.935.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	63.935.600	63.935.600	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</b>	<b>110.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>(25.000.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	40.000.000	(10.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	45.000.000	(15.000.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	00		<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>148.849.800</b>	<b>148.849.800</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	148.849.800	148.849.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	148.849.800	148.849.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.849.800	148.849.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	00		<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>95.000.000</b>	<b>71.932.500</b>	<b>(23.067.500)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	95.000.000	71.932.500	(23.067.500)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5 1	BELANJA OPERASI	86.314.100	69.318.900	(16.995.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.314.100	69.318.900	(16.995.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5 2	BELANJA MODAL	8.685.900	2.613.600	(6.072.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.685.900	2.613.600	(6.072.300)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	00		<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>285.550.600</b>	<b>285.550.600</b>	<b>0</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	285.550.600	285.550.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	285.550.600	285.550.600	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	285.550.600	285.550.600	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>411.060.700</b>	<b>411.060.700</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.000.000	42.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	42.000.000	42.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	42.000.000	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>369.060.700</b>	<b>369.060.700</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	369.060.700	369.060.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	369.060.700	369.060.700	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	369.060.700	369.060.700	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>71.378.237.357</b>	<b>65.886.000.396</b>	<b>(5.492.236.961)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.200.000</b>	<b>66.957.000</b>	<b>(13.243.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.950.000	25.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	25.950.000	25.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000	25.950.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	6.057.000	(1.443.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	7.500.000	6.057.000	(1.443.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	6.057.000	(1.443.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.750.000	34.950.000	(11.800.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	46.750.000	34.950.000	(11.800.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000	34.950.000	(11.800.000)	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>61.236.980.400</b>	<b>55.519.853.639</b>	<b>(5.717.126.761)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.848.443.000	55.189.722.639	(5.658.720.361)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	60.848.443.000	55.189.722.639	(5.658.720.361)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	60.848.443.000	55.189.722.639	(5.658.720.361)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	382.537.600	324.131.200	(58.406.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	382.537.600	324.131.200	(58.406.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	382.537.600	258.601.200	(123.936.400)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	65.530.000	65.530.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.999.800	5.999.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.999.800	5.999.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.800	5.999.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>120.018.800</b>	<b>80.000.000</b>	<b>(40.018.800)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	120.018.800	80.000.000	(40.018.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	(40.018.800)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	(40.018.800)
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.000.000	45.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>311.440.100</b>	<b>365.809.100</b>	<b>54.369.000</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000	28.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.980.100	75.197.100	4.217.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.217.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.217.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.993.900	28.993.900	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.006.100	51.177.100	171.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	171.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.006.100	51.177.100	171.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.990.000	4.990.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.990.000	4.990.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.990.000	4.990.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.495.000	42.476.000	(10.019.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	52.495.000	42.476.000	(10.019.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	52.495.000	42.476.000	(10.019.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.975.000	134.975.000	60.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	74.975.000	134.975.000	60.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.975.000	134.975.000	60.000.000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>290.877.400</b>	<b>258.677.400</b>	<b>(32.200.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05				Pengadaan Mebel	80.000.000	80.000.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1		BELANJA OPERASI	52.803.200	52.803.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1	01	Belanja Pegawai	2.170.000	2.170.000	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.633.200	50.633.200	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2		BELANJA MODAL	27.196.800	27.196.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.196.800	27.196.800	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.877.400	178.677.400	(32.200.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.434.000	9.468.200	5.034.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.170.000	4.340.000	2.170.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.264.000	5.128.200	2.864.200	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	206.443.400	169.209.200	(37.234.200)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.443.400	169.209.200	(37.234.200)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.623.413.657</b>	<b>8.460.383.657</b>	<b>(163.030.000)</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509.636.798	346.606.798	(163.030.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 BELANJA OPERASI	509.636.798	346.606.798	(163.030.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	509.636.798	346.606.798	(163.030.000)	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.113.776.859	8.113.776.859	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 BELANJA OPERASI	8.113.776.859	8.113.776.859	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	8.113.776.859	8.113.776.859	0	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>670.307.000</b>	<b>921.597.000</b>	<b>251.290.000</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	598.348.400	806.608.400	208.260.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 BELANJA OPERASI	598.348.400	806.608.400	208.260.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	598.348.400	806.608.400	208.260.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.999.400	41.999.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 BELANJA OPERASI	41.999.400	41.999.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	41.999.400	41.999.400	0	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.959.200	72.989.200	43.030.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5 1 BELANJA OPERASI	29.959.200	72.989.200	43.030.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	29.959.200	72.989.200	43.030.000	
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.10</b>	<b>00</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>0</b>	<b>167.722.600</b>	<b>167.722.600</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0	167.722.600	167.722.600	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	167.722.600	167.722.600	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.10	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	167.722.600	167.722.600	
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>138.112.161.157</b>	<b>134.468.634.481</b>	<b>(3.643.526.676)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>										<b>(124.139.161.157)</b>	<b>(120.575.634.481)</b>	<b>3.563.526.676</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RSU DAERAH TARUTUNG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>72.128.776.079</b>	<b>86.535.287.256</b>	<b>14.406.511.177</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	72.128.776.079	86.535.287.256	14.406.511.177	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>72.128.776.079</b>	<b>86.535.287.256</b>	<b>14.406.511.177</b>	
0	00	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>93.379.317.265</b>	<b>114.351.106.060</b>	<b>20.971.788.795</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>72.128.776.079</b>	<b>91.480.660.827</b>	<b>19.351.884.748</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	00					<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>72.128.776.079</b>	<b>91.480.660.827</b>	<b>19.351.884.748</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	72.128.776.079	91.480.660.827	19.351.884.748	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1			BELANJA OPERASI	68.224.318.079	83.380.660.827	15.156.342.748	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	68.224.318.079	83.380.660.827	15.156.342.748	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2			BELANJA MODAL	3.904.458.000	8.100.000.000	4.195.542.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.654.458.000	5.100.000.000	2.445.542.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.250.000.000	3.000.000.000	1.750.000.000	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	0.00	00					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.250.541.186</b>	<b>22.870.445.233</b>	<b>1.619.904.047</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	00					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>21.250.541.186</b>	<b>22.870.445.233</b>	<b>1.619.904.047</b>	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.250.541.186	22.870.445.233	1.619.904.047	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	21.250.541.186	22.870.445.233	1.619.904.047	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	21.250.541.186	22.870.445.233	1.619.904.047	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>93.379.317.265</b>	<b>114.351.106.060</b>	<b>20.971.788.795</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(21.250.541.186)</b>	<b>(27.815.818.804)</b>	<b>(6.565.277.618)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 RSU DAERAH TARUTUNG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
0	00	1.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN					
								<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	1.100.000.000	1.100.000.000	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>									<b>1.100.000.000</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>0</b>	
0	00	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>				
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>83.070.844.848</b>	<b>176.078.357.266</b>	<b>93.007.512.418</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>6.320.857.406</b>	<b>10.894.440.677</b>	<b>4.573.583.271</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46			Normalisasi/Restorasi Sungai	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63	5	1	BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	63	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00			<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.245.857.406</b>	<b>10.819.440.677</b>	<b>4.573.583.271</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	421.973.030	421.973.030	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	207.830.000	207.830.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	207.830.000	207.830.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2		BELANJA MODAL	214.143.030	214.143.030	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	214.143.030	214.143.030	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	5.565.766.076	10.145.191.555	4.579.425.479	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2		BELANJA MODAL	5.565.766.076	10.145.191.555	4.579.425.479	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.565.766.076	10.145.191.555	4.579.425.479	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	258.118.300	252.276.092	(5.842.208)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1		BELANJA OPERASI	158.118.500	150.130.100	(7.988.400)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	158.118.500	150.130.100	(7.988.400)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2		BELANJA MODAL	99.999.800	102.145.992	2.146.192	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.146.000	3.146.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.999.800	98.999.992	(999.808)	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>65.365.445.444</b>	<b>152.877.140.801</b>	<b>87.511.695.357</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>65.365.445.444</b>	<b>152.877.140.801</b>	<b>87.511.695.357</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01				Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.237.312.000	1.484.312.000	247.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	435.000.000	625.000.000	190.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	435.000.000	625.000.000	190.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	802.312.000	859.312.000	57.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	802.312.000	859.312.000	57.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	399.999.400	399.999.400	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	380.000.000	380.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000	380.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	2	BELANJA MODAL	19.999.400	19.999.400	0		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.999.400	19.999.400	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05			Pembangunan Jalan	6.614.959.906	17.194.668.773	10.579.708.867		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	600.000.000	589.200.000	(10.800.000)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	589.200.000	(10.800.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2	BELANJA MODAL	6.014.959.906	16.605.468.773	10.590.508.867		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.014.959.906	16.605.468.773	10.590.508.867	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08			Rekonstruksi Jalan	36.911.731.601	101.775.551.040	64.863.819.439		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5	2	BELANJA MODAL	36.911.731.601	101.775.551.040	64.863.819.439		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.911.731.601	101.775.551.040	64.863.819.439	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09			Rehabilitasi Jalan	4.250.050.867	6.366.435.211	2.116.384.344		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	2	BELANJA MODAL	4.250.050.867	6.366.435.211	2.116.384.344		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	09	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.250.050.867	6.366.435.211	2.116.384.344	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10			Pemeliharaan Berkala Jalan	8.701.816.060	17.128.865.288	8.427.049.228		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	2	BELANJA MODAL	8.701.816.060	17.128.865.288	8.427.049.228		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.701.816.060	17.128.865.288	8.427.049.228	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11			Pemeliharaan Rutin Jalan	1.049.995.680	1.325.593.408	275.597.728		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	502.269.593	382.227.393	(120.042.200)		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	502.269.593	382.227.393	(120.042.200)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	2	BELANJA MODAL	547.726.087	943.366.015	395.639.928		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	547.726.087	943.366.015	395.639.928	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12			Pembangunan Jembatan	5.899.579.930	6.451.895.681	552.315.751		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2	BELANJA MODAL	5.899.579.930	6.451.895.681	552.315.751		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	12	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.899.579.930	6.451.895.681	552.315.751	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18			Rehabilitasi Jembatan	0	199.820.000	199.820.000		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	2	BELANJA MODAL	0	199.820.000	199.820.000		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	18	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	199.820.000	199.820.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21				Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	300.000.000	550.000.000	250.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21	5	1		BELANJA OPERASI	300.000.000	550.000.000	250.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	21	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000	550.000.000	250.000.000	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>199.500.000</b>	<b>199.500.000</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>11</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>199.500.000</b>	<b>199.500.000</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04				Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	199.500.000	199.500.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	199.500.000	199.500.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	199.500.000	199.500.000	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>399.999.700</b>	<b>439.989.700</b>	<b>39.990.000</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>12</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>149.999.800</b>	<b>149.999.800</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	99.999.800	99.999.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	99.999.800	99.999.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800	99.999.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>12</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.999.900</b>	<b>99.999.900</b>	<b>0</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	99.999.900	99.999.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	01	BELANJA OPERASI	99.999.900	99.999.900	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.02	01	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900	99.999.900	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>12</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>189.990.000</b>	<b>39.990.000</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000	189.990.000	39.990.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	BELANJA OPERASI	150.000.000	189.990.000	39.990.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	189.990.000	39.990.000	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.785.042.298</b>	<b>11.667.286.088</b>	<b>882.243.790</b>	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>158.700.600</b>	<b>158.700.600</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.046.500	66.046.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	BELANJA OPERASI	66.046.500	66.046.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Belanja Barang dan Jasa	66.046.500	66.046.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.755.500	7.755.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	BELANJA OPERASI	7.755.500	7.755.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Belanja Barang dan Jasa	7.755.500	7.755.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.898.600	84.898.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	BELANJA OPERASI	84.898.600	84.898.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Belanja Barang dan Jasa	84.898.600	84.898.600	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.027.263.308</b>	<b>7.476.939.441</b>	<b>(550.323.867)</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.925.279.008	7.374.955.141	(550.323.867)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	BELANJA OPERASI	7.925.279.008	7.374.955.141	(550.323.867)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	7.925.279.008	7.374.955.141	(550.323.867)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.773.200	89.773.200	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	89.773.200	89.773.200	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	89.773.200	89.773.200	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.111.500	7.111.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.111.500	7.111.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.111.500	7.111.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.099.600	5.099.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	5.099.600	5.099.600	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.099.600	5.099.600	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.999.000</b>	<b>7.999.000</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.999.000	7.999.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.999.000	7.999.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.000	7.999.000	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>69.959.000</b>	<b>69.959.000</b>	<b>0</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.959.000	69.959.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	69.959.000	69.959.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	69.959.000	69.959.000	0	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>662.050.280</b>	<b>860.877.780</b>	<b>198.827.500</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.241.900	10.241.400	(500)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.241.900	10.241.400	(500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.241.900	10.241.400	(500)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.998.700	94.998.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	94.998.700	94.998.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.998.700	94.998.700	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.176.500	13.176.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	13.176.500	13.176.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.176.500	13.176.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.249.800	31.249.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	31.249.800	31.249.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.249.800	31.249.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.985.880	34.985.880	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	34.985.880	34.985.880	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.985.880	34.985.880	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.996.500	19.996.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	19.996.500	19.996.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.996.500	19.996.500	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.401.000	656.229.000	198.828.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	457.401.000	656.229.000	198.828.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	457.401.000	656.229.000	198.828.000	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>139.929.300</b>	<b>1.101.604.300</b>	<b>961.675.000</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03			Pengadaan Alat Besar	0	948.000.000	948.000.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.760.000	2.760.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5	1	01	Belanja Pegawai	0	2.760.000	2.760.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5	2		BELANJA MODAL	0	945.240.000	945.240.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	945.240.000	945.240.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.780.800	148.655.800	38.875.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.170.000	41.045.000	38.875.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	2.170.000	2.170.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	38.875.000	38.875.000	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	107.610.800	107.610.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.610.800	107.610.800	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.148.500	4.948.500	(25.200.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2		BELANJA MODAL	30.148.500	4.948.500	(25.200.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.148.500	4.948.500	(25.200.000)	
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>127.235.700</b>	<b>99.386.963</b>	<b>(27.848.737)</b>	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.240.000	5.240.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.240.000	5.240.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000	5.240.000	0	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.995.700	22.146.963	(9.848.737)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	31.995.700	22.146.963	(9.848.737)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.995.700	22.146.963	(9.848.737)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	72.000.000	(18.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	90.000.000	72.000.000	(18.000.000)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	72.000.000	(18.000.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.591.905.110</b>	<b>1.891.819.004</b>	<b>299.913.894</b>			
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.803.800	200.902.194	(21.901.606)			
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	222.803.800	200.902.194	(21.901.606)	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	222.803.800	200.902.194	(21.901.606)
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.246.250.722	1.568.066.222	321.815.500
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.246.250.722	1.568.066.222	321.815.500
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.250.722	1.568.066.222	321.815.500
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.789.200	27.789.200	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	27.789.200	27.789.200	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.789.200	27.789.200	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.070.888	75.070.888	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.183.100	3.183.100	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	01	Belanja Pegawai	2.490.000	2.490.000	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	693.100	693.100	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	71.887.788	71.887.788	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.887.788	71.887.788	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.990.500	19.990.500	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	16.489.014	16.489.014	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.489.014	16.489.014	0
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2		BELANJA MODAL	3.501.486	3.501.486	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.501.486	3.501.486	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>83.070.844.848</b>	<b>176.078.357.266</b>	<b>93.007.512.418</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(81.970.844.848)</b>	<b>(174.978.357.266)</b>	<b>(93.007.512.418)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>14.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	4 1 02	Retribusi Daerah	14.000.000	25.000.000	11.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>14.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	
0	00	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>				
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>7.955.162.755</b>	<b>16.108.300.626</b>	<b>8.153.137.871</b>	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	0.00	00		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>3.196.253.934</b>	<b>4.846.253.735</b>	<b>1.649.999.801</b>	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	00		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.196.253.934</b>	<b>4.846.253.735</b>	<b>1.649.999.801</b>	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.308.754.000	3.758.754.000	1.450.000.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	2.308.754.000	3.758.754.000	1.450.000.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	5 1 01	Belanja Pegawai	11.730.000	23.210.000	11.480.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.297.024.000	3.735.544.000	1.438.520.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	732.499.934	932.499.735	199.999.801	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	732.499.934	932.499.735	199.999.801	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06	5 1 01	Belanja Pegawai	7.830.000	7.830.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	724.669.934	924.669.735	199.999.801	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12		Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	155.000.000	155.000.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12	5 1	BELANJA OPERASI	155.000.000	155.000.000	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.01	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000	155.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	0.00	00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>3.658.909.800</b>	<b>4.349.729.600</b>	<b>690.819.800</b>			
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	00	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.658.909.800</b>	<b>4.349.729.600</b>	<b>690.819.800</b>			
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.909.800	198.909.800	90.000.000			
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	108.909.800	198.909.800	90.000.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	19.300.000	19.300.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.909.800	179.609.800	70.700.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.550.000.000	4.150.819.800	600.819.800
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.550.000.000	4.150.819.800	600.819.800
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	2.170.000	2.170.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000.000	4.148.649.800	598.649.800
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	0.00	00	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>149.999.759</b>	<b>2.824.999.759</b>	<b>2.675.000.000</b>			
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	00	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>149.999.759</b>	<b>2.824.999.759</b>	<b>2.675.000.000</b>			
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	149.999.759	2.824.999.759	2.675.000.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	107.700	27.721.700	27.614.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	107.700	27.721.700	27.614.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	5	2		BELANJA MODAL	149.892.059	2.797.278.059	2.647.386.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	12	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.892.059	2.797.278.059	2.647.386.000
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	0.00	00	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>949.999.262</b>	<b>4.087.317.532</b>	<b>3.137.318.270</b>			

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	00		<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>949.999.262</b>	<b>4.087.317.532</b>	<b>3.137.318.270</b>	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	199.999.800	154.000.000	(45.999.800)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	199.505.600	153.505.800	(45.999.800)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	199.505.600	153.505.800	(45.999.800)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	5 2	BELANJA MODAL	494.200	494.200	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	01	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.200	494.200	0	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	749.999.462	3.933.317.532	3.183.318.070	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	502.909.000	627.229.000	124.320.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	6.550.000	6.230.000	(320.000)	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	496.359.000	620.999.000	124.640.000	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	247.090.462	3.306.088.532	3.058.998.070	
1	03	1.04.2.10.1.03.01.0000	08	2.01	02	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	247.090.462	3.306.088.532	3.058.998.070	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	00	0.00	00		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>20.464.611.184</b>	<b>26.375.024.585</b>	<b>5.910.413.401</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	0.00	00		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	00		<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>38.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	38.000.000	38.000.000	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	37.752.000	37.752.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.752.000	37.752.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	2	BELANJA MODAL	248.000	248.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	02	2.01	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.000	248.000	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.546.000.000</b>	<b>1.626.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>818.000.000</b>	<b>908.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	818.000.000	908.000.000	90.000.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	817.752.000	907.752.000	90.000.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	1 01	Belanja Pegawai	5.220.000	6.710.000	1.490.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	812.532.000	901.042.000	88.510.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	248.000	248.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.02	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	248.000	248.000	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>728.000.000</b>	<b>718.000.000</b>	<b>(10.000.000)</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	530.000.000	530.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	529.504.000	529.504.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.504.000	29.504.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	1 06	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000	500.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	2	BELANJA MODAL	496.000	496.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496.000	496.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	198.000.000	188.000.000	(10.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	197.504.000	188.000.000	(9.504.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	197.504.000	188.000.000	(9.504.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	2		BELANJA MODAL	496.000	0	(496.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	03	2.03	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496.000	0	(496.000)	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>7.468.831.026</b>	<b>14.462.461.588</b>	<b>6.993.630.562</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>7.468.831.026</b>	<b>14.462.461.588</b>	<b>6.993.630.562</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.650.342.926	13.643.973.488	6.993.630.562	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.509.885.082	3.048.473.861	538.588.779	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	19.060.000	105.630.000	86.570.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.490.825.082	2.942.843.861	452.018.779	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	4.140.457.844	10.595.499.627	6.455.041.783	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.365.800	30.365.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.513.389.744	4.434.548.828	921.159.084	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	596.702.300	6.130.584.999	5.533.882.699	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	818.488.100	818.488.100	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	818.488.100	818.488.100	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	35.200.000	35.200.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	783.288.100	783.288.100	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.411.780.158</b>	<b>10.248.562.997</b>	<b>(1.163.217.161)</b>	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>70.337.500</b>	<b>42.337.500</b>	<b>(28.000.000)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.418.600	36.418.600	(28.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	64.418.600	36.418.600	(28.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.418.600	36.418.600	(28.000.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.918.900	5.918.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	5.918.900	5.918.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.918.900	5.918.900	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.390.200.558</b>	<b>3.064.253.403</b>	<b>(1.325.947.155)</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.304.183.358	2.978.236.203	(1.325.947.155)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.304.183.358	2.978.236.203	(1.325.947.155)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	4.304.183.358	2.978.236.203	(1.325.947.155)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.517.200	78.517.200	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	78.517.200	78.517.200	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	78.517.200	78.517.200	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.500.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000	7.500.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	7.500.000	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>669.084.800</b>	<b>803.943.000</b>	<b>134.858.200</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	228.002.900	224.227.100	(3.775.800)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	105.122.600	149.186.800	44.064.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.122.600	149.186.800	44.064.200	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	5	2		BELANJA MODAL	122.880.300	75.040.300	(47.840.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.880.300	75.040.300	(47.840.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.617.100	11.307.100	(11.310.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	21.017.100	11.307.100	(9.710.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.017.100	11.307.100	(9.710.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	5	2		BELANJA MODAL	1.600.000	0	(1.600.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.000	0	(1.600.000)	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.636.800	31.636.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	31.636.800	31.636.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.636.800	31.636.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.680.000	30.680.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	30.680.000	30.680.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.680.000	30.680.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08				Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.160.000	11.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08	5	1		BELANJA OPERASI	11.160.000	11.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000	11.160.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.988.000	479.932.000	149.944.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	329.988.000	479.932.000	149.944.000	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	329.988.000	479.932.000	149.944.000	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.077.445.700</b>	<b>6.077.445.700</b>	<b>0</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.950.000	4.950.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000	4.950.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.999.998.900	5.999.998.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.999.998.900	5.999.998.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.998.900	5.999.998.900	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.496.800	72.496.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	72.496.800	72.496.800	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.496.800	72.496.800	0	
<b>1</b>	<b>04</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>204.711.600</b>	<b>260.583.394</b>	<b>55.871.794</b>	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.178.100	150.873.400	20.695.300	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	130.178.100	150.873.400	20.695.300	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	130.178.100	150.873.400	20.695.300	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.823.500	89.999.994	35.176.494	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	54.823.500	76.124.494	21.300.994	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.823.500	76.124.494	21.300.994	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	0	13.875.500	13.875.500	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	13.875.500	13.875.500	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.710.000	19.710.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	19.710.000	19.710.000	0	
1	04	1.04.2.10.1.03.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.710.000	19.710.000	0	
<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>2.388.146.800</b>	<b>2.077.613.142</b>	<b>(310.533.658)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	0.00	00		<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>74.999.800</b>	<b>24.000.800</b>	<b>(50.999.000)</b>	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	00		<b>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>74.999.800</b>	<b>24.000.800</b>	<b>(50.999.000)</b>	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	74.999.800	24.000.800	(50.999.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	74.999.800	24.000.800	(50.999.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	06	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.800	24.000.800	(50.999.000)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	0.00	00		<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>2.313.147.000</b>	<b>2.053.612.342</b>	<b>(259.534.658)</b>	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	00		<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.313.147.000</b>	<b>2.053.612.342</b>	<b>(259.534.658)</b>	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	205.667.700	205.667.700	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	205.667.700	205.667.700	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	205.667.700	205.667.700	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	02		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	282.323.700	282.323.700	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	282.323.700	282.323.700	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	282.323.700	282.323.700	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.825.155.600	1.565.620.942	(259.534.658)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	363.226.600	370.726.600	7.500.000	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5 1 01	Belanja Pegawai	6.510.000	6.510.000	0	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	356.716.600	364.216.600	7.500.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Organisasi : 1.04.2.10.1.03.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	1.461.929.000	1.194.894.342	(267.034.658)	
2	10	1.04.2.10.1.03.01.0000	10	2.01	03	5	2	01		Belanja Modal Tanah	1.461.929.000	1.194.894.342	(267.034.658)	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>30.807.920.739</b>	<b>44.560.938.353</b>	<b>13.753.017.614</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(30.793.920.739)</b>	<b>(44.535.938.353)</b>	<b>(13.742.017.614)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.04.2.10.1.03.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>11.354.852.832</b>	<b>13.098.489.766</b>	<b>1.743.636.934</b>			
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>577.492.200</b>	<b>2.538.357.350</b>	<b>1.960.865.150</b>			
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>367.492.600</b>	<b>1.238.358.200</b>	<b>870.865.600</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	367.492.600	1.238.358.200	870.865.600			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	367.492.600	1.238.358.200	870.865.600		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	367.492.600	1.238.358.200	870.865.600	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>209.999.600</b>	<b>1.299.999.150</b>	<b>1.089.999.550</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	109.999.800	1.129.999.350	1.019.999.550			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	109.999.800	1.129.999.350	1.019.999.550		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.999.800	1.129.999.350	1.019.999.550	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.999.800	169.999.800	70.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	99.999.800	169.999.800	70.000.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800	169.999.800	70.000.000	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>2.886.074.140</b>	<b>2.985.824.140</b>	<b>99.750.000</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.886.074.140</b>	<b>2.985.824.140</b>	<b>99.750.000</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.900.000	229.650.000	99.750.000			
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	129.900.000	229.650.000	99.750.000		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	129.900.000	229.650.000	99.750.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.756.174.140	2.756.174.140	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	199.452.500	199.452.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	01	Belanja Pegawai	14.820.000	14.820.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	184.632.500	184.632.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	2		BELANJA MODAL	2.556.721.640	2.556.721.640	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.356.722.000	2.356.722.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.999.640	199.999.640	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.891.286.492</b>	<b>7.574.308.276</b>	<b>(316.978.216)</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>66.749.700</b>	<b>66.749.700</b>	<b>0</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	4.999.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.750.000	45.750.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	45.750.000	45.750.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000	45.750.000	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.977.693.892</b>	<b>2.452.365.885</b>	<b>(525.328.007)</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.454.692	2.396.126.685	(525.328.007)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.921.454.692	2.396.126.685	(525.328.007)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	2.921.454.692	2.396.126.685	(525.328.007)	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.239.200	50.239.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	50.239.200	50.239.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	50.239.200	50.239.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>211.279.200</b>	<b>218.879.200</b>	<b>7.600.000</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.600	7.999.600	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.999.600	7.999.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.600	7.999.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.098.200	31.698.200	7.600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	24.098.200	24.098.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.098.200	24.098.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	0	7.600.000	7.600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7.600.000	7.600.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.171.700	6.171.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	6.171.700	6.171.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.171.700	6.171.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.659.700	15.659.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	15.659.700	15.659.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.659.700	15.659.700	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.350.000	157.350.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	157.350.000	157.350.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.350.000	157.350.000	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.346.377.700</b>	<b>4.504.409.491</b>	<b>158.031.791</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000	1.330.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.330.000	1.330.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000	1.330.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.998.900	8.998.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	8.998.900	8.998.900	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.998.900	8.998.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.336.048.800	4.494.080.591	158.031.791	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1			BELANJA OPERASI	4.336.048.800	4.494.080.591	158.031.791	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.336.048.800	4.494.080.591	158.031.791	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>289.186.000</b>	<b>331.904.000</b>	<b>42.718.000</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	281.999.700	324.717.700	42.718.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1			BELANJA OPERASI	281.999.700	324.717.700	42.718.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	281.999.700	324.717.700	42.718.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.186.300	7.186.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	7.186.300	7.186.300	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	7.186.300	7.186.300	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>11.354.852.832</b>	<b>13.098.489.766</b>	<b>1.743.636.934</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(11.354.852.832)</b>	<b>(13.098.489.766)</b>	<b>(1.743.636.934)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	00	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00	5				
										<b>BELANJA</b>
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>
							<b>3.909.179.650</b>	<b>5.514.173.940</b>	<b>1.604.994.290</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	0.00	00					<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>
							<b>339.000.000</b>	<b>2.492.537.800</b>	<b>2.153.537.800</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	00					<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>
							<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>(25.000.000)</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
							75.000.000	50.000.000	(25.000.000)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI
										75.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
										75.000.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	00					<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>
							<b>175.000.000</b>	<b>2.353.537.800</b>	<b>2.178.537.800</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
							0	128.537.800	128.537.800	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	1			BELANJA OPERASI
										0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	1	01		Belanja Pegawai
										0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
										0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	2			BELANJA MODAL
										0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin
										0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
							175.000.000	175.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	1			BELANJA OPERASI
										172.434.100
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
										172.434.100
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	2			BELANJA MODAL
										2.565.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin
										2.565.900
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07					Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
							0	2.050.000.000	2.050.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07	5	2			BELANJA MODAL
										0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	80.000.000	80.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	07	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	1.970.000.000	1.970.000.000	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>89.000.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>0</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89.000.000	89.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	89.000.000	89.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.000.000	89.000.000	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.570.179.650</b>	<b>3.021.636.140</b>	<b>(548.543.510)</b>	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.860.300</b>	<b>28.860.300</b>	<b>0</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.772.200	4.772.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	4.772.200	4.772.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.772.200	4.772.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.246.600	4.246.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.246.600	4.246.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.246.600	4.246.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.841.500	19.841.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	19.841.500	19.841.500	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.841.500	19.841.500	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.979.309.700</b>	<b>2.184.312.324</b>	<b>(794.997.376)</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.930.158.500	2.135.161.124	(794.997.376)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.930.158.500	2.135.161.124	(794.997.376)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.930.158.500	2.135.161.124	(794.997.376)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.151.200	42.151.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	42.151.200	42.151.200	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	42.151.200	42.151.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0	
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>172.018.300</b>	<b>224.628.700</b>	<b>52.610.400</b>	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.510.800	13.510.800	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.510.800	13.510.800	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.510.800	13.510.800	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.477.600	20.477.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.477.600	20.477.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.477.600	20.477.600	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.987.100	5.985.500	(1.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.987.100	5.985.500	(1.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.987.100	5.985.500	(1.600)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.899.400	20.899.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	20.899.400	20.899.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.899.400	20.899.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.997.400	19.997.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.997.400	19.997.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.400	19.997.400	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.146.000	143.758.000	52.612.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	91.146.000	143.758.000	52.612.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	91.146.000	143.758.000	52.612.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>46.850.000</b>	<b>46.850.000</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	46.850.000	46.850.000			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.944.600	4.944.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	680.000	680.000
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.264.600	4.264.600
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	0	41.905.400	41.905.400	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	41.905.400	41.905.400
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>240.379.900</b>	<b>235.379.891</b>	<b>(5.000.009)</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.000	1.200.000	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	1.200.000	0
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.192.700	16.192.691	(5.000.009)			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	21.192.700	16.192.691	(5.000.009)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.192.700	16.192.691	(5.000.009)
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	217.987.200	0			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	217.987.200	217.987.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	217.987.200	217.987.200	0
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.611.450</b>	<b>301.604.925</b>	<b>151.993.475</b>			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.156.250	101.149.850	1.993.600			
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	99.156.250	101.149.850	1.993.600	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	99.156.250	101.149.850	1.993.600
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.905.000	25.904.875	(125)			



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	25.905.000	25.904.875	(125)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.905.000	25.904.875	(125)	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.000.000	150.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	0	150.000.000	150.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	150.000.000	150.000.000	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.550.200	24.550.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	24.550.200	24.550.200	0	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.550.200	24.550.200	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>3.909.179.650</b>	<b>5.514.173.940</b>	<b>1.604.994.290</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(3.909.179.650)</b>	<b>(5.514.173.940)</b>	<b>(1.604.994.290)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
							Jumlah Pendapatan	0	0	0			
0	00	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>						
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	4.195.783.786	4.980.623.353	784.839.567			
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	164.000.000	409.000.000	245.000.000			
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	164.000.000	409.000.000	245.000.000			
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	164.000.000	409.000.000	245.000.000			
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	164.000.000	409.000.000	245.000.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	05	Belanja Hibah	164.000.000	409.000.000	245.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	240.390.400	240.390.400	0			
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	98.390.400	123.390.400	25.000.000			
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75.000.000	75.000.000	0		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	05	Belanja Hibah	15.000.000	15.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	60.000.000	60.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.290.400	21.890.400	15.600.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	6.290.400	21.890.400	15.600.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.290.400	21.890.400	15.600.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10			Pemberian Layanan Kedaruratan	5.700.000	15.100.000	9.400.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	5.700.000	15.100.000	9.400.000		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	15.100.000	9.400.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000	5.700.000	0		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	5.700.000	5.700.000	0		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	5.700.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12				Pemberian Layanan Rujukan	5.700.000	5.700.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1		BELANJA OPERASI	5.700.000	5.700.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	5.700.000	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>142.000.000</b>	<b>117.000.000</b>	<b>(25.000.000)</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05				Penyediaan Alat Bantu	92.000.000	92.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	92.000.000	92.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	05	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	92.000.000	92.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.000.000	25.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.000.000	25.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000	0	(25.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	14				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25.000.000	0	(25.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	14	5	1		BELANJA OPERASI	25.000.000	0	(25.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	14	5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000	0	(25.000.000)	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>565.254.900</b>	<b>655.254.900</b>	<b>90.000.000</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>565.254.900</b>	<b>655.254.900</b>	<b>90.000.000</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01				Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.999.800	24.999.800	(10.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	34.999.800	24.999.800	(10.000.000)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800	24.999.800	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	5	1	05	Belanja Hibah	10.000.000	0	(10.000.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.126.100	193.126.100	100.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	93.126.100	174.387.400	81.261.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.126.100	174.387.400	81.261.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5 2	BELANJA MODAL	0	18.738.700	18.738.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	18.738.700	18.738.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	437.129.000	437.129.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	437.129.000	437.129.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	387.129.000	387.129.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	50.000.000	50.000.000	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>232.588.886</b>	<b>938.773.586</b>	<b>706.184.700</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>218.403.886</b>	<b>924.588.586</b>	<b>706.184.700</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Penyediaan Makanan	218.403.886	924.588.586	706.184.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	218.403.886	924.588.586	706.184.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.897.700	57.197.400	44.299.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	205.506.186	867.391.186	661.885.000	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>14.185.000</b>	<b>14.185.000</b>	<b>0</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	14.185.000	14.185.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	14.185.000	14.185.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.185.000	14.185.000	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>20.999.500</b>	<b>30.197.800</b>	<b>9.198.300</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>20.999.500</b>	<b>30.197.800</b>	<b>9.198.300</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	17.000.000	26.198.300	9.198.300	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	BELANJA OPERASI	17.000.000	20.701.100	3.701.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000	20.701.100	3.701.100	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	BELANJA MODAL	0	5.497.200	5.497.200	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	5.497.200	5.497.200	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3.999.500	3.999.500	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	BELANJA OPERASI	3.999.500	3.999.500	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.500	3.999.500	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.972.550.100</b>	<b>2.707.006.667</b>	<b>(265.543.433)</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.362.300</b>	<b>7.362.300</b>	<b>0</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.362.300	3.362.300	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	BELANJA OPERASI	3.362.300	3.362.300	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Belanja Barang dan Jasa	3.362.300	3.362.300	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.528.215.800</b>	<b>2.144.057.968</b>	<b>(384.157.832)</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.484.124.200	2.099.966.368	(384.157.832)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	BELANJA OPERASI	2.484.124.200	2.099.966.368	(384.157.832)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Belanja Pegawai	2.484.124.200	2.099.966.368	(384.157.832)	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	39.591.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	BELANJA OPERASI	39.591.600	39.591.600	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	39.591.600	39.591.600	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>261.146.700</b>	<b>324.156.999</b>	<b>63.010.299</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.586.000	11.586.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	11.586.000	11.586.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.586.000	11.586.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	45.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	45.000.000	45.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000	45.000.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.700	29.998.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	29.998.700	29.998.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.998.700	29.998.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	40.547.299	10.547.299	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	30.000.000	40.547.299	10.547.299	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	40.547.299	10.547.299	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.562.000	197.025.000	52.463.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	144.562.000	197.025.000	52.463.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	144.562.000	197.025.000	52.463.000	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>11.805.800</b>	<b>62.710.200</b>	<b>50.904.400</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.805.800	62.710.200	50.904.400	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	7.377.800	7.377.800	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.377.800	7.377.800	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2		BELANJA MODAL	11.805.800	55.332.400	43.526.600	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.805.800	55.332.400	43.526.600	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.403.000</b>	<b>110.602.700</b>	<b>3.199.700</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.575.000	16.774.700	1.199.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.575.000	16.774.700	1.199.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.575.000	16.774.700	1.199.700	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	90.828.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	90.828.000	90.828.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	90.828.000	90.828.000	0	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.616.500</b>	<b>58.116.500</b>	<b>1.500.000</b>	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.472.900	33.972.900	1.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	32.472.900	33.972.900	1.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.472.900	33.972.900	1.500.000	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.131.900	7.131.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.131.900	7.131.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.131.900	7.131.900	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.536.700	8.536.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	8.536.700	8.536.700	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 DINAS SOSIAL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.536.700	8.536.700	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.475.000	8.475.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	8.475.000	8.475.000	0	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	8.475.000	8.475.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>4.195.783.786</b>	<b>4.980.623.353</b>	<b>784.839.567</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(4.195.783.786)</b>	<b>(4.980.623.353)</b>	<b>(784.839.567)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>3.932.217.505</b>	<b>3.702.696.784</b>	<b>(229.520.721)</b>		
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>470.000.000</b>	<b>1.020.566.300</b>	<b>550.566.300</b>		
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>470.000.000</b>	<b>1.020.566.300</b>	<b>550.566.300</b>		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	470.000.000	1.020.566.300	550.566.300		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	470.000.000	1.020.566.300	550.566.300	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.360.000	1.360.000
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	470.000.000	1.019.206.300	549.206.300
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02			Pelayanan antar Kerja	20.000.000	20.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>52.785.900</b>	<b>52.785.900</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>39.786.100</b>	<b>39.786.100</b>	<b>0</b>		
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	39.786.100	39.786.100	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	39.786.100	39.786.100	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.786.100	39.786.100	0	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>12.999.800</b>	<b>12.999.800</b>	<b>0</b>	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	12.999.800	12.999.800	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	12.999.800	12.999.800	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	05	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.999.800	12.999.800	0	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.389.431.605</b>	<b>2.609.344.584</b>	<b>(780.087.021)</b>	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.990.124.405</b>	<b>2.206.056.384</b>	<b>(784.068.021)</b>	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.945.973.205	2.161.905.184	(784.068.021)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.945.973.205	2.161.905.184	(784.068.021)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	2.945.973.205	2.161.905.184	(784.068.021)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.151.200	42.151.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.151.200	42.151.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	41.347.200	41.347.200	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	804.000	804.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>173.996.500</b>	<b>173.996.500</b>	<b>0</b>	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000	4.999.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.999.000	4.999.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.000	4.999.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.400	19.997.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	19.997.400	19.997.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.997.400	19.997.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.220.700	6.220.700	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	6.220.700	6.220.700	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.220.700	6.220.700	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.164.400	8.164.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	8.164.400	8.164.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.164.400	8.164.400	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.615.000	134.615.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	134.615.000	134.615.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.615.000	134.615.000	0	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>27.100.700</b>	<b>31.081.700</b>	<b>3.981.000</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.100.700	16.948.700	(10.152.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	27.100.700	16.948.700	(10.152.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.100.700	16.948.700	(10.152.000)	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	14.133.000	14.133.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	11	5 1	BELANJA OPERASI	0	14.133.000	14.133.000	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.07	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	14.133.000	14.133.000	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>154.684.200</b>	<b>154.684.200</b>	<b>0</b>	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.025.000	26.025.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	26.025.000	26.025.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.025.000	26.025.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	127.159.200	127.159.200	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	127.159.200	127.159.200	0	
<b>2</b>	<b>07</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>41.525.800</b>	<b>41.525.800</b>	<b>0</b>	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.504.800	32.504.800	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	32.504.800	32.504.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01 DINAS KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.504.800	32.504.800	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.021.000	9.021.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	9.021.000	9.021.000	0	
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.021.000	9.021.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>3.932.217.505</b>	<b>3.702.696.784</b>	<b>(229.520.721)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(3.932.217.505)</b>	<b>(3.702.696.784)</b>	<b>229.520.721</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.07.3.32.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				<b>BELANJA</b>
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	01		1.007.000.000	860.000.000	(147.000.000)	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	01	5	1	860.000.000	(147.000.000)	BELANJA OPERASI
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	01	5	1	860.000.000	(147.000.000)	Belanja Barang dan Jasa
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	02		95.000.000	100.000.000	5.000.000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	02	5	1	100.000.000	5.000.000	BELANJA OPERASI
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	02	5	1	100.000.000	5.000.000	Belanja Barang dan Jasa
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	03		1.071.997.100	1.213.997.100	142.000.000	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	03	5	1	1.213.997.100	150.501.200	BELANJA OPERASI
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	03	5	1	2.470.000	0	Belanja Pegawai
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	03	5	1	1.061.025.900	150.501.200	Belanja Barang dan Jasa
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	03	5	2	8.501.200	(8.501.200)	BELANJA MODAL
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.01	03	5	2	8.501.200	(8.501.200)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	00		<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>70.000.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	40.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000	40.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000	40.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	00		<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>69.993.100</b>	<b>69.993.100</b>	<b>0</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.993.100	39.993.100	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	39.993.100	39.993.100	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.993.100	39.993.100	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.02	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	00		<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>305.000.000</b>	<b>305.000.000</b>	<b>0</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.000.000	225.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02	5 1	BELANJA OPERASI	225.000.000	225.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000	225.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80.000.000	80.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	80.000.000	80.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	0	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>130.006.900</b>	<b>130.006.900</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>130.006.900</b>	<b>130.006.900</b>	<b>0</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.006.900	130.006.900	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	130.006.900	130.006.900	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.006.900	130.006.900	0	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	25.000.000	25.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	05	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000	25.000.000	0	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.530.690.354</b>	<b>4.072.727.736</b>	<b>542.037.382</b>	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>0</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.000.000	8.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000	8.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	8.000.000	8.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	22.000.000	22.000.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000	22.000.000	0	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.842.052.104</b>	<b>3.189.995.886</b>	<b>347.943.782</b>		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.793.524.204	3.136.847.986	343.323.782		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.793.524.204	3.136.847.986	343.323.782		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.793.524.204	3.136.847.986	343.323.782	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.347.200	45.967.200	4.620.000		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	41.347.200	45.967.200	4.620.000		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	41.347.200	45.967.200	4.620.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.180.700	7.180.700	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.180.700	7.180.700	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.180.700	7.180.700	0	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>209.409.900</b>	<b>249.464.800</b>	<b>40.054.900</b>		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.900	4.997.900	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.997.900	4.997.900	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.900	4.997.900	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.278.200	31.278.200	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	31.278.200	31.278.200	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.278.200	31.278.200	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.995.500	7.995.500	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	7.995.500	7.995.500	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.995.500	7.995.500	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.273.300	10.418.200	144.900	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	10.273.300	10.418.200	144.900	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.273.300	10.418.200	144.900	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000	17.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	17.000.000	17.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000	17.000.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.865.000	177.775.000	39.910.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	137.865.000	177.775.000	39.910.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.865.000	177.775.000	39.910.000	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>46.442.000</b>	<b>82.390.800</b>	<b>35.948.800</b>	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	2.000.000	21.948.800	19.948.800	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000	4.500.000	2.500.000	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	4.500.000	2.500.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	5	2	BELANJA MODAL	0	17.448.800	17.448.800		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	17.448.800	17.448.800	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.442.000	60.442.000	16.000.000		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	44.442.000	60.442.000	16.000.000		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.442.000	60.442.000	16.000.000	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>292.901.000</b>	<b>410.990.900</b>	<b>118.089.900</b>		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.420.000	2.420.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.420.000	2.420.000	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000	2.420.000	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.997.000	23.493.300	5.496.300		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	17.997.000	23.493.300	5.496.300		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.997.000	23.493.300	5.496.300	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.484.000	385.077.600	112.593.600		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	272.484.000	385.077.600	112.593.600		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	272.484.000	385.077.600	112.593.600	
<b>2</b>	<b>09</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>94.885.350</b>	<b>94.885.350</b>	<b>0</b>		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.985.450	70.985.450	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	70.985.450	70.985.450	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	70.985.450	70.985.450	0	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.465.700	3.465.700	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.465.700	3.465.700	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.465.700	3.465.700	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.434.200	20.434.200	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	20.434.200	20.434.200	0		
2	09	2.09.3.25.3.27.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.434.200	20.434.200	0	
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>1.407.571.432</b>	<b>1.597.571.432</b>	<b>190.000.000</b>		
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>1.407.571.432</b>	<b>1.597.571.432</b>	<b>190.000.000</b>		
<b>3</b>	<b>25</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>			<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>1.407.571.432</b>	<b>1.597.571.432</b>	<b>190.000.000</b>		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	160.000.000	40.000.000		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	120.000.000	160.000.000	40.000.000		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02	5	1	01	Belanja Pegawai	890.000	890.000	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	119.110.000	159.110.000	40.000.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.999.932	149.999.932	0		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	120.447.400	126.811.000	6.363.600		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.447.400	126.811.000	6.363.600	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	2	BELANJA MODAL	29.552.532	23.188.932	(6.363.600)		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.363.600	0	(6.363.600)	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.188.932	23.188.932	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	610.000.000	760.000.000	150.000.000		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	1	BELANJA OPERASI	594.000.000	760.000.000	166.000.000		
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	1	01	Belanja Pegawai	2.470.000	2.470.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	591.530.000	757.530.000	166.000.000	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	2		BELANJA MODAL	16.000.000	0	(16.000.000)	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	05	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000	0	(16.000.000)	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	527.571.500	527.571.500	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06	5	1		BELANJA OPERASI	527.571.500	527.571.500	0	
3	25	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	527.571.500	527.571.500	0	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>0</b>	<b>1.396.063.100</b>	<b>1.396.063.100</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>0</b>	<b>566.072.000</b>	<b>566.072.000</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>166.082.800</b>	<b>166.082.800</b>	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	0	146.082.800	146.082.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	146.082.800	146.082.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	146.082.800	146.082.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	20.000.000	20.000.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	20.000.000	20.000.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	20.000.000	20.000.000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>0</b>	<b>399.989.200</b>	<b>399.989.200</b>	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	399.989.200	399.989.200	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	399.989.200	399.989.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.830.000	1.830.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	398.159.200	398.159.200	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>0</b>	<b>149.999.200</b>	<b>149.999.200</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>0</b>	<b>149.999.200</b>	<b>149.999.200</b>	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	04				Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	0	149.999.200	149.999.200	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	149.999.200	149.999.200	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.570.000	1.570.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	148.429.200	148.429.200	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>0</b>	<b>679.991.900</b>	<b>679.991.900</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>579.999.700</b>	<b>579.999.700</b>	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0	149.999.900	149.999.900	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	149.999.900	149.999.900	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.570.000	1.570.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	148.429.900	148.429.900	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	429.999.800	429.999.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	425.773.800	425.773.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	0	3.400.000	3.400.000	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	422.373.800	422.373.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	2		BELANJA MODAL	0	4.226.000	4.226.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Organisasi : 2.09.3.25.3.27.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.01	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4.226.000	4.226.000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>99.992.200</b>	<b>99.992.200</b>	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	99.992.200	99.992.200	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	93.769.400	93.769.400	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	93.769.400	93.769.400	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	5	2		BELANJA MODAL	0	6.222.800	6.222.800	
3	27	2.09.3.25.3.27.01.0000	04	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	6.222.800	6.222.800	
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>7.712.258.886</b>	<b>9.840.359.368</b>	<b>2.128.100.482</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>										<b>(7.712.258.886)</b>	<b>(9.840.359.368)</b>	<b>(2.128.100.482)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.09.3.25.3.27.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	170.000.000	170.000.000	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>									<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0</b>	
0	00	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>				
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>8.633.029.350</b>	<b>8.753.125.322</b>	<b>120.095.972</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>157.429.700</b>	<b>255.784.650</b>	<b>98.354.950</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00			<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>106.685.500</b>	<b>151.944.550</b>	<b>45.259.050</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35.093.500	54.043.500	18.950.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	35.093.500	54.043.500	18.950.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.093.500	54.043.500	18.950.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	56.399.000	75.631.600	19.232.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	56.399.000	75.631.600	19.232.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.399.000	75.631.600	19.232.600	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	15.193.000	22.269.450	7.076.450	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	15.193.000	22.269.450	7.076.450	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.193.000	22.269.450	7.076.450	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	00			<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>50.744.200</b>	<b>103.840.100</b>	<b>53.095.900</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.744.200	103.840.100	53.095.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 1	BELANJA OPERASI	50.744.200	103.840.100	53.095.900	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.744.200	103.840.100	53.095.900	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>43.601.100</b>	<b>41.761.100</b>	<b>(1.840.000)</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Penyimpanan Sementara Limbah B3</b>	<b>43.601.100</b>	<b>41.761.100</b>	<b>(1.840.000)</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	43.601.100	41.761.100	(1.840.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	43.601.100	41.761.100	(1.840.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.601.100	41.761.100	(1.840.000)	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>60.085.000</b>	<b>73.175.000</b>	<b>13.090.000</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>60.085.000</b>	<b>73.175.000</b>	<b>13.090.000</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.100.500	29.140.500	(960.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	30.100.500	29.140.500	(960.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.100.500	29.140.500	(960.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.984.500	44.034.500	14.050.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	29.984.500	44.034.500	14.050.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.984.500	44.034.500	14.050.000	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>09</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>43.601.000</b>	<b>43.238.000</b>	<b>(363.000)</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>09</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>43.601.000</b>	<b>43.238.000</b>	<b>(363.000)</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43.601.000	43.238.000	(363.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	43.601.000	43.238.000	(363.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.601.000	43.238.000	(363.000)	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>10</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>40.427.900</b>	<b>38.907.900</b>	<b>(1.520.000)</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>10</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>40.427.900</b>	<b>38.907.900</b>	<b>(1.520.000)</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.427.900	38.907.900	(1.520.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	40.427.900	38.907.900	(1.520.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	40.427.900	38.907.900	(1.520.000)	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>11</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>786.652.000</b>	<b>790.367.200</b>	<b>3.715.200</b>	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>11</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>786.652.000</b>	<b>790.367.200</b>	<b>3.715.200</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43.601.000	48.367.200	4.766.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	43.601.000	48.367.200	4.766.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.601.000	48.367.200	4.766.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	743.051.000	742.000.000	(1.051.000)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.051.000	0	(1.051.000)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.051.000	0	(1.051.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	2	BELANJA MODAL	742.000.000	742.000.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	742.000.000	742.000.000	0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.501.232.650</b>	<b>7.509.891.472</b>	<b>8.658.822</b>		
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>92.728.900</b>	<b>92.728.900</b>	<b>0</b>		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.109.000	86.109.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	86.109.000	86.109.000	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.109.000	86.109.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.619.900	6.619.900	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.619.900	6.619.900	0		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.619.900	6.619.900	0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.099.711.400</b>	<b>2.717.651.722</b>	<b>(382.059.678)</b>		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.804.200	2.645.298.522	(386.505.678)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.031.804.200	2.645.298.522	(386.505.678)		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.031.804.200	2.645.298.522	(386.505.678)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.907.200	65.353.200	4.446.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	60.907.200	65.353.200	4.446.000		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	60.907.200	65.353.200	4.446.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>78.199.200</b>	<b>73.915.200</b>	<b>(4.284.000)</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.199.200	73.915.200	(4.284.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5 1	BELANJA OPERASI	73.915.200	73.915.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.915.200	73.915.200	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5 2	BELANJA MODAL	4.284.000	0	(4.284.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.284.000	0	(4.284.000)	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>163.522.800</b>	<b>220.903.800</b>	<b>57.381.000</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.993.800	4.993.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.993.800	4.993.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.993.800	4.993.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.549.300	57.945.300	(2.604.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	60.549.300	57.945.300	(2.604.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.549.300	57.945.300	(2.604.000)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.794.900	12.794.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	12.794.900	12.794.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.794.900	12.794.900	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800	24.999.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	24.999.800	24.999.800	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800	24.999.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.185.000	120.170.000	59.985.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	60.185.000	120.170.000	59.985.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.185.000	120.170.000	59.985.000	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>36.858.300</b>	<b>133.230.300</b>	<b>96.372.000</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	0	19.373.800	19.373.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2	BELANJA MODAL	0	19.373.800	19.373.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	19.373.800	19.373.800	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.858.300	39.768.500	2.910.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	487.100	487.100	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	487.100	487.100	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	36.371.200	39.281.400	2.910.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.371.200	39.281.400	2.910.200	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	74.088.000	74.088.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	07	5 2	BELANJA MODAL	0	74.088.000	74.088.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	07	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	74.088.000	74.088.000	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.109.660.300</b>	<b>3.114.042.350</b>	<b>4.382.050</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.160.000	18.008.600	(1.151.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	19.160.000	18.008.600	(1.151.400)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.160.000	18.008.600	(1.151.400)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.088.500.300	3.094.033.750	5.533.450	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	3.088.500.300	3.094.033.750	5.533.450	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.088.500.300	3.094.033.750	5.533.450	
<b>2</b>	<b>11</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>920.551.750</b>	<b>1.157.419.200</b>	<b>236.867.450</b>	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.818.650	83.707.050	4.888.400	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	78.818.650	83.707.050	4.888.400	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.818.650	83.707.050	4.888.400	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	796.544.500	1.033.031.650	236.487.150	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	796.544.500	1.029.531.650	232.987.150	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	796.544.500	1.029.531.650	232.987.150	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 2	BELANJA MODAL	0	3.500.000	3.500.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	3.500.000	3.500.000	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.999.800	20.491.700	(4.508.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	5 1	BELANJA OPERASI	24.999.800	20.491.700	(4.508.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800	20.491.700	(4.508.100)	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.987.500	9.987.500	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	9.987.500	9.987.500	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.987.500	9.987.500	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.201.300	10.201.300	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	10.201.300	10.201.300	0	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.201.300	10.201.300	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>8.633.029.350</b>	<b>8.753.125.322</b>	<b>120.095.972</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(8.463.029.350)</b>	<b>(8.583.125.322)</b>	<b>(120.095.972)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>		<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.524.671.570</b>	<b>4.423.078.945</b>	<b>(101.592.625)</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>621.303.700</b>	<b>621.303.700</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>621.303.700</b>	<b>621.303.700</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	110.889.200	110.889.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	110.889.200	110.889.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.889.200	110.889.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	510.414.500	510.414.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	510.414.500	510.414.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	510.414.500	510.414.500	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>42.884.000</b>	<b>42.884.000</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>42.884.000</b>	<b>42.884.000</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	42.884.000	42.884.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	42.884.000	42.884.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.884.000	42.884.000	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>31.247.300</b>	<b>31.247.300</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>31.247.300</b>	<b>31.247.300</b>	<b>0</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.247.500	6.247.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.247.500	6.247.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.247.500	6.247.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.999.800	24.999.800	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	24.999.800	24.999.800	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800	24.999.800	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>71.384.600</b>	<b>71.384.600</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>71.384.600</b>	<b>71.384.600</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	71.384.600	71.384.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	71.384.600	71.384.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.384.600	71.384.600	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.757.851.970</b>	<b>3.656.259.345</b>	<b>(101.592.625)</b>	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.921.600</b>	<b>2.921.600</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.921.600	2.921.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.921.600	2.921.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.921.600	2.921.600	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.827.450.420</b>	<b>2.310.779.995</b>	<b>(516.670.425)</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.782.241.920	2.265.571.495	(516.670.425)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.782.241.920	2.265.571.495	(516.670.425)	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	2.782.241.920	2.265.571.495	(516.670.425)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.191.600	40.191.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	40.191.600	40.191.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	40.191.600	40.191.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.016.900	5.016.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	5.016.900	5.016.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.016.900	5.016.900	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>278.285.600</b>	<b>348.011.600</b>	<b>69.726.000</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.000	4.972.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.972.000	4.972.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.972.000	4.972.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.021.100	73.021.100	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	73.021.100	73.021.100	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.021.100	73.021.100	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.116.800	6.116.800	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	6.116.800	6.116.800	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.116.800	6.116.800	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.654.200	23.654.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	23.654.200	23.654.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.654.200	23.654.200	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.697.500	11.697.500	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	11.697.500	11.697.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.697.500	11.697.500	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.960.000	6.960.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	6.960.000	6.960.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.960.000	6.960.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.864.000	221.590.000	69.726.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	151.864.000	221.590.000	69.726.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	151.864.000	221.590.000	69.726.000	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>263.482.200</b>	<b>608.834.000</b>	<b>345.351.800</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.482.200	608.834.000	345.351.800	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	13.572.600	63.275.000	49.702.400	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	1.040.000	2.080.000	1.040.000	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.532.600	61.195.000	48.662.400	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	249.909.600	545.559.000	295.649.400	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.909.600	545.559.000	295.649.400	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.033.600</b>	<b>217.033.600</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.033.600	36.033.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	36.033.600	36.033.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.033.600	36.033.600	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	180.000.000	180.000.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	180.000.000	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>163.650.950</b>	<b>163.650.950</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.928.750	84.928.750	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	84.928.750	84.928.750	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.928.750	84.928.750	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.582.000	15.582.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	15.582.000	15.582.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.582.000	15.582.000	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.998.900	49.998.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	49.998.900	49.998.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.998.900	49.998.900	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.141.300	13.141.300	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	13.141.300	13.141.300	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.141.300	13.141.300	0	
<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2.12.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>	<b>00</b>			<b>Penataan Organisasi</b>	<b>5.027.600</b>	<b>5.027.600</b>	<b>0</b>	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.027.600	5.027.600	0	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.027.600	5.027.600	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	5.027.600	5.027.600	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>4.524.671.570</b>	<b>4.423.078.945</b>	<b>(101.592.625)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(4.524.671.570)</b>	<b>(4.423.078.945)</b>	<b>101.592.625</b>	
0	00	2.12.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>		<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>4.940.004.765</b>	<b>5.300.509.805</b>	<b>360.505.040</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>420.277.165</b>	<b>303.573.433</b>	<b>(116.703.732)</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>420.277.165</b>	<b>303.573.433</b>	<b>(116.703.732)</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	420.277.165	303.573.433	(116.703.732)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	420.277.165	303.573.433	(116.703.732)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	420.277.165	303.573.433	(116.703.732)	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>367.449.500</b>	<b>544.577.600</b>	<b>177.128.100</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>367.449.500</b>	<b>544.577.600</b>	<b>177.128.100</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	90.000.000	135.128.100	45.128.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	90.000.000	135.128.100	45.128.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000	135.128.100	45.128.100	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	122.771.300	122.771.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	122.771.300	122.771.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	122.771.300	122.771.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	74.778.100	74.778.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	74.778.100	74.778.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.778.100	74.778.100	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	79.900.100	79.900.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	79.900.100	79.900.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.900.100	79.900.100	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0	132.000.000	132.000.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	132.000.000	132.000.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	132.000.000	132.000.000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>449.870.200</b>	<b>1.371.627.600</b>	<b>921.757.400</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>449.870.200</b>	<b>1.371.627.600</b>	<b>921.757.400</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.000.000	93.750.000	43.750.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	93.750.000	43.750.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	50.000.000	93.750.000	43.750.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	128.582.800	437.126.000	308.543.200	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	128.582.800	437.126.000	308.543.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	128.582.800	437.126.000	308.543.200	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	237.395.700	728.860.400	491.464.700	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	237.395.700	728.860.400	491.464.700	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	237.395.700	728.860.400	491.464.700	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	33.891.700	111.891.200	77.999.500	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	33.891.700	111.891.200	77.999.500	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.891.700	111.891.200	77.999.500	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.702.407.900</b>	<b>3.080.731.172</b>	<b>(621.676.728)</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.991.000</b>	<b>3.991.000</b>	<b>0</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.991.000	3.991.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.991.000	3.991.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.991.000	3.991.000	0	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.434.591.400</b>	<b>2.756.570.701</b>	<b>(678.020.699)</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.386.002.200	2.700.757.501	(685.244.699)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.386.002.200	2.700.757.501	(685.244.699)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.386.002.200	2.700.757.501	(685.244.699)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.089.200	51.313.200	7.224.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	44.089.200	51.313.200	7.224.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	44.089.200	51.313.200	7.224.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000	4.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000	4.500.000	0	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>120.814.100</b>	<b>137.229.100</b>	<b>16.415.000</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.600	4.998.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.998.600	4.998.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.600	4.998.600	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.825.000	13.825.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	13.825.000	13.825.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.825.000	13.825.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.996.300	6.996.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	6.996.300	6.996.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.996.300	6.996.300	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.200	4.999.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	4.999.200	4.999.200	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.200	4.999.200	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.995.000	91.410.000	16.415.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	74.995.000	91.410.000	16.415.000	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	74.995.000	91.410.000	16.415.000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>32.371.400</b>	<b>32.371.400</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	32.371.400	32.371.400	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	0	32.371.400	32.371.400	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	32.371.400	32.371.400	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>89.161.500</b>	<b>84.466.571</b>	<b>(4.694.929)</b>	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.999.100	10.304.171	(4.694.929)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	14.999.100	10.304.171	(4.694.929)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.100	10.304.171	(4.694.929)	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	72.662.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	72.662.400	72.662.400	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.662.400	72.662.400	0	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>53.849.900</b>	<b>66.102.400</b>	<b>12.252.500</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.993.600	50.246.100	12.252.500		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	37.993.600	50.246.100	12.252.500		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.993.600	50.246.100	12.252.500	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.873.000	5.873.000	0		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.873.000	5.873.000	0		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.873.000	5.873.000	0	
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.983.300	9.983.300	0		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	BELANJA OPERASI	9.983.300	9.983.300	0		
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.983.300	9.983.300	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>4.940.004.765</b>	<b>5.300.509.805</b>	<b>360.505.040</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(4.940.004.765)</b>	<b>(5.300.509.805)</b>	<b>(360.505.040)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.13.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>		<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>380.025.500</b>	<b>523.380.200</b>	<b>143.354.700</b>	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>190.035.100</b>	<b>250.034.900</b>	<b>59.999.800</b>	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>40.035.100</b>	<b>100.034.900</b>	<b>59.999.800</b>	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	19.989.900	19.989.900	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.989.900	19.989.900	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.989.900	19.989.900	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.045.200	80.045.000	59.999.800	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	20.045.200	80.045.000	59.999.800	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.045.200	80.045.000	59.999.800	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000	50.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1 05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	100.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 05	Belanja Hibah	100.000.000	100.000.000	0	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>39.990.400</b>	<b>63.345.500</b>	<b>23.355.100</b>	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>39.990.400</b>	<b>63.345.500</b>	<b>23.355.100</b>	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.999.900	35.000.000	15.000.100	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	19.999.900	35.000.000	15.000.100	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900	35.000.000	15.000.100	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.990.500	28.345.500	8.355.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	19.990.500	28.345.500	8.355.000	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	06	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.990.500	28.345.500	8.355.000	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>150.000.000</b>	<b>209.999.800</b>	<b>59.999.800</b>	
<b>2</b>	<b>08</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>209.999.800</b>	<b>59.999.800</b>	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000	150.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	150.000.000	150.000.000	0	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	59.999.800	59.999.800	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	59.999.800	59.999.800	
2	08	2.14.2.08.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	59.999.800	59.999.800	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>11.176.085.735</b>	<b>11.316.356.382</b>	<b>140.270.647</b>	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4.975.359.735</b>	<b>3.912.719.036</b>	<b>(1.062.640.699)</b>	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.332.237.600</b>	<b>896.551.700</b>	<b>(435.685.900)</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	01			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0	147.999.900	147.999.900	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	147.999.900	147.999.900	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	147.999.900	147.999.900	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	69.504.800	69.504.800	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	69.504.800	69.504.800	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	69.504.800	69.504.800	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03			Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	195.263.000	118.047.600	(77.215.400)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	195.263.000	118.047.600	(77.215.400)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.263.000	118.047.600	(77.215.400)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	75.000.000	75.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.061.974.600	485.999.400	(575.975.200)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	1.061.974.600	485.999.400	(575.975.200)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.061.974.600	485.999.400	(575.975.200)	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.409.600.035</b>	<b>1.569.604.836</b>	<b>160.004.801</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	200.000.035	200.000.036	1	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5 2	BELANJA MODAL	200.000.035	200.000.036	1	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	02	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.035	200.000.036	1	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	03		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0	59.999.800	59.999.800	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	0	59.999.800	59.999.800	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	59.999.800	59.999.800	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.209.600.000	1.309.605.000	100.005.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	1.209.600.000	1.309.605.000	100.005.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.02	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.209.600.000	1.309.605.000	100.005.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	00		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.388.270.300</b>	<b>1.009.312.500</b>	<b>(378.957.800)</b>			
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.450.000	40.240.000	(5.210.000)			
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	45.450.000	40.240.000	(5.210.000)		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000	40.240.000	(5.210.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	492.580.600	327.371.500	(165.209.100)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	492.580.600	316.871.500	(175.709.100)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	492.580.600	316.871.500	(175.709.100)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	2		BELANJA MODAL	0	10.500.000	10.500.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10.500.000	10.500.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.750.000	26.828.000	13.078.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08	5	1		BELANJA OPERASI	13.750.000	26.828.000	13.078.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000	26.828.000	13.078.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	10				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	80.000.000	80.000.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	80.000.000	80.000.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	80.000.000	80.000.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	746.692.700	502.030.000	(244.662.700)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	5	1	BELANJA OPERASI	746.692.700	494.530.000	(252.162.700)		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	746.692.700	494.530.000	(252.162.700)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	5	2	BELANJA MODAL	0	7.500.000	7.500.000		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	11	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	7.500.000	7.500.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13			Peningkatan Kesertaan KB Pria	89.797.000	32.843.000	(56.954.000)		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13	5	1	BELANJA OPERASI	89.797.000	32.843.000	(56.954.000)		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.03	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	89.797.000	32.843.000	(56.954.000)	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>845.251.800</b>	<b>437.250.000</b>	<b>(408.001.800)</b>		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75.000.000	75.000.000	0		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	BELANJA OPERASI	75.000.000	75.000.000	0		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000	75.000.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	770.251.800	362.250.000	(408.001.800)		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	770.251.800	362.250.000	(408.001.800)		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	03	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	770.251.800	362.250.000	(408.001.800)	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.006.709.200</b>	<b>2.509.504.300</b>	<b>1.502.795.100</b>		
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>1.006.709.200</b>	<b>2.509.504.300</b>	<b>1.502.795.100</b>		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	82.649.900	82.649.900	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	0	82.649.900	82.649.900	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	82.649.900	82.649.900	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	10		Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	375.000.000	374.996.800	(3.200)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	10	5 1	BELANJA OPERASI	375.000.000	374.996.800	(3.200)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	10	5 1 01	Belanja Pegawai	0	7.760.000	7.760.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000	367.236.800	(7.763.200)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	11		Advokasi dan Promosi IPK	631.709.200	2.051.857.600	1.420.148.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	11	5 1	BELANJA OPERASI	631.709.200	2.051.857.600	1.420.148.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	04	2.01	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	631.709.200	2.051.857.600	1.420.148.400	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.194.016.800</b>	<b>4.894.133.046</b>	<b>(299.883.754)</b>	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>0</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.190.000	6.190.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	6.190.000	6.190.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.190.000	6.190.000	0	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.545.952.600</b>	<b>4.195.093.346</b>	<b>(350.859.254)</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.494.880.200	4.127.380.546	(367.499.654)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	4.494.880.200	4.127.380.546	(367.499.654)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	4.494.880.200	4.127.380.546	(367.499.654)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.755.200	61.395.600	16.640.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	44.755.200	61.395.600	16.640.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	02	5 1 01	Belanja Pegawai	44.755.200	61.395.600	16.640.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.317.200	6.317.200	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	6.317.200	6.317.200	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.317.200	6.317.200	0	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>109.775.000</b>	<b>99.775.000</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	109.775.000	99.775.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.05	05	5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000	109.775.000	99.775.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.05	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	109.775.000	99.775.000	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>145.626.800</b>	<b>223.333.900</b>	<b>77.707.100</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.003.100	5.749.600	746.500	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	5.003.100	5.749.600	746.500	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.003.100	5.749.600	746.500	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.170.000	23.305.400	3.135.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	20.170.000	23.305.400	3.135.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.170.000	23.305.400	3.135.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.940.800	11.766.000	1.825.200	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	9.940.800	11.766.000	1.825.200	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.800	11.766.000	1.825.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	11.799.900	1.800.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05	BELANJA OPERASI	9.999.900	11.799.900	1.800.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	05	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900	11.799.900	1.800.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.999.000	5.999.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06	BELANJA OPERASI	5.999.000	5.999.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	06	Belanja Barang dan Jasa	5.999.000	5.999.000	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.514.000	164.714.000	70.200.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09	BELANJA OPERASI	94.514.000	164.714.000	70.200.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.06	09	Belanja Barang dan Jasa	94.514.000	164.714.000	70.200.000	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.197.400</b>	<b>194.497.400</b>	<b>(171.700.000)</b>	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	6.100.000	1.100.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01	BELANJA OPERASI	5.000.000	6.100.000	1.100.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	6.100.000	1.100.000	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.397.400	8.397.400	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02	BELANJA OPERASI	8.397.400	8.397.400	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	02	Belanja Barang dan Jasa	8.397.400	8.397.400	0	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.800.000	180.000.000	(172.800.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04	BELANJA OPERASI	352.800.000	180.000.000	(172.800.000)	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.08	04	Belanja Barang dan Jasa	352.800.000	180.000.000	(172.800.000)	
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>120.050.000</b>	<b>165.243.400</b>	<b>45.193.400</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Organisasi : 2.14.2.08.0.00.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.050.000	147.545.600	27.495.600		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	120.050.000	147.545.600	27.495.600		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	120.050.000	147.545.600	27.495.600	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	7.699.400	7.699.400		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	7.699.400	7.699.400		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.699.400	7.699.400	
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	9.998.400	9.998.400		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.998.400	9.998.400		
2	14	2.14.2.08.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.998.400	9.998.400	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>11.556.111.235</b>	<b>11.839.736.582</b>	<b>283.625.347</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(11.556.111.235)</b>	<b>(11.839.736.582)</b>	<b>(283.625.347)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.14.2.08.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>458.000.000</b>	<b>478.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	458.000.000	478.000.000	20.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>458.000.000</b>	<b>478.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
0	00	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>4.914.272.688</b>	<b>6.005.759.054</b>	<b>1.091.486.366</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>305.840.800</b>	<b>984.884.400</b>	<b>679.043.600</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>124.999.800</b>	<b>124.999.800</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	124.999.800	124.999.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	63.754.800	63.754.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	63.754.800	63.754.800	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2			BELANJA MODAL	0	61.245.000	61.245.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	61.045.000	61.045.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	200.000	200.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00					<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>16.049.600</b>	<b>16.049.600</b>	<b>0</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03					Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	16.049.600	16.049.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1			BELANJA OPERASI	16.049.600	16.049.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	16.049.600	16.049.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	00					<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>59.918.600</b>	<b>311.198.600</b>	<b>251.280.000</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	251.280.000	251.280.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	251.280.000	251.280.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	251.280.000	251.280.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	18.418.600	18.418.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	BELANJA OPERASI	18.418.600	18.418.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.418.600	18.418.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.500.000	37.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1	BELANJA OPERASI	37.500.000	37.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000	37.500.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000	4.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>197.644.800</b>	<b>457.151.800</b>	<b>259.507.000</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	197.644.800	337.062.800	139.418.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	197.644.800	337.062.800	139.418.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	197.644.800	337.062.800	139.418.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	120.089.000	120.089.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	120.089.000	120.089.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	120.089.000	120.089.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	00			<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.227.800</b>	<b>75.484.600</b>	<b>43.256.800</b>		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	32.227.800	75.484.600	43.256.800		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5	1	BELANJA OPERASI	32.227.800	74.789.400	42.561.600		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	32.227.800	74.789.400	42.561.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5	2		BELANJA MODAL	0	695.200	695.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.14	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	695.200	695.200	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>14.629.900</b>	<b>14.629.900</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.13</b>	<b>00</b>				<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>14.629.900</b>	<b>14.629.900</b>	<b>0</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900	14.629.900	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	1		BELANJA OPERASI	14.629.900	14.629.900	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.629.900	14.629.900	0	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.593.801.988</b>	<b>5.006.244.754</b>	<b>412.442.766</b>	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.499.200</b>	<b>27.497.300</b>	<b>4.998.100</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.400	14.999.400	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.999.400	14.999.400	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.400	14.999.400	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	4.998.100	4.998.100	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.998.100	4.998.100	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.998.100	4.998.100	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.800	7.499.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	7.499.800	7.499.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.800	7.499.800	0	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.253.896.688</b>	<b>3.333.642.254</b>	<b>79.745.566</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.206.797.188	3.286.542.754	79.745.566	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.206.797.188	3.286.542.754	79.745.566	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	3.206.797.188	3.286.542.754	79.745.566	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.099.600	42.099.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	42.099.600	42.099.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	42.099.600	42.099.600	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.999.900	4.999.900	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.900	4.999.900	0	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>114.913.000</b>	<b>114.913.000</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	50.000.000	50.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	50.000.000	50.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	50.000.000	50.000.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	64.913.000	64.913.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5 1	BELANJA OPERASI	0	64.913.000	64.913.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	64.913.000	64.913.000	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>321.637.600</b>	<b>375.419.200</b>	<b>53.781.600</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.293.000	6.293.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	6.293.000	6.293.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.293.000	6.293.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.756.400	18.756.400	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	18.756.400	18.756.400	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.756.400	18.756.400	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.500	4.997.500	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	4.997.500	4.997.500	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.500	4.997.500	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.452.900	14.459.500	6.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	14.452.900	14.459.500	6.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.452.900	14.459.500	6.600	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.005.800	12.005.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	12.005.800	12.005.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.005.800	12.005.800	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.132.000	318.907.000	53.775.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	265.132.000	318.907.000	53.775.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	265.132.000	318.907.000	53.775.000	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>491.000.000</b>	<b>491.000.000</b>	<b>0</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	475.000.000	475.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2	BELANJA MODAL	475.000.000	475.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.000.000	475.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	16.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	16.000.000	16.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000	16.000.000	0	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>376.648.200</b>	<b>384.599.500</b>	<b>7.951.300</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.342.600	43.293.900	1.951.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	41.342.600	43.293.900	1.951.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.342.600	43.293.900	1.951.300	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.305.600	340.305.600	6.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	334.305.600	340.305.600	6.000.000	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	334.305.600	340.305.600	6.000.000	
<b>2</b>	<b>15</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>128.120.300</b>	<b>279.173.500</b>	<b>151.053.200</b>	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.450.300	274.503.500	151.053.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	123.450.300	274.503.500	151.053.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.450.300	274.503.500	151.053.200	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000	4.670.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.670.000	4.670.000	0	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000	4.670.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>4.914.272.688</b>	<b>6.005.759.054</b>	<b>1.091.486.366</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(4.456.272.688)</b>	<b>(5.527.759.054)</b>	<b>(1.071.486.366)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>580.000.000</b>	<b>580.000.000</b>	<b>0</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	580.000.000	580.000.000	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>									<b>580.000.000</b>	<b>580.000.000</b>	<b>0</b>	
0	00	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>				
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	00	0.00	00			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.175.629.200</b>	<b>9.390.865.065</b>	<b>1.215.235.865</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	0.00	00			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>670.248.700</b>	<b>1.603.458.700</b>	<b>933.210.000</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	00			<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>670.248.700</b>	<b>1.603.458.700</b>	<b>933.210.000</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.009.800	282.269.800	272.260.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	10.009.800	282.269.800	272.260.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.009.800	282.269.800	272.260.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.000.000	974.000.000	474.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	500.000.000	974.000.000	474.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	974.000.000	474.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06			Pelayanan Informasi Publik	99.999.900	99.999.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	99.999.900	99.999.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900	99.999.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	60.239.000	97.189.000	36.950.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	60.239.000	97.189.000	36.950.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.239.000	97.189.000	36.950.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	150.000.000	150.000.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	0	150.000.000	150.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	12	5	1	02	0	150.000.000	150.000.000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>287.700.000</b>	<b>620.371.100</b>	<b>332.671.100</b>	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>287.700.000</b>	<b>620.371.100</b>	<b>332.671.100</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	251.600.000	602.371.700	350.771.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	251.600.000	602.371.700	350.771.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	0	4.340.000	4.340.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	251.600.000	598.031.700	346.431.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	11			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	36.100.000	17.999.400	(18.100.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	36.100.000	17.999.400	(18.100.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	11	5	1	02	36.100.000	17.999.400	(18.100.600)	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.217.680.500</b>	<b>7.167.035.265</b>	<b>(50.645.235)</b>	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.498.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>(3.498.000)</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	4.000.000	4.000.000	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.498.000	0	(3.498.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	3.498.000	0	(3.498.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	3.498.000	0	(3.498.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.602.746.600</b>	<b>2.466.155.265</b>	<b>(136.591.335)</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.598.700	2.420.758.965	(145.839.735)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5 1 BELANJA OPERASI	2.566.598.700	2.420.758.965	(145.839.735)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	01	5 1 01 Belanja Pegawai	2.566.598.700	2.420.758.965	(145.839.735)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.148.000	41.396.400	9.248.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03	5 1 BELANJA OPERASI	32.148.000	41.396.400	9.248.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	03	5 1 01 Belanja Pegawai	32.148.000	41.396.400	9.248.400	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.900	3.999.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	5 1 BELANJA OPERASI	3.999.900	3.999.900	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.02	05	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	3.999.900	3.999.900	0	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>64.992.400</b>	<b>80.117.400</b>	<b>15.125.000</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	64.992.400	80.117.400	15.125.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07	5 1 BELANJA OPERASI	64.992.400	80.117.400	15.125.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.04	07	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	64.992.400	80.117.400	15.125.000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>52.130.000</b>	<b>52.130.000</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	52.130.000	52.130.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	02	5 1 BELANJA OPERASI	0	25.130.000	25.130.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	02	5 1 02 Belanja Barang dan Jasa	0	25.130.000	25.130.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	02	5 2 BELANJA MODAL	0	27.000.000	27.000.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.05	02	5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	27.000.000	27.000.000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>201.704.500</b>	<b>263.578.200</b>	<b>61.873.700</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.000	9.974.200	(10.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.985.000	9.974.200	(10.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.985.000	9.974.200	(10.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.732.900	24.310.500	(132.422.400)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	680.000	24.310.500	23.630.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1 01	Belanja Pegawai	680.000	0	(680.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	24.310.500	24.310.500	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	156.052.900	0	(156.052.900)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.052.900	0	(156.052.900)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	6.999.700	6.999.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.999.700	6.999.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.999.700	6.999.700	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.986.600	34.986.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	34.986.600	34.986.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.986.600	34.986.600	0	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	11.270.200	11.270.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	11.270.200	11.270.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.270.200	11.270.200	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	26.040.000	26.040.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	26.040.000	26.040.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	26.040.000	26.040.000	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	149.997.000	149.997.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	149.997.000	149.997.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	149.997.000	149.997.000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.988.800</b>	<b>463.619.600</b>	<b>454.630.800</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	460.519.600	460.519.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	8.500.000	8.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.500.000	8.500.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	0	452.019.600	452.019.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	452.019.600	452.019.600	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	11			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.988.800	3.100.000	(5.888.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	11	5	1	BELANJA OPERASI	8.988.800	1.900.000	(7.088.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.988.800	1.900.000	(7.088.800)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	11	5	2	BELANJA MODAL	0	1.200.000	1.200.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.07	11	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.200.000	1.200.000	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.248.574.000</b>	<b>3.756.034.600</b>	<b>(492.539.400)</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.997.600	8.012.000	(16.985.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	24.997.600	8.012.000	(16.985.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.997.600	8.012.000	(16.985.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.863.581.500	3.570.993.500	(292.588.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.863.581.500	3.570.993.500	(292.588.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.270.000	1.270.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.862.311.500	3.569.723.500	(292.588.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.100	9.007.900	(10.991.200)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03	5	1		BELANJA OPERASI	19.999.100	9.007.900	(10.991.200)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.100	9.007.900	(10.991.200)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.995.800	168.021.200	(171.974.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	339.995.800	168.021.200	(171.974.600)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	339.995.800	168.021.200	(171.974.600)	
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.176.200</b>	<b>81.400.200</b>	<b>(1.776.000)</b>	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.992.200	73.506.200	(6.486.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	79.992.200	73.506.200	(6.486.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.992.200	73.506.200	(6.486.000)	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.184.000	7.894.000	4.710.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.184.000	7.894.000	4.710.000	
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.000	7.894.000	4.710.000	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>195.976.000</b>	<b>198.473.000</b>	<b>2.497.000</b>	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>195.976.000</b>	<b>198.473.000</b>	<b>2.497.000</b>	
<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>195.976.000</b>	<b>198.473.000</b>	<b>2.497.000</b>	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	195.976.000	198.473.000	2.497.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	195.976.000	198.473.000	2.497.000	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	195.976.000	198.473.000	2.497.000	
<b>Jumlah Belanja</b>										<b>8.371.605.200</b>	<b>9.589.338.065</b>	<b>1.217.732.865</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>										<b>(7.791.605.200)</b>	<b>(9.009.338.065)</b>	<b>(1.217.732.865)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.16.2.20.2.21.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	0	0	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	4 1 02	Retribusi Daerah	0	0	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	0	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0	00	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>				
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	4.290.092.006	1.117.277.195	(3.172.814.811)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	0.00	00		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	496.658.000	114.948.450	(381.709.550)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	00		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	496.658.000	114.948.450	(381.709.550)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	496.658.000	114.948.450	(381.709.550)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	01	5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	496.658.000	114.948.450	(381.709.550)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	496.658.000	114.948.450	(381.709.550)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	0.00	00		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	250.608.700	0	(250.608.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	00		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	250.608.700	0	(250.608.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	250.608.700	0	(250.608.700)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	250.608.700	0	(250.608.700)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.608.700	0	(250.608.700)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(150.000.000)</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(150.000.000)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	0	(150.000.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	150.000.000	0	(150.000.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	06	2.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	150.000.000	0	(150.000.000)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>235.560.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>(225.560.600)</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>235.560.600</b>	<b>10.000.000</b>	<b>(225.560.600)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	01			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	44.153.000	0	(44.153.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	44.153.000	0	(44.153.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.153.000	0	(44.153.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	03			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	169.997.600	0	(169.997.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	169.997.600	0	(169.997.600)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	169.997.600	0	(169.997.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	21.410.000	10.000.000	(11.410.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	21.410.000	10.000.000	(11.410.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	07	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.410.000	10.000.000	(11.410.000)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>08</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>817.751.900</b>	<b>202.585.000</b>	<b>(615.166.900)</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>08</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>817.751.900</b>	<b>202.585.000</b>	<b>(615.166.900)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	08	2.01	01				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	817.751.900	202.585.000	(615.166.900)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	08	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	817.751.900	202.585.000	(615.166.900)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	08	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.570.000	0	(2.570.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	08	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	815.181.900	202.585.000	(612.596.900)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.339.512.806</b>	<b>789.743.745</b>	<b>(1.549.769.061)</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>18.904.900</b>	<b>12.334.900</b>	<b>(6.570.000)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.764.900	5.764.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.764.900	5.764.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.764.900	5.764.900	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.140.000	6.570.000	(6.570.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	13.140.000	6.570.000	(6.570.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000	6.570.000	(6.570.000)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.074.670.706</b>	<b>654.728.845</b>	<b>(1.419.941.861)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.588.206	633.009.945	(1.404.578.261)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.037.588.206	633.009.945	(1.404.578.261)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.037.588.206	633.009.945	(1.404.578.261)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.727.200	15.363.600	(15.363.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.727.200	15.363.600	(15.363.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	30.727.200	15.363.600	(15.363.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.355.300	6.355.300	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	6.355.300	6.355.300	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.355.300	6.355.300	0	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128.260.800</b>	<b>67.510.200</b>	<b>(60.750.600)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.855.900	1.529.300	(1.326.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.855.900	1.529.300	(1.326.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.855.900	1.529.300	(1.326.600)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.601.700	13.177.600	(11.424.100)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	24.601.700	13.177.600	(11.424.100)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.601.700	13.177.600	(11.424.100)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.135.900	2.104.000	(2.031.900)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.135.900	2.104.000	(2.031.900)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.135.900	2.104.000	(2.031.900)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.521.300	7.119.300	(6.402.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	13.521.300	7.119.300	(6.402.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.521.300	7.119.300	(6.402.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.440.000	0	(1.440.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	1.440.000	0	(1.440.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000	0	(1.440.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.706.000	43.580.000	(38.126.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	81.706.000	43.580.000	(38.126.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.706.000	43.580.000	(38.126.000)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.740.800</b>	<b>29.517.000</b>	<b>(49.223.800)</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	600.000	(600.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.200.000	600.000	(600.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000	600.000	(600.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.044.000	10.917.000	(12.127.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	23.044.000	10.917.000	(12.127.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.044.000	10.917.000	(12.127.000)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	18.000.000	(36.496.800)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	18.000.000	(36.496.800)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	18.000.000	(36.496.800)	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>38.935.600</b>	<b>25.652.800</b>	<b>(13.282.800)</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.565.600	16.282.800	(13.282.800)		
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	29.565.600	16.282.800	(13.282.800)		
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.565.600	16.282.800	(13.282.800)	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.370.000	9.370.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	9.370.000	9.370.000	0	
2	17	2.17.3.30.3.31.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.370.000	9.370.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>4.290.092.006</b>	<b>1.117.277.195</b>	<b>(3.172.814.811)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(4.290.092.006)</b>	<b>(1.117.277.195)</b>	<b>3.172.814.811</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.17.3.30.3.31.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	0	1.900.000.000	1.900.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	4 1 02	Retribusi Daerah	0	1.860.000.000	1.860.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	40.000.000	40.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>0</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>1.900.000.000</b>	
0	00	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>				
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	00	0.00	00		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	0	6.438.575.103	6.438.575.103	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	0.00	00		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	0	360.709.550	360.709.550	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	00		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	0	360.709.550	360.709.550	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	360.709.550	360.709.550	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0	360.709.550	360.709.550	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	360.709.550	360.709.550	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	0.00	00		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	0	315.563.900	315.563.900	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	00		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	0	315.563.900	315.563.900	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0	315.563.900	315.563.900	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	315.563.900	315.563.900	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	05	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	315.563.900	315.563.900	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	06	2.01	01			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	150.000.000	150.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	150.000.000	150.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	06	2.01	01	5	1 05	Belanja Hibah	0	150.000.000	150.000.000	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>07</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>0</b>	<b>225.560.600</b>	<b>225.560.600</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>0</b>	<b>225.560.600</b>	<b>225.560.600</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	44.153.000	44.153.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	44.153.000	44.153.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	44.153.000	44.153.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	169.997.600	169.997.600	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	169.997.600	169.997.600	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	169.997.600	169.997.600	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	11.410.000	11.410.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	11.410.000	11.410.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.410.000	11.410.000	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>08</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>0</b>	<b>782.421.700</b>	<b>782.421.700</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>08</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>0</b>	<b>782.421.700</b>	<b>782.421.700</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0	782.421.700	782.421.700	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	782.421.700	782.421.700	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	2.570.000	2.570.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	08	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	779.851.700	779.851.700	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>0</b>	<b>4.604.319.353</b>	<b>4.604.319.353</b>	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>40.123.586</b>	<b>40.123.586</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	40.123.586	40.123.586	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	40.123.586	40.123.586	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	40.123.586	40.123.586	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>3.558.664.261</b>	<b>3.558.664.261</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	3.524.618.661	3.524.618.661	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	3.524.618.661	3.524.618.661	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	3.524.618.661	3.524.618.661	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	34.045.600	34.045.600	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	34.045.600	34.045.600	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	0	34.045.600	34.045.600	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>292.440.037</b>	<b>292.440.037</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	7.504.996	7.504.996	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	7.504.996	7.504.996	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.504.996	7.504.996	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	37.290.695	37.290.695	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	37.290.695	37.290.695	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	37.290.695	37.290.695	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	6.394.400	6.394.400	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	6.394.400	6.394.400	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.394.400	6.394.400	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	50.351.326	50.351.326	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	50.351.326	50.351.326	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	50.351.326	50.351.326	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	190.898.620	190.898.620	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	190.898.620	190.898.620	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	190.898.620	190.898.620	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>659.456.300</b>	<b>659.456.300</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	1.400.000	1.400.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	0	1.400.000	1.400.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.400.000	1.400.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	6.607.500	6.607.500	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	0	6.607.500	6.607.500	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.607.500	6.607.500	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	651.448.800	651.448.800	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	0	651.448.800	651.448.800	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	651.448.800	651.448.800	
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>53.635.169</b>	<b>53.635.169</b>	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	16.635.169	16.635.169	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	0	16.635.169	16.635.169	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	16.635.169	16.635.169	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12.000.000	12.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	12.000.000	12.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	12.000.000	12.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	25.000.000	25.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	0	25.000.000	25.000.000	
2	17	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.000.000	25.000.000	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>0</b>	<b>1.165.122.483</b>	<b>1.165.122.483</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	0.00	00	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	0	730.989.300	730.989.300		
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	00	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	0	700.051.500	700.051.500		
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	600.051.500	600.051.500		
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	0	2.881.500	2.881.500	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.881.500	2.881.500	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5 2	BELANJA MODAL	0	597.170.000	597.170.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	01	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	597.170.000	597.170.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	100.000.000	100.000.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	0	97.858.000	97.858.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	97.858.000	97.858.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	0	2.142.000	2.142.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.01	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2.142.000	2.142.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.02	00		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	0	30.937.800	30.937.800	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	30.937.800	30.937.800	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	0	30.937.800	30.937.800	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	03	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	30.937.800	30.937.800	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	0.00	00	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	0	90.084.500	90.084.500		
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	00		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	0	80.801.400	80.801.400	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	80.801.400	80.801.400	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	0	80.801.400	80.801.400	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	80.801.400	80.801.400	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>9.283.100</b>	<b>9.283.100</b>	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	9.283.100	9.283.100	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	0	9.283.100	9.283.100	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	04	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.283.100	9.283.100	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>07</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>0</b>	<b>175.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>0</b>	<b>175.000.000</b>	<b>175.000.000</b>	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	175.000.000	175.000.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	0	175.000.000	175.000.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	07	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	175.000.000	175.000.000	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>0</b>	<b>169.048.683</b>	<b>169.048.683</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>7.999.600</b>	<b>7.999.600</b>	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	7.999.600	7.999.600	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	0	7.999.600	7.999.600	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.999.600	7.999.600	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>47.923.983</b>	<b>47.923.983</b>	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	09				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	8.216.000	8.216.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	8.216.000	8.216.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.216.000	8.216.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	39.707.983	39.707.983	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	39.707.983	39.707.983	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.05	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	39.707.983	39.707.983	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>113.125.100</b>	<b>113.125.100</b>	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	113.125.100	113.125.100	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.570.000	1.570.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.570.000	1.570.000	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	0	111.555.100	111.555.100	
3	30	2.17.3.30.3.31.03.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	111.555.100	111.555.100	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>0</b>	<b>5.438.303.400</b>	<b>5.438.303.400</b>	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>0</b>	<b>5.438.303.400</b>	<b>5.438.303.400</b>	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>5.438.303.400</b>	<b>5.438.303.400</b>	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	5.438.303.400	5.438.303.400	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	5.438.303.400	5.438.303.400	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	0	3.160.000	3.160.000	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.585.143.400	4.585.143.400	
3	31	2.17.3.30.3.31.03.0000	02	2.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	0	850.000.000	850.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>0</b>	<b>13.042.000.986</b>	<b>13.042.000.986</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>0</b>	<b>(11.142.000.986)</b>	<b>(11.142.000.986)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.17.3.30.3.31.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.315.000.000</b>	<b>3.535.000.000</b>	<b>2.220.000.000</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.315.000.000	3.535.000.000	2.220.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>1.315.000.000</b>	<b>3.535.000.000</b>	<b>2.220.000.000</b>	
0	00	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>4.301.167.292</b>	<b>3.931.761.180</b>	<b>(369.406.112)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>314.309.000</b>	<b>282.475.000</b>	<b>(31.834.000)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.484.000</b>	<b>14.599.000</b>	<b>(7.885.000)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	22.484.000	14.599.000	(7.885.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	22.484.000	14.599.000	(7.885.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	22.484.000	14.599.000	(7.885.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>291.825.000</b>	<b>267.876.000</b>	<b>(23.949.000)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	248.826.000	(21.174.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	270.000.000	248.826.000	(21.174.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	270.000.000	248.826.000	(21.174.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	21.825.000	19.050.000	(2.775.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1			BELANJA OPERASI	21.825.000	19.050.000	(2.775.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	21.825.000	19.050.000	(2.775.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00		<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>53.098.500</b>	<b>34.157.500</b>	<b>(18.941.000)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>53.098.500</b>	<b>34.157.500</b>	<b>(18.941.000)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	26.765.500	23.065.500	(3.700.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	26.765.500	23.065.500	(3.700.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.765.500	23.065.500	(3.700.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	26.333.000	11.092.000	(15.241.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	26.333.000	11.092.000	(15.241.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.333.000	11.092.000	(15.241.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>117.595.800</b>	<b>117.483.200</b>	<b>(112.600)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>117.595.800</b>	<b>117.483.200</b>	<b>(112.600)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103.636.100	108.635.900	4.999.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	103.636.100	108.635.900	4.999.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	103.636.100	108.635.900	4.999.800	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13.959.700	8.847.300	(5.112.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	13.959.700	8.847.300	(5.112.400)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.959.700	8.847.300	(5.112.400)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>407.613.000</b>	<b>407.613.000</b>	<b>0</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>407.613.000</b>	<b>407.613.000</b>	<b>0</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120.791.000	0	(120.791.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	120.791.000	0	(120.791.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.791.000	0	(120.791.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	190.222.000	366.461.000	176.239.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	190.222.000	366.461.000	176.239.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	190.222.000	366.461.000	176.239.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000	41.152.000	(55.448.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	96.600.000	41.152.000	(55.448.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000	41.152.000	(55.448.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>84.720.500</b>	<b>84.720.500</b>	<b>0</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84.720.500</b>	<b>84.720.500</b>	<b>0</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84.720.500	84.720.500	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	84.720.500	84.720.500	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.720.500	84.720.500	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.323.830.492</b>	<b>3.005.311.980</b>	<b>(318.518.512)</b>			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.000.200</b>	<b>3.000.200</b>	<b>0</b>			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.200	3.000.200	0			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.200	3.000.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.200	3.000.200	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.444.002.892</b>	<b>2.124.596.780</b>	<b>(319.406.112)</b>			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.397.272.192	2.077.866.080	(319.406.112)			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.397.272.192	2.077.866.080	(319.406.112)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.397.272.192	2.077.866.080	(319.406.112)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.730.600	43.730.600	0			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	43.730.600	43.730.600	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	39.087.600	39.087.600	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.643.000	4.643.000	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.100	3.000.100	0			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.100	3.000.100	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.100	3.000.100	0
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	00	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>269.542.700</b>	<b>296.231.100</b>	<b>26.688.400</b>			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.442.000	5.442.000	0			
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.442.000	5.442.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.442.000	5.442.000	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.260.200	57.260.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	57.260.200	57.260.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.260.200	57.260.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.400	15.000.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	15.000.400	15.000.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.400	15.000.400	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.540.100	20.168.500	(5.371.600)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	25.540.100	20.168.500	(5.371.600)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.540.100	20.168.500	(5.371.600)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.300.000	198.360.000	32.060.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	166.300.000	198.360.000	32.060.000	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.300.000	198.360.000	32.060.000	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>333.575.900</b>	<b>333.575.900</b>	<b>0</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	51.082.200	51.082.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2	BELANJA MODAL	51.082.200	51.082.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.082.200	51.082.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.648.700	167.648.700	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	167.648.700	167.648.700	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.648.700	167.648.700	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.845.000	114.845.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	114.845.000	114.845.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.845.000	114.845.000	0	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>158.223.000</b>	<b>156.214.300</b>	<b>(2.008.700)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.063.800	45.055.100	(2.008.700)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	47.063.800	45.055.100	(2.008.700)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.063.800	45.055.100	(2.008.700)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.159.200	109.159.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	109.159.200	109.159.200	0	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	109.159.200	109.159.200	0	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>115.485.800</b>	<b>91.693.700</b>	<b>(23.792.100)</b>	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.825.700	59.825.700	(13.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	72.825.700	59.825.700	(13.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.825.700	59.825.700	(13.000.000)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	7.557.600	2.557.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	5.000.000	7.557.600	2.557.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	7.557.600	2.557.600	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.916.200	22.910.400	(5.800)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	19.297.100	22.910.400	3.613.300	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.297.100	22.910.400	3.613.300	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	3.619.100	0	(3.619.100)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.619.100	0	(3.619.100)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.743.900	1.400.000	(13.343.900)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	14.743.900	1.400.000	(13.343.900)	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.743.900	1.400.000	(13.343.900)	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>4.301.167.292</b>	<b>3.931.761.180</b>	<b>(369.406.112)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(2.986.167.292)</b>	<b>(396.761.180)</b>	<b>2.589.406.112</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>76.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	76.000.000	76.000.000	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>76.000.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	
0	00	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>4.842.834.418</b>	<b>5.940.346.348</b>	<b>1.097.511.930</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>307.750.600</b>	<b>497.750.600</b>	<b>190.000.000</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>257.750.600</b>	<b>447.750.600</b>	<b>190.000.000</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	0	90.000.000	90.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	0	90.000.000	90.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	90.000.000	90.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	257.750.600	357.750.600	100.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	257.750.600	355.650.600	97.900.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	257.750.600	355.650.600	97.900.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	0	2.100.000	2.100.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2.100.000	2.100.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>0</b>			
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	0			
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	50.000.000	0		
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	0.00	00				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>1.457.196.222</b>	<b>2.372.196.022</b>	<b>914.999.800</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	00				<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>617.196.222</b>	<b>717.196.022</b>	<b>99.999.800</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	617.196.222	717.196.022	99.999.800	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	108.438.300	208.438.100	99.999.800	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	01	Belanja Pegawai	7.240.000	8.810.000	1.570.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	101.198.300	199.628.100	98.429.800	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	508.757.922	508.757.922	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	508.757.922	508.757.922	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	00				<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>840.000.000</b>	<b>1.655.000.000</b>	<b>815.000.000</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02				Pengembangan Organisasi Keolahragaan	840.000.000	1.655.000.000	815.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1		BELANJA OPERASI	840.000.000	1.655.000.000	815.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	02	5	1	05	Belanja Hibah	840.000.000	1.655.000.000	815.000.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.077.887.596</b>	<b>3.070.399.726</b>	<b>(7.487.870)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.754.800</b>	<b>39.754.800</b>	<b>0</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.755.000	33.755.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	33.755.000	33.755.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.755.000	33.755.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.800	5.999.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	5.999.800	5.999.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.800	5.999.800	0	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.366.695.196</b>	<b>2.367.382.226</b>	<b>687.030</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.310.108.196	2.310.795.226	687.030	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.310.108.196	2.310.795.226	687.030	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	2.310.108.196	2.310.795.226	687.030	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.587.200	50.587.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	50.587.200	50.587.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	50.587.200	50.587.200	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.800	5.999.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	5.999.800	5.999.800	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.999.800	5.999.800	0	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>293.225.800</b>	<b>313.216.800</b>	<b>19.991.000</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.982.100	19.982.100	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.00.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	19.982.100	19.982.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.982.100	19.982.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.989.000	27.989.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	27.989.000	27.989.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.989.000	27.989.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.371.600	18.371.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	18.371.600	18.371.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.371.600	18.371.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.313.100	19.313.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	19.313.100	19.313.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.313.100	19.313.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.996.000	19.996.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.996.000	19.996.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.996.000	19.996.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.574.000	207.565.000	19.991.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	187.574.000	207.565.000	19.991.000	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.574.000	207.565.000	19.991.000	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	25.000.000	25.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>197.325.100</b>	<b>169.159.200</b>	<b>(28.165.900)</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.300	40.000.000	(10.000.300)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	50.000.300	40.000.000	(10.000.300)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.300	40.000.000	(10.000.300)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.324.800	127.159.200	(18.165.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	145.324.800	127.159.200	(18.165.600)	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	145.324.800	127.159.200	(18.165.600)	
<b>2</b>	<b>19</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>155.886.700</b>	<b>155.886.700</b>	<b>0</b>	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.235.600	40.235.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	40.235.600	40.235.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.235.600	40.235.600	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.680.000	11.680.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	11.680.000	11.680.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000	11.680.000	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.971.100	103.971.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	98.259.100	98.259.100	0	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.259.100	98.259.100	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	5.712.000	5.712.000	0		
2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.712.000	5.712.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>4.842.834.418</b>	<b>5.940.346.348</b>	<b>1.097.511.930</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(4.766.834.418)</b>	<b>(5.864.346.348)</b>	<b>(1.097.511.930)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.19.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>3.813.326.950</b>	<b>3.434.346.610</b>	<b>(378.980.340)</b>	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>607.245.100</b>	<b>647.147.500</b>	<b>39.902.400</b>	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>607.245.100</b>	<b>647.147.500</b>	<b>39.902.400</b>	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	22.800.000	61.492.400	38.692.400	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	22.800.000	11.492.400	(11.307.600)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000	11.492.400	(11.307.600)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA MODAL	0	50.000.000	50.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	514.449.100	514.449.100	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	194.736.500	194.736.500	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	194.736.500	194.736.500	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA MODAL	319.712.600	319.712.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	319.712.600	319.712.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	69.996.000	71.206.000	1.210.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	BELANJA OPERASI	9.996.000	11.206.000	1.210.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	Belanja Barang dan Jasa	9.996.000	9.996.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	BELANJA MODAL	60.000.000	60.000.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	60.000.000	60.000.000	0	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.206.081.850</b>	<b>2.787.199.110</b>	<b>(418.882.740)</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.450.800</b>	<b>15.450.800</b>	<b>0</b>			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.950.000	4.950.000	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	4.950.000	4.950.000	0			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000	4.950.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	1.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	1.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	1.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.800.000	1.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000	1.800.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.900.800	6.900.800	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.900.800	6.900.800	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.900.800	6.900.800	0	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.687.452.700</b>	<b>2.387.990.060</b>	<b>(299.462.640)</b>			
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.648.440.200	2.348.977.560	(299.462.640)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.648.440.200	2.348.977.560	(299.462.640)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.648.440.200	2.348.977.560	(299.462.640)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.859.600	32.859.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	32.859.600	32.859.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	32.859.600	32.859.600	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.152.900	6.152.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	6.152.900	6.152.900	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.152.900	6.152.900	0	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>127.275.300</b>	<b>132.484.700</b>	<b>5.209.400</b>	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.548.200	2.548.200	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.548.200	2.548.200	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.548.200	2.548.200	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.046.500	28.904.200	2.857.700	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	26.046.500	28.904.200	2.857.700	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.046.500	28.904.200	2.857.700	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.960.700	10.085.200	(875.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	10.960.700	10.085.200	(875.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.960.700	10.085.200	(875.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.041.900	14.396.900	2.355.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	12.041.900	14.396.900	2.355.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.041.900	14.396.900	2.355.000	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.575.000	3.450.500	875.500	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.575.000	3.450.500	875.500	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000	3.450.500	875.500	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.103.000	73.099.700	(3.300)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	73.103.000	73.099.700	(3.300)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.103.000	73.099.700	(3.300)	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>118.210.000</b>	<b>0</b>	<b>(118.210.000)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.210.000	0	(100.210.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.570.000	0	(1.570.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	1 01	Belanja Pegawai	1.570.000	0	(1.570.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2	BELANJA MODAL	98.640.000	0	(98.640.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.640.000	0	(98.640.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	0	(18.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	18.000.000	0	(18.000.000)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000	0	(18.000.000)	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>226.272.000</b>	<b>219.852.500</b>	<b>(6.419.500)</b>	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.500.000	2.500.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.916.000	10.496.500	(6.419.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	16.916.000	10.496.500	(6.419.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.916.000	10.496.500	(6.419.500)	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.856.000	206.856.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	206.856.000	206.856.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	206.856.000	206.856.000	0	
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.421.050</b>	<b>31.421.050</b>	<b>0</b>	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.288.150	28.288.150	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	28.288.150	28.288.150	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 DINAS PERPUSTAKAAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.288.150	28.288.150	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	05				Pemeliharaan Mebel	751.900	751.900	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1		BELANJA OPERASI	751.900	751.900	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	751.900	751.900	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.381.000	2.381.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.381.000	2.381.000	0	
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.381.000	2.381.000	0	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>86.716.000</b>	<b>16.233.600</b>	<b>(70.482.400)</b>	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>86.716.000</b>	<b>16.233.600</b>	<b>(70.482.400)</b>	
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>86.716.000</b>	<b>16.233.600</b>	<b>(70.482.400)</b>	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	86.716.000	16.233.600	(70.482.400)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	86.716.000	16.233.600	(70.482.400)	
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.716.000	16.233.600	(70.482.400)	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>3.900.042.950</b>	<b>3.450.580.210</b>	<b>(449.462.740)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(3.900.042.950)</b>	<b>(3.450.580.210)</b>	<b>449.462.740</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>2.23.2.24.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH				
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000	600.000.000	200.000.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	400.000.000	600.000.000	200.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>400.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	
0	00	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA				
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.159.061.475	8.695.670.824	(1.463.390.651)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.811.655.100	2.616.574.100	(2.195.081.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.601.100.000	1.147.387.300	(2.453.712.700)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04					Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.601.100.000	1.147.387.300	(2.453.712.700)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1			BELANJA OPERASI	431.600.000	229.887.300	(201.712.700)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	01		Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	431.600.000	228.677.300	(202.922.700)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2			BELANJA MODAL	3.169.500.000	917.500.000	(2.252.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	447.500.000	172.500.000	(275.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.722.000.000	745.000.000	(1.977.000.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	00					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.210.555.100	1.469.186.800	258.631.700	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02					Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	310.778.100	569.409.800	258.631.700	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1			BELANJA OPERASI	305.978.100	569.409.800	263.431.700	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	305.978.100	569.409.800	263.431.700	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2			BELANJA MODAL	4.800.000	0	(4.800.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.800.000	0	(4.800.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	899.777.000	899.777.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	769.304.500	887.777.000	118.472.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	769.304.500	887.777.000	118.472.500	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	2		BELANJA MODAL	130.472.500	12.000.000	(118.472.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.472.500	12.000.000	(118.472.500)	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>818.912.675</b>	<b>1.268.111.181</b>	<b>449.198.506</b>	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>818.912.675</b>	<b>1.268.111.181</b>	<b>449.198.506</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01				Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	453.912.900	783.111.501	329.198.601	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	259.196.800	783.111.501	523.914.701	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	259.196.800	783.111.501	523.914.701	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2		BELANJA MODAL	194.716.100	0	(194.716.100)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.716.100	0	(194.716.100)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02				Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	299.999.900	419.999.805	119.999.905	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	299.999.900	419.999.805	119.999.905	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	299.999.900	419.999.805	119.999.905	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	64.999.875	64.999.875	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	64.999.875	64.999.875	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.999.875	64.999.875	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>363.350.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>(53.350.000)</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>363.350.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>(53.350.000)</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	363.350.000	310.000.000	(53.350.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	363.350.000	310.000.000	(53.350.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	363.350.000	310.000.000	(53.350.000)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.165.143.700</b>	<b>4.500.985.543</b>	<b>335.841.843</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.137.000</b>	<b>24.278.600</b>	<b>3.141.600</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.971.900	10.113.500	3.141.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	6.971.900	10.113.500	3.141.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.971.900	10.113.500	3.141.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.194.200	7.194.200	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	7.194.200	7.194.200	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.194.200	7.194.200	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.970.900	6.970.900	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	6.970.900	6.970.900	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.970.900	6.970.900	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.345.839.800</b>	<b>3.468.502.643</b>	<b>122.662.843</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.279.014.100	3.397.190.143	118.176.043	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.279.014.100	3.397.190.143	118.176.043	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	3.279.014.100	3.397.190.143	118.176.043	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.627.300	64.114.100	4.486.800	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	59.627.300	64.114.100	4.486.800	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	56.683.200	58.216.200	1.533.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.944.100	5.897.900	2.953.800	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.198.400	7.198.400	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	7.198.400	7.198.400	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.198.400	7.198.400	0	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>306.208.400</b>	<b>474.063.300</b>	<b>167.854.900</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.992.300	34.992.300	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	34.992.300	34.992.300	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.992.300	34.992.300	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.598.500	39.598.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	39.598.500	39.598.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.598.500	39.598.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.488.300	8.887.300	399.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	8.488.300	8.887.300	399.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.488.300	8.887.300	399.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.377.800	21.183.700	8.805.900	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	12.377.800	21.183.700	8.805.900	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.377.800	21.183.700	8.805.900	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	20.161.500	20.161.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	20.161.500	20.161.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.161.500	20.161.500	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.590.000	349.240.000	158.650.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	190.590.000	349.240.000	158.650.000	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	190.590.000	349.240.000	158.650.000	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>18.000.000</b>	<b>36.301.400</b>	<b>18.301.400</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	36.301.400	18.301.400	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	18.000.000	36.301.400	18.301.400	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000	36.301.400	18.301.400	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>415.223.200</b>	<b>439.104.300</b>	<b>23.881.100</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.990.000	3.990.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.990.000	3.990.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000	3.990.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.998.600	49.799.100	(10.199.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	59.998.600	49.799.100	(10.199.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.998.600	49.799.100	(10.199.500)	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.234.600	385.315.200	34.080.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	351.234.600	385.315.200	34.080.600	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	351.234.600	385.315.200	34.080.600	
<b>3</b>	<b>26</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>58.735.300</b>	<b>58.735.300</b>	<b>0</b>	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.544.800	41.544.800	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	41.544.800	41.544.800	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.544.800	41.544.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  
Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01 DINAS PARIWISATA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.191.500	10.191.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1			BELANJA OPERASI	10.191.500	10.191.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	10.191.500	10.191.500	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.999.000	6.999.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1			BELANJA OPERASI	6.999.000	6.999.000	0	
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	6.999.000	6.999.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>10.159.061.475</b>	<b>8.695.670.824</b>	<b>(1.463.390.651)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(9.759.061.475)</b>	<b>(8.095.670.824)</b>	<b>1.663.390.651</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>450.000.000</b>	<b>325.000.000</b>	<b>(125.000.000)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 02	Retribusi Daerah	350.000.000	225.000.000	(125.000.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	100.000.000	100.000.000	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>450.000.000</b>	<b>325.000.000</b>	<b>(125.000.000)</b>	
0	00	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>				
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>29.275.765.906</b>	<b>35.969.648.044</b>	<b>6.693.882.138</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>6.489.944.650</b>	<b>7.109.059.850</b>	<b>619.115.200</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>4.347.453.750</b>	<b>5.601.213.850</b>	<b>1.253.760.100</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.095.928.450	5.361.228.550	1.265.300.100	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.095.928.450</b>	<b>5.361.228.550</b>	<b>1.265.300.100</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1 01	Belanja Pegawai	20.890.000	10.240.000	(10.650.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.075.038.450	5.350.988.550	1.275.950.100	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	251.525.300	239.985.300	(11.540.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>251.525.300</b>	<b>239.985.300</b>	<b>(11.540.000)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	201.525.300	189.985.300	(11.540.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1 05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00		<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.422.502.100</b>	<b>1.507.846.000</b>	<b>85.343.900</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	194.567.400	283.534.200	88.966.800	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	194.567.400	283.534.200	88.966.800		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.570.000	2.420.000	850.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	192.997.400	281.114.200	88.116.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.227.934.700	1.224.311.800	(3.622.900)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.227.097.500	1.224.311.800	(2.785.700)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	8.960.000	7.710.000	(1.250.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.218.137.500	1.216.601.800	(1.535.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2	BELANJA MODAL	837.200	0	(837.200)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	837.200	0	(837.200)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>			<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>319.999.600</b>	<b>0</b>	<b>(319.999.600)</b>		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	299.999.600	0	(299.999.600)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	BELANJA OPERASI	299.999.600	0	(299.999.600)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	299.999.600	0	(299.999.600)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	05			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.000.000	0	(20.000.000)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	05	5	1	BELANJA OPERASI	20.000.000	0	(20.000.000)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	0	(20.000.000)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>399.989.200</b>	<b>0</b>	<b>(399.989.200)</b>		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	399.989.200	0	(399.989.200)		
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	399.989.200	0	(399.989.200)		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	01	Belanja Pegawai	4.970.000	0	(4.970.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	395.019.200	0	(395.019.200)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>3.115.313.141</b>	<b>10.696.972.938</b>	<b>7.581.659.797</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.355.313.600</b>	<b>555.314.600</b>	<b>(799.999.000)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	205.314.800	205.314.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	205.314.800	205.314.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	205.314.800	205.314.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04				Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1.149.998.800	349.999.800	(799.999.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	1.149.998.800	349.999.800	(799.999.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	01	Belanja Pegawai	3.990.000	2.490.000	(1.500.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.008.800	347.509.800	(798.499.000)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>1.759.999.541</b>	<b>10.141.658.338</b>	<b>8.381.658.797</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0	1.719.090.600	1.719.090.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	1.719.090.600	1.719.090.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	20.410.000	20.410.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.698.680.600	1.698.680.600	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.759.999.541	8.422.567.738	6.662.568.197	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.759.999.541	8.422.567.738	6.662.568.197	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	17.270.000	119.320.000	102.050.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.729.541	8.303.247.738	6.560.518.197	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	0.00	00		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>449.991.900</b>	<b>0</b>	<b>(449.991.900)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	00		<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>349.999.700</b>	<b>0</b>	<b>(349.999.700)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	149.999.900	0	(149.999.900)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	149.999.900	0	(149.999.900)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5 1 01	Belanja Pegawai	1.570.000	0	(1.570.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.429.900	0	(148.429.900)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.999.800	0	(199.999.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	195.773.800	0	(195.773.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 1 01	Belanja Pegawai	1.570.000	0	(1.570.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	194.203.800	0	(194.203.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 2	BELANJA MODAL	4.226.000	0	(4.226.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.226.000	0	(4.226.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	00		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.992.200</b>	<b>0</b>	<b>(99.992.200)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	99.992.200	0	(99.992.200)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	93.769.400	0	(93.769.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.769.400	0	(93.769.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5 2	BELANJA MODAL	6.222.800	0	(6.222.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.222.800	0	(6.222.800)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	0.00	00		<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>180.000.000</b>	<b>254.999.800</b>	<b>74.999.800</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	00		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>180.000.000</b>	<b>254.999.800</b>	<b>74.999.800</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	180.000.000	254.999.800	74.999.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	180.000.000	254.999.800	74.999.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000	254.999.800	74.999.800	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	0.00	00		<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>279.999.700</b>	<b>170.987.000</b>	<b>(109.012.700)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	00		<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>279.999.700</b>	<b>170.987.000</b>	<b>(109.012.700)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	279.999.700	170.987.000	(109.012.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	279.999.700	170.987.000	(109.012.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.999.700	170.987.000	(109.012.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	0.00	00		<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>1.418.299.280</b>	<b>1.805.746.100</b>	<b>387.446.820</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	00		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>1.418.299.280</b>	<b>1.805.746.100</b>	<b>387.446.820</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.163.299.480	1.096.793.300	(66.506.180)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.163.299.480	1.096.793.300	(66.506.180)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.299.480	1.046.793.300	(66.506.180)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5 1 05	Belanja Hibah	50.000.000	50.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	55.000.000	679.200.000	624.200.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	55.000.000	679.200.000	624.200.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	01	Belanja Pegawai	0	2.650.000	2.650.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	651.550.000	621.550.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	1	05	Belanja Hibah	25.000.000	25.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	199.999.800	29.752.800	(170.247.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	183.095.800	29.752.800	(153.343.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	183.095.800	29.752.800	(153.343.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2		BELANJA MODAL	16.904.000	0	(16.904.000)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.904.000	0	(16.904.000)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>17.342.217.235</b>	<b>15.931.882.356</b>	<b>(1.410.334.879)</b>	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>7.499.900</b>	<b>7.499.900</b>	<b>0</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.900	7.499.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.499.900	7.499.900	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.499.900	7.499.900	0	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.309.677.585</b>	<b>13.131.386.006</b>	<b>(1.178.291.579)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.226.930.385	13.049.346.206	(1.177.584.179)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	14.226.930.385	13.049.346.206	(1.177.584.179)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	14.226.930.385	13.049.346.206	(1.177.584.179)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.247.200	75.247.200	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	75.247.200	75.247.200	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	75.247.200	75.247.200	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	6.792.600	(707.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	7.500.000	6.792.600	(707.400)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	6.792.600	(707.400)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	10.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	0	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>552.226.100</b>	<b>648.112.100</b>	<b>95.886.000</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.497.500	9.497.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.497.500	9.497.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.497.500	9.497.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.999.600	85.428.500	4.428.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	80.999.600	85.428.500	4.428.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.999.600	85.428.500	4.428.900	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.996.700	27.996.700	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	27.996.700	27.996.700	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.996.700	27.996.700	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.000.000	34.398.200	5.398.200	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	29.000.000	34.398.200	5.398.200	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000	34.398.200	5.398.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.996.500	59.996.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	59.996.500	59.996.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.996.500	59.996.500	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.155.800	78.806.700	(7.349.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	86.155.800	78.806.700	(7.349.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.155.800	78.806.700	(7.349.100)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.580.000	351.988.000	93.408.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	258.580.000	351.988.000	93.408.000	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	258.580.000	351.988.000	93.408.000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>185.026.700</b>	<b>0</b>	<b>(185.026.700)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	185.026.700	0	(185.026.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	185.026.700	0	(185.026.700)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.026.700	0	(185.026.700)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.137.851.600</b>	<b>1.994.949.000</b>	<b>(142.902.600)</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.000.000	7.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.491.600	35.199.800	(34.291.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	69.491.600	35.199.800	(34.291.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.491.600	35.199.800	(34.291.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.061.360.000	1.952.749.200	(108.610.800)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	2.061.360.000	1.952.749.200	(108.610.800)	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.061.360.000	1.952.749.200	(108.610.800)	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139.935.350</b>	<b>139.935.350</b>	<b>0</b>	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.997.550	129.997.550	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	129.997.550	129.997.550	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.997.550	129.997.550	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.937.800	9.937.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	9.937.800	9.937.800	0	
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.937.800	9.937.800	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>29.275.765.906</b>	<b>35.969.648.044</b>	<b>6.693.882.138</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(28.825.765.906)</b>	<b>(35.644.648.044)</b>	<b>(6.818.882.138)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>3.27.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.900.000.000)</b>	
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.860.000.000	0	(1.860.000.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	04		Lain-lain PAD yang Sah	40.000.000	0	(40.000.000)	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>1.900.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(1.900.000.000)</b>	
0	00	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>8.418.849.746</b>	<b>2.222.396.205</b>	<b>(6.196.453.541)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	0.00	00					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>846.746.700</b>	<b>0</b>	<b>(846.746.700)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	00					<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>815.808.900</b>	<b>0</b>	<b>(815.808.900)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	01					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	700.051.500	0	(700.051.500)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	35.051.500	0	(35.051.500)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	01		Belanja Pegawai	9.270.000	0	(9.270.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	25.781.500	0	(25.781.500)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	665.000.000	0	(665.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	665.000.000	0	(665.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	02					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	115.757.400	0	(115.757.400)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	114.607.800	0	(114.607.800)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	114.607.800	0	(114.607.800)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2			BELANJA MODAL	1.149.600	0	(1.149.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	2	02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.149.600	0	(1.149.600)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>30.937.800</b>	<b>0</b>	<b>(30.937.800)</b>			
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30.937.800	0	(30.937.800)			
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	30.937.800	0	(30.937.800)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.937.800	0	(30.937.800)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>90.084.500</b>	<b>0</b>	<b>(90.084.500)</b>			
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>80.801.400</b>	<b>0</b>	<b>(80.801.400)</b>			
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	04	2.02	01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	80.801.400	0	(80.801.400)			
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	80.801.400	0	(80.801.400)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	04	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	80.801.400	0	(80.801.400)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.283.100</b>	<b>0</b>	<b>(9.283.100)</b>			
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	04	2.03	03		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.283.100	0	(9.283.100)			
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	04	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	9.283.100	0	(9.283.100)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	04	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.283.100	0	(9.283.100)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>65.000.002</b>	<b>0</b>	<b>(65.000.002)</b>			
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>65.000.002</b>	<b>0</b>	<b>(65.000.002)</b>			

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	06	2.01	01			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000	0	(50.000.000)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	0	(50.000.000)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	0	(50.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	06	2.01	02			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.000.002	0	(15.000.002)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.002	0	(15.000.002)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.002	0	(15.000.002)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>175.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(175.000.000)</b>		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>07</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>175.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(175.000.000)</b>		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	07	2.01	01			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	175.000.000	0	(175.000.000)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	175.000.000	0	(175.000.000)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000	0	(175.000.000)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.242.018.544</b>	<b>2.222.396.205</b>	<b>(5.019.622.339)</b>		
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>103.995.223</b>	<b>25.446.065</b>	<b>(78.549.158)</b>		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.900	7.999.900	0		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.999.900	7.999.900	0		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.900	7.999.900	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.999.600	0	(7.999.600)		
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	7.999.600	0	(7.999.600)		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.600	0	(7.999.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.999.725	7.999.725	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	7.999.725	7.999.725	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.725	7.999.725	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.995.998	9.446.440	(70.549.558)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	79.995.998	9.446.440	(70.549.558)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.995.998	9.446.440	(70.549.558)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.571.646.000</b>	<b>1.923.901.251</b>	<b>(3.647.744.749)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.517.828.200	1.900.629.051	(3.617.199.149)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.517.828.200	1.900.629.051	(3.617.199.149)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	5.517.828.200	1.900.629.051	(3.617.199.149)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.818.400	15.272.800	(30.545.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	45.818.400	15.272.800	(30.545.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	45.818.400	15.272.800	(30.545.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.999.400	7.999.400	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.999.400	7.999.400	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.400	7.999.400	0	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.03	05				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	8.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	8.000.000	8.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.04	07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.04	07	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000	5.000.000	0	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.04	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>222.149.150</b>	<b>0</b>	<b>(222.149.150)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.934.900	0	(18.934.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	18.934.900	0	(18.934.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.934.900	0	(18.934.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.05	10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	203.214.250	0	(203.214.250)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1	BELANJA OPERASI	203.214.250	0	(203.214.250)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.05	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.214.250	0	(203.214.250)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>278.497.395</b>	<b>51.203.858</b>	<b>(227.293.537)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.997.900	2.819.504	(6.178.396)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	8.997.900	2.819.504	(6.178.396)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.997.900	2.819.504	(6.178.396)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.999.995	7.133.400	(25.866.595)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	32.999.995	7.133.400	(25.866.595)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.999.995	7.133.400	(25.866.595)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.497.800	0	(7.497.800)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.497.800	0	(7.497.800)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.497.800	0	(7.497.800)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.999.900	0	(51.999.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	51.999.900	0	(51.999.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.999.900	0	(51.999.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.998.000	0	(11.998.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	11.998.000	0	(11.998.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.998.000	0	(11.998.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.003.800	41.250.954	(123.752.846)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	165.003.800	41.250.954	(123.752.846)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	165.003.800	41.250.954	(123.752.846)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>138.007.700</b>	<b>0</b>	<b>(138.007.700)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	24.882.600	0	(24.882.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1	BELANJA OPERASI	530.000	0	(530.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1 01	Belanja Pegawai	530.000	0	(530.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	BELANJA MODAL	24.352.600	0	(24.352.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.352.600	0	(24.352.600)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.125.100	0	(113.125.100)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	1.570.000	0	(1.570.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	1.570.000	0	(1.570.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	111.555.100	0	(111.555.100)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.555.100	0	(111.555.100)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>828.794.900</b>	<b>202.500.000</b>	<b>(626.294.900)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	(2.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000	0	(2.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.342.900	0	(9.342.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	9.342.900	0	(9.342.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.342.900	0	(9.342.900)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.452.000	202.500.000	(614.952.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	817.452.000	202.500.000	(614.952.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	817.452.000	202.500.000	(614.952.000)	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85.928.176</b>	<b>6.345.031</b>	<b>(79.583.145)</b>	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.927.946	6.345.031	(24.582.915)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	30.927.946	6.345.031	(24.582.915)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.927.946	6.345.031	(24.582.915)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0	(20.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	20.000.000	0	(20.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	0	(20.000.000)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.230	0	(35.000.230)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	35.000.230	0	(35.000.230)	
3	30	3.31.3.30.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.230	0	(35.000.230)	
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3.31.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.438.303.400</b>	<b>0</b>	<b>(5.438.303.400)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  
Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	0.00	00			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>5.438.303.400</b>	<b>0</b>	<b>(5.438.303.400)</b>		
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	2.01	00			<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>5.438.303.400</b>	<b>0</b>	<b>(5.438.303.400)</b>		
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	2.01	05			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.438.303.400	0	(5.438.303.400)		
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.438.303.400	0	(5.438.303.400)		
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	01	Belanja Pegawai	3.430.000	0	(3.430.000)	
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.584.873.400	0	(4.584.873.400)	
3	31	3.31.3.30.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	05	Belanja Hibah	850.000.000	0	(850.000.000)	
								<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.857.153.146</b>	<b>2.222.396.205</b>	<b>(11.634.756.941)</b>		
								<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(11.957.153.146)</b>	<b>(2.222.396.205)</b>	<b>9.734.756.941</b>		
0	00	3.31.3.30.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		<b>PEMBIAYAAN</b>					
								<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>278.860.000</b>	<b>298.860.000</b>	<b>20.000.000</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	278.860.000	298.860.000	20.000.000	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>278.860.000</b>	<b>298.860.000</b>	<b>20.000.000</b>	
0	00	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>42.935.493.991</b>	<b>45.386.348.904</b>	<b>2.450.854.913</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>5.755.683.800</b>	<b>7.073.316.700</b>	<b>1.317.632.900</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00					<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>623.016.700</b>	<b>593.016.700</b>	<b>(30.000.000)</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01					Penataan Administrasi Pemerintahan	184.660.400	154.660.400	(30.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	183.160.400	153.160.400	(30.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	183.160.400	153.160.400	(30.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2			BELANJA MODAL	1.500.000	1.500.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	2	05		Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.500.000	1.500.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	149.502.800	149.502.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	149.502.800	149.502.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	149.502.800	149.502.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	288.853.500	288.853.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	288.853.500	288.853.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	288.853.500	288.853.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	00					<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>3.455.350.600</b>	<b>4.954.520.100</b>	<b>1.499.169.500</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	621.247.000	870.536.500	249.289.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	621.247.000	870.536.500	249.289.500	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	621.247.000	870.536.500	249.289.500	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2.789.000.000	3.989.000.000	1.200.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	2.789.000.000	3.989.000.000	1.200.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 05	Belanja Hibah	2.219.000.000	2.919.000.000	700.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	570.000.000	1.070.000.000	500.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	45.103.600	94.983.600	49.880.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	45.103.600	94.983.600	49.880.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.103.600	94.983.600	49.880.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.600.499.000</b>	<b>1.448.962.400</b>	<b>(151.536.600)</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	686.007.700	699.605.700	13.598.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	686.007.700	699.605.700	13.598.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	686.007.700	699.605.700	13.598.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	675.673.900	610.035.300	(65.638.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	675.673.900	610.035.300	(65.638.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	675.673.900	610.035.300	(65.638.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	238.817.400	139.321.400	(99.496.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	238.817.400	139.321.400	(99.496.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.817.400	139.321.400	(99.496.000)	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>76.817.500</b>	<b>76.817.500</b>	<b>0</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	54.376.500	54.376.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5 1	BELANJA OPERASI	54.376.500	54.376.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.376.500	54.376.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	22.441.000	22.441.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	22.441.000	22.441.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.441.000	22.441.000	0	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1.751.453.000</b>	<b>2.388.649.918</b>	<b>637.196.918</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>348.886.000</b>	<b>398.886.000</b>	<b>50.000.000</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	51.325.800	101.325.800	50.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	51.325.800	101.325.800	50.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.325.800	101.325.800	50.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	251.465.200	281.465.200	30.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	251.465.200	281.465.200	30.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	251.465.200	281.465.200	30.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	46.095.000	16.095.000	(30.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	46.095.000	16.095.000	(30.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.095.000	16.095.000	(30.000.000)	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>455.729.500</b>	<b>635.995.000</b>	<b>180.265.500</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	168.590.100	227.999.100	59.409.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	168.590.100	227.999.100	59.409.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	18.000.000	18.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.590.100	209.999.100	59.409.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	132.702.000	223.587.300	90.885.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	132.702.000	223.587.300	90.885.300	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.702.000	223.587.300	90.885.300	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	154.437.400	184.408.600	29.971.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	154.437.400	184.408.600	29.971.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	18.000.000	18.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.437.400	166.408.600	29.971.200	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>946.837.500</b>	<b>1.353.768.918</b>	<b>406.931.418</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	530.839.100	779.289.100	248.450.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5 1	BELANJA OPERASI	530.839.100	779.289.100	248.450.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5 1 01	Belanja Pegawai	428.310.000	676.760.000	248.450.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.529.100	102.529.100	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	193.471.600	362.338.018	168.866.418	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5 1	BELANJA OPERASI	184.424.600	221.493.858	37.069.258	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.424.600	221.493.858	37.069.258	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5 2	BELANJA MODAL	9.047.000	140.844.160	131.797.160	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.047.000	140.844.160	131.797.160	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	222.526.800	212.141.800	(10.385.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5 1	BELANJA OPERASI	222.526.800	212.141.800	(10.385.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	222.526.800	212.141.800	(10.385.000)	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>35.428.357.191</b>	<b>35.924.382.286</b>	<b>496.025.095</b>	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>160.505.800</b>	<b>141.467.600</b>	<b>(19.038.200)</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.900	14.999.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	14.999.900	14.999.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.900	14.999.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.934.000	15.934.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1		BELANJA OPERASI	15.934.000	15.934.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.934.000	15.934.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.697.900	12.697.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	12.697.900	12.697.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.697.900	12.697.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.927.900	10.927.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	10.927.900	10.927.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.927.900	10.927.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.425.700	19.425.700	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	19.425.700	19.425.700	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.425.700	19.425.700	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.520.400	67.482.200	(19.038.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	86.520.400	67.482.200	(19.038.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	86.520.400	67.482.200	(19.038.200)	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.245.946.090</b>	<b>11.209.239.606</b>	<b>(2.036.706.484)</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.044.502.190	11.014.320.706	(2.030.181.484)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	13.044.502.190	11.014.320.706	(2.030.181.484)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	13.044.502.190	11.014.320.706	(2.030.181.484)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177.444.000	170.919.000	(6.525.000)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	177.444.000	170.919.000	(6.525.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	177.444.000	170.919.000	(6.525.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.999.900	11.999.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	11.999.900	11.999.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.999.900	11.999.900	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	12.000.000	12.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>62.684.500</b>	<b>62.684.500</b>	<b>0</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	62.684.500	62.684.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	62.684.500	62.684.500	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.684.500	62.684.500	0	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.796.193.700</b>	<b>5.714.177.700</b>	<b>917.984.000</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	89.408.800	103.814.800	14.406.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	89.408.800	103.814.800	14.406.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.408.800	103.814.800	14.406.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	418.123.500	546.623.500	128.500.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	418.123.500	546.623.500	128.500.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	418.123.500	546.623.500	128.500.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.172.400	179.184.400	30.012.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	149.172.400	179.184.400	30.012.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.172.400	179.184.400	30.012.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.450.000.000	2.722.200.000	272.200.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	2.450.000.000	2.722.200.000	272.200.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000.000	2.722.200.000	272.200.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.689.489.000	2.162.355.000	472.866.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	1.689.489.000	2.162.355.000	472.866.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.689.489.000	2.162.355.000	472.866.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.958.274.800</b>	<b>4.261.068.800</b>	<b>302.794.000</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000.000	2.600.000.000	(400.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2	BELANJA MODAL	3.000.000.000	2.600.000.000	(400.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000.000	2.600.000.000	(400.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	149.100.000	149.100.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.100.000	2.100.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	2.100.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	BELANJA MODAL	147.000.000	147.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.000.000	147.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	809.174.800	1.511.968.800	702.794.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	158.027.500	824.821.500	666.794.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.027.500	824.821.500	666.794.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	651.147.300	687.147.300	36.000.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	651.147.300	687.147.300	36.000.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.674.098.889</b>	<b>3.959.930.689</b>	<b>285.831.800</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	157.500.000	152.500.000	(5.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	157.500.000	152.500.000	(5.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.500.000	152.500.000	(5.000.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.877.189	596.108.989	(146.768.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	742.877.189	596.108.989	(146.768.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	742.877.189	596.108.989	(146.768.200)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	689.989.700	877.344.700	187.355.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	689.989.700	877.344.700	187.355.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	689.989.700	877.344.700	187.355.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.083.732.000	2.333.977.000	250.245.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	2.083.732.000	2.333.977.000	250.245.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.083.732.000	2.333.977.000	250.245.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.943.072.300</b>	<b>2.416.833.300</b>	<b>473.761.000</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	817.698.100	1.261.640.100	443.942.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	817.698.100	1.261.640.100	443.942.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	817.698.100	1.261.640.100	443.942.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	50.000.000	32.500.000	(17.500.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000	32.500.000	(17.500.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	32.500.000	(17.500.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.374.200	330.729.200	70.355.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	260.374.200	330.729.200	70.355.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	260.374.200	330.729.200	70.355.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.000.000	341.964.000	(23.036.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	165.000.000	141.964.000	(23.036.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000	141.964.000	(23.036.000)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	200.000.000	200.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000	450.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2	BELANJA MODAL	450.000.000	450.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000	300.000.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000	150.000.000	0	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.11</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>658.441.812</b>	<b>772.168.391</b>	<b>113.726.579</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	658.441.812	772.168.391	113.726.579	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1	BELANJA OPERASI	658.441.812	772.168.391	113.726.579	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.11	01	5	1 01	Belanja Pegawai	658.441.812	772.168.391	113.726.579	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.12</b>	<b>00</b>			<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>5.811.539.600</b>	<b>6.186.942.400</b>	<b>375.402.800</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.401.541.000	3.629.690.600	228.149.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.401.541.000	3.629.690.600	228.149.600	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.401.541.000	3.629.690.600	228.149.600	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.409.998.600	2.557.251.800	147.253.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	1		BELANJA OPERASI	2.409.998.600	2.557.251.800	147.253.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.12	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.409.998.600	2.557.251.800	147.253.200	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.13</b>	<b>00</b>				<b>Penataan Organisasi</b>	<b>700.000.200</b>	<b>782.425.400</b>	<b>82.425.200</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	184.638.600	267.063.800	82.425.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1		BELANJA OPERASI	184.638.600	267.063.800	82.425.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	184.638.600	267.063.800	82.425.200	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	215.351.600	215.351.600	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1		BELANJA OPERASI	215.351.600	215.351.600	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	215.351.600	215.351.600	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	300.010.000	300.010.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1		BELANJA OPERASI	300.010.000	300.010.000	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.13	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	300.010.000	300.010.000	0	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.14</b>	<b>00</b>				<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>417.599.500</b>	<b>417.443.900</b>	<b>(155.600)</b>	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01				Fasilitasi Keprotokolan	213.514.800	243.175.800	29.661.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1		BELANJA OPERASI	213.514.800	243.175.800	29.661.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	213.514.800	243.175.800	29.661.000	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	104.265.900	74.449.300	(29.816.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1		BELANJA OPERASI	104.265.900	74.449.300	(29.816.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.265.900	74.449.300	(29.816.600)	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	99.818.800	99.818.800	0	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1		BELANJA OPERASI	99.818.800	99.818.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.14	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	99.818.800	99.818.800	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>42.935.493.991</b>	<b>45.386.348.904</b>	<b>2.450.854.913</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(42.656.633.991)</b>	<b>(45.087.488.904)</b>	<b>(2.430.854.913)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>4.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				
						<b>BELANJA</b>				
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>37.592.191.337</b>	<b>37.540.766.873</b>	<b>(51.424.464)</b>	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>14.019.927.800</b>	<b>12.971.445.900</b>	<b>(1.048.481.900)</b>	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					
						<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>1.282.602.500</b>	<b>634.565.000</b>	<b>(648.037.500)</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		15.000.000	15.000.000	0	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1	15.000.000	15.000.000	0	
						BELANJA OPERASI				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1 02	15.000.000	15.000.000	0	
						Belanja Barang dan Jasa				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		817.602.500	450.000.000	(367.602.500)	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1	817.602.500	450.000.000	(367.602.500)	
						BELANJA OPERASI				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5 1 02	817.602.500	450.000.000	(367.602.500)	
						Belanja Barang dan Jasa				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		450.000.000	169.565.000	(280.435.000)	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5 1	450.000.000	169.565.000	(280.435.000)	
						BELANJA OPERASI				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5 1 02	450.000.000	169.565.000	(280.435.000)	
						Belanja Barang dan Jasa				
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>					
						<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>575.458.000</b>	<b>575.458.000</b>	<b>0</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		20.000.000	20.000.000	0	
						Pembahasan KUA dan PPAS				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1	20.000.000	20.000.000	0	
						BELANJA OPERASI				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1 02	20.000.000	20.000.000	0	
						Belanja Barang dan Jasa				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		515.458.000	515.458.000	0	
						Pembahasan APBD				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1	515.458.000	515.458.000	0	
						BELANJA OPERASI				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1 02	515.458.000	515.458.000	0	
						Belanja Barang dan Jasa				
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		20.000.000	20.000.000	0	
						Pembahasan APBD Perubahan				

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	20.000.000	20.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	BELANJA OPERASI	20.000.000	20.000.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	20.000.000	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>207.600.000</b>	<b>207.600.000</b>	<b>0</b>		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07			Pengawasan Penggunaan Anggaran	207.600.000	207.600.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	BELANJA OPERASI	207.600.000	207.600.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	207.600.000	207.600.000	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>2.569.855.000</b>	<b>1.891.179.200</b>	<b>(678.675.800)</b>		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02			Pendalaman Tugas DPRD	1.585.300.000	1.435.300.000	(150.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	BELANJA OPERASI	1.585.300.000	1.435.300.000	(150.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.585.300.000	1.435.300.000	(150.000.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	190.120.000	190.120.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	BELANJA OPERASI	190.120.000	190.120.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	190.120.000	190.120.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	76.939.800	0	(76.939.800)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	BELANJA OPERASI	76.939.800	0	(76.939.800)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.939.800	0	(76.939.800)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	265.759.200	265.759.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	BELANJA OPERASI	265.759.200	265.759.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	265.759.200	265.759.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	06			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	10.000.000	0	(10.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	06	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	0	(10.000.000)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	0	(10.000.000)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07		Penyusunan Program Kerja DPRD	441.736.000	0	(441.736.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07	5 1	BELANJA OPERASI	441.736.000	0	(441.736.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	441.736.000	0	(441.736.000)	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>2.638.557.500</b>	<b>2.347.988.900</b>	<b>(290.568.600)</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	350.000.000	186.500.000	(163.500.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5 1	BELANJA OPERASI	350.000.000	186.500.000	(163.500.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000	186.500.000	(163.500.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03		Pelaksanaan Reses	2.288.557.500	2.161.488.900	(127.068.600)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5 1	BELANJA OPERASI	2.288.557.500	2.161.488.900	(127.068.600)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.288.557.500	2.161.488.900	(127.068.600)	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>152.200.000</b>	<b>152.200.000</b>	<b>0</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02		Pengawasan Kode Etik DPRD	152.200.000	152.200.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	152.200.000	152.200.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	152.200.000	152.200.000	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>6.593.654.800</b>	<b>7.162.454.800</b>	<b>568.800.000</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.931.200.000	6.500.000.000	568.800.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	5.931.200.000	6.500.000.000	568.800.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.931.200.000	6.500.000.000	568.800.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	515.554.100	515.554.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	515.554.100	515.554.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	515.554.100	515.554.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	146.900.700	146.900.700	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	146.900.700	146.900.700	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	146.900.700	146.900.700	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>23.572.263.537</b>	<b>24.569.320.973</b>	<b>997.057.436</b>	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.660.300</b>	<b>12.660.300</b>	<b>0</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.932.000	5.932.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	5.932.000	5.932.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.932.000	5.932.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.728.300	6.728.300	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	6.728.300	6.728.300	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.728.300	6.728.300	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.229.129.392</b>	<b>2.691.109.328</b>	<b>(538.020.064)</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.160.011.292	2.613.677.628	(546.333.664)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	3.160.011.292	2.613.677.628	(546.333.664)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	3.160.011.292	2.613.677.628	(546.333.664)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.891.200	70.204.800	8.313.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	61.891.200	70.204.800	8.313.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	61.291.200	69.604.800	8.313.600	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000	600.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.226.900	7.226.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	7.226.900	7.226.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.226.900	7.226.900	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>161.514.000</b>	<b>206.516.000</b>	<b>45.002.000</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	161.514.000	206.516.000	45.002.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	BELANJA OPERASI	161.514.000	206.516.000	45.002.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	161.514.000	206.516.000	45.002.000	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.080.063.900</b>	<b>1.080.063.900</b>	<b>0</b>		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.331.600	12.331.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	12.331.600	12.331.600	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.331.600	12.331.600	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.687.100	85.687.100	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	85.687.100	85.687.100	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.687.100	85.687.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.027.200	50.027.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	50.027.200	50.027.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.027.200	50.027.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.060.000	173.060.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	173.060.000	173.060.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	173.060.000	173.060.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.758.000	79.758.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	79.758.000	79.758.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.758.000	79.758.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.200.000	79.200.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	79.200.000	79.200.000	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	79.200.000	79.200.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	600.000.000	0		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	600.000.000	600.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	600.000.000	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>436.078.000</b>	<b>528.106.300</b>	<b>92.028.300</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	25.000.000	25.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2	BELANJA MODAL	25.000.000	25.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	411.078.000	503.106.300	92.028.300	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	46.165.900	46.165.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	1.570.000	1.570.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.595.900	44.595.900	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	364.912.100	456.940.400	92.028.300	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364.912.100	456.940.400	92.028.300	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>588.727.200</b>	<b>588.718.800</b>	<b>(8.400)</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.084.000	54.075.600	(8.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	54.084.000	54.075.600	(8.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.084.000	54.075.600	(8.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.643.200	519.643.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	519.643.200	519.643.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	519.643.200	519.643.200	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD

Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>435.985.100</b>	<b>369.035.100</b>	<b>(66.950.000)</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	363.767.000	296.817.000	(66.950.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	363.767.000	296.817.000	(66.950.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	363.767.000	296.817.000	(66.950.000)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.915.000	22.915.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	22.915.000	22.915.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.915.000	22.915.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.303.100	49.303.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	49.303.100	49.303.100	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.303.100	49.303.100	0	
<b>4</b>	<b>02</b>	<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.15</b>	<b>00</b>		<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>15.028.726.964</b>	<b>14.927.732.564</b>	<b>(100.994.400)</b>	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.549.524.964	13.549.524.964	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5 1	BELANJA OPERASI	13.549.524.964	13.549.524.964	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5 1 01	Belanja Pegawai	13.549.524.964	13.549.524.964	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	966.142.200	966.142.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5 1	BELANJA OPERASI	966.142.200	966.142.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5 1 01	Belanja Pegawai	1.430.000	1.430.000	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	964.712.200	964.712.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	513.059.800	412.065.400	(100.994.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5 1	BELANJA OPERASI	513.059.800	412.065.400	(100.994.400)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	513.059.800	412.065.400	(100.994.400)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD  
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	00			Layanan Administrasi DPRD	2.599.378.681	4.165.378.681	1.566.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02			Fasilitasi Fraksi DPRD	6.654.200	6.654.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	5	1	BELANJA OPERASI	6.654.200	6.654.200	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.654.200	6.654.200	0	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	600.000.000	2.166.000.000	1.566.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1	BELANJA OPERASI	600.000.000	2.166.000.000	1.566.000.000		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000	2.166.000.000	1.566.000.000	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.992.724.481	1.992.724.481	0		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	1	BELANJA OPERASI	1.943.448.000	1.893.834.900	(49.613.100)		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.943.448.000	1.893.834.900	(49.613.100)	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2	BELANJA MODAL	49.276.481	98.889.581	49.613.100		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	49.613.100	49.613.100	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.16	04	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.276.481	49.276.481	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>37.592.191.337</b>	<b>37.540.766.873</b>	<b>(51.424.464)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(37.592.191.337)</b>	<b>(37.540.766.873)</b>	<b>51.424.464</b>		
0	00	4.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
								<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>		<b>BELANJA</b>					
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PERENCANAAN</b>	<b>6.677.336.939</b>	<b>6.412.468.991</b>	<b>(264.867.948)</b>		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>733.045.600</b>	<b>910.493.300</b>	<b>177.447.700</b>		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>630.484.300</b>	<b>767.496.300</b>	<b>137.012.000</b>		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03			Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.087.200	50.087.200	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	50.087.200	50.087.200	0		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.087.200	50.087.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	62.759.800	48.582.500	(14.177.300)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	62.759.800	48.582.500	(14.177.300)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.759.800	48.582.500	(14.177.300)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	267.637.300	260.837.300	(6.800.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	267.637.300	260.837.300	(6.800.000)		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	267.637.300	260.837.300	(6.800.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	407.989.300	157.989.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	250.000.000	407.989.300	157.989.300		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	01	Belanja Pegawai	24.000.000	36.000.000	12.000.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	226.000.000	371.989.300	145.989.300	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>102.561.300</b>	<b>142.997.000</b>	<b>40.435.700</b>		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	0		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	65.000.000	65.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	65.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	37.561.300	77.997.000	40.435.700	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	37.561.300	77.997.000	40.435.700	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.561.300	77.997.000	40.435.700	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.235.803.400</b>	<b>1.049.308.400</b>	<b>(186.495.000)</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>300.554.000</b>	<b>469.509.000</b>	<b>168.955.000</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.156.600	57.156.600	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	57.156.600	57.156.600	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.156.600	57.156.600	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.921.300	124.496.300	106.575.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	17.921.300	124.496.300	106.575.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.921.300	124.496.300	106.575.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.428.200	17.428.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	17.428.200	17.428.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.428.200	17.428.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.695.000	127.720.000	57.025.000	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	70.695.000	127.720.000	57.025.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.695.000	127.720.000	57.025.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	72.479.000	83.004.000	10.525.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	72.479.000	83.004.000	10.525.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.479.000	83.004.000	10.525.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64.873.900	59.703.900	(5.170.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	64.873.900	59.703.900	(5.170.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.873.900	59.703.900	(5.170.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>700.249.400</b>	<b>328.199.400</b>	<b>(372.050.000)</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	562.310.000	210.405.000	(351.905.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	562.310.000	210.405.000	(351.905.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.405.000	210.405.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 05	Belanja Hibah	351.905.000	0	(351.905.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	88.187.700	76.112.700	(12.075.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	88.187.700	76.112.700	(12.075.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.187.700	76.112.700	(12.075.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	49.751.700	41.681.700	(8.070.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	49.751.700	41.681.700	(8.070.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.751.700	41.681.700	(8.070.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>235.000.000</b>	<b>251.600.000</b>	<b>16.600.000</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.000.000	60.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1	BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000	80.145.000	20.145.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	60.000.000	80.145.000	20.145.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	80.145.000	20.145.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	35.000.000	17.060.000	(17.940.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	35.000.000	17.060.000	(17.940.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000	17.060.000	(17.940.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	30.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000	50.265.000	20.265.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	50.265.000	20.265.000		
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	50.265.000	20.265.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000	14.130.000	(5.870.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07	5	1		BELANJA OPERASI	20.000.000	14.130.000	(5.870.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000	14.130.000	(5.870.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.708.487.939</b>	<b>4.452.667.291</b>	<b>(255.820.648)</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.783.500</b>	<b>32.814.500</b>	<b>(3.969.000)</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.186.500	5.866.500	(1.320.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	7.186.500	5.866.500	(1.320.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.186.500	5.866.500	(1.320.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.443.000	1.794.000	(2.649.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	4.443.000	1.794.000	(2.649.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.443.000	1.794.000	(2.649.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.154.000	25.154.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	25.154.000	25.154.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	25.154.000	25.154.000	0	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.747.372.380</b>	<b>3.565.386.591</b>	<b>(181.985.789)</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.690.535.080	3.508.549.291	(181.985.789)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.690.535.080	3.508.549.291	(181.985.789)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	3.690.535.080	3.508.549.291	(181.985.789)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.979.200	51.979.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	51.979.200	51.979.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	51.979.200	51.979.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.858.100	4.858.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.858.100	4.858.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.858.100	4.858.100	0	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>477.909.700</b>	<b>622.368.000</b>	<b>144.458.300</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.051.200	11.051.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	11.051.200	11.051.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.051.200	11.051.200	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.806.000	43.806.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	43.806.000	43.806.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.806.000	43.806.000	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.443.500	6.443.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	6.443.500	6.443.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.443.500	6.443.500	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.276.700	86.887.200	12.610.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	74.276.700	86.887.200	12.610.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.276.700	86.887.200	12.610.500	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.744.300	52.732.100	(7.012.200)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	52.732.100	52.732.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.732.100	52.732.100	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	2	BELANJA MODAL	7.012.200	0	(7.012.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.012.200	0	(7.012.200)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.588.000	421.448.000	138.860.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	282.588.000	421.448.000	138.860.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	282.588.000	421.448.000	138.860.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>51.940.900</b>	<b>53.520.900</b>	<b>1.580.000</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.940.900	53.520.900	1.580.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	680.000	680.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	0	680.000	680.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	51.940.900	52.840.900	900.000	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.940.900	52.840.900	900.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180.983.800</b>	<b>120.080.800</b>	<b>(60.903.000)</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.248.400	4.248.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.248.400	4.248.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.248.400	4.248.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.657.700	43.754.700	(60.903.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	50.184.800	43.754.700	(6.430.100)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.184.800	43.754.700	(6.430.100)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	2	BELANJA MODAL	54.472.900	0	(54.472.900)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.472.900	0	(54.472.900)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	72.077.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	72.077.700	72.077.700	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.077.700	72.077.700	0	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>213.497.659</b>	<b>58.496.500</b>	<b>(155.001.159)</b>	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.410.000	30.059.400	6.649.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	23.410.000	30.059.400	6.649.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.410.000	30.059.400	6.649.400	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.400	6.045.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	6.045.400	6.045.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.045.400	6.045.400	0	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.484.200	11.261.700	(8.222.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	19.484.200	11.261.700	(8.222.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.484.200	11.261.700	(8.222.500)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.728.059	0	(150.728.059)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	150.728.059	0	(150.728.059)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.728.059	0	(150.728.059)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.830.000	11.130.000	(2.700.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	BELANJA OPERASI	13.830.000	11.130.000	(2.700.000)	
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000	11.130.000	(2.700.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>262.351.500</b>	<b>312.351.500</b>	<b>50.000.000</b>	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	0.00	00		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>262.351.500</b>	<b>312.351.500</b>	<b>50.000.000</b>	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	00		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>0</b>	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	200.000.000	200.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04	5 1	BELANJA OPERASI	200.000.000	200.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000	200.000.000	0	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	00		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>62.351.500</b>	<b>112.351.500</b>	<b>50.000.000</b>	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	62.351.500	112.351.500	50.000.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	5 1	BELANJA OPERASI	62.351.500	112.351.500	50.000.000	
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.04	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.351.500	112.351.500	50.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>6.939.688.439</b>	<b>6.724.820.491</b>	<b>(214.867.948)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>								<b>(6.939.688.439)</b>	<b>(6.724.820.491)</b>	<b>214.867.948</b>	
0	00	5.01.5.05.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>47.398.333.809</b>	<b>0</b>	<b>(47.398.333.809)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 01	Pajak Daerah	27.091.047.443	0	(27.091.047.443)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.607.286.366	0	(8.607.286.366)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	11.700.000.000	0	(11.700.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.143.007.863.636</b>	<b>0</b>	<b>(1.143.007.863.636)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.095.501.013.000	0	(1.095.501.013.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.506.850.636	0	(47.506.850.636)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>16.745.942.682</b>	<b>0</b>	<b>(16.745.942.682)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	3 01	Pendapatan Hibah	16.745.942.682	0	(16.745.942.682)	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>1.207.152.140.127</b>	<b>0</b>	<b>(1.207.152.140.127)</b>		
0	00	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>				
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00			<b>KEUANGAN</b>	<b>287.154.459.240</b>	<b>4.448.460.723</b>	<b>(282.705.998.517)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	0.00	00			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>274.893.561.244</b>	<b>1.542.860.624</b>	<b>(273.350.700.620)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	00			<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.502.639.300</b>	<b>132.923.400</b>	<b>(1.369.715.900)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	176.416.300	0	(176.416.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	176.416.300	0	(176.416.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	176.416.300	0	(176.416.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.602.800	0	(150.602.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	150.602.800	0	(150.602.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.602.800	0	(150.602.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	53.110.000	0	(53.110.000)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	53.110.000	0	(53.110.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.110.000	0	(53.110.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	53.110.000	3.534.600	(49.575.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	53.110.000	3.534.600	(49.575.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.110.000	3.534.600	(49.575.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	335.307.500	0	(335.307.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	335.307.500	0	(335.307.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1 01	Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	334.097.500	0	(334.097.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	427.529.000	3.454.200	(424.074.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	427.529.000	3.454.200	(424.074.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1 01	Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	426.319.000	3.454.200	(422.864.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	117.464.900	112.379.900	(5.085.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	117.464.900	112.379.900	(5.085.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1 01	Belanja Pegawai	1.210.000	0	(1.210.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.254.900	112.379.900	(3.875.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	40.666.600	13.554.700	(27.111.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	40.666.600	13.554.700	(27.111.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.666.600	13.554.700	(27.111.900)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	148.432.200	0	(148.432.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5 1	BELANJA OPERASI	148.432.200	0	(148.432.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	148.432.200	0	(148.432.200)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>625.749.000</b>	<b>179.034.900</b>	<b>(446.714.100)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.598.900	23.177.000	(81.421.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	104.598.900	23.177.000	(81.421.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.598.900	23.177.000	(81.421.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	32.563.100	8.115.700	(24.447.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	32.563.100	8.115.700	(24.447.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.563.100	8.115.700	(24.447.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	74.999.800	11.308.800	(63.691.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1	BELANJA OPERASI	74.999.800	11.308.800	(63.691.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.999.800	11.308.800	(63.691.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.349.200	8.687.400	(21.661.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5 1	BELANJA OPERASI	30.349.200	8.687.400	(21.661.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.349.200	8.687.400	(21.661.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	383.238.000	127.746.000	(255.492.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1	BELANJA OPERASI	383.238.000	127.746.000	(255.492.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	1 01	Belanja Pegawai	383.238.000	127.746.000	(255.492.000)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>500.029.900</b>	<b>77.738.400</b>	<b>(422.291.500)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	35.254.000	16.504.000	(18.750.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1	BELANJA OPERASI	35.254.000	16.504.000	(18.750.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.254.000	16.504.000	(18.750.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.000.000	5.316.500	(44.683.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	5.316.500	(44.683.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	5.316.500	(44.683.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.095.000	42.527.700	(106.567.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	BELANJA OPERASI	149.095.000	42.527.700	(106.567.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.095.000	42.527.700	(106.567.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	160.437.900	0	(160.437.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1	BELANJA OPERASI	160.437.900	0	(160.437.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.437.900	0	(160.437.900)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000	0	(50.000.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1	BELANJA OPERASI	50.000.000	0	(50.000.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	0	(50.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	55.243.000	13.390.200	(41.852.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	55.243.000	13.390.200	(41.852.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.243.000	13.390.200	(41.852.800)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>				<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>272.106.728.044</b>	<b>1.124.465.924</b>	<b>(270.982.262.120)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.150.478.000	1.122.086.824	(3.028.391.176)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	4.150.478.000	1.122.086.824	(3.028.391.176)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	04	5	1	03	Belanja Bunga	4.150.478.000	1.122.086.824	(3.028.391.176)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	253.136.959.300	2.379.100	(253.134.580.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	105.799.800	2.379.100	(103.420.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.799.800	2.379.100	(103.420.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	4		BELANJA TRANSFER	253.031.159.500	0	(253.031.159.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	253.031.159.500	0	(253.031.159.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	11.520.000.000	0	(11.520.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	11.520.000.000	0	(11.520.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	11.520.000.000	0	(11.520.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.299.290.744	0	(3.299.290.744)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	4		BELANJA TRANSFER	3.299.290.744	0	(3.299.290.744)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	3.299.290.744	0	(3.299.290.744)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>158.415.000</b>	<b>28.698.000</b>	<b>(129.717.000)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	105.235.000	26.197.700	(79.037.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	105.235.000	26.197.700	(79.037.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.235.000	26.197.700	(79.037.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53.180.000	2.500.300	(50.679.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	53.180.000	2.500.300	(50.679.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	53.180.000	2.500.300	(50.679.700)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>771.521.900</b>	<b>91.609.300</b>	<b>(679.912.600)</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>771.521.900</b>	<b>91.609.300</b>	<b>(679.912.600)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05				Penatausahaan Barang Milik Daerah	96.243.300	19.510.300	(76.733.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1		BELANJA OPERASI	96.243.300	19.510.300	(76.733.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	96.243.300	19.510.300	(76.733.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07				Pengamanan Barang Milik Daerah	333.436.800	5.694.700	(327.742.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	333.436.800	5.694.700	(327.742.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	333.436.800	5.694.700	(327.742.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	71.511.400	8.013.100	(63.498.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	71.511.400	8.013.100	(63.498.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.511.400	8.013.100	(63.498.300)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	105.537.700	10.897.200	(94.640.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	105.537.700	10.897.200	(94.640.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	105.537.700	10.897.200	(94.640.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	113.151.800	40.303.500	(72.848.300)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	113.151.800	40.303.500	(72.848.300)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	113.151.800	40.303.500	(72.848.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.640.900	7.190.500	(44.450.400)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	51.640.900	7.190.500	(44.450.400)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	51.640.900	7.190.500	(44.450.400)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.561.098.700</b>	<b>215.372.200</b>	<b>(1.345.726.500)</b>		
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>1.561.098.700</b>	<b>215.372.200</b>	<b>(1.345.726.500)</b>		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	157.213.400	40.368.300	(116.845.100)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	157.213.400	40.368.300	(116.845.100)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	157.213.400	40.368.300	(116.845.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	39.799.000	6.552.100	(33.246.900)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	39.799.000	6.552.100	(33.246.900)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.799.000	6.552.100	(33.246.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	76.608.700	8.449.900	(68.158.800)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	76.608.700	8.449.900	(68.158.800)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	76.608.700	8.449.900	(68.158.800)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	143.022.600	34.418.000	(108.604.600)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	143.022.600	34.418.000	(108.604.600)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	143.022.600	34.418.000	(108.604.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	170.953.600	20.814.300	(150.139.300)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	170.953.600	20.814.300	(150.139.300)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	170.953.600	20.814.300	(150.139.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	59.295.800	7.168.800	(52.127.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	59.295.800	7.168.800	(52.127.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	59.295.800	7.168.800	(52.127.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.434.300	5.735.300	(69.699.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	75.434.300	5.735.300	(69.699.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	75.434.300	5.735.300	(69.699.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	275.880.500	17.544.100	(258.336.400)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	275.880.500	17.544.100	(258.336.400)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	275.880.500	17.544.100	(258.336.400)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	159.594.400	19.244.900	(140.349.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	159.594.400	19.244.900	(140.349.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	159.594.400	19.244.900	(140.349.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	97.754.900	15.716.400	(82.038.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	97.754.900	15.716.400	(82.038.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.754.900	15.716.400	(82.038.500)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11			Penagihan Pajak Daerah	98.709.800	18.424.900	(80.284.900)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	98.709.800	18.424.900	(80.284.900)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	98.709.800	18.424.900	(80.284.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.652.100	1.700.600	(25.951.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	27.652.100	1.700.600	(25.951.500)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.652.100	1.700.600	(25.951.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	94.653.200	7.963.300	(86.689.900)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	94.653.200	7.963.300	(86.689.900)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	94.653.200	7.963.300	(86.689.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	84.526.400	11.271.300	(73.255.100)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	5	1	BELANJA OPERASI	84.526.400	11.271.300	(73.255.100)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	84.526.400	11.271.300	(73.255.100)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.928.277.396</b>	<b>2.598.618.599</b>	<b>(7.329.658.797)</b>		
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>75.112.600</b>	<b>0</b>	<b>(75.112.600)</b>		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.574.000	0	(9.574.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.574.000	0	(9.574.000)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.574.000	0	(9.574.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.411.200	0	(5.411.200)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	5.411.200	0	(5.411.200)		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.411.200	0	(5.411.200)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.421.100	0	(5.421.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5 1	BELANJA OPERASI	5.421.100	0	(5.421.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.421.100	0	(5.421.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.412.300	0	(5.412.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	5.412.300	0	(5.412.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.412.300	0	(5.412.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.421.000	0	(5.421.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	5.421.000	0	(5.421.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.421.000	0	(5.421.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.873.000	0	(43.873.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	43.873.000	0	(43.873.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.873.000	0	(43.873.000)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.251.310.376</b>	<b>2.264.195.549</b>	<b>(5.987.114.827)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.981.192.976	2.200.387.749	(5.780.805.227)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	7.981.192.976	2.200.387.749	(5.780.805.227)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	7.981.192.976	2.200.387.749	(5.780.805.227)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210.929.100	46.198.100	(164.731.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	210.929.100	46.198.100	(164.731.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	106.723.200	35.574.400	(71.148.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.205.900	10.623.700	(93.582.200)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.208.500	12.629.900	(41.578.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5 1	BELANJA OPERASI	54.208.500	12.629.900	(41.578.600)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.208.500	12.629.900	(41.578.600)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.979.800	4.979.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	4.979.800	4.979.800	0	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.979.800	4.979.800	0	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>49.999.800</b>	<b>0</b>	<b>(49.999.800)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.04	06		Penetapan Wajib Retribusi Daerah	49.999.800	0	(49.999.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.04	06	5 1	BELANJA OPERASI	49.999.800	0	(49.999.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.04	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800	0	(49.999.800)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>518.277.300</b>	<b>123.806.800</b>	<b>(394.470.500)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.388.600	3.367.100	(33.021.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	36.388.600	3.367.100	(33.021.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.388.600	3.367.100	(33.021.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.095.000	10.087.300	(64.007.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	74.095.000	10.087.300	(64.007.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.095.000	10.087.300	(64.007.700)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.932.300	8.546.400	(29.385.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	37.932.300	8.546.400	(29.385.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.932.300	8.546.400	(29.385.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.454.000	27.509.000	(57.945.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	85.454.000	27.509.000	(57.945.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.454.000	27.509.000	(57.945.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.929.900	18.963.000	(66.966.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	85.929.900	18.963.000	(66.966.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.929.900	18.963.000	(66.966.900)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.587.500	6.675.000	(26.912.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	33.587.500	6.675.000	(26.912.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.587.500	6.675.000	(26.912.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.890.000	48.659.000	(116.231.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	164.890.000	48.659.000	(116.231.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	164.890.000	48.659.000	(116.231.000)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>318.096.600</b>	<b>0</b>	<b>(318.096.600)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	171.775.800	0	(171.775.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	3.025.800	0	(3.025.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.800	0	(3.025.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	168.750.000	0	(168.750.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.750.000	0	(168.750.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.320.800	0	(146.320.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	146.320.800	0	(146.320.800)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.320.800	0	(146.320.800)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>516.688.120</b>	<b>170.075.150</b>	<b>(346.612.970)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.260.000	1.000.000	(15.260.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	16.260.000	1.000.000	(15.260.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.260.000	1.000.000	(15.260.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.356.300	16.103.000	(27.253.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	43.356.300	16.103.000	(27.253.300)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	43.356.300	16.103.000	(27.253.300)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.071.820	152.972.150	(304.099.670)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	457.071.820	152.972.150	(304.099.670)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	457.071.820	152.972.150	(304.099.670)	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>198.792.600</b>	<b>40.541.100</b>	<b>(158.251.500)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.297.100	23.721.600	(84.575.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	108.297.100	23.721.600	(84.575.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	108.297.100	23.721.600	(84.575.500)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.174.700	7.159.600	(41.015.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	33.174.700	7.159.600	(26.015.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.174.700	7.159.600	(26.015.100)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	15.000.000	0	(15.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	0	(15.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.320.800	9.659.900	(32.660.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	42.320.800	9.659.900	(32.660.900)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	42.320.800	9.659.900	(32.660.900)	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>287.154.459.240</b>	<b>4.448.460.723</b>	<b>(282.705.998.517)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>919.997.680.887</b>	<b>(4.448.460.723)</b>	<b>(924.446.141.610)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>93.080.323.187</b>	<b>20.401.509.600</b>	<b>(72.678.813.587)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.678.813.587	0	(72.678.813.587)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	20.401.509.600	20.401.509.600	0	
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>										<b>93.080.323.187</b>	<b>20.401.509.600</b>	<b>(72.678.813.587)</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>23.406.000.000</b>	<b>702.268.569</b>	<b>(22.703.731.431)</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	8.000.000.000	0	(8.000.000.000)	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.406.000.000	702.268.569	(14.703.731.431)	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>										<b>23.406.000.000</b>	<b>702.268.569</b>	<b>(22.703.731.431)</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	0	60.063.626.609	60.063.626.609	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 01	Pajak Daerah	0	28.098.797.351	28.098.797.351	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	8.483.046.458	8.483.046.458	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	0	23.481.782.800	23.481.782.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	0	1.145.048.795.137	1.145.048.795.137	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	1.095.280.067.190	1.095.280.067.190	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	49.768.727.947	49.768.727.947	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0	16.745.942.682	16.745.942.682	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	3 01	Pendapatan Hibah	0	16.745.942.682	16.745.942.682	
<b>Jumlah Pendapatan</b>									<b>0</b>	<b>1.221.858.364.428</b>	<b>1.221.858.364.428</b>	
0	00	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>				
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	00	0.00	00			<b>KEUANGAN</b>	0	5.313.507.703	5.313.507.703	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	0.00	00			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	0	1.492.479.600	1.492.479.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	00			<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	0	1.492.479.600	1.492.479.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0	116.845.100	116.845.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0	116.845.100	116.845.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	116.845.100	116.845.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	0	155.000.000	155.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	0	155.000.000	155.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	155.000.000	155.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	03			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0	93.158.800	93.158.800	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	93.158.800	93.158.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	93.158.800	93.158.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	04			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	108.604.600	108.604.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	108.604.600	108.604.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	108.604.600	108.604.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	0	150.139.300	150.139.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	150.139.300	150.139.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	150.139.300	150.139.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0	52.127.000	52.127.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	52.127.000	52.127.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	52.127.000	52.127.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	07			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	69.699.000	69.699.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	69.699.000	69.699.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	69.699.000	69.699.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	08			Penetapan Wajib Pajak Daerah	0	258.336.400	258.336.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	0	258.336.400	258.336.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	258.336.400	258.336.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	09			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	140.349.500	140.349.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	140.349.500	140.349.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	140.349.500	140.349.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0	82.038.500	82.038.500	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	82.038.500	82.038.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	82.038.500	82.038.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	11			Penagihan Pajak Daerah	0	80.284.900	80.284.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	11	5	1	BELANJA OPERASI	0	80.284.900	80.284.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	80.284.900	80.284.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	12			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	25.951.500	25.951.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	12	5	1	BELANJA OPERASI	0	25.951.500	25.951.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	12	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.951.500	25.951.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	13			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	0	86.689.900	86.689.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	86.689.900	86.689.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	86.689.900	86.689.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	14			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	73.255.100	73.255.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	14	5	1	BELANJA OPERASI	0	73.255.100	73.255.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	14	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	73.255.100	73.255.100	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>0</b>	<b>3.821.028.103</b>	<b>3.821.028.103</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>23.081.300</b>	<b>23.081.300</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	4.366.700	4.366.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.366.700	4.366.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.366.700	4.366.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1.797.000	1.797.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	1.797.000	1.797.000	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	1.797.000	1.797.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	2.446.200	2.446.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	2.446.200	2.446.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.446.200	2.446.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	14.471.400	14.471.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	14.471.400	14.471.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	14.471.400	14.471.400	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>2.991.715.153</b>	<b>2.991.715.153</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	2.902.700.353	2.902.700.353	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	2.902.700.353	2.902.700.353	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	0	2.902.700.353	2.902.700.353	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	89.014.800	89.014.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	88.484.800	88.484.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	0	88.484.800	88.484.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	0	530.000	530.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	530.000	530.000	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>221.653.950</b>	<b>221.653.950</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	9.973.850	9.973.850	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	9.973.850	9.973.850	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.973.850	9.973.850	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	25.791.700	25.791.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	25.791.700	25.791.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	25.791.700	25.791.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	20.931.300	20.931.300	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	18.753.300	18.753.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	18.753.300	18.753.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	2	BELANJA MODAL	0	2.178.000	2.178.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2.178.000	2.178.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	35.000.000	35.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	35.000.000	35.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	35.000.000	35.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	16.641.300	16.641.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	16.641.300	16.641.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	16.641.300	16.641.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	6.965.800	6.965.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	0	6.965.800	6.965.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.965.800	6.965.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	106.350.000	106.350.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	106.350.000	106.350.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	106.350.000	106.350.000	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>295.776.500</b>	<b>295.776.500</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	171.344.400	171.344.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	0	171.344.400	171.344.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	171.344.400	171.344.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	124.432.100	124.432.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	BELANJA MODAL	0	124.432.100	124.432.100	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	124.432.100	124.432.100	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>194.918.000</b>	<b>194.918.000</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	5.500.000	5.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	5.500.000	5.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.500.000	5.500.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	11.900.000	11.900.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	11.900.000	11.900.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.900.000	11.900.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	177.518.000	177.518.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	177.518.000	177.518.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	177.518.000	177.518.000	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>93.883.200</b>	<b>93.883.200</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	33.378.500	33.378.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	33.378.500	33.378.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	33.378.500	33.378.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	48.719.500	48.719.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	33.719.500	33.719.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	33.719.500	33.719.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	0	15.000.000	15.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	15.000.000	15.000.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	11.785.200	11.785.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1			BELANJA OPERASI	0	11.785.200	11.785.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	11.785.200	11.785.200	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>0</b>	<b>5.313.507.703</b>	<b>5.313.507.703</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>0</b>	<b>1.216.544.856.725</b>	<b>1.216.544.856.725</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.02.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>KEUANGAN</b>	<b>0</b>	<b>281.107.707.360</b>	<b>281.107.707.360</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>276.408.237.420</b>	<b>276.408.237.420</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>0</b>	<b>1.501.236.700</b>	<b>1.501.236.700</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01					Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0	202.986.300	202.986.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	0	202.986.300	202.986.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	202.986.300	202.986.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	177.172.800	177.172.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1			BELANJA OPERASI	0	177.172.800	177.172.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	177.172.800	177.172.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0	61.710.000	61.710.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	0	61.710.000	61.710.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	61.710.000	61.710.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	0	58.175.400	58.175.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	0	58.175.400	58.175.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	58.175.400	58.175.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	377.847.500	377.847.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	5	1			BELANJA OPERASI	0	377.847.500	377.847.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	5	1	01		Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	376.637.500	376.637.500	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	08			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0	450.715.600	450.715.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	0	450.715.600	450.715.600		
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	449.505.600	449.505.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	09				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0	5.085.000	5.085.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	5.085.000	5.085.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	1	01	Belanja Pegawai	0	1.210.000	1.210.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.875.000	3.875.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	11				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	27.111.900	27.111.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	11	5	1		BELANJA OPERASI	0	27.111.900	27.111.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	27.111.900	27.111.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	13				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	140.432.200	140.432.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	1		BELANJA OPERASI	0	140.432.200	140.432.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	13	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	140.432.200	140.432.200	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>418.548.100</b>	<b>418.548.100</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0	81.421.900	81.421.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	81.421.900	81.421.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	81.421.900	81.421.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0	24.447.400	24.447.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	24.447.400	24.447.400	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	24.447.400	24.447.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	06				Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	63.691.000	63.691.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	06	5	1		BELANJA OPERASI	0	63.691.000	63.691.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	63.691.000	63.691.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	07				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	21.661.800	21.661.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	07	5	1		BELANJA OPERASI	0	21.661.800	21.661.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	21.661.800	21.661.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	11				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	227.326.000	227.326.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	11	5	1		BELANJA OPERASI	0	227.326.000	227.326.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	11	5	1	01	Belanja Pegawai	0	227.326.000	227.326.000	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>503.193.600</b>	<b>503.193.600</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	02				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	0	27.735.000	27.735.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	27.735.000	27.735.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	27.735.000	27.735.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	54.313.500	54.313.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	54.313.500	54.313.500	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	54.313.500	54.313.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	04				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	106.567.300	106.567.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	106.567.300	106.567.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	106.567.300	106.567.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	05				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0	167.577.900	167.577.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	05	5	1		BELANJA OPERASI	0	167.577.900	167.577.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	167.577.900	167.577.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	09				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	50.000.000	50.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	50.000.000	50.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	50.000.000	50.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	10				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	96.999.900	96.999.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	10	5	1		BELANJA OPERASI	0	96.999.900	96.999.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	96.999.900	96.999.900	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>				<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>273.764.885.020</b>	<b>273.764.885.020</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	04				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0	3.028.391.176	3.028.391.176	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	04	5	1		BELANJA OPERASI	0	3.028.391.176	3.028.391.176	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	04	5	1	03	Belanja Bunga	0	3.028.391.176	3.028.391.176	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	253.114.283.200	253.114.283.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	0	83.123.700	83.123.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	83.123.700	83.123.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08	5	4		BELANJA TRANSFER	0	253.031.159.500	253.031.159.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	08	5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	0	253.031.159.500	253.031.159.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	09				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	14.322.919.900	14.322.919.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	09	5	3		BELANJA TIDAK TERDUGA	0	14.322.919.900	14.322.919.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	09	5	3	01	Belanja Tidak Terduga	0	14.322.919.900	14.322.919.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	10				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	3.299.290.744	3.299.290.744	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	10	5	4		BELANJA TRANSFER	0	3.299.290.744	3.299.290.744	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.04	10	5	4	01	Belanja Bagi Hasil	0	3.299.290.744	3.299.290.744	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>				<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>220.374.000</b>	<b>220.374.000</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.05	02				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0	130.359.300	130.359.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.05	02	5	1		BELANJA OPERASI	0	130.359.300	130.359.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.05	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	130.359.300	130.359.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.05	03				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	90.014.700	90.014.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.05	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	90.014.700	90.014.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	2.05	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	90.014.700	90.014.700	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	0.00	00		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>758.912.600</b>	<b>758.912.600</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	00		<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>0</b>	<b>758.912.600</b>	<b>758.912.600</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	136.000.000	136.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5 1	BELANJA OPERASI	0	136.000.000	136.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	136.000.000	136.000.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	76.733.000	76.733.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	05	5 1	BELANJA OPERASI	0	76.733.000	76.733.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	76.733.000	76.733.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	0	270.742.100	270.742.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	0	270.742.100	270.742.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	270.742.100	270.742.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	63.498.300	63.498.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	09	5 1	BELANJA OPERASI	0	63.498.300	63.498.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	63.498.300	63.498.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0	94.640.500	94.640.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	10	5 1	BELANJA OPERASI	0	94.640.500	94.640.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	94.640.500	94.640.500	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	0	72.848.300	72.848.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	12	5 1	BELANJA OPERASI	0	72.848.300	72.848.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	12	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	72.848.300	72.848.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	44.450.400	44.450.400	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	13	5	1	BELANJA OPERASI	0	44.450.400	44.450.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	13	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	44.450.400	44.450.400	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>0</b>	<b>3.940.557.340</b>	<b>3.940.557.340</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>110.537.300</b>	<b>110.537.300</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	5.207.300	5.207.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	5.207.300	5.207.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.207.300	5.207.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	5.411.200	5.411.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	5.411.200	5.411.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	5.411.200	5.411.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	4.996.400	4.996.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.996.400	4.996.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.996.400	4.996.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	94.922.400	94.922.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	0	94.922.400	94.922.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	94.922.400	94.922.400	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>2.370.483.185</b>	<b>2.370.483.185</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	2.151.237.585	2.151.237.585	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	2.151.237.585	2.151.237.585	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	0	2.151.237.585	2.151.237.585	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	177.667.000	177.667.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN  
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	177.667.000	177.667.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	01	0	55.082.800	55.082.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	02	0	122.584.200	122.584.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	41.578.600	41.578.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	41.578.600	41.578.600	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	5	1	02	0	41.578.600	41.578.600	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>0</b>	<b>517.544.900</b>	<b>517.544.900</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	23.008.700	23.008.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	23.008.700	23.008.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	02	0	23.008.700	23.008.700	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	84.760.900	84.760.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	79.960.900	79.960.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	02	0	79.960.900	79.960.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	0	4.800.000	4.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	2	02	0	4.800.000	4.800.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	24.850.200	24.850.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	24.850.200	24.850.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1	02	0	24.850.200	24.850.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	70.100.000	70.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	70.100.000	70.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	02	0	70.100.000	70.100.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	82.935.400	82.935.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	0	82.935.400	82.935.400	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	02	0	82.935.400	82.935.400	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	20.993.100	20.993.100	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	20.993.100	20.993.100
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	20.993.100	20.993.100
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	29.924.600	29.924.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08	5 1	BELANJA OPERASI	0	19.924.600	19.924.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	19.924.600	19.924.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08	5 2	BELANJA MODAL	0	10.000.000	10.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	08	5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	10.000.000	10.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	180.972.000	180.972.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	0	180.972.000	180.972.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	180.972.000	180.972.000
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>378.325.070</b>	<b>378.325.070</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	339.136.470	339.136.470
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 2	BELANJA MODAL	0	339.136.470	339.136.470
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	339.136.470	339.136.470
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	39.188.600	39.188.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 1	BELANJA OPERASI	0	2.600.000	2.600.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	2.600.000	2.600.000
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 2	BELANJA MODAL	0	36.588.600	36.588.600
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	10	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	36.588.600	36.588.600
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>246.167.140</b>	<b>246.167.140</b>
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	9.760.000	9.760.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.760.000	9.760.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.760.000	9.760.000	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	35.695.200	35.695.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	35.695.200	35.695.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	35.695.200	35.695.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	200.711.940	200.711.940	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	0	200.711.940	200.711.940	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	200.711.940	200.711.940	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>0</b>	<b>317.499.745</b>	<b>317.499.745</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	107.364.800	107.364.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	0	107.364.800	107.364.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	107.364.800	107.364.800	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	96.263.745	96.263.745	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2	BELANJA MODAL	0	96.263.745	96.263.745	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	96.263.745	96.263.745	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	113.871.200	113.871.200	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	0	71.940.300	71.940.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	71.940.300	71.940.300	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	2	BELANJA MODAL	0	41.930.900	41.930.900	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	10	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	41.930.900	41.930.900	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN  
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>0</b>	<b>281.107.707.360</b>	<b>281.107.707.360</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>0</b>	<b>(281.107.707.360)</b>	<b>(281.107.707.360)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>1</b>			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>171.934.953.658</b>	<b>171.934.953.658</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	171.934.953.658	171.934.953.658	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	1	04		Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>171.934.953.658</b>	<b>171.934.953.658</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>5.02.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>	<b>2</b>			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>17.755.380.126</b>	<b>17.755.380.126</b>	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	2	02		Penyertaan Modal Daerah	0	3.051.648.695	3.051.648.695	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	6	2	03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	14.703.731.431	14.703.731.431	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>17.755.380.126</b>	<b>17.755.380.126</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>4.953.675.625</b>	<b>5.054.866.012</b>	<b>101.190.387</b>	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.468.833.500</b>	<b>1.404.879.764</b>	<b>(63.953.736)</b>	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>631.222.800</b>	<b>585.933.300</b>	<b>(45.289.500)</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	18.432.900	18.432.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	18.432.900	18.432.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	18.432.900	18.432.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	500.000.000	479.710.500	(20.289.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	500.000.000	479.710.500	(20.289.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000	479.710.500	(20.289.500)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	22.789.900	22.789.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	22.789.900	22.789.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	22.789.900	22.789.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	70.000.000	65.000.000	(5.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	BELANJA OPERASI	70.000.000	65.000.000	(5.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	65.000.000	(5.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	20.000.000	0	(20.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	BELANJA OPERASI	14.223.300	0	(14.223.300)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	Belanja Barang dan Jasa	14.223.300	0	(14.223.300)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	BELANJA MODAL	5.776.700	0	(5.776.700)	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.776.700	0	(5.776.700)	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>0</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	55.000.000	55.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	55.000.000	55.000.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	55.000.000	0	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>				<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>734.999.800</b>	<b>734.305.464</b>	<b>(694.336)</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	150.000.000	103.566.000	(46.434.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1		BELANJA OPERASI	150.000.000	103.566.000	(46.434.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	103.566.000	(46.434.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	85.000.000	165.000.000	80.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1		BELANJA OPERASI	85.000.000	165.000.000	80.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000	165.000.000	80.000.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	499.999.800	465.739.464	(34.260.336)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	1		BELANJA OPERASI	499.999.800	465.739.464	(34.260.336)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	499.999.800	465.739.464	(34.260.336)	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>	<b>00</b>				<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>47.610.900</b>	<b>29.641.000</b>	<b>(17.969.900)</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07				Pembinaan Disiplin ASN	17.969.900	0	(17.969.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1		BELANJA OPERASI	17.969.900	0	(17.969.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.969.900	0	(17.969.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29.641.000	29.641.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1		BELANJA OPERASI	29.641.000	29.641.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	29.641.000	29.641.000	0	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.484.842.125</b>	<b>3.649.986.248</b>	<b>165.144.123</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.625.400</b>	<b>17.625.400</b>	<b>0</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.870.900	3.870.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	3.870.900	3.870.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.870.900	3.870.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.299.900	5.299.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	5.299.900	5.299.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.299.900	5.299.900	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.454.600	8.454.600	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	8.454.600	8.454.600	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.454.600	8.454.600	0	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.755.765.911</b>	<b>2.853.764.048</b>	<b>97.998.137</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.690.440.911	2.793.439.048	102.998.137	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.690.440.911	2.793.439.048	102.998.137	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	2.690.440.911	2.793.439.048	102.998.137	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.075.200	55.075.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	55.075.200	55.075.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	55.075.200	55.075.200	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.249.800	5.249.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	5.249.800	5.249.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.249.800	5.249.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	0	(5.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000	0	(5.000.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	(5.000.000)	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3.140.300</b>	<b>3.140.300</b>	<b>0</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.140.300	3.140.300	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	3.140.300	3.140.300	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.03	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.140.300	3.140.300	0	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>370.435.640</b>	<b>420.795.640</b>	<b>50.360.000</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.212.700	5.212.700	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	5.212.700	5.212.700	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.212.700	5.212.700	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.762.700	58.762.700	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	58.602.700	58.602.700	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.602.700	58.602.700	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	160.000	160.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.000	160.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.722.100	9.722.100	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	9.722.100	9.722.100	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.722.100	9.722.100	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.496.000	26.496.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	26.496.000	26.496.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.496.000	26.496.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.367.640	15.367.640	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	15.367.640	15.367.640	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.367.640	15.367.640	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.889.500	4.889.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1	BELANJA OPERASI	4.889.500	4.889.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.889.500	4.889.500	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.985.000	300.345.000	50.360.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	249.985.000	300.345.000	50.360.000	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.985.000	300.345.000	50.360.000	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>109.978.000</b>	<b>107.237.900</b>	<b>(2.740.100)</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.978.000	107.237.900	(2.740.100)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	6.570.000	4.970.000	(1.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	1.570.000	1.570.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	3.400.000	(1.600.000)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	103.408.000	102.267.900	(1.140.100)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.408.000	102.267.900	(1.140.100)	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.199.600</b>	<b>62.199.600</b>	<b>0</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.202.800	7.202.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	7.202.800	7.202.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.202.800	7.202.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.697.274</b>	<b>185.223.360</b>	<b>19.526.086</b>	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.080.800	116.741.786	25.660.986	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	91.080.800	116.741.786	25.660.986	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	91.080.800	116.741.786	25.660.986	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.987.100	37.852.200	(6.134.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	43.987.100	37.852.200	(6.134.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.987.100	37.852.200	(6.134.900)	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.629.374	30.629.374	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2	BELANJA MODAL	30.629.374	30.629.374	0	
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.629.374	30.629.374	0	
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>1.416.356.000</b>	<b>1.410.308.800</b>	<b>(6.047.200)</b>	
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>1.416.356.000</b>	<b>1.410.308.800</b>	<b>(6.047.200)</b>	
<b>5</b>	<b>04</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>1.416.356.000</b>	<b>1.410.308.800</b>	<b>(6.047.200)</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.416.356.000	1.410.308.800	(6.047.200)		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.416.356.000	1.410.308.800	(6.047.200)		
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.416.356.000	1.410.308.800	(6.047.200)	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>6.370.031.625</b>	<b>6.465.174.812</b>	<b>95.143.187</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(6.370.031.625)</b>	<b>(6.465.174.812)</b>	<b>(95.143.187)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
								<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>		<b>BELANJA</b>				
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>15.664.066.882</b>	<b>10.785.558.007</b>	<b>(4.878.508.875)</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>5.345.000.000</b>	<b>1.903.695.000</b>	<b>(3.441.305.000)</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>997.700.000</b>	<b>754.055.000</b>	<b>(243.645.000)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	252.000.000	179.900.000	(72.100.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	252.000.000	179.900.000	(72.100.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000	179.900.000	(72.100.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	252.000.000	151.000.000	(101.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	252.000.000	151.000.000	(101.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000	151.000.000	(101.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03			Reviu Laporan Kinerja	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04			Reviu Laporan Keuangan	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	0	(15.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05			Pengawasan Desa	190.000.000	188.900.000	(1.100.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	190.000.000	188.900.000	(1.100.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000	188.900.000	(1.100.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06			Kerjasama Pengawasan Internal	65.000.000	26.220.000	(38.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	65.000.000	26.220.000	(38.780.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000	26.220.000	(38.780.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	208.700.000	208.035.000	(665.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5 1	BELANJA OPERASI	208.700.000	208.035.000	(665.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	208.700.000	208.035.000	(665.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>4.347.300.000</b>	<b>1.149.640.000</b>	<b>(3.197.660.000)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	0	(100.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4.247.300.000	1.149.640.000	(3.097.660.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	4.247.300.000	1.149.640.000	(3.097.660.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.247.300.000	1.149.640.000	(3.097.660.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>712.000.000</b>	<b>208.546.000</b>	<b>(503.454.000)</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>225.000.000</b>	<b>32.800.000</b>	<b>(192.200.000)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	100.000.000	16.400.000	(83.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000	16.400.000	(83.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	16.400.000	(83.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	125.000.000	16.400.000	(108.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5 1	BELANJA OPERASI	125.000.000	16.400.000	(108.600.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000	16.400.000	(108.600.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>487.000.000</b>	<b>175.746.000</b>	<b>(311.254.000)</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	94.500.000	0	(94.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	94.500.000	0	(94.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000	0	(94.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	105.000.000	24.221.000	(80.779.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	105.000.000	24.221.000	(80.779.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000	24.221.000	(80.779.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	55.000.000	10.415.000	(44.585.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	55.000.000	10.415.000	(44.585.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000	10.415.000	(44.585.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	232.500.000	141.110.000	(91.390.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1	BELANJA OPERASI	232.500.000	141.110.000	(91.390.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	232.500.000	141.110.000	(91.390.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.607.066.882</b>	<b>8.673.317.007</b>	<b>(933.749.875)</b>	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.000.000</b>	<b>0</b>	<b>(17.000.000)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	0	(10.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	10.000.000	0	(10.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	0	(10.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	0	(5.000.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	5.000.000	0	(5.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	0	(5.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	0	(2.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	2.000.000	0	(2.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	0	(2.000.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.204.922.682</b>	<b>4.836.015.007</b>	<b>(1.368.907.675)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.152.439.082	4.787.531.407	(1.364.907.675)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.152.439.082	4.787.531.407	(1.364.907.675)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1 01	Belanja Pegawai	6.152.439.082	4.787.531.407	(1.364.907.675)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.483.600	48.483.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	48.483.600	48.483.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	48.483.600	48.483.600	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	0	(4.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	0	(4.000.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	0	(4.000.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>765.000.000</b>	<b>293.500.000</b>	<b>(471.500.000)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	765.000.000	293.500.000	(471.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1	BELANJA OPERASI	765.000.000	293.500.000	(471.500.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	765.000.000	293.500.000	(471.500.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>994.706.000</b>	<b>983.773.800</b>	<b>(10.932.200)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.931.900	10.500.500	568.600	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	9.931.900	10.500.500	568.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.931.900	10.500.500	568.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	100.000.000	100.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000	100.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	15.000.000	15.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000	15.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.422.100	47.419.300	1.997.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	45.422.100	47.419.300	1.997.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.422.100	47.419.300	1.997.200	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.352.000	14.352.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	14.352.000	14.352.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.352.000	14.352.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	810.000.000	796.502.000	(13.498.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	810.000.000	796.502.000	(13.498.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	810.000.000	796.502.000	(13.498.000)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1.225.500.000</b>	<b>1.758.829.600</b>	<b>533.329.600</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.225.500.000	1.758.829.600	533.329.600	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1	BELANJA OPERASI	172.198.300	214.624.400	42.426.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 01	Belanja Pegawai	6.370.000	12.570.000	6.200.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	165.828.300	202.054.400	36.226.100	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	1.053.301.700	1.544.205.200	490.903.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.053.301.700	1.544.205.200	490.903.500	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>110.376.800</b>	<b>97.880.000</b>	<b>(12.496.800)</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	6.000.000	6.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	6.000.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.880.000	49.880.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	49.880.000	49.880.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.880.000	49.880.000	0	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	42.000.000	(12.496.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	42.000.000	(12.496.800)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	42.000.000	(12.496.800)	
<b>6</b>	<b>01</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>289.561.400</b>	<b>703.318.600</b>	<b>413.757.200</b>	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.969.400	132.315.900	54.346.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	77.969.400	132.315.900	54.346.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.969.400	132.315.900	54.346.500	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.893.000	305.142.700	106.249.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	198.893.000	305.142.700	106.249.700	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	198.893.000	305.142.700	106.249.700	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.239.000	251.000.000	247.761.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	3.239.000	0	(3.239.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.239.000	0	(3.239.000)	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2		BELANJA MODAL	0	251.000.000	251.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	251.000.000	251.000.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.460.000	14.860.000	5.400.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1		BELANJA OPERASI	9.460.000	14.860.000	5.400.000	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.460.000	14.860.000	5.400.000	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>15.664.066.882</b>	<b>10.785.558.007</b>	<b>(4.878.508.875)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(15.664.066.882)</b>	<b>(10.785.558.007)</b>	<b>4.878.508.875</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>96.605.390</b>	<b>96.605.390</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	96.605.390	96.605.390	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>96.605.390</b>	<b>96.605.390</b>	<b>0</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00					<b>KECAMATAN</b>	<b>12.144.307.233</b>	<b>11.238.790.595</b>	<b>(905.516.638)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	0.00	00					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.715.464.750</b>	<b>5.800.523.017</b>	<b>(914.941.733)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	00					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.844.600</b>	<b>1.844.600</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.844.600	1.844.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.844.600	1.844.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.844.600	1.844.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	00					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.438.766.600</b>	<b>5.464.002.267</b>	<b>(974.764.333)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.395.627.100	5.420.862.767	(974.764.333)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	6.395.627.100	5.420.862.767	(974.764.333)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	6.395.627.100	5.420.862.767	(974.764.333)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.427.600	41.427.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	41.427.600	41.427.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	41.427.600	41.427.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.711.900	1.711.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	1.711.900	1.711.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.711.900	1.711.900	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>115.024.200</b>	<b>169.398.300</b>	<b>54.374.100</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.400	5.971.200	3.980.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.990.400	5.971.200	3.980.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.990.400	5.971.200	3.980.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.999.700	108.237.100	45.237.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	58.170.100	83.265.500	25.095.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 01	Belanja Pegawai	15.048.000	15.048.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.122.100	68.217.500	25.095.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2	BELANJA MODAL	4.829.600	24.971.600	20.142.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.829.600	24.971.600	20.142.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.493.700	8.490.600	3.996.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	4.493.700	6.348.600	1.854.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.493.700	6.348.600	1.854.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2	BELANJA MODAL	0	2.142.000	2.142.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	2.142.000	2.142.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.740.400	19.899.400	11.159.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	8.740.400	19.899.400	11.159.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.740.400	19.899.400	11.159.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.800.000	26.800.000	(10.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	36.800.000	26.800.000	(10.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.800.000	26.800.000	(10.000.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.464.000</b>	<b>23.914.000</b>	<b>8.450.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	15.464.000	15.464.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2	BELANJA MODAL	15.464.000	15.464.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.464.000	15.464.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	8.450.000	8.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	8.450.000	8.450.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	8.450.000	8.450.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91.874.700</b>	<b>85.874.500</b>	<b>(6.000.200)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.300.000	1.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000	1.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.912.300	11.912.100	(6.000.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	17.912.300	11.912.100	(6.000.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.912.300	11.912.100	(6.000.200)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	72.662.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	72.662.400	72.662.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.662.400	72.662.400	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.490.650</b>	<b>55.489.350</b>	<b>2.998.700</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.767.750	40.766.450	2.998.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	37.767.750	40.766.450	2.998.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.767.750	40.766.450	2.998.700	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.722.900	14.722.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	14.722.900	14.722.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.722.900	14.722.900	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>61.393.700</b>	<b>71.693.200</b>	<b>10.299.500</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>61.393.700</b>	<b>71.693.200</b>	<b>10.299.500</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	61.393.700	71.693.200	10.299.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1	BELANJA OPERASI	61.393.700	71.693.200	10.299.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.393.700	71.693.200	10.299.500	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>5.367.448.783</b>	<b>5.366.574.378</b>	<b>(874.405)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>5.367.448.783</b>	<b>5.366.574.378</b>	<b>(874.405)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.999.000	35.999.000	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	30.999.000	35.999.000	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.999.000	35.999.000	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.694.740.433	3.822.648.203	127.907.770	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5 1	BELANJA OPERASI	160.508.700	158.294.900	(2.213.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5 1 01	Belanja Pegawai	54.150.000	57.000.000	2.850.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.358.700	101.294.900	(5.063.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5 2	BELANJA MODAL	3.534.231.733	3.664.353.303	130.121.570	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KANTOR KECAMATAN TARUTUNG

Kode Rekening									Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.416.800	89.416.800	(15.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.730.241.932	1.419.263.374	(310.978.558)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.699.573.001	2.155.673.129	456.100.128	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.641.709.350	1.507.927.175	(133.782.175)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	1.524.019.950	1.365.045.775	(158.974.175)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	118.758.000	117.138.000	(1.620.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.261.950	1.247.907.775	(157.354.175)	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	117.689.400	142.881.400	25.192.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.689.400	142.881.400	25.192.000	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>12.144.307.233</b>	<b>11.238.790.595</b>	<b>(905.516.638)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(12.047.701.843)</b>	<b>(11.142.185.205)</b>	<b>905.516.638</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>1.681.455.350</b>	<b>1.863.244.418</b>	<b>181.789.068</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.620.005.750</b>	<b>1.778.630.918</b>	<b>158.625.168</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.440.150.900</b>	<b>1.571.940.068</b>	<b>131.789.168</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.401.630.400	1.533.419.568	131.789.168	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.401.630.400	1.533.419.568	131.789.168	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.401.630.400	1.533.419.568	131.789.168	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.900.000	36.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	36.900.000	36.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	36.900.000	36.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.620.500	1.620.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.620.500	1.620.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.500	1.620.500	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>76.826.900</b>	<b>93.462.900</b>	<b>16.636.000</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.185.400	2.185.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.185.400	2.185.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.400	2.185.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.999.100	28.387.600	388.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	27.999.100	28.387.600	388.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.999.100	28.387.600	388.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.900	1.997.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	1.997.900	1.997.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.900	1.997.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.340.500	6.903.000	3.562.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.340.500	6.903.000	3.562.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.340.500	6.903.000	3.562.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.699.000	2.699.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.699.000	2.699.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.699.000	2.699.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.605.000	51.290.000	12.685.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	38.605.000	51.290.000	12.685.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.605.000	51.290.000	12.685.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	3.000.000	3.000.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>67.111.800</b>	<b>67.411.800</b>	<b>300.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000	550.000	300.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	250.000	550.000	300.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000	550.000	300.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.365.000	12.365.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	12.365.000	12.365.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.365.000	12.365.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.416.150</b>	<b>41.316.150</b>	<b>9.900.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.111.450	32.011.450	9.900.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	22.111.450	32.011.450	9.900.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.111.450	32.011.450	9.900.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.997.000	3.997.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	3.997.000	3.997.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.997.000	3.997.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.307.700	5.307.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	5.307.700	5.307.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.307.700	5.307.700	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>61.449.600</b>	<b>84.613.500</b>	<b>23.163.900</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>61.449.600</b>	<b>84.613.500</b>	<b>23.163.900</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	61.449.600	84.613.500	23.163.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	61.449.600	84.613.500	23.163.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.449.600	84.613.500	23.163.900	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1.681.455.350</b>	<b>1.863.244.418</b>	<b>181.789.068</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(1.681.455.350)</b>	<b>(1.863.244.418)</b>	<b>(181.789.068)</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>1.857.421.092</b>	<b>1.485.771.179</b>	<b>(371.649.913)</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.784.789.092</b>	<b>1.413.139.179</b>	<b>(371.649.913)</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.533.800</b>	<b>16.533.800</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.910.000	13.910.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	13.910.000	13.910.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000	13.910.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.623.800	2.623.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1		BELANJA OPERASI	2.623.800	2.623.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.623.800	2.623.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.607.371.292</b>	<b>1.185.833.129</b>	<b>(421.538.163)</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.574.108.092	1.152.569.929	(421.538.163)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.574.108.092	1.152.569.929	(421.538.163)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.574.108.092	1.152.569.929	(421.538.163)	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.640.800	30.640.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	30.640.800	30.640.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	30.640.800	30.640.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.622.400	2.622.400	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	2.622.400	2.622.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.622.400	2.622.400	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>56.384.900</b>	<b>96.276.800</b>	<b>39.891.900</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.025.700	9.024.500	4.998.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.025.700	9.024.500	4.998.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.025.700	9.024.500	4.998.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.218.800	21.416.600	10.197.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	11.218.800	21.416.600	10.197.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.218.800	21.416.600	10.197.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.337.500	17.335.300	9.997.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1	BELANJA OPERASI	7.337.500	17.335.300	9.997.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.337.500	17.335.300	9.997.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.968.300	35.665.800	14.697.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	20.968.300	35.665.800	14.697.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.968.300	35.665.800	14.697.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.834.600	12.834.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	12.834.600	12.834.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.834.600	12.834.600	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>29.059.300</b>	<b>29.059.300</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05			Pengadaan Mebel	9.152.000	9.152.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	5	2	BELANJA MODAL	9.152.000	9.152.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.152.000	9.152.000	0	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.907.300	19.907.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	19.907.300	19.907.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.907.300	19.907.300	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.058.100</b>	<b>60.058.100</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000	570.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	570.000	570.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	570.000	570.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.991.300	4.991.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	4.991.300	4.991.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.991.300	4.991.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.381.700</b>	<b>25.378.050</b>	<b>9.996.350</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.381.700	25.378.050	9.996.350		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	15.381.700	25.378.050	9.996.350		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.381.700	25.378.050	9.996.350	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>72.632.000</b>	<b>72.632.000</b>	<b>0</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>72.632.000</b>	<b>72.632.000</b>	<b>0</b>		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.632.000	72.632.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	72.632.000	72.632.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	72.632.000	72.632.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1.857.421.092</b>	<b>1.485.771.179</b>	<b>(371.649.913)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(1.857.421.092)</b>	<b>(1.485.771.179)</b>	<b>371.649.913</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				<b>BELANJA</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>KEUANGAN</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>
<b>5</b>	<b>02</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>
5	02	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	12					Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5	02	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	12	5	1			BELANJA OPERASI
5	02	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	12	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>KECAMATAN</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	05	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	05	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.972.900	1.972.900	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.972.900	1.972.900	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.754.290.900</b>	<b>2.022.323.442</b>	<b>(731.967.458)</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.714.804.100	1.982.836.642	(731.967.458)		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.714.804.100	1.982.836.642	(731.967.458)		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.714.804.100	1.982.836.642	(731.967.458)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.782.800	36.782.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	36.782.800	36.782.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	29.227.200	29.227.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.555.600	7.555.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.120.000	1.120.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	1.120.000	1.120.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000	1.120.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.584.000	1.584.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	1	BELANJA OPERASI	1.584.000	1.584.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000	1.584.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>997.700</b>	<b>997.700</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	997.700	997.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06	5	1	BELANJA OPERASI	997.700	997.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.03	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	997.700	997.700	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>46.835.040</b>	<b>55.733.540</b>	<b>8.898.500</b>		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.073.500	1.872.500	799.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	BELANJA OPERASI	1.073.500	1.872.500	799.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	Belanja Barang dan Jasa	1.073.500	1.872.500	799.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.136.300	11.736.300	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	BELANJA OPERASI	8.136.300	11.736.300	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	Belanja Barang dan Jasa	8.136.300	11.736.300	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.315.400	5.214.900	899.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	BELANJA OPERASI	4.015.400	4.914.900	899.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	Belanja Barang dan Jasa	4.015.400	4.914.900	899.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	BELANJA MODAL	300.000	300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000	300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.850.000	23.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	BELANJA OPERASI	23.850.000	23.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000	23.850.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.734.000	1.734.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	BELANJA OPERASI	1.734.000	1.734.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	Belanja Barang dan Jasa	1.734.000	1.734.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.115.840	3.115.840	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	BELANJA OPERASI	3.115.840	3.115.840	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	Belanja Barang dan Jasa	3.115.840	3.115.840	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.610.000	8.210.000	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	BELANJA OPERASI	4.610.000	8.210.000	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	Belanja Barang dan Jasa	4.610.000	8.210.000	3.600.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.690.000</b>	<b>40.690.000</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.690.000	40.690.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	40.690.000	40.690.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.690.000	40.690.000	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.556.500</b>	<b>65.756.500</b>	<b>2.200.000</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	800.000	400.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	400.000	800.000	400.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	400.000	800.000	400.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.659.700	10.459.700	1.800.000			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	8.659.700	10.459.700	1.800.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.659.700	10.459.700	1.800.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.504.900</b>	<b>59.718.250</b>	<b>19.213.350</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.681.800	33.078.250	9.396.450			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	23.681.800	33.078.250	9.396.450	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	23.681.800	33.078.250	9.396.450
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.823.100	26.640.000	9.816.900			
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	16.823.100	26.640.000	9.816.900	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.823.100	26.640.000	9.816.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>39.822.200</b>	<b>39.822.200</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>39.822.200</b>	<b>39.822.200</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.822.200	39.822.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	39.822.200	39.822.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	39.822.200	39.822.200	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>780.040.750</b>	<b>791.581.421</b>	<b>11.540.671</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>11.545.000</b>	<b>11.545.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	11.545.000	11.545.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	0	11.545.000	11.545.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	11.545.000	11.545.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>				<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>780.040.750</b>	<b>780.036.421</b>	<b>(4.329)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	715.229.150	715.224.821	(4.329)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.048.500	81.783.800	53.735.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	18.228.000	24.348.000	6.120.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.820.500	57.435.800	47.615.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	687.180.650	633.441.021	(53.739.629)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	687.180.650	633.441.021	(53.739.629)	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.811.600	64.811.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	64.811.600	64.811.600	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	64.811.600	64.811.600	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	18				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0	6.500.000	6.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	18	5	1		BELANJA OPERASI	0	6.500.000	6.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	06	2.01	18	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	6.500.000	6.500.000	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>3.773.895.590</b>	<b>3.091.278.253</b>	<b>(682.617.337)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(3.773.895.590)</b>	<b>(3.091.278.253)</b>	<b>682.617.337</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>3.655.882.285</b>	<b>3.465.162.612</b>	<b>(190.719.673)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.777.519.912</b>	<b>2.579.854.286</b>	<b>(197.665.626)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.607.400</b>	<b>2.607.400</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.607.400	2.607.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.607.400	2.607.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.607.400	2.607.400	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.646.300.312</b>	<b>2.413.207.586</b>	<b>(233.092.726)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.619.382.612	2.378.662.686	(240.719.926)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.619.382.612	2.378.662.686	(240.719.926)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	2.619.382.612	2.378.662.686	(240.719.926)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.288.000	31.915.200	7.627.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	24.288.000	31.915.200	7.627.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	24.288.000	31.915.200	7.627.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.629.700	2.629.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	2.629.700	2.629.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.629.700	2.629.700	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>31.958.300</b>	<b>42.184.400</b>	<b>10.226.100</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.047.800	20.564.500	5.516.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	15.047.800	20.564.500	5.516.700	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.047.800	20.564.500	5.516.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.170.000	14.170.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	14.170.000	14.170.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.170.000	14.170.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.740.500	2.784.900	44.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.740.500	2.784.900	44.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.740.500	2.784.900	44.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	4.665.000	4.665.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	4.665.000	4.665.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.665.000	4.665.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>0</b>	<b>25.201.000</b>	<b>25.201.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	25.201.000	25.201.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	0	25.201.000	25.201.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	25.201.000	25.201.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>59.323.900</b>	<b>59.323.900</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	630.000	630.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	630.000	630.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	630.000	630.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.197.100	4.197.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.197.100	4.197.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.197.100	4.197.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>37.330.000</b>	<b>37.330.000</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.330.000	37.330.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	BELANJA OPERASI	37.330.000	37.330.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	01	2.09	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	37.330.000	37.330.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>127.627.500</b>	<b>134.573.500</b>	<b>6.946.000</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>127.627.500</b>	<b>134.573.500</b>	<b>6.946.000</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	127.627.500	134.573.500	6.946.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	127.627.500	134.573.500	6.946.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	127.627.500	134.573.500	6.946.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>750.734.873</b>	<b>750.734.826</b>	<b>(47)</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>750.734.873</b>	<b>750.734.826</b>	<b>(47)</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.999.600	4.999.600	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	4.999.600	4.999.600	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.600	4.999.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	626.512.873	621.396.326	(5.116.547)		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	12.836.000	0	(12.836.000)		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	11.080.000	0	(11.080.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.756.000	0	(1.756.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	613.676.873	621.396.326	7.719.453	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	152.760.317	155.890.317	3.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	460.916.556	465.506.009	4.589.453	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	119.222.400	124.338.900	5.116.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	119.222.400	124.338.900	5.116.500	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	15.048.000	15.048.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	104.174.400	109.290.900	5.116.500	
								<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.655.882.285</b>	<b>3.465.162.612</b>	<b>(190.719.673)</b>		
								<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(3.655.882.285)</b>	<b>(3.465.162.612)</b>	<b>190.719.673</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.05.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
								<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.593.600</b>	<b>1.593.600</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	1.593.600	1.593.600	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>1.593.600</b>	<b>1.593.600</b>	<b>0</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	00	0.00	00					<b>KECAMATAN</b>	<b>2.820.900.581</b>	<b>2.647.074.534</b>	<b>(173.826.047)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	0.00	00					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.092.611.946</b>	<b>1.882.285.899</b>	<b>(210.326.047)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	00					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.499.900</b>	<b>4.499.900</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.499.900	4.499.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	4.499.900	4.499.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.499.900	4.499.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	00					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.953.234.046</b>	<b>1.729.491.099</b>	<b>(223.742.947)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.910.061.046	1.686.318.099	(223.742.947)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.910.061.046	1.686.318.099	(223.742.947)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.910.061.046	1.686.318.099	(223.742.947)	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.673.100	38.673.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	38.673.100	38.673.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	38.571.600	38.571.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	101.500	101.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.499.900	4.499.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	4.499.900	4.499.900	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.900	4.499.900	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>47.846.300</b>	<b>56.266.300</b>	<b>8.420.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.334.900	3.334.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.334.900	3.334.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.334.900	3.334.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.493.600	17.493.600	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	12.493.600	17.493.600	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	02	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.493.600	17.493.600	5.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.730.000	26.730.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	26.730.000	26.730.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.730.000	26.730.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.287.800	5.287.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	5.287.800	5.287.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.287.800	5.287.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	3.420.000	3.420.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	3.420.000	3.420.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.420.000	3.420.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.891.300</b>	<b>60.891.300</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.000.000	3.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000	3.300.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	3.300.000	3.300.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000	3.300.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.591.300	54.591.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.591.300	54.591.300	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.591.300	54.591.300	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.140.400</b>	<b>31.137.300</b>	<b>4.996.900</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.140.400	31.137.300	4.996.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	26.140.400	31.137.300	4.996.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	26.140.400	31.137.300	4.996.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>97.805.300</b>	<b>134.305.300</b>	<b>36.500.000</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>97.805.300</b>	<b>134.305.300</b>	<b>36.500.000</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	97.805.300	134.305.300	36.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	97.805.300	134.305.300	36.500.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.805.300	134.305.300	36.500.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>630.483.335</b>	<b>630.483.335</b>	<b>0</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>630.483.335</b>	<b>630.483.335</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	532.706.035	532.706.035	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	BELANJA OPERASI	84.971.100	84.971.100	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	01	Belanja Pegawai	23.598.000	23.598.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	61.373.100	61.373.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	2		BELANJA MODAL	447.734.935	447.734.935	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.865.500	37.865.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	02	5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	409.869.435	409.869.435	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.777.300	97.777.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	95.901.800	95.901.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	95.901.800	95.901.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03	5	2		BELANJA MODAL	1.875.500	1.875.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	03	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.875.500	1.875.500	0	
								<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.820.900.581</b>	<b>2.647.074.534</b>	<b>(173.826.047)</b>		
								<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(2.819.306.981)</b>	<b>(2.645.480.934)</b>	<b>173.826.047</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.06.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
								<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KANTOR KECAMATAN PURBATUA

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				
						<b>BELANJA</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>KECAMATAN</b>	<b>1.719.812.788</b>	<b>1.545.844.548</b>	<b>(173.968.240)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.636.148.788</b>	<b>1.429.399.148</b>	<b>(206.749.640)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					
						<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.999.800</b>	<b>1.999.800</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.800	1.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.999.800	1.999.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	1.999.800	1.999.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>					
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.479.662.088</b>	<b>1.255.694.048</b>	<b>(223.968.040)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01					
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.441.586.088	1.217.618.048	(223.968.040)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1			
						BELANJA OPERASI	1.441.586.088	1.217.618.048	(223.968.040)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	1	01		
						Belanja Pegawai	1.441.586.088	1.217.618.048	(223.968.040)	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03					
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.007.600	35.007.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	1			
						BELANJA OPERASI	35.007.600	35.007.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	1	01		
						Belanja Pegawai	31.947.600	31.947.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	3.060.000	3.060.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.068.400	3.068.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	5	1			
						BELANJA OPERASI	3.068.400	3.068.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.02	05	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	3.068.400	3.068.400	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>					
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41.815.100</b>	<b>49.067.200</b>	<b>7.252.100</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.780.500	3.776.900	1.996.400	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KANTOR KECAMATAN PURBATUA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.780.500	3.776.900	1.996.400		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.780.500	3.776.900	1.996.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.235.000	17.235.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	17.235.000	17.235.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.235.000	17.235.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.327.500	4.610.400	282.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.327.500	4.610.400	282.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.327.500	4.610.400	282.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.504.500	2.504.500	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.504.500	2.504.500	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.504.500	2.504.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	15.967.600	20.940.400	4.972.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	15.967.600	20.940.400	4.972.800		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	15.967.600	20.940.400	4.972.800	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.665.800</b>	<b>5.665.800</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.665.800	5.665.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	2	BELANJA MODAL	5.665.800	5.665.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.665.800	5.665.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.694.200</b>	<b>64.694.200</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KANTOR KECAMATAN PURBATUA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.496.000	3.496.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	3.496.000	3.496.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.496.000	3.496.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.698.200	59.698.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	59.698.200	59.698.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.698.200	59.698.200	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.07.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.311.800</b>	<b>52.278.100</b>	<b>9.966.300</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.458.000	33.431.400	973.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	32.458.000	33.431.400	973.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.458.000	33.431.400	973.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.468.200	2.468.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.468.200	2.468.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.468.200	2.468.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.296.300	7.295.000	1.998.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	5.296.300	7.295.000	1.998.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.296.300	7.295.000	1.998.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.089.300	9.083.500	6.994.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11	5 1	BELANJA OPERASI	2.089.300	9.083.500	6.994.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	2.09	11	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.089.300	9.083.500	6.994.200	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KANTOR KECAMATAN PURBATUA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	0.00	00					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>83.664.000</b>	<b>116.445.400</b>	<b>32.781.400</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	00					<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>83.664.000</b>	<b>116.445.400</b>	<b>32.781.400</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	83.664.000	116.445.400	32.781.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01	5	1			BELANJA OPERASI	83.664.000	116.445.400	32.781.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	02	2.01	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	83.664.000	116.445.400	32.781.400	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1.719.812.788</b>	<b>1.545.844.548</b>	<b>(173.968.240)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(1.719.812.788)</b>	<b>(1.545.844.548)</b>	<b>173.968.240</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.07.0000	00	0.00	00	6				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>1.531.982.992</b>	<b>1.353.249.844</b>	<b>(178.733.148)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.445.367.992</b>	<b>1.249.597.844</b>	<b>(195.770.148)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.207.300</b>	<b>2.207.300</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.207.300	2.207.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.207.300	2.207.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.01	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.207.300	2.207.300	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.287.992.392</b>	<b>1.065.259.244</b>	<b>(222.733.148)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.255.936.092	1.027.202.944	(228.733.148)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.255.936.092	1.027.202.944	(228.733.148)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	01	5 1 01	Belanja Pegawai	1.255.936.092	1.027.202.944	(228.733.148)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.867.600	33.867.600	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03	5 1	BELANJA OPERASI	27.867.600	33.867.600	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	03	5 1 01	Belanja Pegawai	27.867.600	33.867.600	6.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.188.700	4.188.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	4.188.700	4.188.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.188.700	4.188.700	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>63.401.700</b>	<b>84.219.700</b>	<b>20.818.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.000	1.999.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.999.000	1.999.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.999.000	1.999.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.052.700	12.635.600	3.582.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	9.052.700	12.635.600	3.582.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.052.700	12.635.600	3.582.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.013.500	14.665.900	1.652.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	13.013.500	14.665.900	1.652.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	13.013.500	14.665.900	1.652.400	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.796.500	4.015.200	218.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.796.500	4.015.200	218.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.796.500	4.015.200	218.700	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.540.000	50.904.000	15.364.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	35.540.000	50.904.000	15.364.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	35.540.000	50.904.000	15.364.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>64.358.300</b>	<b>63.248.300</b>	<b>(1.110.000)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.861.500	7.751.500	(110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	7.861.500	7.751.500	(110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.861.500	7.751.500	(110.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.408.300</b>	<b>34.663.300</b>	<b>7.255.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.981.700	26.954.800	2.973.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01 5 1	BELANJA OPERASI	23.981.700	26.954.800	2.973.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.981.700	26.954.800	2.973.100	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.920.500	2.650.500	730.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06 5 1	BELANJA OPERASI	1.920.500	2.650.500	730.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.500	2.650.500	730.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.506.100	5.058.000	3.551.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09 5 1	BELANJA OPERASI	1.506.100	5.058.000	3.551.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.09	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.506.100	5.058.000	3.551.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>86.615.000</b>	<b>93.652.000</b>	<b>7.037.000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>86.615.000</b>	<b>93.652.000</b>	<b>7.037.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	86.615.000	93.652.000	7.037.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01 5 1	BELANJA OPERASI	86.615.000	93.652.000	7.037.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	2.01	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	86.615.000	93.652.000	7.037.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	03					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	10.000.000	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	0	10.000.000	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	10.000.000	10.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>1.531.982.992</b>	<b>1.353.249.844</b>	<b>(178.733.148)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(1.531.982.992)</b>	<b>(1.353.249.844)</b>	<b>178.733.148</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.08.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	4				<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	4	1			<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.938.500</b>	<b>2.938.500</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	2.938.500	2.938.500	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>											<b>2.938.500</b>	<b>2.938.500</b>	<b>0</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00	5				<b>BELANJA</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	00	0.00	00					<b>KECAMATAN</b>	<b>2.737.940.796</b>	<b>2.243.585.022</b>	<b>(494.355.774)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	0.00	00					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.666.407.896</b>	<b>2.122.052.122</b>	<b>(544.355.774)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	00					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.042.400</b>	<b>1.042.400</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.042.400	1.042.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.042.400	1.042.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.042.400	1.042.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	00					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.482.356.096</b>	<b>1.938.000.322</b>	<b>(544.355.774)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.449.436.096	1.905.080.322	(544.355.774)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	2.449.436.096	1.905.080.322	(544.355.774)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	2.449.436.096	1.905.080.322	(544.355.774)	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	30.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	30.000.000	30.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	25.627.200	25.627.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.372.800	4.372.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.920.000	2.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	5	1			BELANJA OPERASI	2.920.000	2.920.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000	2.920.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>93.703.700</b>	<b>93.703.700</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.891.800	28.891.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	28.891.800	28.891.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.891.800	28.891.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.312.000	7.312.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	7.312.000	7.312.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.312.000	7.312.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	9.999.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	9.999.900	9.999.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.900	9.999.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000	47.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	47.500.000	47.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000	47.500.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>61.096.800</b>	<b>61.096.800</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	900.000	900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	900.000	900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.700.000	5.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	5.700.000	5.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	5.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>28.208.900</b>	<b>28.208.900</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.765.200	22.765.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	22.765.200	22.765.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	22.765.200	22.765.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	10				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.443.700	5.443.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	10	5	1		BELANJA OPERASI	5.443.700	5.443.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	01	2.09	10	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.443.700	5.443.700	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>71.532.900</b>	<b>71.532.900</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>71.532.900</b>	<b>71.532.900</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	71.532.900	71.532.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	71.532.900	71.532.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	71.532.900	71.532.900	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	50.000.000	50.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	5	1		BELANJA OPERASI	0	50.000.000	50.000.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	03	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	0	50.000.000	50.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>2.737.940.796</b>	<b>2.243.585.022</b>	<b>(494.355.774)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(2.735.002.296)</b>	<b>(2.240.646.522)</b>	<b>494.355.774</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.09.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>						
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	4	1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>7.113.100</b>	<b>7.113.100</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	4	1	02	Retribusi Daerah	7.113.100	7.113.100	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>7.113.100</b>	<b>7.113.100</b>	<b>0</b>			
0	00	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>						
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00		<b>KECAMATAN</b>	<b>2.144.684.050</b>	<b>1.728.461.309</b>	<b>(416.222.741)</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	0.00	00		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.067.469.050</b>	<b>1.601.246.309</b>	<b>(466.222.741)</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	00		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.625.400</b>	<b>10.625.400</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.140.700	6.140.700	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	6.140.700	6.140.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	6.140.700	6.140.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.484.700	4.484.700	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.484.700	4.484.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.484.700	4.484.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	00		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.868.404.800</b>	<b>1.402.182.059</b>	<b>(466.222.741)</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.833.444.100	1.367.221.359	(466.222.741)			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.833.444.100	1.367.221.359	(466.222.741)		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.833.444.100	1.367.221.359	(466.222.741)	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.464.500	30.464.500	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03	5	1	<b>BELANJA OPERASI</b>	30.464.500	30.464.500	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	25.627.200	25.627.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.837.300	4.837.300	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.496.200	4.496.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	5 1	BELANJA OPERASI	4.496.200	4.496.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.02	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.496.200	4.496.200	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>87.423.300</b>	<b>87.423.300</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.805.700	2.805.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5 1	BELANJA OPERASI	2.805.700	2.805.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.805.700	2.805.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.961.600	14.961.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5 1	BELANJA OPERASI	13.461.600	13.461.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.461.600	13.461.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5 2	BELANJA MODAL	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	02	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.980.300	4.980.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	5 1	BELANJA OPERASI	4.980.300	4.980.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.300	4.980.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.725.000	12.725.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	5 1	BELANJA OPERASI	12.725.000	12.725.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.725.000	12.725.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.055.500	4.055.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5 1	BELANJA OPERASI	4.055.500	4.055.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.055.500	4.055.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.995.200	1.995.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06	5 1	BELANJA OPERASI	1.995.200	1.995.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.995.200	1.995.200	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.900.000	45.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5 1	BELANJA OPERASI	45.900.000	45.900.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.06	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000	45.900.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.071.100</b>	<b>69.071.100</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000	7.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	7.920.000	7.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000	7.920.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.654.300	5.654.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	03	5 1	BELANJA OPERASI	5.654.300	5.654.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	03	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.654.300	5.654.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>31.944.450</b>	<b>31.944.450</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.944.450	31.944.450	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	31.944.450	31.944.450	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.944.450	31.944.450	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.10.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>77.215.000</b>	<b>77.215.000</b>	<b>0</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	00			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>77.215.000</b>	<b>77.215.000</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	77.215.000	77.215.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	77.215.000	77.215.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	77.215.000	77.215.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	0.00	00			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	00			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	50.000.000	50.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	50.000.000	50.000.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.10.0000	03	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	50.000.000	50.000.000	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>2.144.684.050</b>	<b>1.728.461.309</b>	<b>(416.222.741)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(2.137.570.950)</b>	<b>(1.721.348.209)</b>	<b>416.222.741</b>		
0	00	7.01.0.00.0.00.10.0000	00	0.00	00	6		<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KANTOR KECAMATAN GAROGA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
0	00	7.01.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>					
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	00	0.00	00		<b>KECAMATAN</b>	<b>2.255.669.610</b>	<b>1.998.320.463</b>	<b>(257.349.147)</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	0.00	00		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.194.830.610</b>	<b>1.894.073.263</b>	<b>(300.757.347)</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	00		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>31.970.800</b>	<b>21.970.800</b>	<b>(10.000.000)</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.970.800	21.970.800	(10.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	31.970.800	21.970.800	(10.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.01	06	5	02	Belanja Barang dan Jasa	31.970.800	21.970.800	(10.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	00		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.981.362.910</b>	<b>1.674.013.763</b>	<b>(307.349.147)</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.941.759.610	1.634.410.463	(307.349.147)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	1.941.759.610	1.634.410.463	(307.349.147)		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	01	5	01	Belanja Pegawai	1.941.759.610	1.634.410.463	(307.349.147)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	36.087.600	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	36.087.600	36.087.600	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	03	5	01	Belanja Pegawai	36.087.600	36.087.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.515.700	3.515.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	3.515.700	3.515.700	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.02	05	5	02	Belanja Barang dan Jasa	3.515.700	3.515.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	00		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>40.761.700</b>	<b>50.761.700</b>	<b>10.000.000</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.100	1.997.100	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	BELANJA OPERASI	1.997.100	1.997.100	0		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KANTOR KECAMATAN GAROGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.997.100	1.997.100	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.728.000	4.728.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	4.728.000	4.728.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.728.000	4.728.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.573.800	5.573.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	5.573.800	5.573.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.573.800	5.573.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.622.800	3.622.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	3.622.800	3.622.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.622.800	3.622.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.840.000	34.840.000	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	24.840.000	34.840.000	10.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	24.840.000	34.840.000	10.000.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>60.465.000</b>	<b>60.465.000</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.465.000	60.465.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2		BELANJA MODAL	60.465.000	60.465.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.07	06	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.465.000	60.465.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>63.995.200</b>	<b>59.589.400</b>	<b>(4.405.800)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	1.000.000	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1		BELANJA OPERASI	500.000	1.000.000	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	1.000.000	500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.998.400	4.092.600	(4.905.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1		BELANJA OPERASI	8.998.400	4.092.600	(4.905.800)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KANTOR KECAMATAN GAROGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	8.998.400	4.092.600	(4.905.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1		BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.275.000</b>	<b>27.272.600</b>	<b>10.997.600</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.275.000	16.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	16.275.000	16.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.275.000	16.275.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	10.997.600	10.997.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	0	10.997.600	10.997.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	10.997.600	10.997.600	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>18.160.000</b>	<b>41.660.000</b>	<b>23.500.000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>18.160.000</b>	<b>41.660.000</b>	<b>23.500.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.160.000	41.660.000	23.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	18.160.000	41.660.000	23.500.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	18.160.000	41.660.000	23.500.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>0</b>	<b>9.948.200</b>	<b>9.948.200</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>0</b>	<b>9.948.200</b>	<b>9.948.200</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	4.960.000	4.960.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KANTOR KECAMATAN GAROGA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.960.000	4.960.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.960.000	4.960.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	4.988.200	4.988.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	0	4.988.200	4.988.200	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	03	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	4.988.200	4.988.200	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>0</b>	<b>9.960.000</b>	<b>9.960.000</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>0</b>	<b>9.960.000</b>	<b>9.960.000</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	9.960.000	9.960.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	0	9.960.000	9.960.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	04	2.02	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	9.960.000	9.960.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>32.720.000</b>	<b>32.720.000</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>32.720.000</b>	<b>32.720.000</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.720.000	32.720.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	32.720.000	32.720.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	05	2.01	08	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.720.000	32.720.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>9.959.000</b>	<b>9.959.000</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>9.959.000</b>	<b>9.959.000</b>	<b>0</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KANTOR KECAMATAN GAROGA

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.960.000	4.960.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	5	1			BELANJA OPERASI	4.960.000	4.960.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.960.000	4.960.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16					Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.999.000	4.999.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	5	1			BELANJA OPERASI	4.999.000	4.999.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.11.0000	06	2.01	16	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	4.999.000	4.999.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>											<b>2.255.669.610</b>	<b>1.998.320.463</b>	<b>(257.349.147)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>											<b>(2.255.669.610)</b>	<b>(1.998.320.463)</b>	<b>257.349.147</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.11.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>86.214.883</b>	<b>86.214.883</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	4	Retribusi Daerah	86.214.883	86.214.883	0	
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>86.214.883</b>	<b>86.214.883</b>	<b>0</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	00	0.00	00		<b>KECAMATAN</b>	<b>3.889.223.129</b>	<b>3.937.375.744</b>	<b>48.152.615</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	0.00	00		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.031.270.800</b>	<b>3.058.780.514</b>	<b>27.509.714</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	00		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>765.300</b>	<b>765.300</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	765.300	765.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	765.300	765.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	765.300	765.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	00		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.821.023.000</b>	<b>2.819.195.114</b>	<b>(1.827.886)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.775.726.100	2.773.898.214	(1.827.886)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	2.775.726.100	2.773.898.214	(1.827.886)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	01	5	Belanja Pegawai	2.775.726.100	2.773.898.214	(1.827.886)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.023.200	44.023.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	44.023.200	44.023.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	03	5	Belanja Pegawai	44.023.200	44.023.200	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.273.700	1.273.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	1.273.700	1.273.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.02	05	5	Belanja Barang dan Jasa	1.273.700	1.273.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	00		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>80.503.900</b>	<b>110.973.900</b>	<b>30.470.000</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	2.000.000	(5.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000	2.000.000	(5.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	2.000.000	(5.000.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.280.500	19.438.800	7.158.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02 5 1	BELANJA OPERASI	12.280.500	19.438.800	7.158.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.280.500	19.438.800	7.158.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.083.400	10.399.300	5.315.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03 5 1	BELANJA OPERASI	5.083.400	10.399.300	5.315.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.083.400	10.399.300	5.315.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000	4.495.800	2.995.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000	4.495.800	2.995.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	4.495.800	2.995.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.640.000	3.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06 5 1	BELANJA OPERASI	3.640.000	3.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000	3.640.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000	71.000.000	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09 5 1	BELANJA OPERASI	51.000.000	71.000.000	20.000.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.06	09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000	71.000.000	20.000.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>28.087.300</b>	<b>18.802.000</b>	<b>(9.285.300)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.087.300	18.802.000	(9.285.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06 5 2	BELANJA MODAL	28.087.300	18.802.000	(9.285.300)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.07	06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.087.300	18.802.000	(9.285.300)	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.486.800</b>	<b>66.486.800</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	1.500.000	1.500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.490.000	10.490.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	10.490.000	10.490.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000	10.490.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.404.500</b>	<b>42.557.400</b>	<b>8.152.900</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.583.200	35.738.200	7.155.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	28.583.200	35.738.200	7.155.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	28.583.200	35.738.200	7.155.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.860.000	2.860.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	2.860.000	2.860.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000	2.860.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.961.300	3.959.200	997.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09	5	1	BELANJA OPERASI	2.961.300	3.959.200	997.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.961.300	3.959.200	997.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>75.952.800</b>	<b>96.595.700</b>	<b>20.642.900</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>75.952.800</b>	<b>96.595.700</b>	<b>20.642.900</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	75.952.800	96.595.700	20.642.900		



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	75.952.800	96.595.700	20.642.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.952.800	96.595.700	20.642.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>781.999.529</b>	<b>781.999.530</b>	<b>1</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>			<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>781.999.529</b>	<b>781.999.530</b>	<b>1</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	682.000.129	664.287.232	(17.712.897)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2	BELANJA MODAL	682.000.129	664.287.232	(17.712.897)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	283.426.105	265.713.208	(17.712.897)	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	02	5	2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	398.574.024	398.574.024	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99.999.400	117.712.298	17.712.898	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	99.999.400	117.712.298	17.712.898	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1 01	Belanja Pegawai	15.048.000	15.048.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.12.0000	03	2.02	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.951.400	102.664.298	17.712.898	
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>3.889.223.129</b>	<b>3.937.375.744</b>	<b>48.152.615</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>								<b>(3.803.008.246)</b>	<b>(3.851.160.861)</b>	<b>(48.152.615)</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.12.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
							<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>KECAMATAN</b>	<b>1.733.030.050</b>	<b>1.597.889.149</b>	<b>(135.140.901)</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.656.004.150</b>	<b>1.520.863.249</b>	<b>(135.140.901)</b>			
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.785.000</b>	<b>935.000</b>	<b>(18.850.000)</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.975.000	935.000	(1.040.000)			
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	1.975.000	935.000	(1.040.000)			
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000	935.000	(1.040.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.810.000	0	(17.810.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07	5	1		BELANJA OPERASI	17.810.000	0	(17.810.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.01	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.810.000	0	(17.810.000)	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.482.424.800</b>	<b>1.314.160.549</b>	<b>(168.264.251)</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.455.099.100	1.287.874.849	(167.224.251)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1		BELANJA OPERASI	1.455.099.100	1.287.874.849	(167.224.251)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	1.455.099.100	1.287.874.849	(167.224.251)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.160.400	25.160.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03	5	1		BELANJA OPERASI	25.160.400	25.160.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	25.160.400	25.160.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.165.300	1.125.300	(1.040.000)	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05	5	1		BELANJA OPERASI	2.165.300	1.125.300	(1.040.000)	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.02	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.165.300	1.125.300	(1.040.000)	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>35.546.500</b>	<b>63.733.400</b>	<b>28.186.900</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.020.300	3.020.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	3.020.300	3.020.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.020.300	3.020.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.662.000	20.716.000	7.054.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1	BELANJA OPERASI	13.662.000	20.716.000	7.054.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	04	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.662.000	20.716.000	7.054.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.928.300	3.928.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1	BELANJA OPERASI	3.928.300	3.928.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	05	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.928.300	3.928.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	07			Penyediaan Bahan/Material	14.935.900	17.938.800	3.002.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	07	5	1	BELANJA OPERASI	14.935.900	17.938.800	3.002.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	07	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.935.900	17.938.800	3.002.900	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	18.130.000	18.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	0	18.130.000	18.130.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.06	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	18.130.000	18.130.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.256.500</b>	<b>60.256.500</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	700.000	700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000	700.000	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.059.700	5.059.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	5.059.700	5.059.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.059.700	5.059.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.991.350</b>	<b>81.777.800</b>	<b>23.786.450</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.294.050	24.732.700	9.438.650	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	15.294.050	24.732.700	9.438.650	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.294.050	24.732.700	9.438.650	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.198.600	42.325.400	10.126.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	0	3.600.000	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0	3.600.000	3.600.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	06	5 2	BELANJA MODAL	32.198.600	38.725.400	6.526.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	06	5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.198.600	38.725.400	6.526.800	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.249.100	9.470.100	4.221.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	5.249.100	9.470.100	4.221.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.249.100	9.470.100	4.221.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.249.600	5.249.600	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KANTOR KECAMATAN PAGARAN

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	10	5	1	BELANJA OPERASI	5.249.600	5.249.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	01	2.09	10	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.249.600	5.249.600	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>77.025.900</b>	<b>77.025.900</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>77.025.900</b>	<b>77.025.900</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	77.025.900	77.025.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01	5	1	BELANJA OPERASI	77.025.900	77.025.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.13.0000	02	2.01	01	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.025.900	77.025.900	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>1.733.030.050</b>	<b>1.597.889.149</b>	<b>(135.140.901)</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(1.733.030.050)</b>	<b>(1.597.889.149)</b>	<b>135.140.901</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
										<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>KECAMATAN</b>	<b>1.630.584.300</b>	<b>1.087.065.517</b>	<b>(543.518.783)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.546.060.800</b>	<b>1.002.542.017</b>	<b>(543.518.783)</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.873.700</b>	<b>1.873.700</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.873.700	1.873.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06	5	1			BELANJA OPERASI	1.873.700	1.873.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.01	06	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.873.700	1.873.700	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.370.276.500</b>	<b>776.765.217</b>	<b>(593.511.283)</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.347.876.100	754.364.817	(593.511.283)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.347.876.100	754.364.817	(593.511.283)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01	5	1	01		Belanja Pegawai	1.347.379.300	754.364.817	(593.014.483)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	496.800	0	(496.800)	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.400.400	22.400.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03	5	1			BELANJA OPERASI	22.400.400	22.400.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.02	03	5	1	01		Belanja Pegawai	22.400.400	22.400.400	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>59.443.400</b>	<b>84.442.900</b>	<b>24.999.500</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.375.000	1.375.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01	5	1			BELANJA OPERASI	1.375.000	1.375.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	01	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	1.375.000	1.375.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	07					Penyediaan Bahan/Material	23.980.400	38.980.000	14.999.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	07	5	1			BELANJA OPERASI	17.980.400	18.020.400	40.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	07	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	17.980.400	18.020.400	40.000	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	07	5	2	BELANJA MODAL	6.000.000	20.959.600	14.959.600		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	07	5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000	20.959.600	14.959.600	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.088.000	44.087.900	9.999.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09	5	1	BELANJA OPERASI	34.088.000	44.087.900	9.999.900		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	34.088.000	44.087.900	9.999.900	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>66.075.000</b>	<b>66.075.000</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01	5	1	BELANJA OPERASI	500.000	500.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	500.000	500.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.575.000	11.575.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02	5	1	BELANJA OPERASI	11.575.000	11.575.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000	11.575.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04	5	1	BELANJA OPERASI	54.000.000	54.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000	54.000.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.392.200</b>	<b>73.385.200</b>	<b>24.993.000</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.343.200	51.336.500	14.993.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01	5	1	BELANJA OPERASI	36.343.200	51.336.500	14.993.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	36.343.200	51.336.500	14.993.300	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.049.000	22.048.700	9.999.700		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06	5	1	BELANJA OPERASI	12.049.000	22.048.700	9.999.700		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	12.049.000	22.048.700	9.999.700	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.14.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>62.923.500</b>	<b>62.923.500</b>	<b>0</b>		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	00		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>62.923.500</b>	<b>62.923.500</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62.923.500	62.923.500	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01	5	BELANJA OPERASI	62.923.500	62.923.500	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	62.923.500	62.923.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	0.00	00		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>21.600.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	00		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>21.600.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>0</b>			
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	0			
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08	5	1	BELANJA OPERASI	21.600.000	21.600.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.14.0000	05	2.01	08	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000	21.600.000	0	
<b>Jumlah Belanja</b>								<b>1.630.584.300</b>	<b>1.087.065.517</b>	<b>(543.518.783)</b>			
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>								<b>(1.630.584.300)</b>	<b>(1.087.065.517)</b>	<b>543.518.783</b>			
0	00	7.01.0.00.0.00.14.0000	00	0.00	00	6	<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KANTOR KECAMATAN MUARA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	5.534.527	5.534.527	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	4	Retribusi Daerah	5.534.527	5.534.527	0	
<b>Jumlah Pendapatan</b>								<b>5.534.527</b>	<b>5.534.527</b>	<b>0</b>	
0	00	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00	5	<b>BELANJA</b>				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	00	0.00	00		<b>KECAMATAN</b>	2.230.414.240	1.693.645.315	(536.768.925)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	0.00	00		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.128.015.940	1.591.247.015	(536.768.925)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	00		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2.288.700	2.288.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.288.700	2.288.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06	5	BELANJA OPERASI	2.288.700	2.288.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.01	06	5	Belanja Barang dan Jasa	2.288.700	2.288.700	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	00		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1.944.844.600	1.358.094.375	(586.750.225)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.862.100	1.325.111.875	(586.750.225)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	BELANJA OPERASI	1.911.862.100	1.325.111.875	(586.750.225)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	01	5	Belanja Pegawai	1.911.862.100	1.325.111.875	(586.750.225)	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.800.000	28.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03	5	BELANJA OPERASI	28.800.000	28.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	03	5	Belanja Pegawai	28.800.000	28.800.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.182.500	4.182.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05	5	BELANJA OPERASI	4.182.500	4.182.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.02	05	5	Belanja Barang dan Jasa	4.182.500	4.182.500	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	00		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90.287.240</b>	<b>105.597.240</b>	<b>15.310.000</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KANTOR KECAMATAN MUARA

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000	5.700.000	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	BELANJA OPERASI	5.700.000	5.700.000	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000	5.700.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.267.900	9.267.900	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02	5	1		BELANJA OPERASI	9.267.900	9.267.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.267.900	9.267.900	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.268.000	4.268.000	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03	5	1		BELANJA OPERASI	4.268.000	4.268.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.268.000	4.268.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.911.740	17.911.740	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1		BELANJA OPERASI	17.911.740	17.911.740	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.911.740	17.911.740	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.575.600	1.575.600	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1		BELANJA OPERASI	1.575.600	1.575.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.600	1.575.600	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.475.000	3.475.000	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1		BELANJA OPERASI	3.475.000	3.475.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000	3.475.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	14.594.000	14.594.000	0				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	07	5	1		BELANJA OPERASI	14.594.000	14.594.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	07	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	14.594.000	14.594.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.495.000	48.805.000	15.310.000				
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1		BELANJA OPERASI	33.495.000	48.805.000	15.310.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.06	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	33.495.000	48.805.000	15.310.000	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.450.000</b>	<b>21.100.000</b>	<b>12.650.000</b>				

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KANTOR KECAMATAN MUARA

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12.650.000	12.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	06	5	BELANJA MODAL	0	12.650.000	12.650.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	06	5	2	02	0	12.650.000	12.650.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.450.000	8.450.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	5	BELANJA MODAL	8.450.000	8.450.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.07	11	5	2	02	8.450.000	8.450.000	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.052.200</b>	<b>62.052.200</b>	<b>0</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01	5	BELANJA OPERASI	2.000.000	2.000.000	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	01	5	1	02	2.000.000	2.000.000	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.555.400	5.555.400	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	BELANJA OPERASI	5.555.400	5.555.400	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	02	5	1	02	5.555.400	5.555.400	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.08	04	5	1	02	54.496.800	54.496.800	0	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>20.093.200</b>	<b>42.114.500</b>	<b>22.021.300</b>		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.093.200	34.143.200	14.050.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	BELANJA OPERASI	20.093.200	34.143.200	14.050.000		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	01	5	1	02	20.093.200	34.143.200	14.050.000	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	7.971.300	7.971.300		
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	09	5	BELANJA OPERASI	0	7.971.300	7.971.300		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN  
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KANTOR KECAMATAN MUARA

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	0	7.971.300	7.971.300	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>102.398.300</b>	<b>102.398.300</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>				<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>102.398.300</b>	<b>102.398.300</b>	<b>0</b>	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	102.398.300	102.398.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1		BELANJA OPERASI	102.398.300	102.398.300	0	
7	01	7.01.0.00.0.00.15.0000	02	2.01	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	102.398.300	102.398.300	0	
									<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.230.414.240</b>	<b>1.693.645.315</b>	<b>(536.768.925)</b>	
									<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(2.224.879.713)</b>	<b>(1.688.110.788)</b>	<b>536.768.925</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>7.01.0.00.0.00.15.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
									<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
						<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>5</b>				
						<b>BELANJA</b>				
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>5.199.128.463</b>	<b>5.032.580.326</b>	<b>(166.548.137)</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>02</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>269.631.000</b>	<b>389.081.000</b>	<b>119.450.000</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					
						<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>269.631.000</b>	<b>389.081.000</b>	<b>119.450.000</b>	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02					
						Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000	150.000.000	120.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1			
						BELANJA OPERASI	30.000.000	150.000.000	120.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	0	120.000.000	120.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	05		
						Belanja Hibah	30.000.000	30.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04					
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	239.631.000	239.081.000	(550.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1			
						BELANJA OPERASI	239.631.000	239.081.000	(550.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	1	02		
						Belanja Barang dan Jasa	239.631.000	239.081.000	(550.000)	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>					
						<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>964.255.763</b>	<b>964.255.763</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>					
						<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>964.255.763</b>	<b>964.255.763</b>	<b>0</b>	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	871.239.063	871.239.063	0				
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	871.239.063	871.239.063	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	5	1	05	Belanja Hibah	871.239.063	871.239.063	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04			Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93.016.700	93.016.700	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	93.016.700	93.016.700	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	93.016.700	93.016.700	0	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>31.539.200</b>	<b>31.539.200</b>	<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>31.539.200</b>	<b>31.539.200</b>	<b>0</b>		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	31.539.200	31.539.200	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	31.539.200	31.539.200	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.539.200	31.539.200	0	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>		
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>		

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	60.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	60.000.000	60.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000	60.000.000	0
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>06</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>602.210.700</b>	<b>589.830.700</b>	<b>(12.380.000)</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>			<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>602.210.700</b>	<b>589.830.700</b>	<b>(12.380.000)</b>	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000	137.620.000	(12.380.000)			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04	5	1	BELANJA OPERASI	150.000.000	137.620.000	(12.380.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000	137.620.000	(12.380.000)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.372.900	97.372.900	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05	5	1	BELANJA OPERASI	97.372.900	97.372.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	97.372.900	97.372.900	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	354.837.800	354.837.800	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	354.837.800	354.837.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	06	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	354.837.800	354.837.800	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening						Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum		
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.271.491.800</b>	<b>2.997.873.663</b>	<b>(273.618.137)</b>			
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>	<b>00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.896.734.000</b>	<b>2.629.133.163</b>	<b>(267.600.837)</b>			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.686.400	2.588.085.563	(267.600.837)			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	BELANJA OPERASI	2.855.686.400	2.588.085.563	(267.600.837)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	1	01	Belanja Pegawai	2.855.686.400	2.588.085.563	(267.600.837)
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.047.600	37.047.600	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	BELANJA OPERASI	37.047.600	37.047.600	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	1	01	Belanja Pegawai	37.047.600	37.047.600	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	BELANJA OPERASI	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>200.857.900</b>	<b>200.540.500</b>	<b>(317.400)</b>			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.739.400	7.739.400	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	BELANJA OPERASI	7.739.400	7.739.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	7.739.400	7.739.400	0
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	17.000.000	0			
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	BELANJA OPERASI	17.000.000	17.000.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000	17.000.000	0



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening							Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.962.400	10.962.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	BELANJA OPERASI	10.962.400	10.962.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	Belanja Barang dan Jasa	10.962.400	10.962.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.900	14.682.500	(317.400)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA OPERASI	14.999.900	14.682.500	(317.400)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	Belanja Barang dan Jasa	14.999.900	14.682.500	(317.400)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.751.200	7.751.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA OPERASI	7.751.200	7.751.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	Belanja Barang dan Jasa	7.751.200	7.751.200	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.405.000	142.405.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA OPERASI	142.405.000	142.405.000	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	Belanja Barang dan Jasa	142.405.000	142.405.000	0	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>00</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44.694.400</b>	<b>44.694.400</b>	<b>0</b>	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.694.400	44.694.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	BELANJA MODAL	44.694.400	44.694.400	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.694.400	44.694.400	0	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>00</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>75.496.600</b>	<b>69.796.700</b>	<b>(5.699.900)</b>	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	4.000.000	(3.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA OPERASI	7.000.000	4.000.000	(3.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	4.000.000	(3.000.000)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.999.800	11.299.900	(2.699.900)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA OPERASI	13.999.800	11.299.900	(2.699.900)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	Belanja Barang dan Jasa	13.999.800	11.299.900	(2.699.900)	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA OPERASI	54.496.800	54.496.800	0	

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	54.496.800	54.496.800	0	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>00</b>				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.708.900</b>	<b>49.708.900</b>	<b>0</b>	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.997.300	27.997.300	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1		BELANJA OPERASI	27.997.300	27.997.300	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	27.997.300	27.997.300	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.721.700	11.721.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1		BELANJA OPERASI	11.721.700	11.721.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	11.721.700	11.721.700	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.900	9.989.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1		BELANJA OPERASI	9.989.900	9.989.900	0	
8	01	8.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	9.989.900	9.989.900	0	
<b>Jumlah Belanja</b>									<b>5.199.128.463</b>	<b>5.032.580.326</b>	<b>(166.548.137)</b>		
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>									<b>(5.199.128.463)</b>	<b>(5.032.580.326)</b>	<b>166.548.137</b>		
<b>0</b>	<b>00</b>	<b>8.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>	<b>00</b>	<b>6</b>			<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>685.423.155.062</b>	<b>108.966.245.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794.389.400.238</b>	<b>697.984.094.004</b>	<b>227.165.650.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.149.744.587</b>	<b>130.760.344.349</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>411.816.808.324</b>	<b>20.130.678.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.947.486.761</b>	<b>407.002.024.447</b>	<b>27.173.010.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.175.034.510</b>	<b>2.227.547.749</b>
1 01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	411.816.808.324	20.130.678.437	0	0	431.947.486.761	407.002.024.447	27.173.010.063	0	0	434.175.034.510	2.227.547.749
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 08											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 03											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 03											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 05											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 06											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 08											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 09											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 12											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 14											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02											
1 01	1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 06											





**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	138.260.700	0	0	0	138.260.700	125.640.300	0	0	0	125.640.300	(12.620.400)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	74.785.300	0	0	0	74.785.300	70.536.600	0	0	0	70.536.600	(4.248.700)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	63.475.400	0	0	0	63.475.400	55.103.700	0	0	0	55.103.700	(8.371.700)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000	0	0	0	280.000.000	270.000.000	0	0	0	270.000.000	(10.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	90.000.000	0	0	0	90.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	(10.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	190.000.000	0	0	0	190.000.000	190.000.000	0	0	0	190.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.696.010.000	0	0	0	1.696.010.000	1.686.010.000	0	0	0	1.686.010.000	(10.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	(10.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	20.000.000	0	0	0	20.000.000	(10.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.616.010.000	0	0	0	1.616.010.000	1.616.010.000	0	0	0	1.616.010.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.576.000.000	0	0	0	1.576.000.000	1.576.000.000	0	0	0	1.576.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pembiayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.010.000	0	0	0	40.010.000	40.010.000	0	0	0	40.010.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	694.650.100	8.685.900	0	0	703.336.000	652.654.900	2.613.600	0	0	655.268.500	(48.067.500)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.935.600	0	0	0	63.935.600	63.935.600	0	0	0	63.935.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.935.600	0	0	0	63.935.600	63.935.600	0	0	0	63.935.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	110.000.000	0	0	0	110.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	(25.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	50.000.000	0	0	0	50.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	(10.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	60.000.000	0	0	0	60.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	(15.000.000)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	148.849.800	0	0	0	148.849.800	148.849.800	0	0	0	148.849.800	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	148.849.800	0	0	0	148.849.800	148.849.800	0	0	0	148.849.800	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	86.314.100	8.685.900	0	0	95.000.000	69.318.900	2.613.600	0	0	71.932.500	(23.067.500)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	86.314.100	8.685.900	0	0	95.000.000	69.318.900	2.613.600	0	0	71.932.500	(23.067.500)
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	285.550.600	0	0	0	285.550.600	285.550.600	0	0	0	285.550.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	285.550.600	0	0	0	285.550.600	285.550.600	0	0	0	285.550.600	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	411.060.700	0	0	0	411.060.700	411.060.700	0	0	0	411.060.700	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	0	0	0	42.000.000	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.000.000	0	0	0	42.000.000	42.000.000	0	0	0	42.000.000	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	369.060.700	0	0	0	369.060.700	369.060.700	0	0	0	369.060.700	0
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	369.060.700	0	0	0	369.060.700	369.060.700	0	0	0	369.060.700	0
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000	RSU DAERAH TARUTUNG	89.474.859.265	3.904.458.000	0	0	93.379.317.265	106.251.106.060	8.100.000.000	0	0	114.351.106.060	20.971.788.795

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 01												
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02												
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01												
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 02												
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02												
1 02	1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32												
1 03													
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 03												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 03												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11												
1 03	1.03.0.00.0.00.01.0000 02												







**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 04	1.04.2.10.1.03.01.0000 03 2.03 03	197.504.000	496.000	0	0	198.000.000	188.000.000	0	0	188.000.000	(10.000.000)	
1 04	1.04.2.10.1.03.01.0000 05	3.328.373.182	4.140.457.844	0	0	7.468.831.026	3.866.961.961	10.595.499.627	0	14.462.461.588	6.993.630.562	
1 04	1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01	3.328.373.182	4.140.457.844	0	0	7.468.831.026	3.866.961.961	10.595.499.627	0	14.462.461.588	6.993.630.562	
1 04	1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 02	2.509.885.082	4.140.457.844	0	0	6.650.342.926	3.048.473.861	10.595.499.627	0	13.643.973.488	6.993.630.562	
1 04	1.04.2.10.1.03.01.0000 05 2.01 03	818.488.100	0	0	0	818.488.100	818.488.100	0	0	818.488.100	0	
<b>1 05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>12.704.744.942</b>	<b>2.559.287.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.264.032.482</b>	<b>13.758.483.966</b>	<b>4.854.179.740</b>	<b>0</b>	<b>18.612.663.706</b>	<b>3.348.631.224</b>	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000	8.798.131.192	2.556.721.640	0	0	11.354.852.832	10.534.168.126	2.564.321.640	0	13.098.489.766	1.743.636.934	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01	7.891.286.492	0	0	0	7.891.286.492	7.566.708.276	7.600.000	0	7.574.308.276	(316.978.216)	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	66.749.700	0	0	0	66.749.700	66.749.700	0	0	66.749.700	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	4.999.900	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	4.999.900	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	4.999.900	0	0	0	4.999.900	4.999.900	0	0	4.999.900	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	45.750.000	0	0	0	45.750.000	45.750.000	0	0	45.750.000	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	2.977.693.892	0	0	0	2.977.693.892	2.452.365.885	0	0	2.452.365.885	(525.328.007)	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	2.921.454.692	0	0	0	2.921.454.692	2.396.126.685	0	0	2.396.126.685	(525.328.007)	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	50.239.200	0	0	0	50.239.200	50.239.200	0	0	50.239.200	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	6.000.000	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	6.000.000	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06	211.279.200	0	0	0	211.279.200	211.279.200	7.600.000	0	218.879.200	7.600.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	7.999.600	0	0	0	7.999.600	7.999.600	0	0	7.999.600	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	24.098.200	0	0	0	24.098.200	24.098.200	7.600.000	0	31.698.200	7.600.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	6.171.700	0	0	0	6.171.700	6.171.700	0	0	6.171.700	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	15.659.700	0	0	0	15.659.700	15.659.700	0	0	15.659.700	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	157.350.000	0	0	0	157.350.000	157.350.000	0	0	157.350.000	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	4.346.377.700	0	0	0	4.346.377.700	4.504.409.491	0	0	4.504.409.491	158.031.791	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	1.330.000	0	0	0	1.330.000	1.330.000	0	0	1.330.000	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	8.998.900	0	0	0	8.998.900	8.998.900	0	0	8.998.900	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	4.336.048.800	0	0	0	4.336.048.800	4.494.080.591	0	0	4.494.080.591	158.031.791	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	289.186.000	0	0	0	289.186.000	331.904.000	0	0	331.904.000	42.718.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	281.999.700	0	0	0	281.999.700	324.717.700	0	0	324.717.700	42.718.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	7.186.300	0	0	0	7.186.300	7.186.300	0	0	7.186.300	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 02	577.492.200	0	0	0	577.492.200	2.538.357.350	0	0	2.538.357.350	1.960.865.150	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	367.492.600	0	0	0	367.492.600	1.238.358.200	0	0	1.238.358.200	870.865.600	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	367.492.600	0	0	0	367.492.600	1.238.358.200	0	0	1.238.358.200	870.865.600	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	209.999.600	0	0	0	209.999.600	1.299.999.150	0	0	1.299.999.150	1.089.999.550	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	109.999.800	0	0	0	109.999.800	1.129.999.350	0	0	1.129.999.350	1.019.999.550	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	99.999.800	0	0	0	99.999.800	169.999.800	0	0	169.999.800	70.000.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 04	329.352.500	2.556.721.640	0	0	2.886.074.140	429.102.500	2.556.721.640	0	2.985.824.140	99.750.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	329.352.500	2.556.721.640	0	0	2.886.074.140	429.102.500	2.556.721.640	0	2.985.824.140	99.750.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	129.900.000	0	0	0	129.900.000	229.650.000	0	0	229.650.000	99.750.000	
1 05	1.05.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	199.452.500	2.556.721.640	0	0	2.756.174.140	199.452.500	2.556.721.640	0	2.756.174.140	0	
1 05	1.05.0.00.0.00.04.0000	3.906.613.750	2.565.900	0	0	3.909.179.650	3.224.315.840	2.289.858.100	0	5.514.173.940	1.604.994.290	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	0	0	0	39.591.600	39.591.600	0	0	0	39.591.600	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.146.700	0	0	0	261.146.700	324.156.999	0	0	0	324.156.999	63.010.299
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.586.000	0	0	0	11.586.000	11.586.000	0	0	0	11.586.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	0	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.700	0	0	0	29.998.700	29.998.700	0	0	0	29.998.700	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	40.547.299	0	0	0	40.547.299	10.547.299
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.562.000	0	0	0	144.562.000	197.025.000	0	0	0	197.025.000	52.463.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	11.805.800	0	0	11.805.800	7.377.800	55.332.400	0	0	62.710.200	50.904.400
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	11.805.800	0	0	11.805.800	7.377.800	55.332.400	0	0	62.710.200	50.904.400
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.403.000	0	0	0	107.403.000	110.602.700	0	0	0	110.602.700	3.199.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	2.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.575.000	0	0	0	15.575.000	16.774.700	0	0	0	16.774.700	1.199.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	0	0	0	90.828.000	90.828.000	0	0	0	90.828.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.616.500	0	0	0	56.616.500	58.116.500	0	0	0	58.116.500	1.500.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.472.900	0	0	0	32.472.900	33.972.900	0	0	0	33.972.900	1.500.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.131.900	0	0	0	7.131.900	7.131.900	0	0	0	7.131.900	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.536.700	0	0	0	8.536.700	8.536.700	0	0	0	8.536.700	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.475.000	0	0	0	8.475.000	8.475.000	0	0	0	8.475.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	164.000.000	0	0	0	164.000.000	409.000.000	0	0	0	409.000.000	245.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	164.000.000	0	0	0	164.000.000	409.000.000	0	0	0	409.000.000	245.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	164.000.000	0	0	0	164.000.000	409.000.000	0	0	0	409.000.000	245.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	240.390.400	0	0	0	240.390.400	240.390.400	0	0	0	240.390.400	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	98.390.400	0	0	0	98.390.400	123.390.400	0	0	0	123.390.400	25.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75.000.000	0	0	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	75.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.290.400	0	0	0	6.290.400	21.890.400	0	0	0	21.890.400	15.600.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	5.700.000	0	0	0	5.700.000	15.100.000	0	0	0	15.100.000	9.400.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000	0	0	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	5.700.000	0	0	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	142.000.000	0	0	0	142.000.000	117.000.000	0	0	0	117.000.000	(25.000.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05	Penyediaan Alat Bantu	92.000.000	0	0	0	92.000.000	92.000.000	0	0	0	92.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	(25.000.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	565.254.900	0	0	0	565.254.900	636.516.200	18.738.700	0	0	655.254.900	90.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	565.254.900	0	0	0	565.254.900	636.516.200	18.738.700	0	0	655.254.900	90.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	34.999.800	0	0	0	34.999.800	24.999.800	0	0	0	24.999.800	(10.000.000)
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.126.100	0	0	0	93.126.100	174.387.400	18.738.700	0	0	193.126.100	100.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	437.129.000	0	0	0	437.129.000	437.129.000	0	0	0	437.129.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	232.588.886	0	0	0	232.588.886	938.773.586	0	0	0	938.773.586	706.184.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	218.403.886	0	0	0	218.403.886	924.588.586	0	0	0	924.588.586	706.184.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	218.403.886	0	0	0	218.403.886	924.588.586	0	0	0	924.588.586	706.184.700
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.185.000	0	0	0	14.185.000	14.185.000	0	0	0	14.185.000	0
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	14.185.000	0	0	0	14.185.000	14.185.000	0	0	0	14.185.000	0





**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.484.000	0	0	0	272.484.000	385.077.600	0	0	0	385.077.600	112.593.600
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.885.350	0	0	0	94.885.350	94.885.350	0	0	0	94.885.350	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.985.450	0	0	0	70.985.450	70.985.450	0	0	0	70.985.450	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.465.700	0	0	0	3.465.700	3.465.700	0	0	0	3.465.700	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.434.200	0	0	0	20.434.200	20.434.200	0	0	0	20.434.200	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.165.495.900	8.501.200	0	0	2.173.997.100	2.173.997.100	0	0	0	2.173.997.100	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.165.495.900	8.501.200	0	0	2.173.997.100	2.173.997.100	0	0	0	2.173.997.100	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	1.007.000.000	0	0	0	1.007.000.000	860.000.000	0	0	0	860.000.000	(147.000.000)
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	95.000.000	0	0	0	95.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	5.000.000
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.063.495.900	8.501.200	0	0	1.071.997.100	1.213.997.100	0	0	0	1.213.997.100	142.000.000
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	444.993.100	0	0	0	444.993.100	444.993.100	0	0	0	444.993.100	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	70.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	0	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	40.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	69.993.100	0	0	0	69.993.100	69.993.100	0	0	0	69.993.100	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.993.100	0	0	0	39.993.100	39.993.100	0	0	0	39.993.100	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.02 04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	305.000.000	0	0	0	305.000.000	305.000.000	0	0	0	305.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.000.000	0	0	0	225.000.000	225.000.000	0	0	0	225.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.04 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80.000.000	0	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	130.006.900	0	0	0	130.006.900	130.006.900	0	0	0	130.006.900	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.006.900	0	0	0	130.006.900	130.006.900	0	0	0	130.006.900	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.006.900	0	0	0	130.006.900	130.006.900	0	0	0	130.006.900	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
2 09 2.09.3.25.3.27.01.0000 05 2.01 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
<b>2 10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>926.217.800</b>	<b>1.461.929.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.388.146.800</b>	<b>882.718.800</b>	<b>1.194.894.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.077.613.142</b>	<b>(310.533.658)</b>
1 04 1.04.2.10.1.03.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	926.217.800	1.461.929.000	0	0	2.388.146.800	882.718.800	1.194.894.342	0	0	2.077.613.142	(310.533.658)
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	74.999.800	0	0	0	74.999.800	24.000.800	0	0	0	24.000.800	(50.999.000)
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.999.800	0	0	0	74.999.800	24.000.800	0	0	0	24.000.800	(50.999.000)
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 06 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	74.999.800	0	0	0	74.999.800	24.000.800	0	0	0	24.000.800	(50.999.000)
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	851.218.000	1.461.929.000	0	0	2.313.147.000	858.718.000	1.194.894.342	0	0	2.053.612.342	(259.534.658)
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	851.218.000	1.461.929.000	0	0	2.313.147.000	858.718.000	1.194.894.342	0	0	2.053.612.342	(259.534.658)
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	205.667.700	0	0	0	205.667.700	205.667.700	0	0	0	205.667.700	0
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	282.323.700	0	0	0	282.323.700	282.323.700	0	0	0	282.323.700	0
2 10 1.04.2.10.1.03.01.0000 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	363.226.600	1.461.929.000	0	0	1.825.155.600	370.726.600	1.194.894.342	0	0	1.565.620.942	(259.534.658)
<b>2 11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>7.850.374.150</b>	<b>782.655.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.633.029.350</b>	<b>7.874.882.122</b>	<b>878.243.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.753.125.322</b>	<b>120.095.972</b>
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.850.374.150	782.655.200	0	0	8.633.029.350	7.874.882.122	878.243.200	0	0	8.753.125.322	120.095.972
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.460.577.450	40.655.200	0	0	7.501.232.650	7.373.648.272	136.243.200	0	0	7.509.891.472	8.658.822

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.728.900	0	0	0	92.728.900	92.728.900	0	0	0	92.728.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.109.000	0	0	0	86.109.000	86.109.000	0	0	0	86.109.000	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.619.900	0	0	0	6.619.900	6.619.900	0	0	0	6.619.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.099.711.400	0	0	0	3.099.711.400	2.717.651.722	0	0	0	2.717.651.722	(382.059.678)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.804.200	0	0	0	3.031.804.200	2.645.298.522	0	0	0	2.645.298.522	(386.505.678)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.907.200	0	0	0	60.907.200	65.353.200	0	0	0	65.353.200	4.446.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.915.200	4.284.000	0	0	78.199.200	73.915.200	0	0	0	73.915.200	(4.284.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.915.200	4.284.000	0	0	78.199.200	73.915.200	0	0	0	73.915.200	(4.284.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.522.800	0	0	0	163.522.800	220.903.800	0	0	0	220.903.800	57.381.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.993.800	0	0	0	4.993.800	4.993.800	0	0	0	4.993.800	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.549.300	0	0	0	60.549.300	57.945.300	0	0	0	57.945.300	(2.604.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.794.900	0	0	0	12.794.900	12.794.900	0	0	0	12.794.900	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800	0	0	0	24.999.800	24.999.800	0	0	0	24.999.800	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.185.000	0	0	0	60.185.000	120.170.000	0	0	0	120.170.000	59.985.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	487.100	36.371.200	0	0	36.858.300	487.100	132.743.200	0	0	133.230.300	96.372.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0	19.373.800	0	0	19.373.800	19.373.800
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	487.100	36.371.200	0	0	36.858.300	487.100	39.281.400	0	0	39.768.500	2.910.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	74.088.000	0	0	74.088.000	74.088.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.109.660.300	0	0	0	3.109.660.300	3.114.042.350	0	0	0	3.114.042.350	4.382.050
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.160.000	0	0	0	19.160.000	18.008.600	0	0	0	18.008.600	(1.151.400)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.088.500.300	0	0	0	3.088.500.300	3.094.033.750	0	0	0	3.094.033.750	5.533.450
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.551.750	0	0	0	920.551.750	1.153.919.200	3.500.000	0	0	1.157.419.200	236.867.450
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.818.650	0	0	0	78.818.650	83.707.050	0	0	0	83.707.050	4.888.400
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	796.544.500	0	0	0	796.544.500	1.029.531.650	3.500.000	0	0	1.033.031.650	236.487.150
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.999.800	0	0	0	24.999.800	20.491.700	0	0	0	20.491.700	(4.508.100)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.987.500	0	0	0	9.987.500	9.987.500	0	0	0	9.987.500	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.201.300	0	0	0	10.201.300	10.201.300	0	0	0	10.201.300	0
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	157.429.700	0	0	0	157.429.700	255.784.650	0	0	0	255.784.650	98.354.950
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	106.685.500	0	0	0	106.685.500	151.944.550	0	0	0	151.944.550	45.259.050
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	35.093.500	0	0	0	35.093.500	54.043.500	0	0	0	54.043.500	18.950.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	56.399.000	0	0	0	56.399.000	75.631.600	0	0	0	75.631.600	19.232.600
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	15.193.000	0	0	0	15.193.000	22.269.450	0	0	0	22.269.450	7.076.450
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	50.744.200	0	0	0	50.744.200	103.840.100	0	0	0	103.840.100	53.095.900
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.744.200	0	0	0	50.744.200	103.840.100	0	0	0	103.840.100	53.095.900
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	43.601.100	0	0	0	43.601.100	41.761.100	0	0	0	41.761.100	(1.840.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	43.601.100	0	0	0	43.601.100	41.761.100	0	0	0	41.761.100	(1.840.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	43.601.100	0	0	0	43.601.100	41.761.100	0	0	0	41.761.100	(1.840.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	60.085.000	0	0	0	60.085.000	73.175.000	0	0	0	73.175.000	13.090.000



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.085.000	0	0	0	60.085.000	73.175.000	0	0	0	73.175.000	13.090.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	30.100.500	0	0	0	30.100.500	29.140.500	0	0	0	29.140.500	(960.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.984.500	0	0	0	29.984.500	44.034.500	0	0	0	44.034.500	14.050.000
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.601.000	0	0	0	43.601.000	43.238.000	0	0	0	43.238.000	(363.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.601.000	0	0	0	43.601.000	43.238.000	0	0	0	43.238.000	(363.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43.601.000	0	0	0	43.601.000	43.238.000	0	0	0	43.238.000	(363.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.427.900	0	0	0	40.427.900	38.907.900	0	0	0	38.907.900	(1.520.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	40.427.900	0	0	0	40.427.900	38.907.900	0	0	0	38.907.900	(1.520.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40.427.900	0	0	0	40.427.900	38.907.900	0	0	0	38.907.900	(1.520.000)
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	44.652.000	742.000.000	0	0	786.652.000	48.367.200	742.000.000	0	0	790.367.200	3.715.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01	Pengelolaan Sampah	44.652.000	742.000.000	0	0	786.652.000	48.367.200	742.000.000	0	0	790.367.200	3.715.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 03	Penganganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	43.601.000	0	0	0	43.601.000	48.367.200	0	0	0	48.367.200	4.766.200
2 11 2.11.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.051.000	742.000.000	0	0	743.051.000	0	742.000.000	0	0	742.000.000	(1.051.000)
<b>2 12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.274.761.970</b>	<b>249.909.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.524.671.570</b>	<b>3.877.519.945</b>	<b>545.559.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.423.078.945</b>	<b>(101.592.625)</b>
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.274.761.970	249.909.600	0	0	4.524.671.570	3.877.519.945	545.559.000	0	0	4.423.078.945	(101.592.625)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.507.942.370	249.909.600	0	0	3.757.851.970	3.110.700.345	545.559.000	0	0	3.656.259.345	(101.592.625)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.921.600	0	0	0	2.921.600	2.921.600	0	0	0	2.921.600	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.921.600	0	0	0	2.921.600	2.921.600	0	0	0	2.921.600	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.827.450.420	0	0	0	2.827.450.420	2.310.779.995	0	0	0	2.310.779.995	(516.670.425)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.782.241.920	0	0	0	2.782.241.920	2.265.571.495	0	0	0	2.265.571.495	(516.670.425)
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.191.600	0	0	0	40.191.600	40.191.600	0	0	0	40.191.600	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.016.900	0	0	0	5.016.900	5.016.900	0	0	0	5.016.900	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.285.600	0	0	0	278.285.600	348.011.600	0	0	0	348.011.600	69.726.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.000	0	0	0	4.972.000	4.972.000	0	0	0	4.972.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.021.100	0	0	0	73.021.100	73.021.100	0	0	0	73.021.100	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.116.800	0	0	0	6.116.800	6.116.800	0	0	0	6.116.800	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.654.200	0	0	0	23.654.200	23.654.200	0	0	0	23.654.200	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.697.500	0	0	0	11.697.500	11.697.500	0	0	0	11.697.500	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.960.000	0	0	0	6.960.000	6.960.000	0	0	0	6.960.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.864.000	0	0	0	151.864.000	221.590.000	0	0	0	221.590.000	69.726.000
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.572.600	249.909.600	0	0	263.482.200	63.275.000	545.559.000	0	0	608.834.000	345.351.800
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.572.600	249.909.600	0	0	263.482.200	63.275.000	545.559.000	0	0	608.834.000	345.351.800
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.033.600	0	0	0	217.033.600	217.033.600	0	0	0	217.033.600	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.033.600	0	0	0	36.033.600	36.033.600	0	0	0	36.033.600	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	0	0	0	180.000.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.650.950	0	0	0	163.650.950	163.650.950	0	0	0	163.650.950	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.928.750	0	0	0	84.928.750	84.928.750	0	0	0	84.928.750	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.582.000	0	0	0	15.582.000	15.582.000	0	0	0	15.582.000	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.998.900	0	0	0	49.998.900	49.998.900	0	0	0	49.998.900	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.141.300	0	0	0	13.141.300	13.141.300	0	0	0	13.141.300	0
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13	Penataan Organisasi	5.027.600	0	0	0	5.027.600	5.027.600	0	0	0	5.027.600	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2.12.0.00.0.00.01.0000.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.027.600	0	0	0	5.027.600	5.027.600	0	0	0	5.027.600	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	621.303.700	0	0	0	621.303.700	621.303.700	0	0	0	621.303.700	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	621.303.700	0	0	0	621.303.700	621.303.700	0	0	0	621.303.700	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	110.889.200	0	0	0	110.889.200	110.889.200	0	0	0	110.889.200	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	510.414.500	0	0	0	510.414.500	510.414.500	0	0	0	510.414.500	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	42.884.000	0	0	0	42.884.000	42.884.000	0	0	0	42.884.000	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	42.884.000	0	0	0	42.884.000	42.884.000	0	0	0	42.884.000	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	42.884.000	0	0	0	42.884.000	42.884.000	0	0	0	42.884.000	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.247.300	0	0	0	31.247.300	31.247.300	0	0	0	31.247.300	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	31.247.300	0	0	0	31.247.300	31.247.300	0	0	0	31.247.300	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.247.500	0	0	0	6.247.500	6.247.500	0	0	0	6.247.500	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.999.800	0	0	0	24.999.800	24.999.800	0	0	0	24.999.800	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.384.600	0	0	0	71.384.600	71.384.600	0	0	0	71.384.600	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	71.384.600	0	0	0	71.384.600	71.384.600	0	0	0	71.384.600	0
2.12.0.00.0.00.01.0000.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	71.384.600	0	0	0	71.384.600	71.384.600	0	0	0	71.384.600	0
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>4.940.004.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.940.004.765</b>	<b>5.268.138.405</b>	<b>32.371.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300.509.805</b>	<b>360.505.040</b>
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.940.004.765	0	0	0	4.940.004.765	5.268.138.405	32.371.400	0	0	5.300.509.805	360.505.040
2.13.0.00.0.00.01.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.702.407.900	0	0	0	3.702.407.900	3.048.359.772	32.371.400	0	0	3.080.731.172	(621.676.728)
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.991.000	0	0	0	3.991.000	3.991.000	0	0	0	3.991.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.991.000	0	0	0	3.991.000	3.991.000	0	0	0	3.991.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.434.591.400	0	0	0	3.434.591.400	2.756.570.701	0	0	0	2.756.570.701	(678.020.699)
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.386.002.200	0	0	0	3.386.002.200	2.700.757.501	0	0	0	2.700.757.501	(685.244.699)
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.089.200	0	0	0	44.089.200	51.313.200	0	0	0	51.313.200	7.224.000
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	4.500.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120.814.100	0	0	0	120.814.100	137.229.100	0	0	0	137.229.100	16.415.000
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.600	0	0	0	4.998.600	4.998.600	0	0	0	4.998.600	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.825.000	0	0	0	13.825.000	13.825.000	0	0	0	13.825.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.996.300	0	0	0	6.996.300	6.996.300	0	0	0	6.996.300	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.200	0	0	0	4.999.200	4.999.200	0	0	0	4.999.200	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.995.000	0	0	0	74.995.000	91.410.000	0	0	0	91.410.000	16.415.000
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	32.371.400	0	0	32.371.400	32.371.400
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	32.371.400	0	0	32.371.400	32.371.400
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.161.500	0	0	0	89.161.500	84.466.571	0	0	0	84.466.571	(4.694.929)
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.999.100	0	0	0	14.999.100	10.304.171	0	0	0	10.304.171	(4.694.929)
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	0	0	0	72.662.400	72.662.400	0	0	0	72.662.400	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.849.900	0	0	0	53.849.900	66.102.400	0	0	0	66.102.400	12.252.500
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.993.600	0	0	0	37.993.600	50.246.100	0	0	0	50.246.100	12.252.500
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.873.000	0	0	0	5.873.000	5.873.000	0	0	0	5.873.000	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.983.300	0	0	0	9.983.300	9.983.300	0	0	0	9.983.300	0
2.13.0.00.0.00.01.0000.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	420.277.165	0	0	0	420.277.165	303.573.433	0	0	0	303.573.433	(116.703.732)
2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	420.277.165	0	0	0	420.277.165	303.573.433	0	0	0	303.573.433	(116.703.732)
2.13.0.00.0.00.01.0000.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	420.277.165	0	0	0	420.277.165	303.573.433	0	0	0	303.573.433	(116.703.732)
2.13.0.00.0.00.01.0000.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	367.449.500	0	0	0	367.449.500	544.577.600	0	0	0	544.577.600	177.128.100

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Belanja					Belanja							
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	367.449.500	0	0	0	0	367.449.500	544.577.600	0	0	0	544.577.600	177.128.100
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	135.128.100	0	0	0	135.128.100	45.128.100
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	122.771.300	0	0	0	0	122.771.300	122.771.300	0	0	0	122.771.300	0
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	74.778.100	0	0	0	0	74.778.100	74.778.100	0	0	0	74.778.100	0
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	79.900.100	0	0	0	0	79.900.100	79.900.100	0	0	0	79.900.100	0
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	0	0	0	0	0	0	132.000.000	0	0	0	132.000.000	132.000.000
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	449.870.200	0	0	0	0	449.870.200	1.371.627.600	0	0	0	1.371.627.600	921.757.400
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	449.870.200	0	0	0	0	449.870.200	1.371.627.600	0	0	0	1.371.627.600	921.757.400
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	93.750.000	0	0	0	93.750.000	43.750.000
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	128.582.800	0	0	0	0	128.582.800	437.126.000	0	0	0	437.126.000	308.543.200
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	237.395.700	0	0	0	0	237.395.700	728.860.400	0	0	0	728.860.400	491.464.700
2 13	2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	33.891.700	0	0	0	0	33.891.700	111.891.200	0	0	0	111.891.200	77.999.500
<b>2 14</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>10.976.085.700</b>	<b>200.000.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.176.085.735</b>	<b>11.098.356.346</b>	<b>218.000.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.316.356.382</b>	<b>140.270.647</b>
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.976.085.700	200.000.035	0	0	0	11.176.085.735	11.098.356.346	218.000.036	0	0	11.316.356.382	140.270.647
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.194.016.800	0	0	0	0	5.194.016.800	4.894.133.046	0	0	0	4.894.133.046	(299.883.754)
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.190.000	0	0	0	0	6.190.000	6.190.000	0	0	0	6.190.000	0
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.190.000	0	0	0	0	6.190.000	6.190.000	0	0	0	6.190.000	0
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.545.952.600	0	0	0	0	4.545.952.600	4.195.093.346	0	0	0	4.195.093.346	(350.859.254)
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.494.880.200	0	0	0	0	4.494.880.200	4.127.380.546	0	0	0	4.127.380.546	(367.499.654)
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44.755.200	0	0	0	0	44.755.200	61.395.600	0	0	0	61.395.600	16.640.400
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.317.200	0	0	0	0	6.317.200	6.317.200	0	0	0	6.317.200	0
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	109.775.000	0	0	0	109.775.000	99.775.000
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	109.775.000	0	0	0	109.775.000	99.775.000
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.626.800	0	0	0	0	145.626.800	223.333.900	0	0	0	223.333.900	77.707.100
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.003.100	0	0	0	0	5.003.100	5.749.600	0	0	0	5.749.600	746.500
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.170.000	0	0	0	0	20.170.000	23.305.400	0	0	0	23.305.400	3.135.400
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.940.800	0	0	0	0	9.940.800	11.766.000	0	0	0	11.766.000	1.825.200
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	0	0	0	0	9.999.900	11.799.900	0	0	0	11.799.900	1.800.000
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.999.000	0	0	0	0	5.999.000	5.999.000	0	0	0	5.999.000	0
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.514.000	0	0	0	0	94.514.000	164.714.000	0	0	0	164.714.000	70.200.000
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.197.400	0	0	0	0	366.197.400	194.497.400	0	0	0	194.497.400	(171.700.000)
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	6.100.000	0	0	0	6.100.000	1.100.000
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.397.400	0	0	0	0	8.397.400	8.397.400	0	0	0	8.397.400	0
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.800.000	0	0	0	0	352.800.000	180.000.000	0	0	0	180.000.000	(172.800.000)
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.050.000	0	0	0	0	120.050.000	165.243.400	0	0	0	165.243.400	45.193.400
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.050.000	0	0	0	0	120.050.000	147.545.600	0	0	0	147.545.600	27.495.600
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	7.699.400	0	0	0	7.699.400	7.699.400
2 14	2.14.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	9.998.400	0	0	0	9.998.400	9.998.400



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.637.600	0	0	0	321.637.600	375.419.200	0	0	0	375.419.200	53.781.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.293.000	0	0	0	6.293.000	6.293.000	0	0	0	6.293.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.756.400	0	0	0	18.756.400	18.756.400	0	0	0	18.756.400	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.500	0	0	0	4.997.500	4.997.500	0	0	0	4.997.500	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.452.900	0	0	0	14.452.900	14.459.500	0	0	0	14.459.500	6.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.005.800	0	0	0	12.005.800	12.005.800	0	0	0	12.005.800	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	265.132.000	0	0	0	265.132.000	318.907.000	0	0	0	318.907.000	53.775.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	491.000.000	0	0	491.000.000	0	491.000.000	0	0	491.000.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	475.000.000	0	0	475.000.000	0	475.000.000	0	0	475.000.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.648.200	0	0	0	376.648.200	384.599.500	0	0	0	384.599.500	7.951.300
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.342.600	0	0	0	41.342.600	43.293.900	0	0	0	43.293.900	1.951.300
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.305.600	0	0	0	334.305.600	340.305.600	0	0	0	340.305.600	6.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.120.300	0	0	0	128.120.300	279.173.500	0	0	0	279.173.500	151.053.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.450.300	0	0	0	123.450.300	274.503.500	0	0	0	274.503.500	151.053.200
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000	0	0	0	4.670.000	4.670.000	0	0	0	4.670.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	305.840.800	0	0	0	305.840.800	922.944.200	61.940.200	0	0	984.884.400	679.043.600
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	63.754.800	61.245.000	0	0	124.999.800	124.999.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	63.754.800	61.245.000	0	0	124.999.800	124.999.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	16.049.600	0	0	0	16.049.600	16.049.600	0	0	0	16.049.600	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	16.049.600	0	0	0	16.049.600	16.049.600	0	0	0	16.049.600	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	59.918.600	0	0	0	59.918.600	311.198.600	0	0	0	311.198.600	251.280.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	0	0	251.280.000	0	0	0	251.280.000	251.280.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	18.418.600	0	0	0	18.418.600	18.418.600	0	0	0	18.418.600	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.500.000	0	0	0	37.500.000	37.500.000	0	0	0	37.500.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	197.644.800	0	0	0	197.644.800	457.151.800	0	0	0	457.151.800	259.507.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	197.644.800	0	0	0	197.644.800	337.062.800	0	0	0	337.062.800	139.418.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	120.089.000	0	0	0	120.089.000	120.089.000
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.227.800	0	0	0	32.227.800	74.789.400	695.200	0	0	75.484.600	43.256.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	32.227.800	0	0	0	32.227.800	74.789.400	695.200	0	0	75.484.600	43.256.800
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	14.629.900	0	0	0	14.629.900	14.629.900	0	0	0	14.629.900	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900	0	0	0	14.629.900	14.629.900	0	0	0	14.629.900	0
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 03 2.13 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900	0	0	0	14.629.900	14.629.900	0	0	0	14.629.900	0
<b>2 16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.019.576.300</b>	<b>156.052.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.175.629.200</b>	<b>8.910.645.465</b>	<b>480.219.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.390.865.065</b>	<b>1.215.235.865</b>
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.019.576.300	156.052.900	0	0	8.175.629.200	8.910.645.465	480.219.600	0	0	9.390.865.065	1.215.235.865
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.061.627.600	156.052.900	0	0	7.217.680.500	6.686.815.665	480.219.600	0	0	7.167.035.265	(50.645.235)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.498.000	0	0	0	7.498.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	(3.498.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.498.000	0	0	0	3.498.000	0	0	0	0	0	(3.498.000)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.602.746.600	0	0	0	2.602.746.600	2.466.155.265	0	0	0	2.466.155.265	(136.591.335)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.566.598.700	0	0	0	2.566.598.700	2.420.758.965	0	0	0	2.420.758.965	(145.839.735)
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.148.000	0	0	0	32.148.000	41.396.400	0	0	0	41.396.400	9.248.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.900	0	0	0	3.999.900	3.999.900	0	0	0	3.999.900	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	64.992.400	0	0	0	64.992.400	80.117.400	0	0	0	80.117.400	15.125.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	64.992.400	0	0	0	64.992.400	80.117.400	0	0	0	80.117.400	15.125.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	25.130.000	27.000.000	0	0	52.130.000	52.130.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	25.130.000	27.000.000	0	0	52.130.000	52.130.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.651.600	156.052.900	0	0	201.704.500	263.578.200	0	0	0	263.578.200	61.873.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.000	0	0	0	9.985.000	9.974.200	0	0	0	9.974.200	(10.800)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	680.000	156.052.900	0	0	156.732.900	24.310.500	0	0	0	24.310.500	(132.422.400)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	6.999.700	0	0	0	6.999.700	6.999.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.986.600	0	0	0	34.986.600	34.986.600	0	0	0	34.986.600	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	11.270.200	0	0	0	11.270.200	11.270.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	26.040.000	0	0	0	26.040.000	26.040.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	149.997.000	0	0	0	149.997.000	149.997.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.988.800	0	0	0	8.988.800	10.400.000	453.219.600	0	0	463.619.600	454.630.800
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	8.500.000	452.019.600	0	0	460.519.600	460.519.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.988.800	0	0	0	8.988.800	1.900.000	1.200.000	0	0	3.100.000	(5.888.800)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.248.574.000	0	0	0	4.248.574.000	3.756.034.600	0	0	0	3.756.034.600	(492.539.400)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.997.600	0	0	0	24.997.600	8.012.000	0	0	0	8.012.000	(16.985.600)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.863.581.500	0	0	0	3.863.581.500	3.570.993.500	0	0	0	3.570.993.500	(292.588.000)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.999.100	0	0	0	19.999.100	9.007.900	0	0	0	9.007.900	(10.991.200)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	339.995.800	0	0	0	339.995.800	168.021.200	0	0	0	168.021.200	(171.974.600)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.176.200	0	0	0	83.176.200	81.400.200	0	0	0	81.400.200	(1.776.000)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.992.200	0	0	0	79.992.200	73.506.200	0	0	0	73.506.200	(6.486.000)
2.16.2.20.2.21.01.0000	01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.184.000	0	0	0	3.184.000	7.894.000	0	0	0	7.894.000	4.710.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	670.248.700	0	0	0	670.248.700	1.603.458.700	0	0	0	1.603.458.700	933.210.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	670.248.700	0	0	0	670.248.700	1.603.458.700	0	0	0	1.603.458.700	933.210.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	10.009.800	0	0	0	10.009.800	282.269.800	0	0	0	282.269.800	272.260.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	500.000.000	0	0	0	500.000.000	974.000.000	0	0	0	974.000.000	474.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	99.999.900	0	0	0	99.999.900	99.999.900	0	0	0	99.999.900	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	60.239.000	0	0	0	60.239.000	97.189.000	0	0	0	97.189.000	36.950.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	287.700.000	0	0	0	287.700.000	620.371.100	0	0	0	620.371.100	332.671.100
2.16.2.20.2.21.01.0000	03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	287.700.000	0	0	0	287.700.000	620.371.100	0	0	0	620.371.100	332.671.100
2.16.2.20.2.21.01.0000	03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	251.600.000	0	0	0	251.600.000	602.371.700	0	0	0	602.371.700	350.771.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	36.100.000	0	0	0	36.100.000	17.999.400	0	0	0	17.999.400	(18.100.600)
2.17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>4.290.092.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.290.092.006</b>	<b>7.555.852.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.555.852.298</b>	<b>3.265.760.292</b>
2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.290.092.006	0	0	0	4.290.092.006	1.117.277.195	0	0	0	1.117.277.195	(3.172.814.811)
2.17.3.30.3.31.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.339.512.806	0	0	0	2.339.512.806	789.743.745	0	0	0	789.743.745	(1.549.769.061)
2.17.3.30.3.31.01.0000	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.904.900	0	0	0	18.904.900	12.334.900	0	0	0	12.334.900	(6.570.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.764.900	0	0	0	5.764.900	5.764.900	0	0	0	5.764.900	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.140.000	0	0	0	13.140.000	6.570.000	0	0	0	6.570.000	(6.570.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.074.670.706	0	0	0	2.074.670.706	654.728.845	0	0	0	654.728.845	(1.419.941.861)
2.17.3.30.3.31.01.0000	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.037.588.206	0	0	0	2.037.588.206	633.009.945	0	0	0	633.009.945	(1.404.578.261)
2.17.3.30.3.31.01.0000	01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.727.200	0	0	0	30.727.200	15.363.600	0	0	0	15.363.600	(15.363.600)

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.355.300	0	0	0	6.355.300	6.355.300	0	0	0	6.355.300	0
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.260.800	0	0	0	128.260.800	67.510.200	0	0	0	67.510.200	(60.750.600)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.855.900	0	0	0	2.855.900	1.529.300	0	0	0	1.529.300	(1.326.600)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.601.700	0	0	0	24.601.700	13.177.600	0	0	0	13.177.600	(11.424.100)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.135.900	0	0	0	4.135.900	2.104.000	0	0	0	2.104.000	(2.031.900)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.521.300	0	0	0	13.521.300	7.119.300	0	0	0	7.119.300	(6.402.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.440.000	0	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	(1.440.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.706.000	0	0	0	81.706.000	43.580.000	0	0	0	43.580.000	(38.126.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.740.800	0	0	0	78.740.800	29.517.000	0	0	0	29.517.000	(49.223.800)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0	600.000	(600.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.044.000	0	0	0	23.044.000	10.917.000	0	0	0	10.917.000	(12.127.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	18.000.000	0	0	0	18.000.000	(36.496.800)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.935.600	0	0	0	38.935.600	25.652.800	0	0	0	25.652.800	(13.282.800)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.565.600	0	0	0	29.565.600	16.282.800	0	0	0	16.282.800	(13.282.800)
2.17.3.30.3.31.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.370.000	0	0	0	9.370.000	9.370.000	0	0	0	9.370.000	0
2.17.3.30.3.31.01.0000.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	496.658.000	0	0	0	496.658.000	114.948.450	0	0	0	114.948.450	(381.709.550)
2.17.3.30.3.31.01.0000.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	496.658.000	0	0	0	496.658.000	114.948.450	0	0	0	114.948.450	(381.709.550)
2.17.3.30.3.31.01.0000.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	496.658.000	0	0	0	496.658.000	114.948.450	0	0	0	114.948.450	(381.709.550)
2.17.3.30.3.31.01.0000.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	250.608.700	0	0	0	250.608.700	0	0	0	0	0	(250.608.700)
2.17.3.30.3.31.01.0000.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.608.700	0	0	0	250.608.700	0	0	0	0	0	(250.608.700)
2.17.3.30.3.31.01.0000.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	250.608.700	0	0	0	250.608.700	0	0	0	0	0	(250.608.700)
2.17.3.30.3.31.01.0000.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	(150.000.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	(150.000.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	0	(150.000.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	235.560.600	0	0	0	235.560.600	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(225.560.600)
2.17.3.30.3.31.01.0000.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	235.560.600	0	0	0	235.560.600	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(225.560.600)
2.17.3.30.3.31.01.0000.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	44.153.000	0	0	0	44.153.000	0	0	0	0	0	(44.153.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.07.2.01.03	Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	169.997.600	0	0	0	169.997.600	0	0	0	0	0	(169.997.600)
2.17.3.30.3.31.01.0000.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	21.410.000	0	0	0	21.410.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	(11.410.000)
2.17.3.30.3.31.01.0000.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	817.751.900	0	0	0	817.751.900	202.585.000	0	0	0	202.585.000	(615.166.900)
2.17.3.30.3.31.01.0000.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	817.751.900	0	0	0	817.751.900	202.585.000	0	0	0	202.585.000	(615.166.900)
2.17.3.30.3.31.01.0000.08.2.01.01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	817.751.900	0	0	0	817.751.900	202.585.000	0	0	0	202.585.000	(615.166.900)
2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	0	0	0	0	6.438.575.103	0	0	0	6.438.575.103	6.438.575.103
2.17.3.30.3.31.03.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0	4.604.319.353	0	0	0	4.604.319.353	4.604.319.353
2.17.3.30.3.31.03.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	40.123.586	0	0	0	40.123.586	40.123.586
2.17.3.30.3.31.03.0000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	40.123.586	0	0	0	40.123.586	40.123.586
2.17.3.30.3.31.03.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	3.558.664.261	0	0	0	3.558.664.261	3.558.664.261
2.17.3.30.3.31.03.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	3.524.618.661	0	0	0	3.524.618.661	3.524.618.661
2.17.3.30.3.31.03.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	34.045.600	0	0	0	34.045.600	34.045.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)	
		Belanja					Belanja						
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	292.440.037	0	0	0	292.440.037	292.440.037
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	7.504.996	0	0	0	7.504.996	7.504.996
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	37.290.695	0	0	0	37.290.695	37.290.695
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	6.394.400	0	0	0	6.394.400	6.394.400
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	50.351.326	0	0	0	50.351.326	50.351.326
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	190.898.620	0	0	0	190.898.620	190.898.620
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	659.456.300	0	0	0	659.456.300	659.456.300
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	6.607.500	0	0	0	6.607.500	6.607.500
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	0	651.448.800	0	0	0	651.448.800	651.448.800
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	53.635.169	0	0	0	53.635.169	53.635.169
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	16.635.169	0	0	0	16.635.169	16.635.169
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	12.000.000	12.000.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	0	0	0	0	360.709.550	0	0	0	360.709.550	360.709.550
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0	0	0	0	0	360.709.550	0	0	0	360.709.550	360.709.550
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	360.709.550	0	0	0	360.709.550	360.709.550
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	0	0	0	0	315.563.900	0	0	0	315.563.900	315.563.900
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	315.563.900	0	0	0	315.563.900	315.563.900
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0	0	0	0	0	315.563.900	0	0	0	315.563.900	315.563.900
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0	0	0	0	0	225.560.600	0	0	0	225.560.600	225.560.600
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 07 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	0	0	0	0	0	225.560.600	0	0	0	225.560.600	225.560.600
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	44.153.000	0	0	0	44.153.000	44.153.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	169.997.600	0	0	0	169.997.600	169.997.600
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 07 2.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0	0	0	0	0	11.410.000	0	0	0	11.410.000	11.410.000
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	0	0	0	0	782.421.700	0	0	0	782.421.700	782.421.700
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0	0	0	0	0	782.421.700	0	0	0	782.421.700	782.421.700
2 17	2.17.3.30.3.31.03.0000 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0	0	0	0	0	782.421.700	0	0	0	782.421.700	782.421.700
<b>2 18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>3.963.972.292</b>	<b>337.195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.301.167.292</b>	<b>3.598.185.280</b>	<b>333.575.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.931.761.180</b>	<b>(369.406.112)</b>
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.963.972.292	337.195.000	0	0	4.301.167.292	3.598.185.280	333.575.900	0	0	3.931.761.180	(369.406.112)
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.986.635.492	337.195.000	0	0	3.323.830.492	2.671.736.080	333.575.900	0	0	3.005.311.980	(318.518.512)
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.200	0	0	0	3.000.200	3.000.200	0	0	0	3.000.200	0
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.200	0	0	0	3.000.200	3.000.200	0	0	0	3.000.200	0
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.444.002.892	0	0	0	2.444.002.892	2.124.596.780	0	0	0	2.124.596.780	(319.406.112)
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.397.272.192	0	0	0	2.397.272.192	2.077.866.080	0	0	0	2.077.866.080	(319.406.112)
2 18	2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.730.600	0	0	0	43.730.600	43.730.600	0	0	0	43.730.600	0



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.100	0	0	0	3.000.100	3.000.100	0	0	0	3.000.100	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.542.700	0	0	0	269.542.700	296.231.100	0	0	0	296.231.100	26.688.400
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.442.000	0	0	0	5.442.000	5.442.000	0	0	0	5.442.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.260.200	0	0	0	57.260.200	57.260.200	0	0	0	57.260.200	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.400	0	0	0	15.000.400	15.000.400	0	0	0	15.000.400	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.540.100	0	0	0	25.540.100	20.168.500	0	0	0	20.168.500	(5.371.600)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166.300.000	0	0	0	166.300.000	198.360.000	0	0	0	198.360.000	32.060.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	333.575.900	0	0	333.575.900	0	333.575.900	0	0	333.575.900	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	0	51.082.200	0	0	51.082.200	0	51.082.200	0	0	51.082.200	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	167.648.700	0	0	167.648.700	0	167.648.700	0	0	167.648.700	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	114.845.000	0	0	114.845.000	0	114.845.000	0	0	114.845.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.223.000	0	0	0	158.223.000	156.214.300	0	0	0	156.214.300	(2.008.700)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.063.800	0	0	0	47.063.800	45.055.100	0	0	0	45.055.100	(2.008.700)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.159.200	0	0	0	109.159.200	109.159.200	0	0	0	109.159.200	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.866.700	3.619.100	0	0	115.485.800	91.693.700	0	0	0	91.693.700	(23.792.100)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.825.700	0	0	0	72.825.700	59.825.700	0	0	0	59.825.700	(13.000.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	0	0	0	5.000.000	7.557.600	0	0	0	7.557.600	2.557.600
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.297.100	3.619.100	0	0	22.916.200	22.910.400	0	0	0	22.910.400	(5.800)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.743.900	0	0	0	14.743.900	1.400.000	0	0	0	1.400.000	(13.343.900)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	314.309.000	0	0	0	314.309.000	282.475.000	0	0	0	282.475.000	(31.834.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	22.484.000	0	0	0	22.484.000	14.599.000	0	0	0	14.599.000	(7.885.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	22.484.000	0	0	0	22.484.000	14.599.000	0	0	0	14.599.000	(7.885.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	291.825.000	0	0	0	291.825.000	267.876.000	0	0	0	267.876.000	(23.949.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	0	0	0	270.000.000	248.826.000	0	0	0	248.826.000	(21.174.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	21.825.000	0	0	0	21.825.000	19.050.000	0	0	0	19.050.000	(2.775.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	53.098.500	0	0	0	53.098.500	34.157.500	0	0	0	34.157.500	(18.941.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.098.500	0	0	0	53.098.500	34.157.500	0	0	0	34.157.500	(18.941.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	26.765.500	0	0	0	26.765.500	23.065.500	0	0	0	23.065.500	(3.700.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	26.333.000	0	0	0	26.333.000	11.092.000	0	0	0	11.092.000	(15.241.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	117.595.800	0	0	0	117.595.800	117.483.200	0	0	0	117.483.200	(112.600)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	117.595.800	0	0	0	117.595.800	117.483.200	0	0	0	117.483.200	(112.600)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	103.636.100	0	0	0	103.636.100	108.635.900	0	0	0	108.635.900	4.999.800
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13.959.700	0	0	0	13.959.700	8.847.300	0	0	0	8.847.300	(5.112.400)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	407.613.000	0	0	0	407.613.000	407.613.000	0	0	0	407.613.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	407.613.000	0	0	0	407.613.000	407.613.000	0	0	0	407.613.000	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120.791.000	0	0	0	120.791.000	0	0	0	0	0	(120.791.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	190.222.000	0	0	0	190.222.000	366.461.000	0	0	0	366.461.000	176.239.000
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	96.600.000	0	0	0	96.600.000	41.152.000	0	0	0	41.152.000	(55.448.000)
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	84.720.500	0	0	0	84.720.500	84.720.500	0	0	0	84.720.500	0
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.720.500	0	0	0	84.720.500	84.720.500	0	0	0	84.720.500	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84.720.500	0	0	0	84.720.500	84.720.500	0	0	0	84.720.500	0
<b>2 19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>4.303.364.496</b>	<b>539.469.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.842.834.418</b>	<b>5.398.776.426</b>	<b>541.569.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.940.346.348</b>	<b>1.097.511.930</b>
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.303.364.496	539.469.922	0	0	4.842.834.418	5.398.776.426	541.569.922	0	0	5.940.346.348	1.097.511.930
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.047.175.596	30.712.000	0	0	3.077.887.596	3.039.687.726	30.712.000	0	0	3.070.399.726	(7.487.870)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.754.800	0	0	0	39.754.800	39.754.800	0	0	0	39.754.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.755.000	0	0	0	33.755.000	33.755.000	0	0	0	33.755.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.800	0	0	0	5.999.800	5.999.800	0	0	0	5.999.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.366.695.196	0	0	0	2.366.695.196	2.367.382.226	0	0	0	2.367.382.226	687.030
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.310.108.196	0	0	0	2.310.108.196	2.310.795.226	0	0	0	2.310.795.226	687.030
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.587.200	0	0	0	50.587.200	50.587.200	0	0	0	50.587.200	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.800	0	0	0	5.999.800	5.999.800	0	0	0	5.999.800	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.225.800	0	0	0	293.225.800	313.216.800	0	0	0	313.216.800	19.991.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.982.100	0	0	0	19.982.100	19.982.100	0	0	0	19.982.100	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.989.000	0	0	0	27.989.000	27.989.000	0	0	0	27.989.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.371.600	0	0	0	18.371.600	18.371.600	0	0	0	18.371.600	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.313.100	0	0	0	19.313.100	19.313.100	0	0	0	19.313.100	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.996.000	0	0	0	19.996.000	19.996.000	0	0	0	19.996.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.574.000	0	0	0	187.574.000	207.565.000	0	0	0	207.565.000	19.991.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.325.100	0	0	0	197.325.100	169.159.200	0	0	0	169.159.200	(28.165.900)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.300	0	0	0	50.000.300	40.000.000	0	0	0	40.000.000	(10.000.300)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145.324.800	0	0	0	145.324.800	127.159.200	0	0	0	127.159.200	(18.165.600)
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.174.700	5.712.000	0	0	155.886.700	150.174.700	5.712.000	0	0	155.886.700	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.235.600	0	0	0	40.235.600	40.235.600	0	0	0	40.235.600	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.680.000	0	0	0	11.680.000	11.680.000	0	0	0	11.680.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.259.100	5.712.000	0	0	103.971.100	98.259.100	5.712.000	0	0	103.971.100	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	307.750.600	0	0	0	307.750.600	495.650.600	2.100.000	0	0	497.750.600	190.000.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	257.750.600	0	0	0	257.750.600	445.650.600	2.100.000	0	0	447.750.600	190.000.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000	90.000.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	257.750.600	0	0	0	257.750.600	355.650.600	2.100.000	0	0	357.750.600	100.000.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	948.438.300	508.757.922	0	0	1.457.196.222	1.863.438.100	508.757.922	0	0	2.372.196.022	914.999.800
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	108.438.300	508.757.922	0	0	617.196.222	208.438.100	508.757.922	0	0	717.196.022	99.999.800
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	108.438.300	508.757.922	0	0	617.196.222	208.438.100	508.757.922	0	0	717.196.022	99.999.800
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	840.000.000	0	0	0	840.000.000	1.655.000.000	0	0	0	1.655.000.000	815.000.000
2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	840.000.000	0	0	0	840.000.000	1.655.000.000	0	0	0	1.655.000.000	815.000.000
<b>2 20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>195.976.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.976.000</b>	<b>198.473.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.473.000</b>	<b>2.497.000</b>
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	195.976.000	0	0	0	195.976.000	198.473.000	0	0	0	198.473.000	2.497.000
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	195.976.000	0	0	0	195.976.000	198.473.000	0	0	0	198.473.000	2.497.000





**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)		
		Belanja					Belanja							
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja			
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 02													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.02													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 03													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 05													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01													
3 26	3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07													
<b>3 27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>29.062.549.206</b>	<b>213.216.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.275.765.906</b>	<b>37.355.262.344</b>	<b>10.448.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.365.711.144</b>	<b>8.089.945.238</b>		
2 09	2.09.3.25.3.27.01.0000													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 02													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.05													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.05 01													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.05 05													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.06													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 02 2.06 01													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 03													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.01													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 03 2.01 04													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 04													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.01													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.01 01													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.01 02													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.03													
3 27	2.09.3.25.3.27.01.0000 04 2.03 02													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03													
3 27	3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06													

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	552.226.100	0	0	0	552.226.100	648.112.100	0	0	0	648.112.100	95.886.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.497.500	0	0	0	9.497.500	9.497.500	0	0	0	9.497.500	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.999.600	0	0	0	80.999.600	85.428.500	0	0	0	85.428.500	4.428.900
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.996.700	0	0	0	27.996.700	27.996.700	0	0	0	27.996.700	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.000.000	0	0	0	29.000.000	34.398.200	0	0	0	34.398.200	5.398.200
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	59.996.500	0	0	0	59.996.500	59.996.500	0	0	0	59.996.500	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.155.800	0	0	0	86.155.800	78.806.700	0	0	0	78.806.700	(7.349.100)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.580.000	0	0	0	258.580.000	351.988.000	0	0	0	351.988.000	93.408.000
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	185.026.700	0	0	185.026.700	0	0	0	0	0	(185.026.700)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	185.026.700	0	0	185.026.700	0	0	0	0	0	(185.026.700)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.137.851.600	0	0	0	2.137.851.600	1.994.949.000	0	0	0	1.994.949.000	(142.902.600)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	7.000.000	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.491.600	0	0	0	69.491.600	35.199.800	0	0	0	35.199.800	(34.291.800)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.061.360.000	0	0	0	2.061.360.000	1.952.749.200	0	0	0	1.952.749.200	(108.610.800)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.935.350	0	0	0	139.935.350	139.935.350	0	0	0	139.935.350	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.997.550	0	0	0	129.997.550	129.997.550	0	0	0	129.997.550	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.937.800	0	0	0	9.937.800	9.937.800	0	0	0	9.937.800	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.489.107.450	837.200	0	0	6.489.944.650	7.109.059.850	0	0	0	7.109.059.850	619.115.200
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.347.453.750	0	0	0	4.347.453.750	5.601.213.850	0	0	0	5.601.213.850	1.253.760.100
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.095.928.450	0	0	0	4.095.928.450	5.361.228.550	0	0	0	5.361.228.550	1.265.300.100
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	251.525.300	0	0	0	251.525.300	239.985.300	0	0	0	239.985.300	(11.540.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kevenangan Kabupaten/Kota	1.421.664.900	837.200	0	0	1.422.502.100	1.507.846.000	0	0	0	1.507.846.000	85.343.900
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	194.567.400	0	0	0	194.567.400	283.534.200	0	0	0	283.534.200	88.966.800
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.227.097.500	837.200	0	0	1.227.934.700	1.224.311.800	0	0	0	1.224.311.800	(3.622.900)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	319.999.600	0	0	0	319.999.600	0	0	0	0	0	(319.999.600)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	299.999.600	0	0	0	299.999.600	0	0	0	0	0	(299.999.600)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	399.989.200	0	0	0	399.989.200	0	0	0	0	0	(399.989.200)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	399.989.200	0	0	0	399.989.200	0	0	0	0	0	(399.989.200)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.115.313.141	0	0	0	3.115.313.141	10.696.972.938	0	0	0	10.696.972.938	7.581.659.797
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.355.313.600	0	0	0	1.355.313.600	555.314.600	0	0	0	555.314.600	(799.999.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	205.314.800	0	0	0	205.314.800	205.314.800	0	0	0	205.314.800	0
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1.149.998.800	0	0	0	1.149.998.800	349.999.800	0	0	0	349.999.800	(799.999.000)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.759.999.541	0	0	0	1.759.999.541	10.141.658.338	0	0	0	10.141.658.338	8.381.658.797
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0	0	0	0	0	1.719.090.600	0	0	0	1.719.090.600	1.719.090.600
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.759.999.541	0	0	0	1.759.999.541	8.422.567.738	0	0	0	8.422.567.738	6.662.568.197
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	439.543.100	10.448.800	0	0	449.991.900	0	0	0	0	0	(449.991.900)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	345.773.700	4.226.000	0	0	349.999.700	0	0	0	0	0	(349.999.700)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	149.999.900	0	0	0	149.999.900	0	0	0	0	0	(149.999.900)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195.773.800	4.226.000	0	0	199.999.800	0	0	0	0	0	(199.999.800)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.769.400	6.222.800	0	0	99.992.200	0	0	0	0	0	(99.992.200)
3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	93.769.400	6.222.800	0	0	99.992.200	0	0	0	0	0	(99.992.200)



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.517.828.200	0	0	0	5.517.828.200	1.900.629.051	0	0	0	1.900.629.051	(3.617.199.149)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.818.400	0	0	0	45.818.400	15.272.800	0	0	0	15.272.800	(30.545.600)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.999.400	0	0	0	7.999.400	7.999.400	0	0	0	7.999.400	0
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	222.149.150	0	0	0	222.149.150	0	0	0	0	0	(222.149.150)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.934.900	0	0	0	18.934.900	0	0	0	0	0	(18.934.900)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	203.214.250	0	0	0	203.214.250	0	0	0	0	0	(203.214.250)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.497.395	0	0	0	278.497.395	51.203.858	0	0	0	51.203.858	(227.293.537)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.997.900	0	0	0	8.997.900	2.819.504	0	0	0	2.819.504	(6.178.396)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.999.995	0	0	0	32.999.995	7.133.400	0	0	0	7.133.400	(25.866.595)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.497.800	0	0	0	7.497.800	0	0	0	0	0	(7.497.800)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.999.900	0	0	0	51.999.900	0	0	0	0	0	(51.999.900)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.998.000	0	0	0	11.998.000	0	0	0	0	0	(11.998.000)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.003.800	0	0	0	165.003.800	41.250.954	0	0	0	41.250.954	(123.752.846)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.100.000	135.907.700	0	0	138.007.700	0	0	0	0	0	(138.007.700)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	530.000	24.352.600	0	0	24.882.600	0	0	0	0	0	(24.882.600)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.570.000	111.555.100	0	0	113.125.100	0	0	0	0	0	(113.125.100)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828.794.900	0	0	0	828.794.900	202.500.000	0	0	0	202.500.000	(626.294.900)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	(2.000.000)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.342.900	0	0	0	9.342.900	0	0	0	0	0	(9.342.900)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	817.452.000	0	0	0	817.452.000	202.500.000	0	0	0	202.500.000	(614.952.000)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.928.176	0	0	0	85.928.176	6.345.031	0	0	0	6.345.031	(79.583.145)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.927.946	0	0	0	30.927.946	6.345.031	0	0	0	6.345.031	(24.582.915)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	(20.000.000)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.230	0	0	0	35.000.230	0	0	0	0	0	(35.000.230)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	180.597.100	666.149.600	0	0	846.746.700	0	0	0	0	0	(846.746.700)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	149.659.300	666.149.600	0	0	815.808.900	0	0	0	0	0	(815.808.900)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	35.051.500	665.000.000	0	0	700.051.500	0	0	0	0	0	(700.051.500)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114.607.800	1.149.600	0	0	115.757.400	0	0	0	0	0	(115.757.400)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	30.937.800	0	0	0	30.937.800	0	0	0	0	0	(30.937.800)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30.937.800	0	0	0	30.937.800	0	0	0	0	0	(30.937.800)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	90.084.500	0	0	0	90.084.500	0	0	0	0	0	(90.084.500)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	80.801.400	0	0	0	80.801.400	0	0	0	0	0	(80.801.400)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	80.801.400	0	0	0	80.801.400	0	0	0	0	0	(80.801.400)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.283.100	0	0	0	9.283.100	0	0	0	0	0	(9.283.100)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.283.100	0	0	0	9.283.100	0	0	0	0	0	(9.283.100)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	65.000.002	0	0	0	65.000.002	0	0	0	0	0	(65.000.002)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	65.000.002	0	0	0	65.000.002	0	0	0	0	0	(65.000.002)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	(50.000.000)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.000.002	0	0	0	15.000.002	0	0	0	0	0	(15.000.002)
3 30 3.31.3.30.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	175.000.000	0	0	0	175.000.000	0	0	0	0	0	(175.000.000)











**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.248.400	0	0	0	4.248.400	4.248.400	0	0	0	4.248.400	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.184.800	54.472.900	0	0	104.657.700	43.754.700	0	0	0	43.754.700	(60.903.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	0	0	0	72.077.700	72.077.700	0	0	0	72.077.700	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.769.600	150.728.059	0	0	213.497.659	58.496.500	0	0	0	58.496.500	(155.001.159)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.410.000	0	0	0	23.410.000	30.059.400	0	0	0	30.059.400	6.649.400
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.400	0	0	0	6.045.400	6.045.400	0	0	0	6.045.400	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.484.200	0	0	0	19.484.200	11.261.700	0	0	0	11.261.700	(8.222.500)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	150.728.059	0	0	150.728.059	0	0	0	0	0	(150.728.059)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.830.000	0	0	0	13.830.000	11.130.000	0	0	0	11.130.000	(2.700.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	733.045.600	0	0	0	733.045.600	910.493.300	0	0	0	910.493.300	177.447.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	630.484.300	0	0	0	630.484.300	767.496.300	0	0	0	767.496.300	137.012.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.087.200	0	0	0	50.087.200	50.087.200	0	0	0	50.087.200	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	62.759.800	0	0	0	62.759.800	48.582.500	0	0	0	48.582.500	(14.177.300)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	267.637.300	0	0	0	267.637.300	260.837.300	0	0	0	260.837.300	(6.800.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	0	0	0	250.000.000	407.989.300	0	0	0	407.989.300	157.989.300
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	102.561.300	0	0	0	102.561.300	142.997.000	0	0	0	142.997.000	40.435.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	65.000.000	0	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	65.000.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	37.561.300	0	0	0	37.561.300	77.997.000	0	0	0	77.997.000	40.435.700
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.235.803.400	0	0	0	1.235.803.400	1.049.308.400	0	0	0	1.049.308.400	(186.495.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	300.554.000	0	0	0	300.554.000	469.509.000	0	0	0	469.509.000	168.955.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.156.600	0	0	0	57.156.600	57.156.600	0	0	0	57.156.600	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.921.300	0	0	0	17.921.300	124.496.300	0	0	0	124.496.300	106.575.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.428.200	0	0	0	17.428.200	17.428.200	0	0	0	17.428.200	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.695.000	0	0	0	70.695.000	127.720.000	0	0	0	127.720.000	57.025.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	72.479.000	0	0	0	72.479.000	83.004.000	0	0	0	83.004.000	10.525.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	64.873.900	0	0	0	64.873.900	59.703.900	0	0	0	59.703.900	(5.170.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	700.249.400	0	0	0	700.249.400	328.199.400	0	0	0	328.199.400	(372.050.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	562.310.000	0	0	0	562.310.000	210.405.000	0	0	0	210.405.000	(351.905.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	88.187.700	0	0	0	88.187.700	76.112.700	0	0	0	76.112.700	(12.075.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	49.751.700	0	0	0	49.751.700	41.681.700	0	0	0	41.681.700	(8.070.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	235.000.000	0	0	0	235.000.000	251.600.000	0	0	0	251.600.000	16.600.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000	0	0	0	60.000.000	80.145.000	0	0	0	80.145.000	20.145.000
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	35.000.000	0	0	0	35.000.000	17.060.000	0	0	0	17.060.000	(17.940.000)
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	30.000.000	0	0	0	30.000.000	50.265.000	0	0	0	50.265.000	20.265.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	14.130.000	0	0	0	14.130.000	(5.870.000)
<b>5 02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>18.973.938.196</b>	<b>330.070.800</b>	<b>11.520.000.000</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>287.154.459.240</b>	<b>19.374.600.327</b>	<b>842.204.215</b>	<b>14.322.919.900</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>290.870.174.686</b>	<b>3.715.715.446</b>
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	18.973.938.196	330.070.800	11.520.000.000	256.330.450.244	287.154.459.240	4.448.460.723	0	0	0	4.448.460.723	(282.705.998.517)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.598.206.596	330.070.800	0	0	9.928.277.396	2.598.618.599	0	0	0	2.598.618.599	(7.329.658.797)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.112.600	0	0	0	75.112.600	0	0	0	0	0	(75.112.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.574.000	0	0	0	9.574.000	0	0	0	0	0	(9.574.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.411.200	0	0	0	5.411.200	0	0	0	0	0	(5.411.200)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.421.100	0	0	0	5.421.100	0	0	0	0	0	(5.421.100)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.412.300	0	0	0	5.412.300	0	0	0	0	0	(5.412.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.421.000	0	0	0	5.421.000	0	0	0	0	0	(5.421.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.873.000	0	0	0	43.873.000	0	0	0	0	0	(43.873.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.251.310.376	0	0	0	8.251.310.376	2.264.195.549	0	0	0	2.264.195.549	(5.987.114.827)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.981.192.976	0	0	0	7.981.192.976	2.200.387.749	0	0	0	2.200.387.749	(5.780.805.227)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210.929.100	0	0	0	210.929.100	46.198.100	0	0	0	46.198.100	(164.731.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.208.500	0	0	0	54.208.500	12.629.900	0	0	0	12.629.900	(41.578.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.979.800	0	0	0	4.979.800	4.979.800	0	0	0	4.979.800	0
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	49.999.800	0	0	0	49.999.800	0	0	0	0	0	(49.999.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	49.999.800	0	0	0	49.999.800	0	0	0	0	0	(49.999.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.277.300	0	0	0	518.277.300	123.806.800	0	0	0	123.806.800	(394.470.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.388.600	0	0	0	36.388.600	3.367.100	0	0	0	3.367.100	(33.021.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.095.000	0	0	0	74.095.000	10.087.300	0	0	0	10.087.300	(64.007.700)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.932.300	0	0	0	37.932.300	8.546.400	0	0	0	8.546.400	(29.385.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.454.000	0	0	0	85.454.000	27.509.000	0	0	0	27.509.000	(57.945.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.929.900	0	0	0	85.929.900	18.963.000	0	0	0	18.963.000	(66.966.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.587.500	0	0	0	33.587.500	6.675.000	0	0	0	6.675.000	(26.912.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.890.000	0	0	0	164.890.000	48.659.000	0	0	0	48.659.000	(116.231.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.025.800	315.070.800	0	0	318.096.600	0	0	0	0	0	(318.096.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.025.800	168.750.000	0	0	171.775.800	0	0	0	0	0	(171.775.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	146.320.800	0	0	146.320.800	0	0	0	0	0	(146.320.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.688.120	0	0	0	516.688.120	170.075.150	0	0	0	170.075.150	(346.612.970)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.260.000	0	0	0	16.260.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	(15.260.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.356.300	0	0	0	43.356.300	16.103.000	0	0	0	16.103.000	(27.253.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.071.820	0	0	0	457.071.820	152.972.150	0	0	0	152.972.150	(304.099.670)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.792.600	15.000.000	0	0	198.792.600	40.541.100	0	0	0	40.541.100	(158.251.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.297.100	0	0	0	108.297.100	23.721.600	0	0	0	23.721.600	(84.575.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.174.700	15.000.000	0	0	48.174.700	7.159.600	0	0	0	7.159.600	(41.015.100)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.320.800	0	0	0	42.320.800	9.659.900	0	0	0	9.659.900	(32.660.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.043.111.000	0	11.520.000.000	256.330.450.244	274.893.561.244	1.542.860.624	0	0	0	1.542.860.624	(273.350.700.620)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.502.639.300	0	0	0	1.502.639.300	132.923.400	0	0	0	132.923.400	(1.369.715.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	176.416.300	0	0	0	176.416.300	0	0	0	0	0	(176.416.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.602.800	0	0	0	150.602.800	0	0	0	0	0	(150.602.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	53.110.000	0	0	0	53.110.000	0	0	0	0	0	(53.110.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	53.110.000	0	0	0	53.110.000	3.534.600	0	0	0	3.534.600	(49.575.400)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	335.307.500	0	0	0	335.307.500	0	0	0	0	0	(335.307.500)

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	427.529.000	0	0	0	427.529.000	3.454.200	0	0	0	3.454.200	(424.074.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	117.464.900	0	0	0	117.464.900	112.379.900	0	0	0	112.379.900	(5.085.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	40.666.600	0	0	0	40.666.600	13.554.700	0	0	0	13.554.700	(27.111.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	148.432.200	0	0	0	148.432.200	0	0	0	0	0	(148.432.200)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	625.749.000	0	0	0	625.749.000	179.034.900	0	0	0	179.034.900	(446.714.100)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	104.598.900	0	0	0	104.598.900	23.177.000	0	0	0	23.177.000	(81.421.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	32.563.100	0	0	0	32.563.100	8.115.700	0	0	0	8.115.700	(24.447.400)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	74.999.800	0	0	0	74.999.800	11.308.800	0	0	0	11.308.800	(63.691.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	30.349.200	0	0	0	30.349.200	8.687.400	0	0	0	8.687.400	(21.661.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	383.238.000	0	0	0	383.238.000	127.746.000	0	0	0	127.746.000	(255.492.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	500.029.900	0	0	0	500.029.900	77.738.400	0	0	0	77.738.400	(422.291.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	35.254.000	0	0	0	35.254.000	16.504.000	0	0	0	16.504.000	(18.750.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5.316.500	0	0	0	5.316.500	(44.683.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.095.000	0	0	0	149.095.000	42.527.700	0	0	0	42.527.700	(106.567.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	160.437.900	0	0	0	160.437.900	0	0	0	0	0	(160.437.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	(50.000.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	55.243.000	0	0	0	55.243.000	13.390.200	0	0	0	13.390.200	(41.852.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.256.277.800	0	11.520.000.000	256.330.450.244	272.106.728.044	1.124.465.924	0	0	0	1.124.465.924	(270.982.262.120)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.150.478.000	0	0	0	4.150.478.000	1.122.086.824	0	0	0	1.122.086.824	(3.028.391.176)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	105.799.800	0	0	253.031.159.500	253.136.959.300	2.379.100	0	0	0	2.379.100	(253.134.580.200)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	11.520.000.000	0	11.520.000.000	0	0	0	0	0	(11.520.000.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	3.299.290.744	3.299.290.744	0	0	0	0	0	(3.299.290.744)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	158.415.000	0	0	0	158.415.000	28.698.000	0	0	0	28.698.000	(129.717.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	105.235.000	0	0	0	105.235.000	26.197.700	0	0	0	26.197.700	(79.037.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53.180.000	0	0	0	53.180.000	2.500.300	0	0	0	2.500.300	(50.679.700)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	771.521.900	0	0	0	771.521.900	91.609.300	0	0	0	91.609.300	(679.912.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	771.521.900	0	0	0	771.521.900	91.609.300	0	0	0	91.609.300	(679.912.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	96.243.300	0	0	0	96.243.300	19.510.300	0	0	0	19.510.300	(76.733.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	333.436.800	0	0	0	333.436.800	5.694.700	0	0	0	5.694.700	(327.742.100)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	71.511.400	0	0	0	71.511.400	8.013.100	0	0	0	8.013.100	(63.498.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	105.537.700	0	0	0	105.537.700	10.897.200	0	0	0	10.897.200	(94.640.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	113.151.800	0	0	0	113.151.800	40.303.500	0	0	0	40.303.500	(72.848.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.640.900	0	0	0	51.640.900	7.190.500	0	0	0	7.190.500	(44.450.400)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.561.098.700	0	0	0	1.561.098.700	215.372.200	0	0	0	215.372.200	(1.345.726.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.561.098.700	0	0	0	1.561.098.700	215.372.200	0	0	0	215.372.200	(1.345.726.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	157.213.400	0	0	0	157.213.400	40.368.300	0	0	0	40.368.300	(116.845.100)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	39.799.000	0	0	0	39.799.000	6.552.100	0	0	0	6.552.100	(33.246.900)

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	76.608.700	0	0	0	76.608.700	8.449.900	0	0	0	8.449.900	(68.158.800)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	143.022.600	0	0	0	143.022.600	34.418.000	0	0	0	34.418.000	(108.604.600)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	170.953.600	0	0	0	170.953.600	20.814.300	0	0	0	20.814.300	(150.139.300)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	59.295.800	0	0	0	59.295.800	7.168.800	0	0	0	7.168.800	(52.127.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.434.300	0	0	0	75.434.300	5.735.300	0	0	0	5.735.300	(69.699.000)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	275.880.500	0	0	0	275.880.500	17.544.100	0	0	0	17.544.100	(258.336.400)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	159.594.400	0	0	0	159.594.400	19.244.900	0	0	0	19.244.900	(140.349.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	97.754.900	0	0	0	97.754.900	15.716.400	0	0	0	15.716.400	(82.038.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	98.709.800	0	0	0	98.709.800	18.424.900	0	0	0	18.424.900	(80.284.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	27.652.100	0	0	0	27.652.100	1.700.600	0	0	0	1.700.600	(25.951.500)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	94.653.200	0	0	0	94.653.200	7.963.300	0	0	0	7.963.300	(86.689.900)
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	84.526.400	0	0	0	84.526.400	11.271.300	0	0	0	11.271.300	(73.255.100)
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	5.000.023.203	313.484.500	0	0	5.313.507.703	5.313.507.703
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0	3.507.543.603	313.484.500	0	0	3.821.028.103	3.821.028.103
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	23.081.300	0	0	0	23.081.300	23.081.300
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	4.366.700	0	0	0	4.366.700	4.366.700
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	1.797.000	0	0	0	1.797.000	1.797.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	2.446.200	0	0	0	2.446.200	2.446.200
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	14.471.400	0	0	0	14.471.400	14.471.400
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	2.991.185.153	530.000	0	0	2.991.715.153	2.991.715.153
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	2.902.700.353	0	0	0	2.902.700.353	2.902.700.353
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	88.484.800	530.000	0	0	89.014.800	89.014.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	219.475.950	2.178.000	0	0	221.653.950	221.653.950
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	9.973.850	0	0	0	9.973.850	9.973.850
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	25.791.700	0	0	0	25.791.700	25.791.700
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	18.753.300	2.178.000	0	0	20.931.300	20.931.300
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	16.641.300	0	0	0	16.641.300	16.641.300
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	6.965.800	0	0	0	6.965.800	6.965.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	106.350.000	0	0	0	106.350.000	106.350.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	295.776.500	0	0	295.776.500	295.776.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	171.344.400	0	0	171.344.400	171.344.400
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	124.432.100	0	0	124.432.100	124.432.100
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	194.918.000	0	0	0	194.918.000	194.918.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	5.500.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	11.900.000	0	0	0	11.900.000	11.900.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	0	177.518.000	0	0	0	177.518.000	177.518.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	78.883.200	15.000.000	0	0	93.883.200	93.883.200
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	33.378.500	0	0	0	33.378.500	33.378.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	33.719.500	15.000.000	0	0	48.719.500	48.719.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	11.785.200	0	0	0	11.785.200	11.785.200
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0	0	0	0	0	1.492.479.600	0	0	0	1.492.479.600	1.492.479.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	0	0	0	0	0	1.492.479.600	0	0	0	1.492.479.600	1.492.479.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	0	0	0	0	0	116.845.100	0	0	0	116.845.100	116.845.100



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	0	0	0	0	0	155.000.000	0	0	0	155.000.000	155.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	93.158.800	0	0	0	93.158.800	93.158.800
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	108.604.600	0	0	0	108.604.600	108.604.600
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	0	0	0	0	0	150.139.300	0	0	0	150.139.300	150.139.300
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0	0	0	0	0	52.127.000	0	0	0	52.127.000	52.127.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	0	0	0	0	69.699.000	0	0	0	69.699.000	69.699.000
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0	0	0	0	0	258.336.400	0	0	0	258.336.400	258.336.400
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0	0	0	0	0	140.349.500	0	0	0	140.349.500	140.349.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	82.038.500	0	0	0	82.038.500	82.038.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 11	Pengalihan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	80.284.900	0	0	0	80.284.900	80.284.900
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	25.951.500	0	0	0	25.951.500	25.951.500
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	86.689.900	0	0	0	86.689.900	86.689.900
5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0	0	0	73.255.100	0	0	0	73.255.100	73.255.100
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	0	0	0	0	0	9.925.617.501	528.719.715	14.322.919.900	256.330.450.244	281.107.707.360	281.107.707.360
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	0	0	0	0	0	3.411.837.625	528.719.715	0	0	3.940.557.340	3.940.557.340
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	110.537.300	0	0	0	110.537.300	110.537.300
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	5.207.300	0	0	0	5.207.300	5.207.300
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	5.411.200	0	0	0	5.411.200	5.411.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	4.996.400	0	0	0	4.996.400	4.996.400
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	94.922.400	0	0	0	94.922.400	94.922.400
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	2.370.483.185	0	0	0	2.370.483.185	2.370.483.185
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	0	2.151.237.585	0	0	0	2.151.237.585	2.151.237.585
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	0	177.667.000	0	0	0	177.667.000	177.667.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	0	0	41.578.600	0	0	0	41.578.600	41.578.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	502.744.900	14.800.000	0	0	517.544.900	517.544.900
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	0	0	23.008.700	0	0	0	23.008.700	23.008.700
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	79.960.900	4.800.000	0	0	84.760.900	84.760.900
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	24.850.200	0	0	0	24.850.200	24.850.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	0	0	70.100.000	0	0	0	70.100.000	70.100.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0	0	0	82.935.400	0	0	0	82.935.400	82.935.400
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	20.993.100	0	0	0	20.993.100	20.993.100
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0	19.924.600	10.000.000	0	0	29.924.600	29.924.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	0	180.972.000	0	0	0	180.972.000	180.972.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	2.600.000	375.725.070	0	0	378.325.070	378.325.070
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	339.136.470	0	0	339.136.470	339.136.470
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	2.600.000	36.588.600	0	0	39.188.600	39.188.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	246.167.140	0	0	0	246.167.140	246.167.140
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	0	9.760.000	0	0	0	9.760.000	9.760.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0	0	0	35.695.200	0	0	0	35.695.200	35.695.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	0	0	200.711.940	0	0	0	200.711.940	200.711.940
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	0	0	179.305.100	138.194.645	0	0	317.499.745	317.499.745
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	0	0	107.364.800	0	0	0	107.364.800	107.364.800
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	96.263.745	0	0	96.263.745	96.263.745
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	71.940.300	41.930.900	0	0	113.871.200	113.871.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0	0	0	0	0	5.754.867.276	0	14.322.919.900	256.330.450.244	276.408.237.420	276.408.237.420
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0	0	0	0	0	1.501.236.700	0	0	0	1.501.236.700	1.501.236.700
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0	0	0	0	0	202.986.300	0	0	0	202.986.300	202.986.300
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	0	0	0	0	177.172.800	0	0	0	177.172.800	177.172.800
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0	0	0	0	0	61.710.000	0	0	0	61.710.000	61.710.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	58.175.400	0	0	0	58.175.400	58.175.400
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	0	0	0	0	377.847.500	0	0	0	377.847.500	377.847.500
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0	0	0	0	0	450.715.600	0	0	0	450.715.600	450.715.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0	0	0	0	0	5.085.000	0	0	0	5.085.000	5.085.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	0	0	0	0	0	27.111.900	0	0	0	27.111.900	27.111.900
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	140.432.200	0	0	0	140.432.200	140.432.200
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0	0	0	0	0	418.548.100	0	0	0	418.548.100	418.548.100
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0	0	0	0	0	81.421.900	0	0	0	81.421.900	81.421.900
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0	0	0	0	0	24.447.400	0	0	0	24.447.400	24.447.400
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	63.691.000	0	0	0	63.691.000	63.691.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0	0	21.661.800	0	0	0	21.661.800	21.661.800
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	227.326.000	0	0	0	227.326.000	227.326.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	503.193.600	0	0	0	503.193.600	503.193.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	0	0	0	0	0	27.735.000	0	0	0	27.735.000	27.735.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0	0	0	0	0	54.313.500	0	0	0	54.313.500	54.313.500
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	106.567.300	0	0	0	106.567.300	106.567.300
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	167.577.900	0	0	0	167.577.900	167.577.900
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	96.999.900	0	0	0	96.999.900	96.999.900
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	3.111.514.876	14.322.919.900	256.330.450.244	273.764.885.020	273.764.885.020	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	3.028.391.176	0	0	0	3.028.391.176	3.028.391.176
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	83.123.700	0	253.031.159.500	253.114.283.200	253.114.283.200	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	0	0	0	0	14.322.919.900	0	14.322.919.900	14.322.919.900	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	3.299.290.744	3.299.290.744	3.299.290.744	
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	220.374.000	0	0	0	220.374.000	220.374.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.05 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	130.359.300	0	0	0	130.359.300	130.359.300
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.05 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	90.014.700	0	0	0	90.014.700	90.014.700
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0	0	0	0	0	758.912.600	0	0	0	758.912.600	758.912.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	758.912.600	0	0	0	758.912.600	758.912.600
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	136.000.000	0	0	0	136.000.000	136.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	76.733.000	0	0	0	76.733.000	76.733.000
5 02 5.02.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	0	270.742.100	0	0	0	270.742.100	270.742.100











**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	05	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
							Belanja					Belanja					
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
						1.120.000	0	0	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0	
						1.584.000	0	0	0	1.584.000	1.584.000	0	0	0	1.584.000	0	
						997.700	0	0	0	997.700	997.700	0	0	0	997.700	0	
						997.700	0	0	0	997.700	997.700	0	0	0	997.700	0	
						46.535.040	300.000	0	0	46.835.040	55.433.540	300.000	0	0	55.733.540	8.898.500	
						1.073.500	0	0	0	1.073.500	1.872.500	0	0	0	1.872.500	799.000	
						8.136.300	0	0	0	8.136.300	11.736.300	0	0	0	11.736.300	3.600.000	
						4.015.400	300.000	0	0	4.315.400	4.914.900	300.000	0	0	5.214.900	899.500	
						23.850.000	0	0	0	23.850.000	23.850.000	0	0	0	23.850.000	0	
						1.734.000	0	0	0	1.734.000	1.734.000	0	0	0	1.734.000	0	
						3.115.840	0	0	0	3.115.840	3.115.840	0	0	0	3.115.840	0	
						4.610.000	0	0	0	4.610.000	8.210.000	0	0	0	8.210.000	3.600.000	
						0	40.690.000	0	0	40.690.000	0	40.690.000	0	0	40.690.000	0	
						0	40.690.000	0	0	40.690.000	0	40.690.000	0	0	40.690.000	0	
						63.556.500	0	0	0	63.556.500	65.756.500	0	0	0	65.756.500	2.200.000	
						400.000	0	0	0	400.000	800.000	0	0	0	800.000	400.000	
						8.659.700	0	0	0	8.659.700	10.459.700	0	0	0	10.459.700	1.800.000	
						54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0	
						40.504.900	0	0	0	40.504.900	59.718.250	0	0	0	59.718.250	19.213.350	
						23.681.800	0	0	0	23.681.800	33.078.250	0	0	0	33.078.250	9.396.450	
						16.823.100	0	0	0	16.823.100	26.640.000	0	0	0	26.640.000	9.816.900	
						39.822.200	0	0	0	39.822.200	39.822.200	0	0	0	39.822.200	0	
						39.822.200	0	0	0	39.822.200	39.822.200	0	0	0	39.822.200	0	
						92.860.100	687.180.650	0	0	780.040.750	158.140.400	633.441.021	0	0	791.581.421	11.540.671	
						0	0	0	0	0	11.545.000	0	0	0	11.545.000	11.545.000	
						0	0	0	0	0	11.545.000	0	0	0	11.545.000	11.545.000	
						92.860.100	687.180.650	0	0	780.040.750	146.595.400	633.441.021	0	0	780.036.421	(4.329)	
						28.048.500	687.180.650	0	0	715.229.150	81.783.800	633.441.021	0	0	715.224.821	(4.329)	
						64.811.600	0	0	0	64.811.600	64.811.600	0	0	0	64.811.600	0	
						0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	
						0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	
						0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.500.000	
						3.042.205.412	613.676.873	0	0	3.655.882.285	2.818.565.286	646.597.326	0	0	3.465.162.612	(190.719.673)	
						2.777.519.912	0	0	0	2.777.519.912	2.554.653.286	25.201.000	0	0	2.579.854.286	(197.665.626)	
						2.607.400	0	0	0	2.607.400	2.607.400	0	0	0	2.607.400	0	
						2.607.400	0	0	0	2.607.400	2.607.400	0	0	0	2.607.400	0	
						2.646.300.312	0	0	0	2.646.300.312	2.413.207.586	0	0	0	2.413.207.586	(233.092.726)	
						2.619.382.612	0	0	0	2.619.382.612	2.378.662.686	0	0	0	2.378.662.686	(240.719.926)	
						24.288.000	0	0	0	24.288.000	31.915.200	0	0	0	31.915.200	7.627.200	
						2.629.700	0	0	0	2.629.700	2.629.700	0	0	0	2.629.700	0	
						31.958.300	0	0	0	31.958.300	42.184.400	0	0	0	42.184.400	10.226.100	
						15.047.800	0	0	0	15.047.800	20.564.500	0	0	0	20.564.500	5.516.700	
						14.170.000	0	0	0	14.170.000	14.170.000	0	0	0	14.170.000	0	







KABUPATEN TAPANULI UTARA  
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.540.000	0	0	0	35.540.000	50.904.000	0	0	0	50.904.000	15.364.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.358.300	0	0	0	64.358.300	63.248.300	0	0	0	63.248.300	(1.110.000)
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	0	0	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	(1.000.000)
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.861.500	0	0	0	7.861.500	7.751.500	0	0	0	7.751.500	(110.000)
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.408.300	0	0	0	27.408.300	34.663.300	0	0	0	34.663.300	7.255.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.981.700	0	0	0	23.981.700	26.954.800	0	0	0	26.954.800	2.973.100
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.920.500	0	0	0	1.920.500	2.650.500	0	0	0	2.650.500	730.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.506.100	0	0	0	1.506.100	5.058.000	0	0	0	5.058.000	3.551.900
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.615.000	0	0	0	86.615.000	93.652.000	0	0	0	93.652.000	7.037.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.615.000	0	0	0	86.615.000	93.652.000	0	0	0	93.652.000	7.037.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	86.615.000	0	0	0	86.615.000	93.652.000	0	0	0	93.652.000	7.037.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
7.01.7.01.0.00.0.00.08.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000	KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.737.940.796	0	0	0	2.737.940.796	2.243.585.022	0	0	0	2.243.585.022	(494.355.774)
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.666.407.896	0	0	0	2.666.407.896	2.122.052.122	0	0	0	2.122.052.122	(544.355.774)
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.042.400	0	0	0	1.042.400	1.042.400	0	0	0	1.042.400	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.042.400	0	0	0	1.042.400	1.042.400	0	0	0	1.042.400	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.482.356.096	0	0	0	2.482.356.096	1.938.000.322	0	0	0	1.938.000.322	(544.355.774)
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.449.436.096	0	0	0	2.449.436.096	1.905.080.322	0	0	0	1.905.080.322	(544.355.774)
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.920.000	0	0	0	2.920.000	2.920.000	0	0	0	2.920.000	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.703.700	0	0	0	93.703.700	93.703.700	0	0	0	93.703.700	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.891.800	0	0	0	28.891.800	28.891.800	0	0	0	28.891.800	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.312.000	0	0	0	7.312.000	7.312.000	0	0	0	7.312.000	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	0	0	0	9.999.900	9.999.900	0	0	0	9.999.900	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000	0	0	0	47.500.000	47.500.000	0	0	0	47.500.000	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.096.800	0	0	0	61.096.800	61.096.800	0	0	0	61.096.800	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	900.000	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.700.000	0	0	0	5.700.000	5.700.000	0	0	0	5.700.000	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	0	0	0	54.496.800	54.496.800	0	0	0	54.496.800	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.208.900	0	0	0	28.208.900	28.208.900	0	0	0	28.208.900	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.765.200	0	0	0	22.765.200	22.765.200	0	0	0	22.765.200	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.443.700	0	0	0	5.443.700	5.443.700	0	0	0	5.443.700	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.532.900	0	0	0	71.532.900	71.532.900	0	0	0	71.532.900	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.532.900	0	0	0	71.532.900	71.532.900	0	0	0	71.532.900	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	71.532.900	0	0	0	71.532.900	71.532.900	0	0	0	71.532.900	0
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
7.01.7.01.0.00.0.00.09.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000
7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000	KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	2.143.184.050	1.500.000	0	0	2.144.684.050	1.726.961.309	1.500.000	0	0	1.728.461.309	(416.222.741)
7.01.7.01.0.00.0.00.10.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.065.969.050	1.500.000	0	0	2.067.469.050	1.599.746.309	1.500.000	0	0	1.601.246.309	(466.222.741)













**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	871.239.063	0	0	0	871.239.063	871.239.063	0	0	0	871.239.063	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93.016.700	0	0	0	93.016.700	93.016.700	0	0	0	93.016.700	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.539.200	0	0	0	31.539.200	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	31.539.200	0	0	0	31.539.200	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	31.539.200	0	0	0	31.539.200	31.539.200	0	0	0	31.539.200	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	0	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	602.210.700	0	0	0	602.210.700	589.830.700	0	0	0	589.830.700	(12.380.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	602.210.700	0	0	0	602.210.700	589.830.700	0	0	0	589.830.700	(12.380.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150.000.000	0	0	0	150.000.000	137.620.000	0	0	0	137.620.000	(12.380.000)
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.372.900	0	0	0	97.372.900	97.372.900	0	0	0	97.372.900	0
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	354.837.800	0	0	0	354.837.800	354.837.800	0	0	0	354.837.800	0
<b>TOTAL</b>		<b>970.630.303.950</b>	<b>131.389.345.199</b>	<b>11.520.000.000</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>1.369.870.099.393</b>	<b>986.462.734.741</b>	<b>248.337.221.362</b>	<b>14.322.919.900</b>	<b>256.330.450.244</b>	<b>1.505.453.326.247</b>	<b>135.583.226.854</b>

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
<b>A SPM Bidang Pendidikan</b>						
<b>Pendidikan Dasar</b>						
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	0
			Penambahan Ruang Kelas Baru	150.000.000	325.000.000	175.000.000
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	233.212.000	587.820.000	354.608.000
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	445.104.000	458.740.000	13.636.000
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	399.999.659	1.924.450.171	1.524.450.512
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	8.488.748.318	10.333.876.918	1.845.128.600
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	139.801.000	148.470.000	8.669.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.198.900	31.330.000	9.131.100
			Pengadaan Mebel Sekolah	0	200.000.000	200.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0	0
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.556.773.000	4.600.602.000	43.829.000
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	0	0	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0	0	0
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	173.242.400	173.242.400	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.718.163.798	6.663.456.998	(54.706.800)
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	324.758.000	625.288.500	300.530.500
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.570.893.500	41.570.893.500	0
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>63.222.894.575</b>	<b>67.643.170.487</b>	<b>4.420.275.912</b>
			<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>	<b>63.222.894.575</b>	<b>67.643.170.487</b>	<b>4.420.275.912</b>
<b>Pendidikan Kesetaraan</b>						
		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	236.700.000	0
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>236.700.000</b>	<b>236.700.000</b>	<b>0</b>

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)	
			<b>Jumlah Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>236.700.000</b>	<b>236.700.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>						
		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>					
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0	0	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	100.000.012	100.000.012	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0	0	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0	0	
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	0	0	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	0	0	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0	0	0	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	30.390.000	45.390.000	15.000.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.900.800.000	1.720.800.000	(180.000.000)	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0	0	0	
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.367.310.000	4.367.310.000	0	
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>6.298.500.000</b>	<b>6.233.500.012</b>	<b>(64.999.988)</b>	
			<b>Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>6.298.500.000</b>	<b>6.233.500.012</b>	<b>(64.999.988)</b>	
			<b>Jumlah SPM Bidang Pendidikan</b>	<b>69.758.094.575</b>	<b>74.113.370.499</b>	<b>4.355.275.924</b>	
	<b>B SPM Bidang Kesehatan</b>						
	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	977.763.400	977.763.400	0	
			<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>977.763.400</b>	<b>977.763.400</b>	<b>0</b>	
			<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	<b>977.763.400</b>	<b>977.763.400</b>	<b>0</b>	
	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	712.664.400	2.155.564.400	1.442.900.000	
			<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>712.664.400</b>	<b>2.155.564.400</b>	<b>1.442.900.000</b>	
			<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>	<b>712.664.400</b>	<b>2.155.564.400</b>	<b>1.442.900.000</b>	
	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>						

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)	
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	276.022.100	292.272.100	16.250.000	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>276.022.100</b>	<b>292.272.100</b>	<b>16.250.000</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>			<b>276.022.100</b>	<b>292.272.100</b>	<b>16.250.000</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	420.861.200	503.861.200	83.000.000	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>420.861.200</b>	<b>503.861.200</b>	<b>83.000.000</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita</b>			<b>420.861.200</b>	<b>503.861.200</b>	<b>83.000.000</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	385.069.600	385.069.600	0	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>385.069.600</b>	<b>385.069.600</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>			<b>385.069.600</b>	<b>385.069.600</b>	<b>0</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	95.000.000	95.000.000	0	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>			<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	411.325.800	611.325.800	200.000.000	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>411.325.800</b>	<b>611.325.800</b>	<b>200.000.000</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>			<b>411.325.800</b>	<b>611.325.800</b>	<b>200.000.000</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>						
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	184.367.900	184.367.900	0	
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>184.367.900</b>	<b>184.367.900</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			<b>184.367.900</b>	<b>184.367.900</b>	<b>0</b>

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)		
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>							
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	163.851.700	163.851.700	0		
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>163.851.700</b>	<b>163.851.700</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>				<b>163.851.700</b>	<b>163.851.700</b>	<b>0</b>
	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>							
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	332.058.700	349.058.700	17.000.000		
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>332.058.700</b>	<b>349.058.700</b>	<b>17.000.000</b>
		<b>Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>				<b>332.058.700</b>	<b>349.058.700</b>	<b>17.000.000</b>
	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</b>							
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	225.759.500	225.759.500	0		
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>225.759.500</b>	<b>225.759.500</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</b>				<b>225.759.500</b>	<b>225.759.500</b>	<b>0</b>
	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>							
		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	157.564.500	157.564.500	0		
		<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>157.564.500</b>	<b>157.564.500</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>				<b>157.564.500</b>	<b>157.564.500</b>	<b>0</b>
		<b>Jumlah SPM Bidang Kesehatan</b>				<b>4.342.308.800</b>	<b>6.101.458.800</b>	<b>1.759.150.000</b>
	<b>C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>							
	<b>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>							
		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.308.754.000	3.758.754.000	1.450.000.000		
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	732.499.934	932.499.735	199.999.801		
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	155.000.000	155.000.000	0		
		<b>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>3.196.253.934</b>	<b>4.846.253.735</b>	<b>1.649.999.801</b>
		<b>Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari</b>				<b>3.196.253.934</b>	<b>4.846.253.735</b>	<b>1.649.999.801</b>

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>						
		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	108.909.800	198.909.800	90.000.000
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	3.550.000.000	4.150.819.800	600.819.800
			<b>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.658.909.800</b>	<b>4.349.729.600</b>	<b>690.819.800</b>
			<b>Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik</b>	<b>3.658.909.800</b>	<b>4.349.729.600</b>	<b>690.819.800</b>
			<b>Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>	<b>6.855.163.734</b>	<b>9.195.983.335</b>	<b>2.340.819.601</b>
<b>E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>						
	<b>Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum</b>					
		<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	367.492.600	1.238.358.200	870.865.600
			<b>Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>367.492.600</b>	<b>1.238.358.200</b>	<b>870.865.600</b>
			<b>Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum</b>	<b>367.492.600</b>	<b>1.238.358.200</b>	<b>870.865.600</b>
	<b>Pelayanan informasi rawan bencana</b>					
		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>				
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	75.000.000	50.000.000	(25.000.000)
			<b>Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>(25.000.000)</b>
			<b>Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana</b>	<b>75.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>(25.000.000)</b>
	<b>Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>					
		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>				
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0	128.537.800	128.537.800
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	175.000.000	175.000.000	0
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	0	2.050.000.000	2.050.000.000
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0
			<b>Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>175.000.000</b>	<b>2.353.537.800</b>	<b>2.178.537.800</b>
			<b>Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>175.000.000</b>	<b>2.353.537.800</b>	<b>2.178.537.800</b>
	<b>Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>					

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)	
		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>					
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89.000.000	89.000.000	0	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	
			<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>89.000.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>0</b>	
			<b>Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>89.000.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>					
		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	129.900.000	229.650.000	99.750.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.756.174.140	2.756.174.140	0	
			<b>Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.886.074.140</b>	<b>2.985.824.140</b>	<b>99.750.000</b>	
			<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>2.886.074.140</b>	<b>2.985.824.140</b>	<b>99.750.000</b>	
			<b>Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>3.592.566.740</b>	<b>6.716.720.140</b>	<b>3.124.153.400</b>	
	<b>F SPM Bidang Sosial</b>						
	<b>Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>						
		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75.000.000	75.000.000	0	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.290.400	21.890.400	15.600.000	
			Pemberian Layanan Kedaruratan	5.700.000	15.100.000	9.400.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000	5.700.000	0	
			Pemberian Layanan Rujukan	5.700.000	5.700.000	0	
			<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>98.390.400</b>	<b>123.390.400</b>	<b>25.000.000</b>	
			<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>	<b>98.390.400</b>	<b>123.390.400</b>	<b>25.000.000</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>						
		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>					
			Penyediaan Makanan	218.403.886	924.588.586	706.184.700	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	0	
			<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>218.403.886</b>	<b>924.588.586</b>	<b>706.184.700</b>	
			<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	<b>218.403.886</b>	<b>924.588.586</b>	<b>706.184.700</b>	



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>	<b>316.794.286</b>	<b>1.047.978.986</b>	<b>731.184.700</b>

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	781.661.171.440	794.389.400.238	925.149.744.587	130.760.344.349	16 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	432.117.486.761	431.947.486.761	434.175.034.510	2.227.547.749	1 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	329.755.641.647	329.755.641.647	324.906.162.604	(4.849.479.043)	1 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	102.191.845.114	102.191.845.114	109.268.871.906	7.077.026.792	7 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	282.369.713.315	231.491.478.422	248.819.740.541	17.328.262.119	7 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.595.213.436	92.628.778.543	88.756.445.629	(3.872.332.914)	4 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	135.947.706.379	136.052.293.179	157.310.955.712	21.258.662.533	16 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.600.010.000	1.696.010.000	1.686.010.000	(10.000.000)	1 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	728.336.000	703.336.000	655.268.500	(48.067.500)	7 %
1	02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	498.447.500	411.060.700	411.060.700	0	0 %
1	03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	50.092.790.238	91.026.007.603	192.186.657.892	101.160.650.289	111 %
1	03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	10.785.042.298	11.667.286.088	882.243.790	8 %
1	03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.320.857.420	6.320.857.406	10.894.440.677	4.573.583.271	72 %
1	03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.196.253.934	3.196.253.934	4.846.253.735	1.649.999.801	52 %
1	03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.658.909.800	3.658.909.800	4.349.729.600	690.819.800	19 %
1	03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	149.999.759	149.999.759	2.824.999.759	2.675.000.000	1.783 %
1	03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	949.999.262	949.999.262	4.087.317.532	3.137.318.270	330 %
1	03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	35.216.770.063	65.365.445.444	152.877.140.801	87.511.695.357	134 %
1	03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.000	199.500.000	199.500.000	0	0 %
1	03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	400.000.000	399.999.700	439.989.700	39.990.000	10 %
1	04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.052.831.000	20.464.611.184	26.375.024.585	5.910.413.401	29 %
1	04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	11.411.780.158	10.248.562.997	(1.163.217.161)	10 %
1	04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0 %
1	04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.546.000.000	1.546.000.000	1.626.000.000	80.000.000	5 %
1	04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.468.831.000	7.468.831.026	14.462.461.588	6.993.630.562	94 %
1	05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.802.566.340	15.264.032.482	18.612.663.706	3.348.631.224	22 %
1	05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	11.461.466.142	10.595.944.416	(865.521.726)	8 %
1	05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	577.492.200	577.492.200	2.538.357.350	1.960.865.150	340 %
1	05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	339.000.000	339.000.000	2.492.537.800	2.153.537.800	635 %

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.886.074.140	2.886.074.140	2.985.824.140	99.750.000	3 %
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.225.783.786	4.195.783.786	4.980.623.353	784.839.567	19 %
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.972.550.100	2.972.550.100	2.707.006.667	(265.543.433)	9 %
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	164.000.000	164.000.000	409.000.000	245.000.000	149 %
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	240.390.400	240.390.400	240.390.400	0	0 %
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	595.254.900	565.254.900	655.254.900	90.000.000	16 %
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	232.588.886	232.588.886	938.773.586	706.184.700	304 %
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	20.999.500	20.999.500	30.197.800	9.198.300	44 %
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	44.202.038.193	73.118.883.133	80.037.122.471	6.918.239.338	9 %
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.532.217.505	3.932.217.505	3.702.696.784	(229.520.721)	6 %
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.989.431.605	3.389.431.605	2.609.344.584	(780.087.021)	23 %
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	470.000.000	470.000.000	1.020.566.300	550.566.300	117 %
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0 %
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	52.785.900	52.785.900	52.785.900	0	0 %
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	380.025.500	380.025.500	523.380.200	143.354.700	38 %
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	190.035.100	190.035.100	250.034.900	59.999.800	32 %
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	39.990.400	39.990.400	63.345.500	23.355.100	58 %
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150.000.000	150.000.000	209.999.800	59.999.800	40 %
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	6.304.687.454	6.846.724.836	542.037.382	9 %
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.530.690.354	4.072.727.736	542.037.382	15 %
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	0	2.173.997.100	2.173.997.100	0	0 %
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0	444.993.100	444.993.100	0	0 %
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0	130.006.900	130.006.900	0	0 %
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0	25.000.000	25.000.000	0	0 %
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.388.146.800	2.388.146.800	2.077.613.142	(310.533.658)	13 %
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	74.999.800	74.999.800	24.000.800	(50.999.000)	68 %
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.313.147.000	2.313.147.000	2.053.612.342	(259.534.658)	11 %
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.351.339.700	8.633.029.350	8.753.125.322	120.095.972	1 %

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	7.501.232.650	7.509.891.472	8.658.822	0 %
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	157.429.700	157.429.700	255.784.650	98.354.950	62 %
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	43.601.100	43.601.100	41.761.100	(1.840.000)	4 %
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	60.085.000	60.085.000	73.175.000	13.090.000	22 %
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.601.000	43.601.000	43.238.000	(363.000)	1 %
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.427.900	40.427.900	38.907.900	(1.520.000)	4 %
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	786.652.000	786.652.000	790.367.200	3.715.200	0 %
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.524.671.570	4.524.671.570	4.423.078.945	(101.592.625)	2 %
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.757.851.970	3.757.851.970	3.656.259.345	(101.592.625)	3 %
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	621.303.700	621.303.700	621.303.700	0	0 %
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	42.884.000	42.884.000	42.884.000	0	0 %
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.247.300	31.247.300	31.247.300	0	0 %
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.384.600	71.384.600	71.384.600	0	0 %
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.657.874.230	4.940.004.765	5.300.509.805	360.505.040	7 %
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.702.407.900	3.080.731.172	(621.676.728)	17 %
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	420.277.165	420.277.165	303.573.433	(116.703.732)	28 %
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	367.449.700	367.449.500	544.577.600	177.128.100	48 %
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	449.870.200	449.870.200	1.371.627.600	921.757.400	205 %
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.032.068.935	11.176.085.735	11.316.356.382	140.270.647	1 %
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	5.194.016.800	4.894.133.046	(299.883.754)	6 %
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.975.359.735	4.975.359.735	3.912.719.036	(1.062.640.699)	21 %
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.006.709.200	1.006.709.200	2.509.504.300	1.502.795.100	149 %
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	320.470.700	4.914.272.688	6.005.759.054	1.091.486.366	22 %
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.593.801.988	5.006.244.754	412.442.766	9 %
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	305.840.800	305.840.800	984.884.400	679.043.600	222 %
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	14.629.900	14.629.900	14.629.900	0	0 %
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.175.629.200	8.175.629.200	9.390.865.065	1.215.235.865	15 %
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.217.680.500	7.217.680.500	7.167.035.265	(50.645.235)	1 %

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	670.248.700	670.248.700	1.603.458.700	933.210.000	139 %
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	287.700.000	287.700.000	620.371.100	332.671.100	116 %
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.231.578.600	4.290.092.006	7.555.852.298	3.265.760.292	76 %
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.281.000.000	2.339.512.806	5.394.063.098	3.054.550.292	131 %
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	496.658.000	496.658.000	475.658.000	(21.000.000)	4 %
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	250.608.700	250.608.700	315.563.900	64.955.200	26 %
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0 %
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	235.560.000	235.560.600	235.560.600	0	0 %
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	817.751.900	817.751.900	985.006.700	167.254.800	20 %
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	753.131.453	4.301.167.292	3.931.761.180	(369.406.112)	9 %
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.323.830.492	3.005.311.980	(318.518.512)	10 %
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	314.309.000	314.309.000	282.475.000	(31.834.000)	10 %
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	197.646.570	53.098.500	34.157.500	(18.941.000)	36 %
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	117.595.800	117.595.800	117.483.200	(112.600)	0 %
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0	407.613.000	407.613.000	0	0 %
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	123.580.083	84.720.500	84.720.500	0	0 %
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.764.947.000	4.842.834.418	5.940.346.348	1.097.511.930	23 %
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.077.887.596	3.070.399.726	(7.487.870)	0 %
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	307.750.000	307.750.600	497.750.600	190.000.000	62 %
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	1.457.197.000	1.457.196.222	2.372.196.022	914.999.800	63 %
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	195.976.000	195.976.000	198.473.000	2.497.000	1 %
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	195.976.000	195.976.000	198.473.000	2.497.000	1 %
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	219.999.900	219.999.900	619.999.900	400.000.000	182 %
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	219.999.900	219.999.900	619.999.900	400.000.000	182 %
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	607.245.100	3.813.326.950	3.434.346.610	(378.980.340)	10 %
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.206.081.850	2.787.199.110	(418.882.740)	13 %
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	607.245.100	607.245.100	647.147.500	39.902.400	7 %
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	56.716.000	86.716.000	16.233.600	(70.482.400)	81 %
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	56.716.000	86.716.000	16.233.600	(70.482.400)	81 %
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	33.029.685.710	54.699.551.959	56.484.775.488	1.785.223.529	3 %

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1.407.571.432	1.597.571.432	190.000.000	13 %
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0	1.407.571.432	1.597.571.432	190.000.000	13 %
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.093.917.775	10.159.061.475	8.695.670.824	(1.463.390.651)	14 %
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.165.143.700	4.500.985.543	335.841.843	8 %
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.811.655.100	4.811.655.100	2.616.574.100	(2.195.081.000)	46 %
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	818.912.675	818.912.675	1.268.111.181	449.198.506	55 %
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	363.350.000	363.350.000	310.000.000	(53.350.000)	15 %
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	26.935.767.935	29.275.765.906	37.365.711.144	8.089.945.238	28 %
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.342.217.235	17.342.217.235	15.931.882.356	(1.410.334.879)	8 %
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.489.944.700	6.489.944.650	7.675.131.850	1.185.187.200	18 %
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.205.314.400	3.115.313.141	10.846.972.138	7.731.658.997	248 %
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	449.992.000	449.991.900	679.991.900	230.000.000	51 %
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	180.000.000	180.000.000	254.999.800	74.999.800	42 %
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	50.000.100	279.999.700	170.987.000	(109.012.700)	39 %
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.218.299.500	1.418.299.280	1.805.746.100	387.446.820	27 %
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	8.418.849.746	3.387.518.688	(5.031.331.058)	60 %
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	7.242.018.544	2.391.444.888	(4.850.573.656)	67 %
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	846.746.700	730.989.300	(115.757.400)	14 %
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	90.084.500	90.084.500	0	0 %
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	65.000.002	0	(65.000.002)	100 %
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	175.000.000	175.000.000	0	0 %
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	5.438.303.400	5.438.303.400	0	0 %
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	5.438.303.400	5.438.303.400	0	0 %
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	45.896.136.697	80.527.685.328	82.927.115.777	2.399.430.449	3 %
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	35.328.080.697	42.935.493.991	45.386.348.904	2.450.854.913	6 %
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	35.428.357.191	35.924.382.286	496.025.095	1 %
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.466.567.500	5.755.683.800	7.073.316.700	1.317.632.900	23 %
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.125.453.300	1.751.453.000	2.388.649.918	637.196.918	36 %
4	02		SEKRETARIAT DPRD	10.568.056.000	37.592.191.337	37.540.766.873	(51.424.464)	0 %
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	23.572.263.537	24.569.320.973	997.057.436	4 %

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)		
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%	
4	02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.568.056.000	14.019.927.800	12.971.445.900	(1.048.481.900)	7 %
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	297.593.957.173	300.464.179.304	304.060.169.989	3.595.990.685	1 %
5	01	PERENCANAAN	6.277.336.939	6.677.336.939	6.412.468.991	(264.867.948)	4 %
5	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.708.487.939	4.708.487.939	4.452.667.291	(255.820.648)	5 %
5	01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	733.045.600	733.045.600	910.493.300	177.447.700	24 %
5	01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	835.803.400	1.235.803.400	1.049.308.400	(186.495.000)	15 %
5	02	KEUANGAN	288.169.105.234	287.154.459.240	290.870.174.686	3.715.715.446	1 %
5	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.942.919.634	9.928.277.396	10.360.204.042	431.926.646	4 %
5	02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	274.893.565.000	274.893.561.244	277.951.098.044	3.057.536.800	1 %
5	02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	771.521.900	771.521.900	851.020.800	79.498.900	10 %
5	02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.561.098.700	1.561.098.700	1.707.851.800	146.753.100	9 %
5	03	KEPEGAWAIAN	1.468.833.500	4.953.675.625	5.054.866.012	101.190.387	2 %
5	03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.484.842.125	3.649.986.248	165.144.123	5 %
5	03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.468.833.500	1.468.833.500	1.404.879.764	(63.953.736)	4 %
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.416.330.000	1.416.356.000	1.410.308.800	(6.047.200)	0 %
5	04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.416.330.000	1.416.356.000	1.410.308.800	(6.047.200)	0 %
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	262.351.500	262.351.500	312.351.500	50.000.000	19 %
5	05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	262.351.500	262.351.500	312.351.500	50.000.000	19 %
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.057.000.000	15.664.066.882	10.785.558.007	(4.878.508.875)	31 %
6	01	INSPEKTORAT DAERAH	6.057.000.000	15.664.066.882	10.785.558.007	(4.878.508.875)	31 %
6	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	9.607.066.882	8.673.317.007	(933.749.875)	10 %
6	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	712.000.000	5.345.000.000	1.903.695.000	(3.441.305.000)	64 %
6	01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	5.345.000.000	712.000.000	208.546.000	(503.454.000)	71 %
7		UNSUR KEWILAYAHAN	12.975.685.273	45.807.204.086	40.976.259.602	(4.830.944.484)	11 %
7	01	KECAMATAN	12.975.685.273	45.807.204.086	40.976.259.602	(4.830.944.484)	11 %
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.940.712.940	36.316.000.116	31.177.110.512	(5.138.889.604)	14 %
7	01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	791.744.500	1.116.217.700	1.277.088.400	160.870.700	14 %
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.340.507.833	8.310.707.270	8.391.321.690	80.614.420	1 %
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	0	9.960.000	9.960.000	100 %
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	57.720.000	54.320.000	54.320.000	0	0 %

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	9.959.000	16.459.000	6.500.000	65 %
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.199.128.463	5.199.128.463	5.032.580.326	(166.548.137)	3 %
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.199.128.463	5.199.128.463	5.032.580.326	(166.548.137)	3 %
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.271.491.800	3.271.491.800	2.997.873.663	(273.618.137)	8 %
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	269.631.000	269.631.000	389.081.000	119.450.000	44 %
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	964.255.763	964.255.763	964.255.763	0	0 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.539.200	31.539.200	31.539.200	0	0 %
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	602.210.700	602.210.700	589.830.700	(12.380.000)	2 %

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPД DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPД (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000						DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	432.642.642.396	433.160.645.439	434.795.034.410
1.01.2.22.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	432.422.642.496	432.540.645.539	434.175.034.510
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	432.422.642.496	432.540.645.539	434.175.034.510
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	323.369.629.590	323.271.773.633	324.906.162.604
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.146.898	222.146.898	222.146.898
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	217.035.998	217.035.998	217.035.998
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.110.900	5.110.900	5.110.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	320.131.559.664	319.949.562.707	321.583.951.678
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	319.908.555.864	319.726.558.907	321.360.947.878
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	217.474.800	217.474.800	217.474.800
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.529.000	5.529.000	5.529.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.452.118	124.452.118	124.452.118
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.452.118	124.452.118	124.452.118
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.655.754.506	1.595.483.306	1.595.483.306
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.821.500	34.821.500	34.821.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	798.385.499	798.385.499	798.385.499
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.921.660	26.921.660	26.921.660
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.967.300	52.967.300	52.967.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.957.500	19.957.500	19.957.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	233.904.000	233.904.000	233.904.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488.797.047	428.525.847	428.525.847
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878.518.504	1.022.930.704	1.022.930.704
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.610.300	87.610.300	87.610.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	382.408.204	516.820.404	516.820.404
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	414.000.000	414.000.000	414.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.197.900	357.197.900	357.197.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.197.900	357.197.900	357.197.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	109.053.012.906	109.268.871.906	109.268.871.906
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	67.111.396.767	67.643.170.487	67.643.170.487
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	325.000.000	325.000.000	325.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	587.820.000	587.820.000	587.820.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	458.740.000	458.740.000	458.740.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.674.450.151	1.924.450.171	1.924.450.171
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.333.876.918	10.333.876.918	10.333.876.918
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	148.470.000	148.470.000	148.470.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	31.330.000	31.330.000	31.330.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	4.600.602.000	4.600.602.000	4.600.602.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	173.242.400	173.242.400	173.242.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.682.213.798	6.663.456.998	6.663.456.998
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	324.758.000	625.288.500	625.288.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	41.570.893.500	41.570.893.500	41.570.893.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	35.586.416.139	35.155.501.407	35.155.501.407
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	1.051.549.000	1.051.549.000	1.051.549.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	320.000.000	320.000.000	320.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.969.647.106	3.969.647.106	3.969.647.106
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	584.108.500	584.108.500	584.108.500
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	57.393.000	57.393.000	57.393.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	573.448.300	573.448.300	573.448.300
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	970.664.200	970.664.200	970.664.200
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	293.671.000	293.671.000	293.671.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	158.635.033	158.635.033	158.635.033
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	612.583.300	181.668.568	181.668.568
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	542.581.600	542.581.600	542.581.600
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	26.194.250.000	26.194.250.000	26.194.250.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	257.885.100	257.885.100	257.885.100
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.118.500.000	6.233.500.012	6.233.500.012
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	100.000.012	100.000.012
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	30.390.000	45.390.000	45.390.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.720.800.000	1.720.800.000	1.720.800.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.367.310.000	4.367.310.000	4.367.310.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	236.700.000	236.700.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	236.700.000	236.700.000	236.700.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	219.999.900	619.999.900	619.999.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	219.999.900	619.999.900	619.999.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	219.999.900	619.999.900	619.999.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	119.999.900	119.999.900	119.999.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	119.999.900	119.999.900	119.999.900
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	500.000.000	500.000.000
1.01.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	100.000.000	500.000.000	500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000						DINAS KESEHATAN	135.782.061.016	134.468.634.481	134.468.634.481
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	135.782.061.016	134.468.634.481	134.468.634.481
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	135.782.061.016	134.468.634.481	134.468.634.481
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	67.399.880.008	65.886.000.396	65.886.000.396
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.957.000	66.957.000	66.957.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.950.000	25.950.000	25.950.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.057.000	6.057.000	6.057.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.950.000	34.950.000	34.950.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	57.137.793.251	55.519.853.639	55.519.853.639
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	56.729.552.251	55.189.722.639	55.189.722.639
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	402.241.200	324.131.200	324.131.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.999.800	5.999.800	5.999.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.809.100	365.809.100	365.809.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000	28.000.000	28.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.980.100	75.197.100	75.197.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.993.900	28.993.900	28.993.900
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.394.100	51.177.100	51.177.100
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.990.000	4.990.000	4.990.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	42.476.000	42.476.000	42.476.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.975.000	134.975.000	134.975.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190.877.400	258.677.400	258.677.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.877.400	178.677.400	178.677.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.623.413.657	8.460.383.657	8.460.383.657
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	509.636.798	346.606.798	346.606.798
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.113.776.859	8.113.776.859	8.113.776.859
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.307.000	921.597.000	921.597.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	658.348.400	806.608.400	806.608.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.999.400	41.999.400	41.999.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.959.200	72.989.200	72.989.200
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	189.722.600	167.722.600	167.722.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	189.722.600	167.722.600	167.722.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65.629.841.808	65.830.294.885	65.830.294.885
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.153.473.000	12.127.523.000	12.127.523.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	719.248.000	719.248.000	719.248.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.060.866.000	7.060.866.000	7.060.866.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	118.000.000	92.050.000	92.050.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	1.950.997.000	1.950.997.000	1.950.997.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.152.574.000	2.152.574.000	2.152.574.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	151.788.000	151.788.000	151.788.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.080.728.508	53.307.131.585	53.307.131.585
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	977.763.400	977.763.400	977.763.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.412.664.400	2.155.564.400	2.155.564.400
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	276.022.100	292.272.100	292.272.100

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	503.861.200	503.861.200	503.861.200
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	385.069.600	385.069.600	385.069.600
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	95.000.000	95.000.000	95.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	511.325.800	611.325.800	611.325.800
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	184.367.900	184.367.900	184.367.900
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	163.851.700	163.851.700	163.851.700
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	349.058.700	349.058.700	349.058.700
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	225.759.500	225.759.500	225.759.500
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	157.564.500	157.564.500	157.564.500
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.439.573.650	2.439.573.650	2.439.573.650
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.046.784.400	2.046.784.400	2.046.784.400
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	131.492.200	131.492.200	131.492.200
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.434.286.250	1.434.286.250	1.434.286.250
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.500.166.400	1.500.166.400	1.500.166.400
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.591.292.800	2.591.292.800	2.591.292.800
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	58.064.000	58.064.000	58.064.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	60.000.000	60.000.000	60.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.085.373.700	1.085.373.700	1.085.373.700
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	32.561.270.985	32.561.270.985	32.561.270.985
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0	0	0
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.543.958.900	2.543.958.900	2.543.958.900
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	821.256.423	188.509.500	188.509.500
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	526.900.000	526.900.000	526.900.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.950.000	7.950.000	7.950.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	30.050.000	30.050.000	30.050.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	125.640.300	125.640.300	125.640.300
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	70.536.600	70.536.600	70.536.600
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	55.103.700	55.103.700	55.103.700
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	270.000.000	270.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	190.000.000	190.000.000	190.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.686.010.000	1.686.010.000	1.686.010.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.616.010.000	1.616.010.000	1.616.010.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.576.000.000	1.576.000.000	1.576.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	40.010.000	40.010.000	40.010.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.02.000.000.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	655.268.500	655.268.500	655.268.500
1.02.000.000.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.935.600	63.935.600	63.935.600
1.02.000.000.01.0000	1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.935.600	63.935.600	63.935.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	85.000.000	85.000.000	85.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	45.000.000	45.000.000	45.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	148.849.800	148.849.800	148.849.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	148.849.800	148.849.800	148.849.800
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	71.932.500	71.932.500	71.932.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	71.932.500	71.932.500	71.932.500
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	285.550.600	285.550.600	285.550.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	285.550.600	285.550.600	285.550.600
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	411.060.700	411.060.700	411.060.700

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000	42.000.000	42.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.000.000	42.000.000	42.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	369.060.700	369.060.700	369.060.700
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	369.060.700	369.060.700	369.060.700
1.02.0.00.0.00.02.0000					RSU DAERAH TARUTUNG	117.260.018.095	114.096.390.578	114.351.106.060
1.02.0.00.0.00.02.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	117.260.018.095	114.096.390.578	114.351.106.060
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.260.018.095	114.096.390.578	114.351.106.060
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.779.357.268	22.615.729.751	22.870.445.233
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.779.357.268	22.615.729.751	22.870.445.233
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.779.357.268	22.615.729.751	22.870.445.233
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	94.480.660.827	91.480.660.827	91.480.660.827
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.480.660.827	91.480.660.827	91.480.660.827
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	94.480.660.827	91.480.660.827	91.480.660.827
1.03.0.00.0.00.01.0000					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	177.751.627.255	175.922.325.626	176.078.357.266
1.03.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	177.751.627.255	175.922.325.626	176.078.357.266
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.751.627.255	175.922.325.626	176.078.357.266
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.305.911.683	11.511.254.448	11.667.286.088
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.700.600	158.700.600	158.700.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.046.500	66.046.500	66.046.500
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.755.500	7.755.500	7.755.500
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.898.600	84.898.600	84.898.600
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.250.209.430	7.320.907.801	7.476.939.441
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.148.225.130	7.218.923.501	7.374.955.141
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.773.200	89.773.200	89.773.200
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.111.500	7.111.500	7.111.500
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.099.600	5.099.600	5.099.600
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.999.000	7.999.000	7.999.000
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.999.000	7.999.000	7.999.000
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.959.000	69.959.000	69.959.000
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.959.000	69.959.000	69.959.000
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.331.780	860.877.780	860.877.780
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.241.400	10.241.400	10.241.400
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.998.700	94.998.700	94.998.700
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.176.500	13.176.500	13.176.500
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.249.800	31.249.800	31.249.800
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	34.985.880	34.985.880	34.985.880
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.996.500	19.996.500	19.996.500
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.683.000	656.229.000	656.229.000
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.101.604.300	1.101.604.300	1.101.604.300
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	948.000.000	948.000.000	948.000.000
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.655.800	148.655.800	148.655.800
1.03.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.948.500	4.948.500	4.948.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.386.963	99.386.963	99.386.963
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.240.000	5.240.000	5.240.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.146.963	22.146.963	22.146.963
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000	72.000.000	72.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.913.720.610	1.891.819.004	1.891.819.004
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.803.800	200.902.194	200.902.194
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.568.066.222	1.568.066.222	1.568.066.222
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.789.200	27.789.200	27.789.200
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.070.888	75.070.888	75.070.888
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.990.500	19.990.500	19.990.500
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.844.440.677	10.894.440.677	10.894.440.677
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.769.440.677	10.819.440.677	10.819.440.677
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	421.973.030	421.973.030	421.973.030
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10.095.191.555	10.145.191.555	10.145.191.555
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	252.276.092	252.276.092	252.276.092
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	154.951.775.195	152.877.140.801	152.877.140.801
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	154.951.775.195	152.877.140.801	152.877.140.801

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.459.312.000	1.484.312.000	1.484.312.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	399.999.400	399.999.400	399.999.400
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	17.353.964.645	17.194.668.773	17.194.668.773
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	103.762.055.168	101.775.551.040	101.775.551.040
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	5.991.435.211	6.366.435.211	6.366.435.211
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	17.128.865.288	17.128.865.288	17.128.865.288
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.361.927.802	1.325.593.408	1.325.593.408
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	6.744.395.681	6.451.895.681	6.451.895.681
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	0	0	0
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	199.820.000	199.820.000	199.820.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	550.000.000	550.000.000	550.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	199.500.000	199.500.000	199.500.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	199.500.000	199.500.000	199.500.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	199.500.000	199.500.000	199.500.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	449.999.700	439.989.700	439.989.700
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	149.999.800	149.999.800	149.999.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	99.999.800	99.999.800	99.999.800
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	99.999.900	99.999.900	99.999.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	99.999.900	99.999.900	99.999.900
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	0	0
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	189.990.000	189.990.000
1.03.0.00.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.03.000.00.01.0000	1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000	189.990.000	189.990.000
1.04.2.10.1.03.01.0000						DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.183.367.089	44.339.899.993	44.560.938.353
1.04.2.10.1.03.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	40.105.753.947	42.262.286.851	42.483.325.211
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.579.982.955	16.108.300.626	16.108.300.626
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.996.253.934	4.846.253.735	4.846.253.735
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.996.253.934	4.846.253.735	4.846.253.735
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.008.754.000	3.758.754.000	3.758.754.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	832.499.934	932.499.735	932.499.735
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	03	2.01	12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	155.000.000	155.000.000	155.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.199.729.800	4.349.729.600	4.349.729.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.199.729.800	4.349.729.600	4.349.729.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	148.909.800	198.909.800	198.909.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4.050.820.000	4.150.819.800	4.150.819.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.899.999.759	2.824.999.759	2.824.999.759
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.899.999.759	2.824.999.759	2.824.999.759
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.899.999.759	2.824.999.759	2.824.999.759
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.483.999.462	4.087.317.532	4.087.317.532
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.483.999.462	4.087.317.532	4.087.317.532
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	154.000.000	154.000.000	154.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4.329.999.462	3.933.317.532	3.933.317.532
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	24.525.770.992	26.153.986.225	26.375.024.585
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.376.536.652	10.277.524.492	10.248.562.997
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.337.500	42.337.500	42.337.500
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.418.600	36.418.600	36.418.600
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.918.900	5.918.900	5.918.900
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.310.647.358	3.093.214.898	3.064.253.403
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.224.630.158	3.007.197.698	2.978.236.203
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.517.200	78.517.200	78.517.200
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.218.000	803.943.000	803.943.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.387.100	224.227.100	224.227.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.307.100	11.307.100	11.307.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.636.800	31.636.800	31.636.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.680.000	30.680.000	30.680.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	11.160.000	11.160.000	11.160.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430.047.000	479.932.000	479.932.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.077.445.700	6.077.445.700	6.077.445.700
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.950.000	4.950.000	4.950.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.999.998.900	5.999.998.900	5.999.998.900
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.496.800	72.496.800	72.496.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.888.094	260.583.394	260.583.394
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.178.100	150.873.400	150.873.400
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.999.994	89.999.994	89.999.994
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.710.000	19.710.000	19.710.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	38.000.000	38.000.000	38.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	38.000.000	38.000.000	38.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	38.000.000	38.000.000	38.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.626.000.000	1.626.000.000	1.626.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	908.000.000	908.000.000	908.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	908.000.000	908.000.000	908.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	718.000.000	718.000.000	718.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	530.000.000	530.000.000	530.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	188.000.000	188.000.000	188.000.000
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	12.485.234.340	14.212.461.733	14.462.461.588
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	12.485.234.340	14.212.461.733	14.462.461.588
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.666.746.240	13.393.973.633	13.643.973.488
1.04.2.10.1.03.01.0000	1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	818.488.100	818.488.100	818.488.100
1.04.2.10.1.03.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.077.613.142	2.077.613.142	2.077.613.142
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.077.613.142	2.077.613.142	2.077.613.142



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	24.000.800	24.000.800	24.000.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	06	2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.000.800	24.000.800	24.000.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	06	2.01	03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	24.000.800	24.000.800	24.000.800
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.053.612.342	2.053.612.342	2.053.612.342
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.053.612.342	2.053.612.342	2.053.612.342
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	205.667.700	205.667.700	205.667.700
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01	02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	282.323.700	282.323.700	282.323.700
1.04.2.10.1.03.01.0000	2	10	10	2.01	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.565.620.942	1.565.620.942	1.565.620.942
1.05.0.00.0.00.01.0000					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.623.817.773	13.088.346.612	13.098.489.766
1.05.0.00.0.00.01.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13.623.817.773	13.088.346.612	13.098.489.766
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.623.817.773	13.088.346.612	13.098.489.766
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.099.636.283	7.564.165.122	7.574.308.276
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.749.700	66.749.700	66.749.700
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.750.000	45.750.000	45.750.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.977.693.892	2.442.222.731	2.452.365.885
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.921.454.692	2.385.983.531	2.396.126.685

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.239.200	50.239.200	50.239.200
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.879.200	218.879.200	218.879.200
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.999.600	7.999.600	7.999.600
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.698.200	31.698.200	31.698.200
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.171.700	6.171.700	6.171.700
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.659.700	15.659.700	15.659.700
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.350.000	157.350.000	157.350.000
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.504.409.491	4.504.409.491	4.504.409.491
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.330.000	1.330.000	1.330.000
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.998.900	8.998.900	8.998.900
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.494.080.591	4.494.080.591	4.494.080.591
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.904.000	331.904.000	331.904.000
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.717.700	324.717.700	324.717.700
1.05.000.000.01.0000	1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.186.300	7.186.300	7.186.300
1.05.000.000.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.538.357.350	2.538.357.350	2.538.357.350
1.05.000.000.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.238.358.200	1.238.358.200	1.238.358.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.238.358.200	1.238.358.200	1.238.358.200
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.299.999.150	1.299.999.150	1.299.999.150
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.129.999.350	1.129.999.350	1.129.999.350
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	169.999.800	169.999.800	169.999.800
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.985.824.140	2.985.824.140	2.985.824.140
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.985.824.140	2.985.824.140	2.985.824.140
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	229.650.000	229.650.000	229.650.000
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.756.174.140	2.756.174.140	2.756.174.140
1.05.0.00.0.00.04.0000						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.009.171.516	5.326.477.077	5.514.173.940
1.05.0.00.0.00.04.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.009.171.516	5.326.477.077	5.514.173.940
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.009.171.516	5.326.477.077	5.514.173.940
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.595.171.516	2.833.939.277	3.021.636.140
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.860.300	28.860.300	28.860.300
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.772.200	4.772.200	4.772.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.246.600	4.246.600	4.246.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.841.500	19.841.500	19.841.500
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.979.309.700	2.146.615.461	2.184.312.324
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.930.158.500	2.097.464.261	2.135.161.124

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.151.200	42.151.200	42.151.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.016.700	224.628.700	224.628.700
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.510.800	13.510.800	13.510.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.477.600	20.477.600	20.477.600
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.985.500	5.985.500	5.985.500
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.899.400	20.899.400	20.899.400
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.997.400	19.997.400	19.997.400
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.146.000	143.758.000	143.758.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000	46.850.000	46.850.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	46.850.000	46.850.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.379.891	235.379.891	235.379.891
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.192.691	16.192.691	16.192.691
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.987.200	217.987.200	217.987.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.604.925	151.604.925	301.604.925
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.149.850	101.149.850	101.149.850
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.904.875	25.904.875	25.904.875
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	150.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.550.200	24.550.200	24.550.200
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.414.000.000	2.492.537.800	2.492.537.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.275.000.000	2.353.537.800	2.353.537.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50.000.000	128.537.800	128.537.800
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	175.000.000	175.000.000	175.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	89.000.000	89.000.000	89.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	89.000.000	89.000.000	89.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.0.00.0.00.01.0000						DINAS SOSIAL	4.747.816.148	4.980.921.188	4.980.623.353
1.06.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.747.816.148	4.980.921.188	4.980.623.353
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.747.816.148	4.980.921.188	4.980.623.353
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.919.199.462	2.707.304.502	2.707.006.667
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.362.300	7.362.300	7.362.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.362.300	3.362.300	3.362.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.406.248.163	2.144.355.803	2.144.057.968
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.362.156.563	2.100.264.203	2.099.966.368
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	39.591.600	39.591.600
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.156.999	324.156.999	324.156.999
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.586.000	11.586.000	11.586.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.000.000	45.000.000	45.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.998.700	29.998.700	29.998.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.547.299	40.547.299	40.547.299
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.025.000	197.025.000	197.025.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.712.800	62.710.200	62.710.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.712.800	62.710.200	62.710.200
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.602.700	110.602.700	110.602.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.774.700	16.774.700	16.774.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.828.000	90.828.000	90.828.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.116.500	58.116.500	58.116.500
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.972.900	33.972.900	33.972.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.131.900	7.131.900	7.131.900
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.536.700	8.536.700	8.536.700
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.475.000	8.475.000	8.475.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	164.000.000	409.000.000	409.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	164.000.000	409.000.000	409.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	02	2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	164.000.000	409.000.000	409.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	240.390.400	240.390.400	240.390.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	123.390.400	123.390.400	123.390.400
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	75.000.000	75.000.000	75.000.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	21.890.400	21.890.400	21.890.400
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	15.100.000	15.100.000	15.100.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.700.000	5.700.000	5.700.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	5.700.000	5.700.000	5.700.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	117.000.000	117.000.000	117.000.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	92.000.000	92.000.000	92.000.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	0	0
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	555.254.900	655.254.900	655.254.900
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	555.254.900	655.254.900	655.254.900
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	24.999.800	24.999.800	24.999.800
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	93.126.100	193.126.100	193.126.100
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	437.129.000	437.129.000	437.129.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	838.773.586	938.773.586	938.773.586
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	824.588.586	924.588.586	924.588.586
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	824.588.586	924.588.586	924.588.586
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	0
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	14.185.000	14.185.000	14.185.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	14.185.000	14.185.000	14.185.000
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	30.197.800	30.197.800	30.197.800
1.06.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	30.197.800	30.197.800	30.197.800

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26.198.300	26.198.300	26.198.300
1.06.0.00.0.00.01.0000	1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3.999.500	3.999.500	3.999.500
2.07.3.32.0.00.01.0000						DINAS KETENAGAKERJAAN	3.698.380.844	3.702.696.784	3.702.696.784
2.07.3.32.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.698.380.844	3.702.696.784	3.702.696.784
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.698.380.844	3.702.696.784	3.702.696.784
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.605.028.444	2.609.344.584	2.609.344.584
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.201.740.244	2.206.056.384	2.206.056.384
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.157.589.044	2.161.905.184	2.161.905.184
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.151.200	42.151.200	42.151.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.996.500	173.996.500	173.996.500
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.000	4.999.000	4.999.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.400	19.997.400	19.997.400
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.220.700	6.220.700	6.220.700
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.164.400	8.164.400	8.164.400
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.615.000	134.615.000	134.615.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.081.700	31.081.700	31.081.700
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.948.700	16.948.700	16.948.700
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.133.000	14.133.000	14.133.000



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.684.200	154.684.200	154.684.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.025.000	26.025.000	26.025.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	127.159.200
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.525.800	41.525.800	41.525.800
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.504.800	32.504.800	32.504.800
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	01	2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.021.000	9.021.000	9.021.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.020.566.500	1.020.566.300	1.020.566.300
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.020.566.500	1.020.566.300	1.020.566.300
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.020.566.500	1.020.566.300	1.020.566.300
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	03	2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	2.01 02	Pelayanan antar Kerja	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	04	2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	52.785.900	52.785.900	52.785.900
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.786.100	39.786.100	39.786.100
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.01 01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	39.786.100	39.786.100	39.786.100
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12.999.800	12.999.800	12.999.800

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.07.3.32.0.00.01.0000	2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	12.999.800	12.999.800	12.999.800
2.09.3.25.3.27.01.0000						DINAS KETAHANAN PANGAN	9.527.942.255	9.831.859.368	9.840.359.368
2.09.3.25.3.27.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.030.307.723	6.838.224.836	6.846.724.836
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.030.307.723	6.838.224.836	6.846.724.836
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.256.310.623	4.064.227.736	4.072.727.736
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	45.000.000	45.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000	22.000.000	22.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.373.578.773	3.181.495.886	3.189.995.886
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.320.430.873	3.128.347.986	3.136.847.986
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45.967.200	45.967.200	45.967.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.180.700	7.180.700	7.180.700
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.464.800	249.464.800	249.464.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.900	4.997.900	4.997.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.278.200	31.278.200	31.278.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.995.500	7.995.500	7.995.500
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.418.200	10.418.200	10.418.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.000.000	17.000.000	17.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.775.000	177.775.000	177.775.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.390.800	82.390.800	82.390.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	21.948.800	21.948.800	21.948.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.442.000	60.442.000	60.442.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.990.900	410.990.900	410.990.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.420.000	2.420.000	2.420.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.493.300	23.493.300	23.493.300
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.077.600	385.077.600	385.077.600
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.885.350	94.885.350	94.885.350
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.985.450	70.985.450	70.985.450
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.465.700	3.465.700	3.465.700
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.434.200	20.434.200	20.434.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.173.997.100	2.173.997.100	2.173.997.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.173.997.100	2.173.997.100	2.173.997.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	860.000.000	860.000.000	860.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.213.997.100	1.213.997.100	1.213.997.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	444.993.100	444.993.100	444.993.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	70.000.000	70.000.000	70.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	30.000.000	30.000.000	30.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	69.993.100	69.993.100	69.993.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02	03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39.993.100	39.993.100	39.993.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.02	04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000	30.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	305.000.000	305.000.000	305.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.04	02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	225.000.000	225.000.000	225.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	03	2.04	03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	130.006.900	130.006.900	130.006.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.006.900	130.006.900	130.006.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	04	2.02	02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.006.900	130.006.900	130.006.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	2	09	05	2.01	02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.497.634.532	2.993.634.532	2.993.634.532
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.331.571.432	1.597.571.432	1.597.571.432
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.331.571.432	1.597.571.432	1.597.571.432
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.331.571.432	1.597.571.432	1.597.571.432
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	160.000.000	160.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.999.932	149.999.932	149.999.932
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	594.000.000	760.000.000	760.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	25	04	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	527.571.500	527.571.500	527.571.500
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.166.063.100	1.396.063.100	1.396.063.100
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	566.072.000	566.072.000	566.072.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.082.800	166.082.800	166.082.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	146.082.800	146.082.800	146.082.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	399.989.200	399.989.200	399.989.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	399.989.200	399.989.200	399.989.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	149.999.200	149.999.200	149.999.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	149.999.200	149.999.200	149.999.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	149.999.200	149.999.200	149.999.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	449.991.900	679.991.900	679.991.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	349.999.700	579.999.700	579.999.700
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	149.999.900	149.999.900	149.999.900
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	199.999.800	429.999.800	429.999.800
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.992.200	99.992.200	99.992.200
2.09.3.25.3.27.01.0000	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	99.992.200	99.992.200	99.992.200
2.11.0.00.0.00.01.0000						DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.799.494.845	8.738.315.316	8.753.125.322
2.11.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.799.494.845	8.738.315.316	8.753.125.322

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.799.494.845	8.738.315.316	8.753.125.322
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.556.260.995	7.495.081.466	7.509.891.472
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.728.900	92.728.900	92.728.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.109.000	86.109.000	86.109.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.619.900	6.619.900	6.619.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.764.021.245	2.702.841.716	2.717.651.722
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.691.668.045	2.630.488.516	2.645.298.522
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.353.200	65.353.200	65.353.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.199.200	73.915.200	73.915.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.199.200	73.915.200	73.915.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.903.800	220.903.800	220.903.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.993.800	4.993.800	4.993.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.945.300	57.945.300	57.945.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.794.900	12.794.900	12.794.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800	24.999.800	24.999.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.170.000	120.170.000	120.170.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.946.300	133.230.300	133.230.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	19.373.800	19.373.800	19.373.800
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.484.500	39.768.500	39.768.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	74.088.000	74.088.000	74.088.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.114.042.350	3.114.042.350	3.114.042.350
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.008.600	18.008.600	18.008.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.094.033.750	3.094.033.750	3.094.033.750
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.157.419.200	1.157.419.200	1.157.419.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.707.050	83.707.050	83.707.050
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.033.031.650	1.033.031.650	1.033.031.650
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.491.700	20.491.700	20.491.700
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.987.500	9.987.500	9.987.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.201.300	10.201.300	10.201.300
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	255.784.650	255.784.650	255.784.650
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	151.944.550	151.944.550	151.944.550
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	54.043.500	54.043.500	54.043.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	75.631.600	75.631.600	75.631.600
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	22.269.450	22.269.450	22.269.450
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0	0	0
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0	0	0
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	103.840.100	103.840.100	103.840.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	103.840.100	103.840.100	103.840.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	41.761.100	41.761.100	41.761.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3	41.761.100	41.761.100	41.761.100

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	41.761.100	41.761.100	41.761.100
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	73.175.000	73.175.000	73.175.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	73.175.000	73.175.000	73.175.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29.140.500	29.140.500	29.140.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.034.500	44.034.500	44.034.500
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.238.000	43.238.000	43.238.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.238.000	43.238.000	43.238.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	43.238.000	43.238.000	43.238.000
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	38.907.900	38.907.900	38.907.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	38.907.900	38.907.900	38.907.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	38.907.900	38.907.900	38.907.900
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	790.367.200	790.367.200	790.367.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	790.367.200	790.367.200	790.367.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	48.367.200	48.367.200	48.367.200
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	742.000.000	742.000.000	742.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.201.458.203	4.454.449.553	4.423.078.945



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.201.458.203	4.454.449.553	4.423.078.945
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.201.458.203	4.454.449.553	4.423.078.945
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.434.638.603	3.687.629.953	3.656.259.345
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.921.600	2.921.600	2.921.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.921.600	2.921.600	2.921.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.239.564.253	2.342.150.603	2.310.779.995
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.194.355.753	2.296.942.103	2.265.571.495
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.191.600	40.191.600	40.191.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.016.900	5.016.900	5.016.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	348.011.600	348.011.600	348.011.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.000	4.972.000	4.972.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.021.100	73.021.100	73.021.100
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.116.800	6.116.800	6.116.800
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.654.200	23.654.200	23.654.200
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.697.500	11.697.500	11.697.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.960.000	6.960.000	6.960.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.590.000	221.590.000	221.590.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.429.000	608.834.000	608.834.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	458.429.000	608.834.000	608.834.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.033.600	217.033.600	217.033.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.033.600	36.033.600	36.033.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	180.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.650.950	163.650.950	163.650.950
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.928.750	84.928.750	84.928.750
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.582.000	15.582.000	15.582.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.998.900	49.998.900	49.998.900
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.141.300	13.141.300	13.141.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.13		Penataan Organisasi	5.027.600	5.027.600	5.027.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.027.600	5.027.600	5.027.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	621.303.700	621.303.700	621.303.700
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	621.303.700	621.303.700	621.303.700
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	110.889.200	110.889.200	110.889.200
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	510.414.500	510.414.500	510.414.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	42.884.000	42.884.000	42.884.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	42.884.000	42.884.000	42.884.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	42.884.000	42.884.000	42.884.000
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	31.247.300	31.247.300	31.247.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	31.247.300	31.247.300	31.247.300
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	6.247.500	6.247.500	6.247.500
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	24.999.800	24.999.800	24.999.800
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	71.384.600	71.384.600	71.384.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	71.384.600	71.384.600	71.384.600
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	71.384.600	71.384.600	71.384.600
2.13.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	5.345.171.107	5.288.569.608	5.300.509.805
2.13.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.345.171.107	5.288.569.608	5.300.509.805

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.345.171.107	5.288.569.608	5.300.509.805
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.115.150.114	3.068.790.975	3.080.731.172
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.991.000	3.991.000	3.991.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.991.000	3.991.000	3.991.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.231.943	2.744.630.504	2.756.570.701
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.745.418.743	2.688.817.304	2.700.757.501
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.313.200	51.313.200	51.313.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.229.100	137.229.100	137.229.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.998.600	4.998.600	4.998.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.825.000	13.825.000	13.825.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.996.300	6.996.300	6.996.300
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.999.200	4.999.200	4.999.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.410.000	91.410.000	91.410.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.371.400	32.371.400	32.371.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.371.400	32.371.400	32.371.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.07	07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.466.571	84.466.571	84.466.571
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.304.171	10.304.171	10.304.171
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	72.662.400	72.662.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.860.100	66.102.400	66.102.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.003.800	50.246.100	50.246.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.873.000	5.873.000	5.873.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.983.300	9.983.300	9.983.300
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	358.943.893	303.573.433	303.573.433
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	358.943.893	303.573.433	303.573.433
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	358.943.893	303.573.433	303.573.433
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	499.449.500	544.577.600	544.577.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	499.449.500	544.577.600	544.577.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	90.000.000	135.128.100	135.128.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	122.771.300	122.771.300	122.771.300
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	74.778.100	74.778.100	74.778.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	79.900.100	79.900.100	79.900.100
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	132.000.000	132.000.000	132.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.371.627.600	1.371.627.600	1.371.627.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.371.627.600	1.371.627.600	1.371.627.600
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	93.750.000	93.750.000	93.750.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	437.126.000	437.126.000	437.126.000
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01 04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	728.860.400	728.860.400	728.860.400
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	111.891.200	111.891.200	111.891.200
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0	0	0
2.13.0.00.0.00.01.0000	2	13	05	2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.889.857.488	11.825.333.245	11.839.736.582
2.14.2.08.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11.889.857.488	11.825.333.245	11.839.736.582
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	523.380.200	523.380.200	523.380.200
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	250.034.900	250.034.900	250.034.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100.034.900	100.034.900	100.034.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	19.989.900	19.989.900	19.989.900

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	80.045.000	80.045.000	80.045.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	63.345.500	63.345.500	63.345.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	63.345.500	63.345.500	63.345.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	35.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	28.345.500	28.345.500	28.345.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	209.999.800	209.999.800	209.999.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	209.999.800	209.999.800	209.999.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	59.999.800	59.999.800	59.999.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	08	07	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.366.477.288	11.301.953.045	11.316.356.382
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.944.253.953	4.879.729.709	4.894.133.046



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.190.000	6.190.000	6.190.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.190.000	6.190.000	6.190.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.245.214.253	4.180.690.009	4.195.093.346
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.177.501.453	4.112.977.209	4.127.380.546
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.395.600	61.395.600	61.395.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.317.200	6.317.200	6.317.200
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	109.775.000	109.775.000	109.775.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.05	05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	109.775.000	109.775.000	109.775.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	223.333.900	223.333.900	223.333.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.749.600	5.749.600	5.749.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.305.400	23.305.400	23.305.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.766.000	11.766.000	11.766.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.799.900	11.799.900	11.799.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.999.000	5.999.000	5.999.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.714.000	164.714.000	164.714.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.497.400	194.497.400	194.497.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.397.400	8.397.400	8.397.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	180.000.000	180.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.243.400	165.243.400	165.243.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.545.600	147.545.600	147.545.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.699.400	7.699.400	7.699.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.998.400	9.998.400	9.998.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.912.719.035	3.912.719.036	3.912.719.036
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	896.551.700	896.551.700	896.551.700
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	147.999.900	147.999.900	147.999.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	69.504.800	69.504.800	69.504.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	118.047.600	118.047.600	118.047.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	485.999.400	485.999.400	485.999.400
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	0	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.569.604.835	1.569.604.836	1.569.604.836
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	200.000.035	200.000.036	200.000.036
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	59.999.800	59.999.800	59.999.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.309.605.000	1.309.605.000	1.309.605.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.009.312.500	1.009.312.500	1.009.312.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	40.240.000	40.240.000	40.240.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	327.371.500	327.371.500	327.371.500
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	26.828.000	26.828.000	26.828.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	80.000.000	80.000.000	80.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	502.030.000	502.030.000	502.030.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	32.843.000	32.843.000	32.843.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	437.250.000	437.250.000	437.250.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75.000.000	75.000.000	75.000.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	362.250.000	362.250.000	362.250.000
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.509.504.300	2.509.504.300	2.509.504.300

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.509.504.300	2.509.504.300	2.509.504.300
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	82.649.900	82.649.900
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	374.996.800	374.996.800
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	2.051.857.600	2.051.857.600
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0	0
2.14.2.08.0.00.01.0000	2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000					DINAS PERHUBUNGAN	5.425.475.374	6.054.555.563	6.005.759.054
2.15.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.425.475.374	6.054.555.563	6.005.759.054
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	5.425.475.374	6.054.555.563	6.005.759.054

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.778.737.874	5.055.041.263	5.006.244.754
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.497.300	27.497.300	27.497.300
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.400	14.999.400	14.999.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.998.100	4.998.100	4.998.100
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.800	7.499.800	7.499.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.162.125.374	3.382.438.763	3.333.642.254
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.115.025.874	3.335.339.263	3.286.542.754
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	42.099.600	42.099.600	42.099.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.900	4.999.900	4.999.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.913.000	114.913.000	114.913.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.913.000	64.913.000	64.913.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.429.200	375.419.200	375.419.200
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.293.000	6.293.000	6.293.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.756.400	18.756.400	18.756.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.997.500	4.997.500	4.997.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.459.500	14.459.500	14.459.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.005.800	12.005.800	12.005.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.917.000	318.907.000	318.907.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	491.000.000	491.000.000	491.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	475.000.000	475.000.000	475.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	16.000.000	16.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.599.500	384.599.500	384.599.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.293.900	43.293.900	43.293.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.305.600	340.305.600	340.305.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.173.500	279.173.500	279.173.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274.503.500	274.503.500	274.503.500
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.670.000	4.670.000	4.670.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	632.107.600	984.884.400	984.884.400
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	124.999.800	124.999.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0	124.999.800	124.999.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	16.049.600	16.049.600	16.049.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	16.049.600	16.049.600	16.049.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	311.198.600	311.198.600	311.198.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	251.280.000	251.280.000	251.280.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	18.418.600	18.418.600	18.418.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	37.500.000	37.500.000	37.500.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	272.631.600	457.151.800	457.151.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	272.631.600	337.062.800	337.062.800
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	0	120.089.000	120.089.000
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.227.800	75.484.600	75.484.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	32.227.800	75.484.600	75.484.600
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	14.629.900	14.629.900	14.629.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900	14.629.900	14.629.900
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	14.629.900	14.629.900	14.629.900
2.16.2.20.2.21.01.0000						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.189.291.833	9.612.099.289	9.589.338.065
2.16.2.20.2.21.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.189.291.833	9.612.099.289	9.589.338.065
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.990.818.833	9.413.626.289	9.390.865.065
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.786.021.433	7.189.796.489	7.167.035.265
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.476.109.033	2.488.916.489	2.466.155.265
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.430.712.733	2.443.520.189	2.420.758.965
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.396.400	41.396.400	41.396.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.900	3.999.900	3.999.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	80.117.400	80.117.400	80.117.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	80.117.400	80.117.400	80.117.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	52.130.000	52.130.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	27.000.000	52.130.000	52.130.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.578.200	263.578.200	263.578.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.974.200	9.974.200	9.974.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.310.500	24.310.500	24.310.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.999.700	6.999.700	6.999.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.986.600	34.986.600	34.986.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.270.200	11.270.200	11.270.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.040.000	26.040.000	26.040.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.997.000	149.997.000	149.997.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.782.000	463.619.600	463.619.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.682.000	460.519.600	460.519.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.100.000	3.100.000	3.100.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.756.034.600	3.756.034.600	3.756.034.600
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.012.000	8.012.000	8.012.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.570.993.500	3.570.993.500	3.570.993.500
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.007.900	9.007.900	9.007.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.021.200	168.021.200	168.021.200



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.400.200	81.400.200	81.400.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.506.200	73.506.200	73.506.200
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.894.000	7.894.000	7.894.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.353.458.700	1.603.458.700	1.603.458.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.353.458.700	1.603.458.700	1.603.458.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	282.269.800	282.269.800	282.269.800
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	724.000.000	974.000.000	974.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	06 Pelayanan Informasi Publik	99.999.900	99.999.900	99.999.900
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	97.189.000	97.189.000	97.189.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	02	2.01	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	851.338.700	620.371.100	620.371.100
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	851.338.700	620.371.100	620.371.100
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	833.339.300	602.371.700	602.371.700
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	17.999.400	17.999.400	17.999.400
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	16	03	2.02	12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	198.473.000	198.473.000	198.473.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	198.473.000	198.473.000	198.473.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	198.473.000	198.473.000	198.473.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	198.473.000	198.473.000	198.473.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.16.2.20.2.21.01.0000	2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000						DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.117.277.195	1.117.277.195	1.117.277.195
2.17.3.30.3.31.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.117.277.195	1.117.277.195	1.117.277.195
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.117.277.195	1.117.277.195	1.117.277.195
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	789.743.745	789.743.745	789.743.745
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.334.900	12.334.900	12.334.900
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.764.900	5.764.900	5.764.900
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.570.000	6.570.000	6.570.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	654.728.845	654.728.845	654.728.845
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	633.009.945	633.009.945	633.009.945
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.363.600	15.363.600	15.363.600
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.355.300	6.355.300	6.355.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.510.200	67.510.200	67.510.200
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.529.300	1.529.300	1.529.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.177.600	13.177.600	13.177.600
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.104.000	2.104.000	2.104.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.119.300	7.119.300	7.119.300
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.580.000	43.580.000	43.580.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.517.000	29.517.000	29.517.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	600.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.917.000	10.917.000	10.917.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000	18.000.000	18.000.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.652.800	25.652.800	25.652.800
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.282.800	16.282.800	16.282.800
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.370.000	9.370.000	9.370.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	114.948.450	114.948.450	114.948.450
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	114.948.450	114.948.450	114.948.450
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	114.948.450	114.948.450	114.948.450
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	202.585.000	202.585.000	202.585.000	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	202.585.000	202.585.000	202.585.000	
2.17.3.30.3.31.01.0000	2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	202.585.000	202.585.000	202.585.000
2.17.3.30.3.31.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	0	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	06	2.01	02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	30	07	2.01	01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0	0
2.17.3.30.3.31.01.0000	3	31	02	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.619.049.634	12.974.642.486	13.042.000.986
2.17.3.30.3.31.03.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.015.623.751	6.371.216.603	6.438.575.103
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.015.623.751	6.371.216.603	6.438.575.103
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.185.536.001	4.536.960.853	4.604.319.353
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.123.586	40.123.586	40.123.586
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.123.586	40.123.586	40.123.586
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.189.880.909	3.491.305.761	3.558.664.261
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.155.835.309	3.457.260.161	3.524.618.661
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.045.600	34.045.600	34.045.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.440.037	292.440.037	292.440.037
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.504.996	7.504.996	7.504.996
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.290.695	37.290.695	37.290.695
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.394.400	6.394.400	6.394.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.351.326	50.351.326	50.351.326
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.898.620	190.898.620	190.898.620
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.456.300	659.456.300	659.456.300
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.607.500	6.607.500	6.607.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.448.800	651.448.800	651.448.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.635.169	53.635.169	53.635.169
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.635.169	16.635.169	16.635.169
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	12.000.000	12.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	360.709.550	360.709.550	360.709.550
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	360.709.550	360.709.550	360.709.550
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	360.709.550	360.709.550	360.709.550
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	315.563.900	315.563.900	315.563.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	315.563.900	315.563.900	315.563.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	315.563.900	315.563.900	315.563.900
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	150.000.000	150.000.000	150.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	06	2.01	01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	225.560.600	225.560.600	225.560.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	225.560.600	225.560.600	225.560.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	44.153.000	44.153.000	44.153.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	169.997.600	169.997.600	169.997.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	07	2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	11.410.000	11.410.000	11.410.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	778.253.700	782.421.700	782.421.700
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	778.253.700	782.421.700	782.421.700
2.17.3.30.3.31.03.0000	2	17	08	2.01	01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	778.253.700	782.421.700	782.421.700
2.17.3.30.3.31.03.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.603.425.883	6.603.425.883	6.603.425.883
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.165.122.483	1.165.122.483	1.165.122.483
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.048.683	169.048.683	169.048.683
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.999.600	7.999.600	7.999.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.01	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.999.600	7.999.600	7.999.600
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.923.983	47.923.983	47.923.983
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.216.000	8.216.000	8.216.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.707.983	39.707.983	39.707.983
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.125.100	113.125.100	113.125.100
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.125.100	113.125.100	113.125.100



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	730.989.300	730.989.300	730.989.300
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	700.051.500	700.051.500	700.051.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.01	01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	600.051.500	600.051.500	600.051.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.01	02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	30.937.800	30.937.800	30.937.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	03	2.02	01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30.937.800	30.937.800	30.937.800
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	90.084.500	90.084.500	90.084.500
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	80.801.400	80.801.400	80.801.400
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.02	01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	80.801.400	80.801.400	80.801.400
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.283.100	9.283.100	9.283.100
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	04	2.03	03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	9.283.100	9.283.100	9.283.100
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	06	2.01	01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	06	2.01	02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	0	0
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	175.000.000	175.000.000	175.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	175.000.000	175.000.000	175.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	30	07	2.01	01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	175.000.000	175.000.000	175.000.000
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.438.303.400	5.438.303.400	5.438.303.400
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5.438.303.400	5.438.303.400	5.438.303.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5.438.303.400	5.438.303.400	5.438.303.400
2.17.3.30.3.31.03.0000	3	31	02	2.01	05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5.438.303.400	5.438.303.400	5.438.303.400
2.18.0.00.0.00.01.0000					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.923.173.399	3.872.910.155	3.931.761.180
2.18.0.00.0.00.01.0000	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.923.173.399	3.872.910.155	3.931.761.180
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.923.173.399	3.872.910.155	3.931.761.180
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.011.724.199	2.946.460.955	3.005.311.980
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.200	3.000.200	3.000.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.200	3.000.200	3.000.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.166.008.999	2.065.745.755	2.124.596.780
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.119.278.299	2.019.015.055	2.077.866.080
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.730.600	43.730.600	43.730.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.100	3.000.100	3.000.100
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	261.231.100	296.231.100	296.231.100
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.442.000	5.442.000	5.442.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.260.200	57.260.200	57.260.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.400	15.000.400	15.000.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.168.500	20.168.500	20.168.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.360.000	198.360.000	198.360.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.575.900	333.575.900	333.575.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	51.082.200	51.082.200	51.082.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.648.700	167.648.700	167.648.700
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	114.845.000	114.845.000	114.845.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.214.300	156.214.300	156.214.300
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.055.100	45.055.100	45.055.100
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.159.200	109.159.200	109.159.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.693.700	91.693.700	91.693.700
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.825.700	59.825.700	59.825.700
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.557.600	7.557.600	7.557.600
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.910.400	22.910.400	22.910.400
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	282.475.000	282.475.000	282.475.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.599.000	14.599.000	14.599.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	14.599.000	14.599.000	14.599.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	267.876.000	267.876.000	267.876.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	248.826.000	248.826.000	248.826.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	19.050.000	19.050.000	19.050.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	34.157.500	34.157.500	34.157.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	34.157.500	34.157.500	34.157.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	23.065.500	23.065.500	23.065.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	11.092.000	11.092.000	11.092.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	102.483.200	117.483.200	117.483.200
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	102.483.200	117.483.200	117.483.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	93.635.900	108.635.900	108.635.900
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	8.847.300	8.847.300	8.847.300
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	407.613.000	407.613.000	407.613.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	407.613.000	407.613.000	407.613.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	0
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	366.461.000	366.461.000	366.461.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	41.152.000	41.152.000	41.152.000
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	84.720.500	84.720.500	84.720.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.720.500	84.720.500	84.720.500
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	84.720.500	84.720.500	84.720.500
2.19.0.00.0.00.01.0000						DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	5.358.773.690	5.951.399.532	5.940.346.348
2.19.0.00.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.358.773.690	5.951.399.532	5.940.346.348
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.358.773.690	5.951.399.532	5.940.346.348
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.928.827.068	3.081.452.910	3.070.399.726
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.754.800	39.754.800	39.754.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.755.000	33.755.000	33.755.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.999.800	5.999.800	5.999.800
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.255.800.568	2.378.435.410	2.367.382.226

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.199.213.568	2.321.848.410	2.310.795.226
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50.587.200	50.587.200	50.587.200
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.999.800	5.999.800	5.999.800
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.225.800	313.216.800	313.216.800
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.982.100	19.982.100	19.982.100
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.989.000	27.989.000	27.989.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.371.600	18.371.600	18.371.600
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.313.100	19.313.100	19.313.100
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.996.000	19.996.000	19.996.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.574.000	207.565.000	207.565.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.159.200	169.159.200	169.159.200
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	40.000.000	40.000.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.159.200	127.159.200	127.159.200
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.886.700	155.886.700	155.886.700
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.235.600	40.235.600	40.235.600
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.680.000	11.680.000	11.680.000
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	103.971.100	103.971.100	103.971.100
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	497.750.600	497.750.600	497.750.600
2.19.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	447.750.600	447.750.600	447.750.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	90.000.000	90.000.000	90.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	357.750.600	357.750.600	357.750.600
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.932.196.022	2.372.196.022	2.372.196.022
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	717.196.022	717.196.022	717.196.022
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	717.196.022	717.196.022	717.196.022
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.215.000.000	1.655.000.000	1.655.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.215.000.000	1.655.000.000	1.655.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	04	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	0	0	0
2.19.0.00.0.00.01.0000	2	19	04	2.01	08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	0	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000						DINAS PERPUSTAKAAN	3.438.687.972	3.437.257.750	3.450.580.210

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.438.687.972	3.437.257.750	3.450.580.210
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.422.454.372	3.421.024.150	3.434.346.610
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.825.306.872	2.773.876.650	2.787.199.110
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.450.800	15.450.800	15.450.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.950.000	4.950.000	4.950.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.900.800	6.900.800	6.900.800
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.426.097.822	2.374.667.600	2.387.990.060
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.387.085.322	2.335.655.100	2.348.977.560
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.859.600	32.859.600	32.859.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.152.900	6.152.900	6.152.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.484.700	132.484.700	132.484.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.548.200	2.548.200	2.548.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.904.200	28.904.200	28.904.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.960.700	10.085.200	10.085.200
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.396.900	14.396.900	14.396.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.575.000	3.450.500	3.450.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.099.700	73.099.700	73.099.700
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.852.500	219.852.500	219.852.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.496.500	10.496.500	10.496.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	206.856.000	206.856.000	206.856.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.421.050	31.421.050	31.421.050
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.288.150	28.288.150	28.288.150
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	751.900	751.900	751.900
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.381.000	2.381.000	2.381.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	597.147.500	647.147.500	647.147.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	597.147.500	647.147.500	647.147.500
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	11.492.400	61.492.400	61.492.400
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	514.449.100	514.449.100	514.449.100
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	71.206.000	71.206.000	71.206.000
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	0	0	0
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	16.233.600	16.233.600	16.233.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	16.233.600	16.233.600	16.233.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	16.233.600	16.233.600	16.233.600
2.23.2.24.0.00.01.0000	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	16.233.600	16.233.600	16.233.600
3.26.0.00.0.00.01.0000						DINAS PARIWISATA	8.304.509.942	8.660.778.187	8.695.670.824
3.26.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	8.304.509.942	8.660.778.187	8.695.670.824
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.304.509.942	8.660.778.187	8.695.670.824
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.409.823.262	4.466.092.906	4.500.985.543
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.278.600	24.278.600	24.278.600



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.113.500	10.113.500	10.113.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.194.200	7.194.200	7.194.200
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.970.900	6.970.900	6.970.900
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.466.005.362	3.433.610.006	3.468.502.643
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.394.692.862	3.362.297.506	3.397.190.143
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.114.100	64.114.100	64.114.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.198.400	7.198.400	7.198.400
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.398.300	474.063.300	474.063.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.992.300	34.992.300	34.992.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.598.500	39.598.500	39.598.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.887.300	8.887.300	8.887.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.183.700	21.183.700	21.183.700
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.161.500	20.161.500	20.161.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.575.000	349.240.000	349.240.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.301.400	36.301.400	36.301.400
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.301.400	36.301.400	36.301.400
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.104.300	439.104.300	439.104.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.990.000	3.990.000	3.990.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.799.100	49.799.100	49.799.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	385.315.200	385.315.200	385.315.200
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.735.300	58.735.300	58.735.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.544.800	41.544.800	41.544.800

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.191.500	10.191.500	10.191.500
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.999.000	6.999.000	6.999.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.316.574.100	2.616.574.100	2.616.574.100
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.147.387.300	1.147.387.300	1.147.387.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.147.387.300	1.147.387.300	1.147.387.300
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.169.186.800	1.469.186.800	1.469.186.800
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	269.409.800	569.409.800	569.409.800
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	899.777.000	899.777.000	899.777.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.268.112.580	1.268.111.181	1.268.111.181
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.268.112.580	1.268.111.181	1.268.111.181
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	783.112.900	783.111.501	783.111.501
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	419.999.805	419.999.805	419.999.805
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	64.999.875	64.999.875	64.999.875
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	0	0
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	310.000.000	310.000.000	310.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	310.000.000	310.000.000	310.000.000
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	07 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	310.000.000	310.000.000	310.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000					DINAS PERTANIAN	35.383.650.894	35.380.439.181	35.969.648.044
3.27.0.00.0.00.01.0000	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	35.383.650.894	35.380.439.181	35.969.648.044
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	35.383.650.894	35.380.439.181	35.969.648.044
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.730.505.204	15.741.763.393	15.931.882.356
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.499.900	7.499.900	7.499.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.499.900	7.499.900	7.499.900
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.983.626.454	12.941.266.643	13.131.386.006
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.901.586.654	12.859.226.843	13.049.346.206
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.247.200	75.247.200	75.247.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.792.600	6.792.600	6.792.600
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	594.494.100	648.112.100	648.112.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.497.500	9.497.500	9.497.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.428.500	85.428.500	85.428.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.996.700	27.996.700	27.996.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.398.200	34.398.200	34.398.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.996.500	59.996.500	59.996.500
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	78.806.700	78.806.700	78.806.700
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.370.000	351.988.000	351.988.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.994.949.400	1.994.949.400	1.994.949.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	7.000.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.200.200	35.200.200	35.199.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.952.749.200	1.952.749.200	1.952.749.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.935.350	139.935.350	139.935.350
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.997.550	129.997.550	129.997.550
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.937.800	9.937.800	9.937.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.503.547.750	7.109.059.850	7.109.059.850
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.077.223.850	5.601.213.850	5.601.213.850
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.825.698.550	5.361.228.550	5.361.228.550
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	251.525.300	239.985.300	239.985.300
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.426.323.900	1.507.846.000	1.507.846.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	203.534.200	283.534.200	283.534.200
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.222.789.700	1.224.311.800	1.224.311.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.967.882.840	10.297.883.038	10.696.972.938
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	555.314.600	555.314.600	555.314.600
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	205.314.800	205.314.800	205.314.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	349.999.800	349.999.800	349.999.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	8.412.568.240	9.742.568.438	10.141.658.338
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	840.000.600	1.520.000.600	1.719.090.600
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.572.567.640	8.222.567.838	8.422.567.738
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0	0	0
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	254.999.800	254.999.800	254.999.800

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	254.999.800	254.999.800	254.999.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	254.999.800	254.999.800	254.999.800
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	170.987.000	170.987.000	170.987.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	170.987.000	170.987.000	170.987.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	170.987.000	170.987.000	170.987.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.755.728.300	1.805.746.100	1.805.746.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.755.728.300	1.805.746.100	1.805.746.100
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.096.793.300	1.096.793.300	1.096.793.300
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	629.182.200	679.200.000	679.200.000
3.27.0.00.0.00.01.0000	3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	29.752.800	29.752.800	29.752.800
3.31.3.30.0.00.01.0000						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.222.396.205	2.222.396.205	2.222.396.205
3.31.3.30.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.222.396.205	2.222.396.205	2.222.396.205
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.222.396.205	2.222.396.205	2.222.396.205
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.222.396.205	2.222.396.205	2.222.396.205
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.446.065	25.446.065	25.446.065
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.900	7.999.900	7.999.900
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.999.725	7.999.725	7.999.725
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.446.440	9.446.440	9.446.440
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.923.901.251	1.923.901.251	1.923.901.251
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.900.629.051	1.900.629.051	1.900.629.051
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.272.800	15.272.800	15.272.800
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.999.400	7.999.400	7.999.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.03	05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.04	07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.203.858	51.203.858	51.203.858
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.819.504	2.819.504	2.819.504
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.133.400	7.133.400	7.133.400
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.250.954	41.250.954	41.250.954
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.500.000	202.500.000	202.500.000
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.500.000	202.500.000	202.500.000
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.345.031	6.345.031	6.345.031
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.345.031	6.345.031	6.345.031
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0
3.31.3.30.0.00.01.0000	3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0	0	0
4.01.0.00.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DAERAH	46.560.022.791	44.956.972.366	45.386.348.904
4.01.0.00.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	46.560.022.791	44.956.972.366	45.386.348.904
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	46.560.022.791	44.956.972.366	45.386.348.904
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.991.130.991	35.511.805.748	35.924.382.286
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.467.600	141.467.600	141.467.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.999.900	14.999.900	14.999.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.934.000	15.934.000	15.934.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.697.900	12.697.900	12.697.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.927.900	10.927.900	10.927.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.425.700	19.425.700	19.425.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.482.200	67.482.200	67.482.200
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.239.446.090	10.796.663.068	11.209.239.606
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.044.502.190	10.601.744.168	11.014.320.706
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170.944.000	170.919.000	170.919.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.999.900	11.999.900	11.999.900
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.000.000	12.000.000	12.000.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	62.684.500	62.684.500	62.684.500
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	62.684.500	62.684.500	62.684.500
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.691.611.700	5.714.177.700	5.714.177.700
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103.814.800	103.814.800	103.814.800
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	546.623.500	546.623.500	546.623.500
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149.284.400	179.184.400	179.184.400
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.702.400.000	2.722.200.000	2.722.200.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.189.489.000	2.162.355.000	2.162.355.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.253.268.800	4.261.068.800	4.261.068.800
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	149.100.000	149.100.000	149.100.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.504.168.800	1.511.968.800	1.511.968.800
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.126.498.889	3.959.930.689	3.959.930.689
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	152.500.000	152.500.000	152.500.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.877.189	596.108.989	596.108.989
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	856.789.700	877.344.700	877.344.700
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.374.332.000	2.333.977.000	2.333.977.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.457.369.300	2.416.833.300	2.416.833.300
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.261.640.100	1.261.640.100	1.261.640.100
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000	32.500.000	32.500.000
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.729.200	330.729.200	330.729.200
4.01.000.000.01.0000	4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	365.000.000	341.964.000	341.964.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	658.441.812	772.168.391	772.168.391
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	658.441.812	772.168.391	772.168.391
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	6.177.742.400	6.186.942.400	6.186.942.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.620.490.600	3.629.690.600	3.629.690.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.557.251.800	2.557.251.800	2.557.251.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	765.000.400	782.425.400	782.425.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	267.063.800	267.063.800	267.063.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	197.926.600	215.351.600	215.351.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	300.010.000	300.010.000	300.010.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0	0	0
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	0	0	0
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	417.599.500	417.443.900	417.443.900
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	01	Fasilitas Keprotokolan	213.514.800	243.175.800	243.175.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	104.265.900	74.449.300	74.449.300
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	99.818.800	99.818.800	99.818.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.587.173.300	7.056.516.700	7.073.316.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	593.016.700	593.016.700	593.016.700
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	154.660.400	154.660.400	154.660.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	149.502.800	149.502.800	149.502.800
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.01	03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	288.853.500	288.853.500	288.853.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.466.840.100	4.954.520.100	4.954.520.100
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	849.736.500	870.536.500	870.536.500
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.522.000.000	3.989.000.000	3.989.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	95.103.600	94.983.600	94.983.600
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03		Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1.450.499.000	1.432.162.400	1.448.962.400
4.01.0.00.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	661.007.700	699.605.700	699.605.700

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	600.673.900	593.235.300	610.035.300
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	188.817.400	139.321.400	139.321.400
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	76.817.500	76.817.500	76.817.500
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	54.376.500	54.376.500	54.376.500
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	22.441.000	22.441.000	22.441.000
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.981.718.500	2.388.649.918	2.388.649.918
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	398.886.000	398.886.000	398.886.000
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	101.325.800	101.325.800	101.325.800
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	251.465.200	281.465.200	281.465.200
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	46.095.000	16.095.000	16.095.000
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	635.995.000	635.995.000	635.995.000
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	233.999.100	233.999.100	227.999.100
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	223.587.300	223.587.300	223.587.300
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	178.408.600	178.408.600	184.408.600
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	946.837.500	1.353.768.918	1.353.768.918
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	530.839.100	779.289.100	779.289.100
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	193.471.600	362.338.018	362.338.018
4.01.000.0.00.01.0000	4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	222.526.800	212.141.800	212.141.800
4.02.000.0.00.01.0000						SEKRETARIAT DPRD	37.561.270.884	37.534.536.902	37.540.766.873
4.02.000.0.00.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	37.561.270.884	37.534.536.902	37.540.766.873
4.02.000.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	37.561.270.884	37.534.536.902	37.540.766.873
4.02.000.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.536.489.984	24.563.091.002	24.569.320.973
4.02.000.0.00.01.0000	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.660.300	12.660.300	12.660.300
4.02.000.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.932.000	5.932.000	5.932.000
4.02.000.0.00.01.0000	4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.728.300	6.728.300	6.728.300
4.02.000.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.703.280.339	2.684.879.357	2.691.109.328
4.02.000.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.634.162.239	2.607.447.657	2.613.677.628

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.891.200	70.204.800	70.204.800
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.226.900	7.226.900	7.226.900
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.514.000	206.516.000	206.516.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	161.514.000	206.516.000	206.516.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.080.063.900	1.080.063.900	1.080.063.900
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.331.600	12.331.600	12.331.600
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.687.100	85.687.100	85.687.100
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.027.200	50.027.200	50.027.200
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.060.000	173.060.000	173.060.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.758.000	79.758.000	79.758.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.200.000	79.200.000	79.200.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	600.000.000	600.000.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	528.106.300	528.106.300	528.106.300
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	503.106.300	503.106.300	503.106.300
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.718.800	588.718.800	588.718.800
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.075.600	54.075.600	54.075.600
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.643.200	519.643.200	519.643.200
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.035.100	369.035.100	369.035.100
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.817.000	296.817.000	296.817.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.915.000	22.915.000	22.915.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.303.100	49.303.100	49.303.100

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.927.732.564	14.927.732.564	14.927.732.564
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	13.549.524.964	13.549.524.964	13.549.524.964
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	966.142.200	966.142.200	966.142.200
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	412.065.400	412.065.400	412.065.400
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.16	Layanan Administrasi DPRD	4.165.378.681	4.165.378.681	4.165.378.681
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	6.654.200	6.654.200	6.654.200
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.166.000.000	2.166.000.000	2.166.000.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	01	2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.992.724.481	1.992.724.481	1.992.724.481
4.02.000.000.01.0000	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.024.780.900	12.971.445.900	12.971.445.900
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	624.400.000	634.565.000	634.565.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	450.000.000	450.000.000	450.000.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0	0	0
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	159.400.000	169.565.000	169.565.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	0	0	0
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	575.458.000	575.458.000	575.458.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.02 03	Pembahasan APBD	515.458.000	515.458.000	515.458.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	207.600.000	207.600.000	207.600.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	207.600.000	207.600.000	207.600.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.891.179.200	1.891.179.200	1.891.179.200
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	1.435.300.000	1.435.300.000	1.435.300.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	190.120.000	190.120.000	190.120.000
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	0	0
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	265.759.200	265.759.200	265.759.200
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0	0	0
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	0	0	0
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.411.488.900	2.347.988.900	2.347.988.900
4.02.000.000.01.0000	4	02	02	2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	250.000.000	186.500.000	186.500.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	2.161.488.900	2.161.488.900	2.161.488.900
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	152.200.000	152.200.000	152.200.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	152.200.000	152.200.000	152.200.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	7.162.454.800	7.162.454.800	7.162.454.800
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	515.554.100	515.554.100	515.554.100
4.02.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	146.900.700	146.900.700	146.900.700
5.01.5.05.0.00.01.0000						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.755.225.851	6.723.490.840	6.724.820.491
5.01.5.05.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.755.225.851	6.723.490.840	6.724.820.491
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	6.442.874.351	6.411.139.340	6.412.468.991
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.468.047.651	4.451.337.640	4.452.667.291
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.814.500	32.814.500	32.814.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.866.500	5.866.500	5.866.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.794.000	1.794.000	1.794.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.154.000	25.154.000	25.154.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.695.791.751	3.564.056.940	3.565.386.591
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.638.954.451	3.507.219.640	3.508.549.291
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.979.200	51.979.200	51.979.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.858.100	4.858.100	4.858.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	498.440.000	622.368.000	622.368.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.051.200	11.051.200	11.051.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.806.000	43.806.000	43.806.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.443.500	6.443.500	6.443.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	101.819.200	86.887.200	86.887.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.732.100	52.732.100	52.732.100
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282.588.000	421.448.000	421.448.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.720.900	53.520.900	53.520.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.720.900	53.520.900	53.520.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.510.900	120.080.800	120.080.800
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.248.400	4.248.400	4.248.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.184.800	43.754.700	43.754.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.077.700	72.077.700	72.077.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.769.600	58.496.500	58.496.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.410.000	30.059.400	30.059.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.045.400	6.045.400	6.045.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.484.200	11.261.700	11.261.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.830.000	11.130.000	11.130.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.017.068.300	910.493.300	910.493.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	874.071.300	767.496.300	767.496.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	50.087.200	50.087.200	50.087.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	48.582.500	48.582.500	48.582.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	260.837.300	260.837.300	260.837.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	514.564.300	407.989.300	407.989.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	142.997.000	142.997.000	142.997.000



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPД DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPД (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	65.000.000	65.000.000	65.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.997.000	77.997.000	77.997.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	957.758.400	1.049.308.400	1.049.308.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	377.959.000	469.509.000	469.509.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPД)	57.156.600	57.156.600	57.156.600
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.921.300	124.496.300	124.496.300
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.428.200	17.428.200	17.428.200
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPД)	142.745.000	127.720.000	127.720.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	83.004.000	83.004.000	83.004.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	59.703.900	59.703.900	59.703.900
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	348.344.400	328.199.400	328.199.400
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPД)	210.405.000	210.405.000	210.405.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	88.187.700	76.112.700	76.112.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	49.751.700	41.681.700	41.681.700
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	231.455.000	251.600.000	251.600.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKP)	60.000.000	60.000.000	60.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.000.000	80.145.000	80.145.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	17.060.000	17.060.000	17.060.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	30.000.000	30.000.000	30.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.265.000	50.265.000	50.265.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	14.130.000	14.130.000	14.130.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	312.351.500	312.351.500	312.351.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	312.351.500	312.351.500	312.351.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	0	0
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	200.000.000	200.000.000	200.000.000
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	112.351.500	112.351.500	112.351.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	112.351.500	112.351.500	112.351.500
5.02.0.00.0.00.01.0000						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	4.448.460.723	4.448.460.723	4.448.460.723
5.02.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4.448.460.723	4.448.460.723	4.448.460.723
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02				KEUANGAN	4.448.460.723	4.448.460.723	4.448.460.723
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.598.618.599	2.598.618.599	2.598.618.599
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.264.195.549	2.264.195.549	2.264.195.549
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.200.387.749	2.200.387.749	2.200.387.749
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.198.100	46.198.100	46.198.100
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.629.900	12.629.900	12.629.900
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.979.800	4.979.800	4.979.800
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.806.800	123.806.800	123.806.800
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.367.100	3.367.100	3.367.100
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.087.300	10.087.300	10.087.300
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.546.400	8.546.400	8.546.400
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.509.000	27.509.000	27.509.000
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.963.000	18.963.000	18.963.000
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.675.000	6.675.000	6.675.000
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.659.000	48.659.000	48.659.000
5.02.00.0.00.01.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.075.150	170.075.150	170.075.150
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.103.000	16.103.000	16.103.000
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.972.150	152.972.150	152.972.150
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.541.100	40.541.100	40.541.100
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.721.600	23.721.600	23.721.600
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.159.600	7.159.600	7.159.600
5.02.000.000.01.0000	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.659.900	9.659.900	9.659.900
5.02.000.000.01.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.542.860.624	1.542.860.624	1.542.860.624
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	132.923.400	132.923.400	132.923.400
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	0	0	0
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	0	0
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0	0	0
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	3.534.600	3.534.600	3.534.600
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0	0	0
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.454.200	3.454.200	3.454.200
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.379.900	112.379.900	112.379.900
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	13.554.700	13.554.700	13.554.700
5.02.000.000.01.0000	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	179.034.900	179.034.900	179.034.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	23.177.000	23.177.000	23.177.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8.115.700	8.115.700	8.115.700
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	11.308.800	11.308.800	11.308.800
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.687.400	8.687.400	8.687.400
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	127.746.000	127.746.000	127.746.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	77.738.400	77.738.400	77.738.400
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	16.504.000	16.504.000	16.504.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5.316.500	5.316.500	5.316.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	42.527.700	42.527.700	42.527.700
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0	0	0
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	0	0	0
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	13.390.200	13.390.200	13.390.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.124.465.924	1.124.465.924	1.124.465.924
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1.122.086.824	1.122.086.824	1.122.086.824

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.379.100	2.379.100	2.379.100
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	0
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0	0	0
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	28.698.000	28.698.000	28.698.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	26.197.700	26.197.700	26.197.700
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	2.500.300	2.500.300	2.500.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	91.609.300	91.609.300	91.609.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	91.609.300	91.609.300	91.609.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.510.300	19.510.300	19.510.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	5.694.700	5.694.700	5.694.700
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.013.100	8.013.100	8.013.100
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	10.897.200	10.897.200	10.897.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40.303.500	40.303.500	40.303.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	7.190.500	7.190.500	7.190.500
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	215.372.200	215.372.200	215.372.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	215.372.200	215.372.200	215.372.200
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	40.368.300	40.368.300	40.368.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	6.552.100	6.552.100	6.552.100
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8.449.900	8.449.900	8.449.900
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	34.418.000	34.418.000	34.418.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	20.814.300	20.814.300	20.814.300
5.02.0.00.0.00.01.0000	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7.168.800	7.168.800	7.168.800

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.735.300	5.735.300	5.735.300
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	17.544.100	17.544.100	17.544.100
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	19.244.900	19.244.900	19.244.900
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	15.716.400	15.716.400	15.716.400
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	18.424.900	18.424.900	18.424.900
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1.700.600	1.700.600	1.700.600
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	7.963.300	7.963.300	7.963.300
5.02.000.000.01.0000	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	11.271.300	11.271.300	11.271.300
5.02.000.000.02.0000						BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.678.353.862	5.313.507.703	5.313.507.703
5.02.000.000.02.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.678.353.862	5.313.507.703	5.313.507.703
5.02.000.000.02.0000	5	02				KEUANGAN	5.678.353.862	5.313.507.703	5.313.507.703
5.02.000.000.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.220.874.262	3.821.028.103	3.821.028.103
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.081.300	23.081.300	23.081.300
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.366.700	4.366.700	4.366.700
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.797.000	1.797.000	1.797.000
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.446.200	2.446.200	2.446.200
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.471.400	14.471.400	14.471.400
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.411.122.668	2.991.715.153	2.991.715.153
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.322.447.868	2.902.700.353	2.902.700.353
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88.674.800	89.014.800	89.014.800
5.02.000.000.02.0000	5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	0	0	0
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	0	0	0
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.113.494	221.653.950	221.653.950
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.973.850	9.973.850	9.973.850
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.000.000	25.791.700	25.791.700
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.373.100	20.931.300	20.931.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.870.000	35.000.000	35.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.636.500	16.641.300	16.641.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.765.800	6.965.800	6.965.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.494.244	106.350.000	106.350.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268.882.600	295.776.500	295.776.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.450.500	171.344.400	171.344.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.432.100	124.432.100	124.432.100
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.838.000	194.918.000	194.918.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.820.000	11.900.000	11.900.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.518.000	177.518.000	177.518.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.836.200	93.883.200	93.883.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.869.200	33.378.500	33.378.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.181.800	48.719.500	48.719.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.785.200	11.785.200	11.785.200
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.457.479.600	1.492.479.600	1.492.479.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.457.479.600	1.492.479.600	1.492.479.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	116.845.100	116.845.100	116.845.100



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	145.000.000	155.000.000	155.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	68.158.800	93.158.800	93.158.800
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	108.604.600	108.604.600	108.604.600
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	150.139.300	150.139.300	150.139.300
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	52.127.000	52.127.000	52.127.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	69.699.000	69.699.000	69.699.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	258.336.400	258.336.400	258.336.400
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	140.349.500	140.349.500	140.349.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	82.038.500	82.038.500	82.038.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	80.284.900	80.284.900	80.284.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	25.951.500	25.951.500	25.951.500
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	86.689.900	86.689.900	86.689.900
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	73.255.100	73.255.100	73.255.100
5.02.0.00.0.00.03.0000						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	276.308.705.930	281.297.380.114	281.107.707.360
5.02.0.00.0.00.03.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	276.308.705.930	281.297.380.114	281.107.707.360
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02				KEUANGAN	276.308.705.930	281.297.380.114	281.107.707.360
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.996.905.010	4.102.118.094	3.940.557.340
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.401.600	127.935.300	110.537.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.207.300	5.207.300	5.207.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.411.200	5.411.200	5.411.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.996.400	4.996.400	4.996.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.466.300	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.320.400	112.320.400	94.922.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.677.602.959	2.548.564.239	2.370.483.185
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.458.357.359	2.329.318.639	2.151.237.585
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	177.667.000	177.667.000	177.667.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.578.600	41.578.600	41.578.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.545.150	517.544.900	517.544.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.008.950	23.008.700	23.008.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.760.900	84.760.900	84.760.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.850.200	24.850.200	24.850.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.100.000	70.100.000	70.100.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.935.400	82.935.400	82.935.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.993.100	20.993.100	20.993.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	29.924.600	29.924.600	29.924.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.972.000	180.972.000	180.972.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127.453.600	354.235.770	378.325.070
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.436.500	326.218.670	339.136.470
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.017.100	28.017.100	39.188.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.215.456	246.167.140	246.167.140
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.760.000	9.760.000	9.760.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.695.200	35.695.200	35.695.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.760.256	200.711.940	200.711.940
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	307.686.245	307.670.745	317.499.745
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.380.300	107.364.800	107.364.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	96.263.745	96.263.745	96.263.745

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.042.200	104.042.200	113.871.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	271.359.888.320	276.436.349.420	276.408.237.420
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.474.915.700	1.509.236.700	1.501.236.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	194.616.300	202.986.300	202.986.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	168.802.800	177.172.800	177.172.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	61.710.000	61.710.000	61.710.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	58.175.400	58.175.400	58.175.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	361.107.500	377.847.500	377.847.500
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	449.874.600	450.715.600	450.715.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5.085.000	5.085.000	5.085.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	27.111.900	27.111.900	27.111.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	148.432.200	148.432.200	140.432.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	427.220.100	418.548.100	418.548.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	81.421.900	81.421.900	81.421.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	24.447.400	24.447.400	24.447.400
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	63.691.000	63.691.000	63.691.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	21.661.800	21.661.800	21.661.800
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	235.998.000	227.326.000	227.326.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	452.196.500	503.193.600	503.193.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	27.750.000	27.735.000	27.735.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	54.358.500	54.313.500	54.313.500
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	106.567.300	106.567.300	106.567.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	167.577.900	167.577.900	167.577.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	50.000.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	45.942.800	96.999.900	96.999.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	268.785.182.020	273.784.997.020	273.764.885.020
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.04	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	0	0	0
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	3.028.391.176	3.028.391.176	3.028.391.176
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	253.134.580.200	253.134.395.200	253.114.283.200
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.322.919.900	14.322.919.900	14.322.919.900
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	3.299.290.744	3.299.290.744	3.299.290.744
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	220.374.000	220.374.000	220.374.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	130.359.300	130.359.300	130.359.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90.014.700	90.014.700	90.014.700
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	951.912.600	758.912.600	758.912.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	951.912.600	758.912.600	758.912.600
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	136.000.000	136.000.000	136.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	76.733.000	76.733.000	76.733.000
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	463.742.100	270.742.100	270.742.100
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	63.498.300	63.498.300	63.498.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	94.640.500	94.640.500	94.640.500
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72.848.300	72.848.300	72.848.300
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44.450.400	44.450.400	44.450.400
5.03.5.04.0.00.01.0000						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.205.362.571	6.333.283.156	6.465.174.812
5.03.5.04.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.205.362.571	6.333.283.156	6.465.174.812
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	4.784.572.771	4.922.974.356	5.054.866.012
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.459.693.007	3.518.094.592	3.649.986.248
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.625.400	17.625.400	17.625.400
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.870.900	3.870.900	3.870.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.299.900	5.299.900	5.299.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.454.600	8.454.600	8.454.600
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.717.830.807	2.721.872.392	2.853.764.048
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.657.505.807	2.661.547.392	2.793.439.048
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.075.200	55.075.200	55.075.200
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.249.800	5.249.800	5.249.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.140.300	3.140.300	3.140.300
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.140.300	3.140.300	3.140.300
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	370.435.640	420.795.640	420.795.640
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.212.700	5.212.700	5.212.700

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.762.700	58.762.700	58.762.700
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.722.100	9.722.100	9.722.100
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.496.000	26.496.000	26.496.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.367.640	15.367.640	15.367.640
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.889.500	4.889.500	4.889.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.985.000	300.345.000	300.345.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	107.237.900	107.237.900	107.237.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.237.900	107.237.900	107.237.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.199.600	62.199.600	62.199.600
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.202.800	7.202.800	7.202.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.223.360	185.223.360	185.223.360
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.741.786	116.741.786	116.741.786
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.852.200	37.852.200	37.852.200
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.629.374	30.629.374	30.629.374
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.324.879.764	1.404.879.764	1.404.879.764
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	585.933.300	585.933.300	585.933.300
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	18.432.900	18.432.900	18.432.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	479.710.500	479.710.500	479.710.500
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	22.789.900	22.789.900	22.789.900
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	65.000.000	65.000.000	65.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	55.000.000	55.000.000	55.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	0	0	0

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	55.000.000	55.000.000	55.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	654.305.464	734.305.464	734.305.464
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	103.566.000	103.566.000	103.566.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	85.000.000	165.000.000	165.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	465.739.464	465.739.464	465.739.464
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.641.000	29.641.000	29.641.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	29.641.000	29.641.000	29.641.000
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	0	0	0
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.420.789.800	1.410.308.800	1.410.308.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.420.789.800	1.410.308.800	1.410.308.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.420.789.800	1.410.308.800	1.410.308.800
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.420.789.800	1.410.308.800	1.410.308.800
6.01.0.00.0.00.01.0000						INSPEKTORAT	11.490.497.977	10.739.684.887	10.785.558.007
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.490.497.977	10.739.684.887	10.785.558.007
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	11.490.497.977	10.739.684.887	10.785.558.007
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.338.829.977	8.627.443.887	8.673.317.007
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.040.954.977	4.790.141.887	4.836.015.007
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.992.471.377	4.741.658.287	4.787.531.407
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48.483.600	48.483.600	48.483.600

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	293.500.000	293.500.000	293.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	293.500.000	293.500.000	293.500.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	926.719.600	983.773.800	983.773.800
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.500	10.500.500	10.500.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	100.000.000	100.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000	15.000.000	15.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.543.100	47.419.300	47.419.300
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.352.000	14.352.000	14.352.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.324.000	796.502.000	796.502.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.403.596.300	1.758.829.600	1.758.829.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.403.596.300	1.758.829.600	1.758.829.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.266.400	97.880.000	97.880.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.880.000	49.880.000	49.880.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.386.400	42.000.000	42.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.792.700	703.318.600	703.318.600
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.703.400	132.315.900	132.315.900
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.229.300	305.142.700	305.142.700
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	235.000.000	251.000.000	251.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.860.000	14.860.000	14.860.000
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.610.045.000	1.903.695.000	1.903.695.000



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.400.855.000	754.055.000	754.055.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	523.200.000	179.900.000	179.900.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	479.600.000	151.000.000	151.000.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	0	0	0
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	0	0	0
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 05	Pengawasan Desa	126.000.000	188.900.000	188.900.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	64.020.000	26.220.000	26.220.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	208.035.000	208.035.000	208.035.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.209.190.000	1.149.640.000	1.149.640.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	0	0	0
6.01.000.000.01.0000	6	01	02	2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.209.190.000	1.149.640.000	1.149.640.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	541.623.000	208.546.000	208.546.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	182.514.000	32.800.000	32.800.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	91.257.000	16.400.000	16.400.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	91.257.000	16.400.000	16.400.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi	359.109.000	175.746.000	175.746.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	90.944.000	24.221.000	24.221.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	52.221.000	10.415.000	10.415.000
6.01.000.000.01.0000	6	01	03	2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	215.944.000	141.110.000	141.110.000
7.01.000.000.01.0000					KANTOR KECAMATAN TARUTUNG	11.388.515.298	11.139.696.339	11.238.790.595
7.01.000.000.01.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	11.388.515.298	11.139.696.339	11.238.790.595
7.01.000.000.01.0000	7	01			KECAMATAN	11.388.515.298	11.139.696.339	11.238.790.595
7.01.000.000.01.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.964.490.498	5.701.428.761	5.800.523.017

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.844.600	1.844.600	1.844.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.844.600	1.844.600	1.844.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.632.958.848	5.364.908.011	5.464.002.267
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.589.819.348	5.321.768.511	5.420.862.767
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	41.427.600	41.427.600	41.427.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.711.900	1.711.900	1.711.900
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.407.700	169.398.300	169.398.300
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.971.200	5.971.200	5.971.200
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.243.300	108.237.100	108.237.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.493.700	8.490.600	8.490.600
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.899.500	19.899.400	19.899.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.800.000	26.800.000	26.800.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.914.000	23.914.000	23.914.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	05 Pengadaan Mebel	15.464.000	15.464.000	15.464.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.450.000	8.450.000	8.450.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.874.700	85.874.500	85.874.500
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.912.300	11.912.100	11.912.100
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.662.400	72.662.400	72.662.400
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.490.650	55.489.350	55.489.350
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.767.750	40.766.450	40.766.450
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.722.900	14.722.900	14.722.900
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.693.200	71.693.200	71.693.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	76.693.200	71.693.200	71.693.200
7.01.000.000.01.0000	7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	76.693.200	71.693.200	71.693.200
7.01.000.000.01.0000	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.347.331.600	5.366.574.378	5.366.574.378
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.347.331.600	5.366.574.378	5.366.574.378
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	35.999.000	35.999.000	35.999.000
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02	02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.918.405.428	3.822.648.203	3.822.648.203
7.01.000.000.01.0000	7	01	03	2.02	03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.392.927.172	1.507.927.175	1.507.927.175
7.01.000.000.02.0000					KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA	1.824.123.123	1.857.859.793	1.863.244.418
7.01.000.000.02.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	1.824.123.123	1.857.859.793	1.863.244.418
7.01.000.000.02.0000	7	01			KECAMATAN	1.824.123.123	1.857.859.793	1.863.244.418
7.01.000.000.02.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.739.509.623	1.773.246.293	1.778.630.918
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.532.818.773	1.566.555.443	1.571.940.068
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.494.298.273	1.528.034.943	1.533.419.568
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.900.000	36.900.000	36.900.000
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.620.500	1.620.500	1.620.500
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.462.900	93.462.900	93.462.900
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.185.400	2.185.400	2.185.400
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.387.600	28.387.600	28.387.600
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.997.900	1.997.900	1.997.900
7.01.000.000.02.0000	7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.903.000	6.903.000	6.903.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.699.000	2.699.000	2.699.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.290.000	51.290.000	51.290.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.411.800	67.411.800	67.411.800
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550.000	550.000	550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.365.000	12.365.000	12.365.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.316.150	41.316.150	41.316.150
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.011.450	32.011.450	32.011.450
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.997.000	3.997.000	3.997.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.307.700	5.307.700	5.307.700
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.613.500	84.613.500	84.613.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.613.500	84.613.500	84.613.500
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	84.613.500	84.613.500	84.613.500
7.01.0.00.0.00.03.0000						KANTOR KECAMATAN ADIANKOTING	1.907.309.342	1.907.309.342	1.485.771.179
7.01.0.00.0.00.03.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.907.309.342	1.907.309.342	1.485.771.179
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01				KECAMATAN	1.907.309.342	1.907.309.342	1.485.771.179
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.834.677.342	1.834.677.342	1.413.139.179
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.533.800	16.533.800	16.533.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.910.000	13.910.000	13.910.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.623.800	2.623.800	2.623.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.607.371.292	1.607.371.292	1.185.833.129
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.574.108.092	1.574.108.092	1.152.569.929
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.640.800	30.640.800	30.640.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.622.400	2.622.400	2.622.400
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.276.800	96.276.800	96.276.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.024.500	9.024.500	9.024.500
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.416.600	21.416.600	21.416.600
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.335.300	17.335.300	17.335.300
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.665.800	35.665.800	35.665.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.834.600	12.834.600	12.834.600
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.059.300	29.059.300	29.059.300
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	9.152.000	9.152.000	9.152.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.907.300	19.907.300	19.907.300
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.058.100	60.058.100	60.058.100
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000	570.000	570.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.991.300	4.991.300	4.991.300
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.378.050	25.378.050	25.378.050
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.378.050	25.378.050	25.378.050
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.632.000	72.632.000	72.632.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	72.632.000	72.632.000	72.632.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	72.632.000	72.632.000	72.632.000
7.01.0.00.0.00.04.0000						KANTOR KECAMATAN SIPOHOLON	3.177.960.406	3.087.580.030	3.091.278.253
7.01.0.00.0.00.04.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	498.900	498.900	498.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	498.900	498.900	498.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	498.900	498.900	498.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	498.900	498.900	498.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	498.900	498.900	498.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.177.461.506	3.087.081.130	3.090.779.353
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01				KECAMATAN	3.177.461.506	3.087.081.130	3.090.779.353
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.339.553.556	2.249.177.509	2.252.875.732
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.656.300	7.656.300	7.656.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.639.100	3.639.100	3.639.100
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	498.700	498.700	498.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.545.600	1.545.600	1.545.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.972.900	1.972.900	1.972.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.109.001.266	2.018.625.219	2.022.323.442
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.069.514.466	1.979.138.419	1.982.836.642
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.782.800	36.782.800	36.782.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.120.000	1.120.000	1.120.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.584.000	1.584.000	1.584.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	997.700	997.700	997.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	997.700	997.700	997.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.733.540	55.733.540	55.733.540

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.872.500	1.872.500	1.872.500
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.736.300	11.736.300	11.736.300
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.214.900	5.214.900	5.214.900
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.850.000	23.850.000	23.850.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.734.000	1.734.000	1.734.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.115.840	3.115.840	3.115.840
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	0	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.210.000	8.210.000	8.210.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.690.000	40.690.000	40.690.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.690.000	40.690.000	40.690.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.756.500	65.756.500	65.756.500
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	800.000	800.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.459.700	10.459.700	10.459.700
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.718.250	59.718.250	59.718.250
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.078.250	33.078.250	33.078.250
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.640.000	26.640.000	26.640.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.822.200	39.822.200	39.822.200
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.822.200	39.822.200	39.822.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.822.200	39.822.200	39.822.200
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	791.585.750	791.581.421	791.581.421
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.545.000	11.545.000	11.545.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.545.000	11.545.000	11.545.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	780.040.750	780.036.421	780.036.421
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	715.229.150	715.224.821	715.224.821
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64.811.600	64.811.600	64.811.600
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	6.500.000	6.500.000	6.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000						KANTOR KECAMATAN PAHAE JULU	3.481.520.532	3.266.434.974	3.465.162.612
7.01.0.00.0.00.05.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	3.481.520.532	3.266.434.974	3.465.162.612
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01				KECAMATAN	3.481.520.532	3.266.434.974	3.465.162.612
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.596.212.706	2.381.126.648	2.579.854.286
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.607.400	2.607.400	2.607.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.607.400	2.607.400	2.607.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.429.566.006	2.214.479.948	2.413.207.586
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.395.021.106	2.179.935.048	2.378.662.686
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.915.200	31.915.200	31.915.200
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.629.700	2.629.700	2.629.700
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.184.400	42.184.400	42.184.400
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.564.500	20.564.500	20.564.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.170.000	14.170.000	14.170.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.784.900	2.784.900	2.784.900



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.665.000	4.665.000	4.665.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.201.000	25.201.000	25.201.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.201.000	25.201.000	25.201.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.323.900	59.323.900	59.323.900
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	630.000	630.000	630.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.197.100	4.197.100	4.197.100
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.330.000	37.330.000	37.330.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.330.000	37.330.000	37.330.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	134.573.500	134.573.500	134.573.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	134.573.500	134.573.500	134.573.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	134.573.500	134.573.500	134.573.500
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	750.734.326	750.734.826	750.734.826
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	750.734.326	750.734.826	750.734.826
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.999.600	4.999.600	4.999.600
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	621.712.326	621.396.326	621.396.326
7.01.0.00.0.00.05.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	124.022.400	124.338.900	124.338.900
7.01.0.00.0.00.06.0000						KANTOR KECAMATAN PAHAE JAE	2.530.318.748	2.620.434.552	2.647.074.534
7.01.0.00.0.00.06.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.530.318.748	2.620.434.552	2.647.074.534
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01				KECAMATAN	2.530.318.748	2.620.434.552	2.647.074.534
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.765.530.113	1.855.645.917	1.882.285.899
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.499.900	4.499.900	4.499.900

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.499.900	4.499.900	4.499.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.612.735.313	1.702.851.117	1.729.491.099
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.569.562.313	1.659.678.117	1.686.318.099
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.673.100	38.673.100	38.673.100
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.499.900	4.499.900	4.499.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.266.300	56.266.300	56.266.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.334.900	3.334.900	3.334.900
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.493.600	17.493.600	17.493.600
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.730.000	26.730.000	26.730.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.287.800	5.287.800	5.287.800
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.420.000	3.420.000	3.420.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.891.300	60.891.300	60.891.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.300.000	3.300.000	3.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.591.300	54.591.300	54.591.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.137.300	31.137.300	31.137.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.137.300	31.137.300	31.137.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	134.305.300	134.305.300	134.305.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	134.305.300	134.305.300	134.305.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	134.305.300	134.305.300	134.305.300
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	630.483.335	630.483.335	630.483.335
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	630.483.335	630.483.335	630.483.335

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	532.706.035	532.706.035	532.706.035
7.01.0.00.0.00.06.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	97.777.300	97.777.300	97.777.300
7.01.0.00.0.00.07.0000						KANTOR KECAMATAN PURBATUA	1.478.355.942	1.409.065.845	1.545.844.548
7.01.0.00.0.00.07.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.478.355.942	1.409.065.845	1.545.844.548
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01				KECAMATAN	1.478.355.942	1.409.065.845	1.545.844.548
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.361.910.542	1.292.620.445	1.429.399.148
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800	1.999.800	1.999.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.999.800	1.999.800	1.999.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.188.205.442	1.118.915.345	1.255.694.048
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.150.129.442	1.080.839.345	1.217.618.048
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.007.600	35.007.600	35.007.600
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.068.400	3.068.400	3.068.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.067.200	49.067.200	49.067.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.776.900	3.776.900	3.776.900
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.235.000	17.235.000	17.235.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.610.400	4.610.400	4.610.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.504.500	2.504.500	2.504.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	20.940.400	20.940.400	20.940.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.665.800	5.665.800	5.665.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.665.800	5.665.800	5.665.800
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.694.200	64.694.200	64.694.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.496.000	3.496.000	3.496.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.698.200	59.698.200	59.698.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.278.100	52.278.100	52.278.100

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.431.400	33.431.400	33.431.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.468.200	2.468.200	2.468.200
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.295.000	7.295.000	7.295.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.083.500	9.083.500	9.083.500
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.445.400	116.445.400	116.445.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	116.445.400	116.445.400	116.445.400
7.01.0.00.0.00.07.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	116.445.400	116.445.400	116.445.400
7.01.0.00.0.00.08.0000						KANTOR KECAMATAN SIMANGUMBAN	1.366.758.001	1.299.653.039	1.353.249.844
7.01.0.00.0.00.08.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.366.758.001	1.299.653.039	1.353.249.844
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01				KECAMATAN	1.366.758.001	1.299.653.039	1.353.249.844
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.263.106.001	1.196.001.039	1.249.597.844
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.207.300	2.207.300	2.207.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.207.300	2.207.300	2.207.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.078.767.401	1.011.662.439	1.065.259.244
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.040.711.101	973.606.139	1.027.202.944
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.867.600	33.867.600	33.867.600
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.188.700	4.188.700	4.188.700
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.219.700	84.219.700	84.219.700
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.000	1.999.000	1.999.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.635.600	12.635.600	12.635.600
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.665.900	14.665.900	14.665.900
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.015.200	4.015.200	4.015.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.904.000	50.904.000	50.904.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.248.300	63.248.300	63.248.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.751.500	7.751.500	7.751.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.663.300	34.663.300	34.663.300
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.954.800	26.954.800	26.954.800
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.650.500	2.650.500	2.650.500
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.058.000	5.058.000	5.058.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	93.652.000	93.652.000	93.652.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	93.652.000	93.652.000	93.652.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	93.652.000	93.652.000	93.652.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000						KANTOR KECAMATAN SIPAHUTAR	2.340.180.216	2.238.671.453	2.243.585.022
7.01.0.00.0.00.09.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.340.180.216	2.238.671.453	2.243.585.022
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01				KECAMATAN	2.340.180.216	2.238.671.453	2.243.585.022
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.218.647.316	2.117.138.553	2.122.052.122
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.042.400	1.042.400	1.042.400

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.042.400	1.042.400	1.042.400
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.034.595.516	1.933.086.753	1.938.000.322
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.001.675.516	1.900.166.753	1.905.080.322
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.920.000	2.920.000	2.920.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	93.703.700	93.703.700	93.703.700
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.891.800	28.891.800	28.891.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.312.000	7.312.000	7.312.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.900	9.999.900	9.999.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.500.000	47.500.000	47.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.096.800	61.096.800	61.096.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	900.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.700.000	5.700.000	5.700.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.208.900	28.208.900	28.208.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.765.200	22.765.200	22.765.200
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.443.700	5.443.700	5.443.700
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	71.532.900	71.532.900	71.532.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	71.532.900	71.532.900	71.532.900
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	71.532.900	71.532.900	71.532.900

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000						KANTOR KECAMATAN PANGARIBUAN	2.194.684.050	1.717.871.949	1.728.461.309
7.01.0.00.0.00.10.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.194.684.050	1.717.871.949	1.728.461.309
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01				KECAMATAN	2.194.684.050	1.717.871.949	1.728.461.309
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.067.469.050	1.590.656.949	1.601.246.309
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.625.400	10.625.400	10.625.400
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.140.700	6.140.700	6.140.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.484.700	4.484.700	4.484.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.868.404.800	1.391.592.699	1.402.182.059
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.833.444.100	1.356.631.999	1.367.221.359
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.464.500	30.464.500	30.464.500
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.496.200	4.496.200	4.496.200
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.423.300	87.423.300	87.423.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.805.700	2.805.700	2.805.700
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.961.600	14.961.600	14.961.600
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.980.300	4.980.300	4.980.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.725.000	12.725.000	12.725.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.055.500	4.055.500	4.055.500
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.995.200	1.995.200	1.995.200
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.900.000	45.900.000	45.900.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.071.100	69.071.100	69.071.100
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.920.000	7.920.000	7.920.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.654.300	5.654.300	5.654.300
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.944.450	31.944.450	31.944.450
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.944.450	31.944.450	31.944.450
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.215.000	77.215.000	77.215.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.215.000	77.215.000	77.215.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	77.215.000	77.215.000	77.215.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000						KANTOR KECAMATAN GAROGA	2.094.911.706	1.895.870.772	1.998.320.463
7.01.0.00.0.00.11.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.094.911.706	1.895.870.772	1.998.320.463
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01				KECAMATAN	2.094.911.706	1.895.870.772	1.998.320.463
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.990.664.506	1.791.623.572	1.894.073.263
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.970.800	21.970.800	21.970.800
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.970.800	21.970.800	21.970.800
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.770.605.006	1.571.564.072	1.674.013.763
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.731.001.706	1.531.960.772	1.634.410.463
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.087.600	36.087.600	36.087.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.515.700	3.515.700	3.515.700
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.761.700	50.761.700	50.761.700



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.100	1.997.100	1.997.100
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.728.000	4.728.000	4.728.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.573.800	5.573.800	5.573.800
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.622.800	3.622.800	3.622.800
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.840.000	34.840.000	34.840.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.465.000	60.465.000	60.465.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.465.000	60.465.000	60.465.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.589.400	59.589.400	59.589.400
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.092.600	4.092.600	4.092.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.272.600	27.272.600	27.272.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.275.000	16.275.000	16.275.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.997.600	10.997.600	10.997.600
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.660.000	41.660.000	41.660.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	41.660.000	41.660.000	41.660.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	41.660.000	41.660.000	41.660.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.948.200	9.948.200	9.948.200
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.948.200	9.948.200	9.948.200
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.960.000	4.960.000	4.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.988.200	4.988.200	4.988.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.960.000	9.960.000	9.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9.960.000	9.960.000	9.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	04	2.02	01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9.960.000	9.960.000	9.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.720.000	32.720.000	32.720.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32.720.000	32.720.000	32.720.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	05	2.01	08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32.720.000	32.720.000	32.720.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.959.000	9.959.000	9.959.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.959.000	9.959.000	9.959.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.960.000	4.960.000	4.960.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	7	01	06	2.01	16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.999.000	4.999.000	4.999.000
7.01.0.00.0.00.12.0000					KANTOR KECAMATAN SIBORONGBORONG	3.988.045.724	3.904.363.503	3.937.375.744
7.01.0.00.0.00.12.0000	7				UNSUR KEWILAYAHAN	3.988.045.724	3.904.363.503	3.937.375.744
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01			KECAMATAN	3.988.045.724	3.904.363.503	3.937.375.744
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.120.093.395	3.025.768.273	3.058.780.514
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	765.300	765.300	765.300
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	765.300	765.300	765.300
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.869.864.945	2.786.182.873	2.819.195.114
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.824.568.045	2.740.885.973	2.773.898.214
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.023.200	44.023.200	44.023.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.273.700	1.273.700	1.273.700
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.503.060	110.973.900	110.973.900

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.280.500	19.438.800	19.438.800
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.083.400	10.399.300	10.399.300
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.499.800	4.495.800	4.495.800
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.639.360	3.640.000	3.640.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.000.000	71.000.000	71.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.069.400	18.802.000	18.802.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.069.400	18.802.000	18.802.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.486.800	66.486.800	66.486.800
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.490.000	10.490.000	10.490.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.403.890	42.557.400	42.557.400
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.582.590	35.738.200	35.738.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.860.000	2.860.000	2.860.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.961.300	3.959.200	3.959.200
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.952.800	96.595.700	96.595.700
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.952.800	96.595.700	96.595.700
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	85.952.800	96.595.700	96.595.700
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	781.999.529	781.999.530	781.999.530
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	781.999.529	781.999.530	781.999.530
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	682.000.129	664.287.232	664.287.232

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000	7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	99.999.400	117.712.298	117.712.298
7.01.0.00.0.00.13.0000						KANTOR KECAMATAN PAGARAN	1.765.113.400	1.597.589.149	1.597.889.149
7.01.0.00.0.00.13.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.765.113.400	1.597.589.149	1.597.889.149
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01				KECAMATAN	1.765.113.400	1.597.589.149	1.597.889.149
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.688.087.500	1.520.563.249	1.520.863.249
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	935.000	935.000	935.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	935.000	935.000	935.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.481.384.800	1.313.860.549	1.314.160.549
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.455.099.100	1.287.574.849	1.287.874.849
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.160.400	25.160.400	25.160.400
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.125.300	1.125.300	1.125.300
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.733.400	63.733.400	63.733.400
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.020.300	3.020.300	3.020.300
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.716.000	20.716.000	20.716.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.928.300	3.928.300	3.928.300
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	17.938.800	17.938.800	17.938.800
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.130.000	18.130.000	18.130.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.256.500	60.256.500	60.256.500
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	700.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.059.700	5.059.700	5.059.700
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.777.800	81.777.800	81.777.800
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.732.700	24.732.700	24.732.700

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.325.400	42.325.400	42.325.400
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.470.100	9.470.100	9.470.100
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.249.600	5.249.600	5.249.600
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	77.025.900	77.025.900	77.025.900
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	77.025.900	77.025.900	77.025.900
7.01.0.00.0.00.13.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	77.025.900	77.025.900	77.025.900
7.01.0.00.0.00.14.0000						KANTOR KECAMATAN PARMONANGAN	1.138.314.715	1.073.469.964	1.087.065.517
7.01.0.00.0.00.14.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.138.314.715	1.073.469.964	1.087.065.517
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01				KECAMATAN	1.138.314.715	1.073.469.964	1.087.065.517
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.053.791.215	988.946.464	1.002.542.017
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.873.700	1.873.700	1.873.700
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.873.700	1.873.700	1.873.700
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	828.014.415	763.169.664	776.765.217
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	805.614.015	740.769.264	754.364.817
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.400.400	22.400.400	22.400.400
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.442.900	84.442.900	84.442.900
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	38.980.000	38.980.000	38.980.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.087.900	44.087.900	44.087.900
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.075.000	66.075.000	66.075.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.575.000	11.575.000	11.575.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000	54.000.000	54.000.000

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.385.200	73.385.200	73.385.200
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.336.500	51.336.500	51.336.500
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.048.700	22.048.700	22.048.700
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	62.923.500	62.923.500	62.923.500
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	62.923.500	62.923.500	62.923.500
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62.923.500	62.923.500	62.923.500
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.600.000	21.600.000	21.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000						KANTOR KECAMATAN MUARA	2.280.395.540	1.693.645.315	1.693.645.315
7.01.0.00.0.00.15.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	2.280.395.540	1.693.645.315	1.693.645.315
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01				KECAMATAN	2.280.395.540	1.693.645.315	1.693.645.315
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.177.997.240	1.591.247.015	1.591.247.015
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.288.700	2.288.700	2.288.700
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.288.700	2.288.700	2.288.700
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.944.844.600	1.358.094.375	1.358.094.375
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.911.862.100	1.325.111.875	1.325.111.875
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.800.000	28.800.000	28.800.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.182.500	4.182.500	4.182.500
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.597.240	105.597.240	105.597.240
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.700.000	5.700.000	5.700.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.267.900	9.267.900	9.267.900

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.268.000	4.268.000	4.268.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.911.740	17.911.740	17.911.740
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.575.600	1.575.600	1.575.600
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.475.000	3.475.000	3.475.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	14.594.000	14.594.000	14.594.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.805.000	48.805.000	48.805.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.100.000	21.100.000	21.100.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.650.000	12.650.000	12.650.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.450.000	8.450.000	8.450.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.052.200	62.052.200	62.052.200
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.555.400	5.555.400	5.555.400
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.114.500	42.114.500	42.114.500
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.143.200	34.143.200	34.143.200
7.01.000.000.15.0000	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.971.300	7.971.300	7.971.300
7.01.000.000.15.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	102.398.300	102.398.300	102.398.300
7.01.000.000.15.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	102.398.300	102.398.300	102.398.300
7.01.000.000.15.0000	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	102.398.300	102.398.300	102.398.300
8.01.000.000.02.0000						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.300.181.163	5.032.580.326	5.032.580.326
8.01.000.000.02.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	5.300.181.163	5.032.580.326	5.032.580.326

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.300.181.163	5.032.580.326	5.032.580.326
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.265.474.500	2.997.873.663	2.997.873.663
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.896.734.000	2.629.133.163	2.629.133.163
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.686.400	2.588.085.563	2.588.085.563
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.047.600	37.047.600	37.047.600
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.02	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.540.500	200.540.500	200.540.500
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.739.400	7.739.400	7.739.400
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000	17.000.000	17.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.962.400	10.962.400	10.962.400
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.682.500	14.682.500	14.682.500
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.751.200	7.751.200	7.751.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.405.000	142.405.000	142.405.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.694.400	44.694.400	44.694.400
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.07	06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.694.400	44.694.400	44.694.400
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.796.700	69.796.700	69.796.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.299.900	11.299.900	11.299.900
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.496.800	54.496.800	54.496.800
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.708.900	49.708.900	49.708.900
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.997.300	27.997.300	27.997.300



**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKP DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKP (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.721.700	11.721.700	11.721.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.989.900	9.989.900	9.989.900
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	389.081.000	389.081.000	389.081.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	389.081.000	389.081.000	389.081.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000	150.000.000	150.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	239.081.000	239.081.000	239.081.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	964.255.763	964.255.763	964.255.763
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	964.255.763	964.255.763	964.255.763
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	871.239.063	871.239.063	871.239.063
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	93.016.700	93.016.700	93.016.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	31.539.200	31.539.200	31.539.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	31.539.200	31.539.200	31.539.200

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPД DAN PERUBAHAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode						Uraian	Perubahan RKPД (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	31.539.200	31.539.200	31.539.200
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.000.000	60.000.000	60.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	60.000.000	60.000.000	60.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	60.000.000	60.000.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	589.830.700	589.830.700	589.830.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	589.830.700	589.830.700	589.830.700
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	137.620.000	137.620.000	137.620.000
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.372.900	97.372.900	97.372.900
8.01.0.00.0.00.02.0000	8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	354.837.800	354.837.800	354.837.800

Bupati Tapanuli Utara

Drs. Nikson Nababan, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		CPNS	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF		
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/c	0	22	0	0	0	18	1	0	41
Golongan IV/b	0	8	26	0	0	352	11	0	397
Golongan IV/a	0	4	81	33		448	22	0	588
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>107</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>818</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>1026</b>
Golongan III/d	0	0	51	191	0	531	39	0	812
Golongan III/c	0	0	12	96	0	452	24	0	584
Golongan III/b	0	0	0	124	0	468	124	5	721
Golongan III/a	0	0	0	14	0	384	253	135	786
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>1835</b>	<b>440</b>	<b>140</b>	<b>2903</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	174	208		382
Golongan II/c	0	0	0	0	0	67	119	108	294
Golongan II/b	0	0	0	0	0	23	110		133
Golongan II/a	0	0	0	0	0	10	43	13	66
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274</b>	<b>480</b>	<b>121</b>	<b>875</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>170</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>2927</b>	<b>979</b>	<b>261</b>	<b>4829</b>

Tarutung, Agustus 2022  
 Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.351.525.305.737,80</b>	<b>1.418.077.322.328,40</b>	<b>104,92</b>	<b>1.290.868.909.824,44</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>128.523.313.999,80</b>	<b>162.791.620.432,40</b>	<b>126,66</b>	<b>133.375.094.965,44</b>
4.1.1	Pajak Daerah	19.167.598.082,00	21.703.779.853,00	113,23	19.678.100.705,83
4.1.2	Retribusi Daerah	6.427.857.200,00	5.470.983.860,00	85,11	4.601.554.356,83
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.086.082.639,00	6.961.082.639,00	98,24	7.557.286.367,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	95.841.776.078,80	128.655.774.080,40	134,24	101.538.153.535,78
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.152.845.449.056,00</b>	<b>1.178.811.365.743,00</b>	<b>102,25</b>	<b>1.078.788.903.404,00</b>
4.2.1	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.105.839.096.306,00</i>	<i>1.129.177.555.060,00</i>	<i>102,11</i>	<i>1.033.949.031.807,00</i>
4.2.1.1	Dana Perimbangan	884.115.485.306,00	907.453.944.060,00	102,64	809.570.224.807,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	29.706.794.000,00	29.706.794.000,00	100,00	32.361.990.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00	100,00	192.016.817.000,00
4.2.2	<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>47.006.352.750,00</i>	<i>49.633.810.683,00</i>	<i>105,59</i>	<i>44.839.871.597,00</i>
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	47.006.352.750,00	49.633.810.683,00	105,59	44.839.871.597,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>70.156.542.682,00</b>	<b>76.474.336.153,00</b>	<b>109,01</b>	<b>78.704.911.455,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	12.745.942.682,00	16.140.380.025,00	126,63	69.863.645.716,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.410.600.000,00	60.333.956.128,00	105,09	8.841.265.739,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.600.666.840.823,00</b>	<b>1.473.274.599.069,95</b>	<b>92,04</b>	<b>1.486.351.970.646,22</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.007.654.617.305,00</b>	<b>918.034.972.259,75</b>	<b>91,11</b>	<b>843.090.065.102,86</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	591.682.021.081,00	521.578.901.088,90	88,15	491.483.123.408,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	345.973.012.604,00	326.238.489.421,85	94,30	341.115.892.680,86
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	604.339.500,00
5.1.5	Belanja Hibah	68.228.072.820,00	68.565.971.013,00	100,50	9.202.176.914,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.771.510.800,00	1.651.610.736,00	93,23	684.532.600,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>325.342.459.318,00</b>	<b>287.918.257.694,20</b>	<b>88,50</b>	<b>339.159.979.339,36</b>
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.617.168.962,00	5.032.098.143,00	89,58	1.691.144.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.867.814.863,00	41.376.791.335,91	90,22	51.036.494.674,60
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	107.635.148.114,00	102.883.849.131,30	95,59	57.823.060.309,86
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	165.556.513.979,00	138.088.293.593,99	83,41	226.099.706.572,90
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	665.813.400,00	537.225.490,00	80,69	2.509.573.782,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.474.955.600,00</b>	<b>10.126.560.516,00</b>	<b>96,67</b>	<b>36.198.159.704,00</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.474.955.600,00	10.126.560.516,00	96,67	36.198.159.704,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>257.194.808.600,00</b>	<b>257.194.808.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>267.903.766.500,00</b>
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	257.194.808.600,00	257.194.808.600,00	100,00	267.903.766.500,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(249.141.535.085,20)</b>	<b>(55.197.276.741,55)</b>	<b>22,16</b>	<b>(195.483.060.821,78)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>260.549.552.399,20</b>	<b>238.451.801.575,30</b>	<b>91,52</b>	<b>298.724.851.129,08</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	96.682.361.598,20	96.583.610.774,30	99,90	70.055.851.129,08
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	163.867.190.801,00	141.868.190.801,00	86,58	228.669.000.000,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>11.408.017.314,00</b>	<b>11.319.571.175,45</b>	<b>99,22</b>	<b>6.559.428.709,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.536.977.814,00	7.536.977.814,00	100,00	6.559.428.709,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	3.871.039.500,00	3.782.593.361,45	97,72	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>249.141.535.085,20</b>	<b>227.132.230.399,85</b>	<b>91,17</b>	<b>292.165.422.420,08</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>171.934.953.658,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96.682.361.598,30</b>

Tarutung, Agustus 2022  
 Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN M.Si



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di Kas Daerah	147.997.984.794,50	91.139.652.656,50
Kas di BUD	146.115.158.709,50	87.024.856.583,50
Kas di Bendahara FKTP	1.882.826.085,00	4.114.796.073,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	34.456.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.391.500,00	64.294.824,00
Kas di BLUD	22.945.373.571,00	4.409.924.361,00
Kas di Bendahara Dana BOS	986.203.792,80	1.034.033.756,80
Kas Lainnya	260.224.003,00	255.902.723,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	34.763.356.747,13	26.505.221.391,25
Piutang Lainnya	3.174.729.249,29	3.226.920.794,61
Penyisihan Piutang	(5.335.679.731,15)	(4.065.046.414,18)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	11.798.977.208,30	12.229.437.390,63
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>216.596.561.134,87</b>	<b>134.834.797.483,61</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>3.522.788.739,00</b>	<b>3.522.788.739,00</b>
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	81.624.056.573,00	74.174.838.822,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>81.624.056.573,00</b>	<b>74.174.838.822,00</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>85.146.845.312,00</b>	<b>77.697.627.561,00</b>
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah	825.123.244.227,00	814.466.289.342,00
Peralatan dan Mesin	379.857.751.686,78	341.871.326.921,37
Gedung dan Bangunan	742.136.090.397,87	683.625.448.612,95
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.515.761.562.332,62	1.391.191.425.712,03
Aset Tetap Lainnya	14.256.093.354,00	13.127.158.558,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.788.972.325,95	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.186.382.049.812,80)	(1.060.098.930.932,44)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>2.295.541.664.511,42</b>	<b>2.184.182.718.213,91</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan	0,00	0,00
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	737.051.408,28	642.070.392,00
Aset Lain-lain	63.915.900.124,00	58.953.843.625,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>64.652.951.532,28</b>	<b>59.595.914.017,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.661.938.022.490,57</b>	<b>2.456.311.057.275,52</b>

URAIAN	2021	2020
<b>KEWAJIBAN</b>		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	13.300.000,00	18.900.000,00
Utang Beban	13.208.212.422,00	37.861.945.561,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	210.161.451,56	66.129.021.378,86
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.431.673.873,56	104.009.866.939,86
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	374.523.858.969,80	232.655.668.168,80
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	374.523.858.969,80	232.655.668.168,80
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>387.955.532.843,36</b>	<b>336.665.535.108,66</b>
<b>EKUITAS</b>		
EKUITAS	2.273.982.489.647,21	2.119.645.522.166,86
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.661.938.022.490,57</b>	<b>2.456.311.057.275,52</b>

TARUTUNG, Agustus 2022  
**BUPATI TAPANULI UTARA**

**Drs. NIKSON NABABAN M.Si**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
7	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>1.429.572.874.138,96</b>	<b>1.092.994.775.025,99</b>	<b>336.578.099.112,97</b>	<b>30,79</b>
7.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>167.569.024.195,96</b>	<b>118.647.333.670,99</b>	<b>48.921.690.524,97</b>	<b>41,23</b>
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	23.131.800.214,00	21.416.666.354,33	1.715.133.859,67	8,01
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.609.373.007,88	4.551.433.218,88	1.057.939.789,00	23,24
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	6.961.082.639,00	7.557.286.367,00	(596.203.728,00)	(7,89)
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	131.866.768.335,08	85.121.947.730,78	46.744.820.604,30	54,92
7.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>1.182.249.505.790,00</b>	<b>895.128.451.961,00</b>	<b>287.121.053.829,00</b>	<b>32,08</b>
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	1.129.177.555.060,00	841.932.214.807,00	287.245.340.253,00	34,12
7.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	53.071.950.730,00	53.196.237.154,00	(124.286.424,00)	(0,23)
7.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>79.754.344.153,00</b>	<b>79.218.989.394,00</b>	<b>535.354.759,00</b>	<b>0,68</b>
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO	19.420.388.025,00	70.377.723.655,00	(50.957.335.630,00)	(72,41)
7.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	60.333.956.128,00	8.841.265.739,00	51.492.690.389,00	582,41
8	<b>BEBAN</b>	<b>1.325.044.792.002,04</b>	<b>1.041.757.282.828,67</b>	<b>283.287.509.173,37</b>	<b>27,19</b>
8.1.1	Beban Pegawai - LO	521.558.550.570,90	491.507.688.671,00	30.050.861.899,90	6,11
8.1.2	Beban Persediaan	107.333.187.840,31	78.059.982.071,45	29.273.205.768,86	37,50
8.1.2	Beban Jasa	194.265.528.245,87	225.652.935.232,00	(31.387.406.986,13)	(13,91)
8.1.2	Beban Pemeliharaan	3.351.002.188,00	5.612.100.558,00	(2.261.098.370,00)	(40,29)
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	34.364.826.073,00	40.026.328.817,00	(5.661.502.744,00)	(14,14)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	604.339.500,00	(604.339.500,00)	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	68.565.971.013,00	9.248.723.114,00	59.317.247.899,00	641,36
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	1.651.610.736,00	684.532.600,00	967.078.136,00	141,28
8.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.362.853.418,06	111.897.763.287,18	23.465.090.130,88	20,97
8.1.8	Beban Penyisihan Piutang	1.270.633.316,97	1.991.147.555,21	(720.514.238,24)	(36,19)
8.1.9	Beban Lain-lain	125.819.999,93	584.791.922,83	(458.971.922,90)	0,00
8.2.1	Beban Transfer	257.194.808.600,00	75.886.949.500,00	181.307.859.100,00	238,92
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>104.528.082.136,92</b>	<b>51.237.492.197,32</b>	<b>53.290.589.939,60</b>	<b>104,01</b>
	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
7.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	87.760.063,00	911.501.110,00	(823.741.047,00)	(90,37)
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(87.760.063,00)</b>	<b>(911.501.110,00)</b>	<b>823.741.047,00</b>	<b>(90,37)</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>104.440.322.073,92</b>	<b>50.325.991.087,32</b>	<b>54.114.330.986,60</b>	<b>107,53</b>
	<b>POS LUAR BIASA</b>				
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Beban Luar Biasa	10.126.560.516,00	0,00	10.126.560.516,00	100,00
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	<b>(10.126.560.516,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.126.560.516,00)</b>	<b>100,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>94.313.761.557,92</b>	<b>50.325.991.087,32</b>	<b>43.987.770.470,60</b>	<b>87,41</b>

TARUTUNG, Agustus 2022  
**BUPATI TAPANULI UTARA**

**Drs. NIKSON NABABAN M.Si**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
 Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	21.703.779.853,00	19.678.100.705,83
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.470.983.860,00	4.601.554.356,83
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.961.082.639,00	7.557.286.367,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	128.655.774.080,40	101.188.923.370,78
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.129.177.555.060,00	809.570.224.807,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	224.378.807.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	49.633.810.683,00	44.839.871.597,00
Pendapatan Hibah - LRA	16.140.380.025,00	69.863.645.716,00
Pendapatan Lainnya - LRA	60.333.956.128,00	8.841.265.739,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>1.418.077.322.328,40</b>	<b>1.290.519.679.659,44</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	521.578.901.088,90	491.483.123.408,00
Belanja Barang dan Jasa	326.238.489.421,85	341.115.892.680,86
Belanja Bunga	0,00	604.339.500,00
Belanja Hibah	68.565.971.013,00	9.202.176.914,00
Belanja Bantuan Sosial	1.651.610.736,00	684.532.600,00
Belanja Tak Terduga	10.126.560.516,00	36.198.159.704,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	257.194.808.600,00	267.903.766.500,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang	3.782.593.361,45	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>1.189.138.934.737,20</b>	<b>1.147.191.991.306,86</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>228.938.387.591,20</b>	<b>143.327.688.352,58</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LRA	0,00	349.230.165,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>0,00</b>	<b>349.230.165,00</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	5.032.098.143,00	1.691.144.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.376.791.335,91	51.036.494.674,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.883.849.131,30	57.823.060.309,86
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.088.293.593,99	226.099.706.572,90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	537.225.490,00	2.509.573.782,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.536.977.814,00	6.559.428.709,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>295.455.235.508,20</b>	<b>345.719.408.048,36</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(295.455.235.508,20)</b>	<b>(345.370.177.883,36)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pinjaman Dalam Negeri	141.868.190.801,00	228.669.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>141.868.190.801,00</b>	<b>228.669.000.000,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>141.868.190.801,00</b>	<b>228.669.000.000,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.697.521.641,41	65.183.430.962,50
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<b>38.697.521.641,41</b>	<b>65.183.430.962,50</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.697.521.641,41	65.183.430.962,50
Koreksi SILPA	98.750.824,00	859.157.297,20
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<b>38.796.272.465,41</b>	<b>66.042.588.259,70</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(98.750.824,00)</b>	<b>(859.157.297,20)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	<b>75.252.592.060,00</b>	<b>25.767.353.172,02</b>
<b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>96.682.361.598,30</b>	<b>70.915.008.426,28</b>
<b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>171.934.953.658,30</b>	<b>96.682.361.598,30</b>
Kas di BUD	146.115.158.709,50	87.024.856.583,50
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	34.456.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.391.500,00	64.294.824,00
Kas di BLUD	22.945.373.571,00	4.409.924.361,00
Kas di Bendahara FKTP	1.882.826.085,00	4.114.796.073,00
Kas di Bendahara Dana BOS	986.203.792,80	1.034.033.756,80
Kas Lainnya	260.224.003,00	255.902.723,00
Setara Kas	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>172.195.177.661,30</b>	<b>96.938.264.321,30</b>

TARUTUNG, Agustus 2022  
**BUPATI TAPANULI UTARA**

**Drs. NIKSON NABABAN M.Si**





## BAB I PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2021.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Daerah sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara selaku entitas pelaporan



mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;



- c. Transfer;
  - d. Surplus/defisit;
  - e. Pembiayaan;
  - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL secara komparatif dengan periode sebelumnya terdiri dari:
- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
  - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan (SiLPA/SiKPA);
  - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
  - e. Lain-lain;
  - f. Saldo Anggaran Lebih akhir.
- Disamping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Neraca.  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
- a. Kas dan setara;
  - b. Investasi jangka pendek;
  - c. Piutang pajak dan bukan pajak;
  - d. Persediaan;
  - e. Investasi jangka panjang;
  - f. Aset tetap;
  - g. Aset Lainnya;
  - h. Kewajiban jangka pendek;
  - i. Kewajiban jangka panjang;
  - j. Ekuitas.
- 4) Laporan Operasional (LO)  
Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan LO dari kegiatan operasional;
  - b. Beban dari kegiatan operasional;
  - c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
  - d. Pos luar biasa;
  - e. Surplus/defisit LO.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)  
yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan:



- a. Aktifitas operasional;
  - b. Aktifitas investasi aset non keuangan;
  - c. Aktifitas pembiayaan;
  - d. Aktifitas transaksi non anggaran;
  - e. Saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:
- a. Ekuitas awal;
  - b. Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan;
  - c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan runtutan sebagai berikut:
- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, Undang-Undang/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
  - b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
  - c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 5 Tambahan lembaran negara nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;



36. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 7 (tujuh) Bab:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro.
- 2.2. Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2.3. Kebijakan Keuangan.
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

#### **Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target.

#### **Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Pelaporan.
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### **Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.
- 5.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- 5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca.
- 5.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional (LO).
- 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas (LAK).
- 5.6. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan.
- 6.2. Letak Geografis
- 6.3. Visi dan Misi
- 6.4. Organisasi dan Personalia
- 6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan

#### **Bab VII PENUTUP**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun 2021 dipengaruhi kondisi tahun 2020 karena proses perencanaan dan penganggaran tahun 2021 dilaksanakan pada tahun 2020.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Secara global perekonomian masyarakat selama Tahun 2021 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat adanya wabah pandemi Covid-19 dimana pada posisi tersebut Pemerintah fokus pada Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/SKB/TU/IX//2021 dan Nomor 06/PB/DPRD-TU/2021 tanggal 03 September 2021 tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 serta Nomor 13/SKB/TU/IX/2021 dan Nomor 07/PB/DPRD-TU/2021 tanggal 03 September 2021 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020, maka Tujuan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat;
2. Meningkatkan ketahanan pangan;
3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan petani;
4. Terwujudnya pengembangan komoditi unggulan daerah;
5. Peningkatan produk unggulan daerah;
6. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;
7. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas;
8. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM;
9. Meningkatnya jumlah wisatawan;
10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah;
11. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan;
12. Terwujudnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang baik;
13. Meningkatnya jumlah desa mandiri;
14. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, maka asumsi-asumsi dasar sebagai indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 yang digunakan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini, namun untuk data terkait dengan PDRB Harga Berlaku, PDRB Harga Konstan dan PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 yang disajikan dalam penyusunan LKPD ini merupakan angka sementara.

**Tabel 2.1 Indikator Makro Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Uraian	2021	2020
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	315.222 <sup>*)</sup>	312.758
2	PDRB Harga Berlaku (Rp milyar)	8.800,08 <sup>*)</sup>	8.274,43
3	PDRB Harga Konstan (Rp milyar) tahun dasar 2010	6.058,35 <sup>*)</sup>	5.851,40
4	PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	27,91 <sup>*)</sup>	26,14
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,54 <sup>*)</sup>	1,50
6	Tingkat Kemiskinan (%)	9,72	9,37
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,54	2,94
8	Angka Partisipasi Sekolah:		
	- 7 sampai dengan 12 Tahun (%)	99,41	99,40
	- 13 sampai dengan 15 Tahun (%)	89,22	99,03
	- 16 sampai dengan 18 Tahun (%)	90,55	86,61
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)	73,36	73,47

Sumber : Diolah dari Data BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Tapanuli Utara telah mengalami peningkatan walaupun lajunya tidaklah sangat signifikan hal ini diakibatkan masih fokusnya Pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pembatasan sosial di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi menjadi sangat terbatas. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara mengalami Peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1,50 menjadi 3,54 pada tahun 2021. Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2021 fokus pada pemulihan ekonomi nasional di daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 tidak terlepas dari adanya Pinjaman Daerah untuk mendukung PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Persero, sehingga Kabupaten Tapanuli Utara memiliki daya tahan terhadap aspek perubahan ekonomi global kondisi Makro maupun Mikro Ekonomi yang berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan relatif tidak begitu tinggi. Jumlah penduduk pada tahun 2021 bertambah sebanyak 2.464 jiwa dari Tahun 2020 menjadi 315.222 jiwa atau meningkat sebesar 0,79% sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.2 di bawah ini:

**Tabel 2.2 Kondisi Pertumbuhan Penduduk**

Uraian	Kondisi Tahunan	
	2021	2020
- Jumlah Penduduk	315.222	312.758
- Luas Wilayah	3.793,71 km <sup>2</sup>	3.793,71 km <sup>2</sup>
- Kepadatan Penduduk	83 jiwa/ km <sup>2</sup>	82 jiwa/ km <sup>2</sup>

Sumber : Diolah dari Data BPS Kabupaten Tapanuli Utara

b. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, dimana



pertumbuhan PDRB suatu daerah merupakan gambaran pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana perhitungannya didasarkan pada 2 (dua) pola yaitu:

- 1) PDRB atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun berkenaan/ berjalan. Informasi yang dapat diperoleh antara lain kinerja ekonomi, struktur ekonomi dan pendapatan per-kapita penduduk.
- 2) PDRB atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) dihitung berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun tertentu (dasar). Informasi yang diperoleh antara lain kinerja ekonomi riil, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita riil suatu daerah.

Secara keseluruhan struktur ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Besaran Kontribusi Tiap Sektor/Lapangan Usaha

Sektor/Lapangan Usaha	Besaran Kontribusi 2020	Besaran Kontribusi 2021
Pertanian dan Kehutanan	43.31	43.91
Pertambangan dan Penggalian	0.07	0.07
Industri Pengolahan	2.27	2.31
Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0.10
Pengadaan Air, Pengelolaan	0.10	0.10
Konstruksi	14.14	14.19
Perdagangan Besar dan Eceran	15.68	15.84
Transportasi dan Pergudangan	4.86	4.80
Penyediaan Akomodasi dan Makan	2.45	2.36
Informasi dan Komunikasi	0.81	0.82
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.61	1.59
Real Estate	2.39	2.32
Jasa Perusahaan	0.31	0.31
Administrasi Pemerintahan	9.43	8.88
Jasa Pendidikan	1.61	1.56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.73	0.70
Jasa lainnya	0.13	0.13
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data BPS Kabupaten Tapanuli Utara.

Selama periode 2020-2021, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan konstan terus mengalami peningkatan seperti terlihat dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB

URAIAN	TAHUN		KENAIKAN PERTUMBUHAN (%) 2021
	2020	2021	
<b>&gt; PDRB-ADHB</b>			
PDRB (milyar)	8.274,43	8.800,08	6,35
Penduduk pertengahan tahun	312.758	315.222	0,79
PDRB Per Kapita	26.456.334	27.917.087	5,52
<b>&gt; PDRB-ADHK</b>			
PDRB (milyar)	5.851,40	6.058,35	3,54
Penduduk pertengahan tahun	312.758	315.222	0,79
PDRB Per Kapita	18.709.034	19.219.312	2,73

Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara.



c. Perkembangan Investasi.

Perkembangan investasi dalam Tahun 2021 belum banyak mengalami peningkatan dari tahun lalu, hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya bencana wabah pandemi Covid-19 yang memaksa sektor investasi tidak dapat memberi kontribusi baik secara nasional maupun tingkat daerah dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Tahun 2021 dan perkiraan ke tahun berikutnya terlihat bahwa kegiatan investasi masih cenderung bersumber dari sektor publik, baik melalui APBD Kabupaten Tapanuli Utara, APBD Provinsi Sumatera Utara maupun APBN.

2.2. Perubahan APBD dan Penjelasan.

Secara umum P-APBD Tahun Anggaran 2021 meningkat dari APBD Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5 Perubahan APBD TA 2021

No	Uraian	APBD TA 2021	P-APBD TA 2021
1.	Pendapatan	1.338.912.320.845,00	1.351.525.305.738,00
2.	Belanja	1.507.991.263.458,00	1.600.666.840.823,00
3.	Surplus/(Defisit)	(169.078.942.613,00)	(249.141.535.085,00)
4.	Pembiayaan:		
	a. Penerimaan	180.949.982.113,00	260.549.552.399,00
	b. Pengeluaran	11.871.039.500,00	11.408.017.314,00
5.	Pembiayaan netto	169.078.942.613,00	249.141.535.085,00
6.	SILPA setelah Perubahan	0,00	0,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara.

1) Perubahan Pendapatan Daerah.

Target pendapatan daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 meningkat 1% dari Rp1.338.912.320.845,00 menjadi Rp1.351.525.305.738,00 atau naik sebesar Rp12.612.984.893,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bentuk dan susunan Pendapatan Daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perbandingan anggaran pendapatan dalam APBD TA. 2021 dengan rencana pendapatan pada P-APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.6 Perubahan Pendapatan Daerah TA 2021

No.	Uraian	APBD 2021	P-APBD 2021	Bertambah/ (Berkurang)
1.	Pendapatan Asli Daerah	131.358.390.527,00	128.523.314.000,00	(2.835.076.527,00)
	a. Pajak Daerah	21.349.468.082,00	19.167.598.082,00	(2.181.870.000,00)
	b. Retribusi Daerah	7.149.860.000,00	6.427.857.200,00	(722.002.800,00)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.607.286.366,00	7.086.082.639,00	(521.203.727,00)
	d. Lain-lain PAD yang sah	95.251.776.079,00	95.841.776.079,00	590.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer	1.133.397.387.636,00	1.152.845.449.056,00	19.448.061.420,00
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.390.537.000,00	1.105.839.096.306,00	12.448.559.306,00
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.006.850.636,00	47.006.352.750,00	6.999.502.114,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	74.156.542.682,00	70.156.542.682,00	(4.000.000.000,00)
	a. Pendapatan Hibah	16.745.942.682,00	12.745.942.682,00	(4.000.000.000,00)
	b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.410.600.000,00	57.410.600.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan (1+2+3)	1.338.912.320.845,00	1.351.525.305.738,00	12.612.984.893,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara.



2) Perubahan Belanja Daerah.

Jumlah anggaran belanja daerah pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 meningkat 6% dari Rp1.507.991.263.458,00 menjadi Rp1.600.666.840.823,00 bertambah Rp92.675.577.365,00. Jumlah belanja operasi pada P-APBD meningkat 1% dari Rp1.002.578.492.553,00 menjadi Rp1.007.654.617.305,00 atau naik sebesar Rp5.076.124.752,00. Belanja modal pada P-APBD meningkat 47% dari Rp220.699.521.797,00 menjadi Rp325.342.459.318,00 atau bertambah sebesar Rp104.642.937.521,00. Belanja tidak terduga pada P-APBD meningkat 5% dari Rp10.000.000.000,00 menjadi Rp10.474.955.600,00 atau bertambah sebesar Rp474.955.600,00. Belanja transfer pada P-APBD menurun sebesar 6% dari Rp274.713.249.108,00 menjadi Rp257.194.808.600,00 atau berkurang sebesar Rp17.518.440.508,00. Untuk lebih jelasnya perbandingan penggunaan anggaran belanja operasi dan belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Perubahan Belanja Daerah TA 2021

URAIAN	APBD 2021	P-APBD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
<b>1. Belanja Operasi</b>			
a. Belanja Pegawai	618.172.833.477,00	591.682.021.081,00	(26.490.812.396,00)
b. Belanja Barang dan Jasa	313.667.820.013,00	345.973.012.604,00	32.305.192.591,00
c. Belanja Hibah	69.207.839.063,00	68.228.072.820,00	(979.766.243,00)
d. Belanja Bantuan Sosial	1.530.000.000,00	1.771.510.800,00	241.510.800,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>1.002.578.492.553,00</b>	<b>1.007.654.617.305,00</b>	<b>5.076.124.752,00</b>
<b>2. Belanja Modal</b>			
a. Belanja Modal Tanah	2.450.000.000,00	5.617.168.962,00	3.167.168.962,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.752.479.705,00	45.867.814.863,00	8.115.335.158,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.208.214.779,00	107.635.148.114,00	16.426.933.335,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	88.941.945.113,00	165.556.513.979,00	76.614.568.866,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	346.882.200,00	665.813.400,00	318.931.200,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>220.699.521.797,00</b>	<b>325.342.459.318,00</b>	<b>104.642.937.521,00</b>
<b>3. Belanja Tidak Terduga</b>			
a. Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.474.955.600,00	474.955.600,00
<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.474.955.600,00</b>	<b>474.955.600,00</b>
<b>4. Belanja Transfer</b>			
a. Belanja Bagi Hasil	2.859.432.808,00	0,00	(2.859.432.808,00)
b. Belanja Bantuan Keuangan	271.853.816.300,00	257.194.808.600,00	(14.659.007.700,00)
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>274.713.249.108,00</b>	<b>257.194.808.600,00</b>	<b>(17.518.440.508,00)</b>

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara

3) Perubahan Pembiayaan

Jumlah anggaran pembiayaan netto pada P-APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 meningkat 47% dari Rp169.078.942.613,00 menjadi Rp249.141.535.085,00 bertambah Rp80.062.592.472,00.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan pada P-APBD meningkat 44% dari Rp180.949.982.113,00 menjadi Rp260.549.552.399,00 atau naik sebesar Rp79.599.570.286,00.



Jumlah Pengeluaran Pembiayaan pada P-APBD berkurang 4% dari Rp11.871.039.500,00 menjadi Rp11.408.017.314,00 atau berkurang sebesar Rp463.022.186,00.

### 2.3. Kebijakan Keuangan.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan kebijakan keuangan yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

##### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

##### a) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit



- 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
  - Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
  - Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.
  - Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
  - Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
  - Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
  - Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
  - Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM. n) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
    - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - (2) menghambat mobilitas penduduk;
    - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
    - (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
  - Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum di atas wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
  - Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan:  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
  - peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:  
Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - hasil kerja sama daerah;
  - jasa giro;
  - hasil pengelolaan dana bergulir;
  - pendapatan bunga;
  - penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang



- dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - pendapatan denda pajak daerah;
  - Pendapatan denda retribusi daerah;
  - pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - pendapatan dari pengembalian;
  - pendapatan dari BLUD; dan
  - pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## 2) Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

### a) Transfer Pemerintah Pusat.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

#### (1) Dana perimbangan.

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

##### (a) Dana Transfer Umum.

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

##### a. Dana Bagi Hasil (DBH).

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi /kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
    - ✓ DBH-Kehutanan;
    - ✓ DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
    - ✓ DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
    - ✓ DBH-Pertambangan Gas Bumi;
    - ✓ DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
    - ✓ DBH-Perikanan;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal



Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung



dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

a. DAK Fisik; dan

b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Insentif Daerah.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(3) Dana Otonomi Khusus.

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Penyaluran Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

(4) Dana Desa.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan



pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Transfer Antar Daerah.

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

(1) Pendapatan bagi hasil.

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2020, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Pendapatan bantuan keuangan.

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah



kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

a) Pendapatan hibah;

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

b) Dana darurat;

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu



ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- c) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penganggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan Infrastruktur Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Tambahan Infrastruktur dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- d) Bagi daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara





Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi. Penganggaran Bonus Produksi Panas Bumi berdasarkan penetapan yang diterbitkan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, PT SOL dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. Belanja Daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) pendidikan;
- b) kesehatan;
- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f) sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- a) tenaga kerja;
- b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) pangan;
- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;



- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i) perhubungan;
  - j) komunikasi dan informatika;
  - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l) penanaman modal;
  - m) kepemudaan dan olah raga;
  - n) statistik;
  - o) persandian;
  - p) kebudayaan;
  - q) perpustakaan; dan
  - r) kearsipan.
- b. Urusan pemerintahan pilihan.  
Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
- 1) kelautan dan perikanan;
  - 2) pariwisata;
  - 3) pertanian;
  - 4) kehutanan;
  - 5) energi dan sumber daya mineral;
  - 6) Perdagangan;
  - 7) perindustrian; dan
  - 8) transmigrasi.
- c. Unsur pendukung, meliputi:
- 1) sekretariat Daerah; dan
  - 2) sekretariat DPRD
- d. Unsur penunjang, meliputi:
- 1) perencanaan;
  - 2) keuangan;
  - 3) kepegawaian;
  - 4) pendidikan dan pelatihan;
  - 5) penelitian dan pengembangan;
  - 6) penghubung; dan
  - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. Unsur kewilayahan, meliputi:
- g. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. Unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan



penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.



- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



- atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
  - i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- 2) Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai



dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda, yaitu:

- (1) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- (1) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.



- (3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
  - (4) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
  - (5) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional, seperti:
    - (a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya;
    - (b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
    - (c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;
    - (d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
  - f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
    - (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
  - g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
    - (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
    - (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
    - (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek



urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19.

- h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya *riil* atau *lumpsum*, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:





- (1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- (2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19). Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
  - 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
  - 2) penghargaan atas suatu prestasi;
  - 3) beasiswa kepada masyarakat;
  - 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 3) Belanja Bunga.  
Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- 4) Belanja Subsidi.  
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.
  - a) Belanja hibah.  
Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah



memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - (2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - (3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - (a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - (b) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - (5) memenuhi persyaratan penerima hibah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari



calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan



- peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk



satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- 1) keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) keperluan mendesak; dan/atau
- 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- 1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau



- 2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (3) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- (4) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen). Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD. Selanjutnya,



penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2021. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2020, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2021. Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan.  
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
    - a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
    - b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;





- c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
- d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

### 3. Surplus dan Defisit.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan



pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA,

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana



cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah.

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;



- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.

Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah;
  - b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau
  - c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk



menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pengeluaran Pembiayaan Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

- 2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.



Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- 3) Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:
  - a) DAK;
  - b) pinjaman daerah; dan
  - c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
  - d) sumber dana cadangan; dan
  - e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nihil.
  - b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  - c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

#### 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengemban amanat untuk mencapai visi yakni Mewujudkan Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan, Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Daerah Wisata dimana misinya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

a. Pendidikan.

Selama periode Tahun 2019-2021 indikator kinerja pendidikan mengalami kondisi fluktuasi pencapaian sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal, dengan kondisi seperti pada tabel 2.8 s/d tabel 2.9 di bawah ini:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK).

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Kasar

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2019	2020	2021
1	SD/MI/Paket A	113,72	113,17	112,06
2	SMP/MTS/Paket B	92,64	95,67	91,92
3	SMA/MA/SMK/Paket C	97,86	91,91	95,67

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.





2) Angka Partisipasi Murni (APM).

Tabel 2.9 Angka Partisipasi Murni

No	Indikator Kinerja	Tahun / %		
		2019	2020	2021
1	SD/MI/Paket A	99,35	99,40	99,41
2	SMP/MTS/Paket B	88,20	88,80	89,22
3	SMA/MA/SMK/Paket C	78,23	78,89	90,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

b. Kesehatan.

Pencapaian kinerja derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terutama angka mortalitas selama periode 2019-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (Kasus)	27/1000 KH	50/1000 KH	3/1000 KH
2	Angka Kematian Balita (Kasus)	6/1000 KH	2/1000 KH	1/1000 KH
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Kasus)	4/100000 KH	8/100000 KH	5/100000 KH
4	Angka Harapan Hidup	68,46	68,63	68,76

Sumber: BPS Kab. Tapanuli Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Indikator kinerja kesehatan Tahun 2021 mengalami perbaikan yang signifikan antara lain adalah menurunnya kasus kematian balita dari 2 kasus pada Tahun 2020 menjadi 1 kasus dalam Tahun 2021, kemudian kematian bayi Tahun 2021 turun menjadi 3 Kasus Kematian Bayi per seribu kelahiran hidup, dimana pada tahun 2020 sebanyak 50 kematian bayi per seribu kelahiran, kemudian angka kemaitain Ibu melahirkan juga mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 5 kematian ibu melahirkan yang dilaporkan dari 8 kasus pada tahun 2021 serta meningkatnya Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara dari 68,63 pada tahun 2020 menjadi 68,76 pada tahun 2021. Hal ini dapat dicapai dengan terealisasinya berbagai program antara lain:

- Adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu berupa pembangunan baru dan rehabilitasi gedung kesehatan serta pengadaan alat-alat kesehatan;
- Peningkatan upaya promosi kesehatan baik melalui penyuluhan dan pengadaan poster-poster kesehatan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan melalui pembinaan, pelatihan di tingkat Kabupaten dan Provinsi, peningkatan strata pendidikan petugas kesehatan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar;
- Meningkatnya kerja sama yang baik antar lintas sektor dengan tim penggerak PKK.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan *good governance*, maka tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Dalam konteks birokrasi pemerintah akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (*goal*)



yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, merupakan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, partisipatif dan bertanggungjawab dan pengawasan daerah, keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara masih terbatas pada sumber dana (*input*) dan keluaran (*output*) belum dapat menilai sampai dengan hasil (*outcome*). Penilaian capaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan belum dapat dilakukan mengingat belum dibangunnya sistem pengukuran data kinerja dan dibuatnya Standar Analisis Belanja (SAB) terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBN/APBD dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Kementerian/Lembaga/SKPD dalam satu tahun anggaran.

Penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan dikaitkan dengan kebijakan anggaran, komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai, jangka waktu pelaksanaannya, serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya, sehingga penerapan SAB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) mendorong setiap instansi untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatannya, (2) menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja, (3) mengurangi tumpang tindih belanja dalam kegiatan investasi dan non investasi.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

##### 3.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.418.077.300.228,40 atau 104,92% dari target sebesar Rp1.351.525.305.737,80. Rincian realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan TA 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.351.525.305.737,80</b>	<b>1.418.077.300.228,40</b>	<b>104,92</b>	<b>1.290.868.909.824,44</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>128.523.313.999,80</b>	<b>162.791.598.332,40</b>	<b>126,66</b>	<b>133.375.094.965,44</b>
- Pendapatan Pajak Daerah	19.167.598.082,00	21.703.779.853,00	113,23	19.678.100.705,83
- Pendapatan Retribusi Daerah	6.427.857.200,00	5.470.983.860,00	85,11	4.601.554.356,83
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.086.082.639,00	6.961.082.639,00	98,24	7.557.286.367,00
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.841.776.078,80	128.655.751.980,40	134,24	101.538.153.535,78
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.152.845.449.056,00</b>	<b>1.178.811.365.743,00</b>	<b>102,25</b>	<b>1.078.788.903.404,00</b>
- Dana Perimbangan	884.115.485.306,00	907.453.944.060,00	102,64	809.570.224.807,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	29.706.794.000,00	29.706.794.000,00	100,00	32.361.990.000,00
- Dana Desa	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00	100,00	192.016.817.000,00
- Pendapatan Bagi Hasil	47.006.352.750,00	49.633.810.683,00	105,59	44.839.871.597,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>70.156.542.682,00</b>	<b>76.474.336.153,00</b>	<b>109,01</b>	<b>78.704.911.455,00</b>
- Pendapatan Hibah	12.745.942.682,00	16.140.380.025,00	126,63	9.467.675.739,00
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.410.600.000,00	60.333.956.128,00	105,09	69.237.235.716,00

Sumber: Diolah dari data BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara.

##### 3.1.2. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.473.278.599.069,95 atau mencapai 92,04% dari anggaran sebesar Rp1.600.666.840.823,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rincian Realisasi Anggaran Belanja TA 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
<b>BELANJA</b>	<b>1.600.666.840.823,00</b>	<b>1.473.278.599.069,95</b>	<b>92,04</b>	<b>1.486.351.970.646,22</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.007.654.617.305,00</b>	<b>918.034.972.259,75</b>	<b>91,11</b>	<b>843.090.065.102,86</b>
Belanja Pegawai	591.682.021.081,00	521.578.901.088,90	88,15	491.483.123.408,00
Belanja Barang dan Jasa	345.973.012.604,00	326.238.489.421,85	94,30	341.115.892.680,86
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	604.339.500,00
Belanja Hibah	68.228.072.820,00	68.565.971.013,00	100,50	9.202.176.914,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
Belanja Bantuan Sosial	1.771.510.800,00	1.651.610.736,00	93,23	684.532.600,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>325.342.459.318,00</b>	<b>287.922.257.694,20</b>	<b>88,50</b>	<b>339.159.979.339,36</b>
Belanja Modal Tanah	5.617.168.962,00	5.032.098.143,00	89,58	1.691.144.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	45.867.814.863,00	41.380.791.335,91	90,22	51.036.494.674,60
Belanja Gedung dan Bangunan	107.635.148.114,00	102.883.849.131,30	95,59	57.823.060.309,86
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	165.556.513.979,00	138.088.293.593,99	83,41	226.099.706.572,90
Belanja Aset Tetap Lainnya	665.813.400,00	537.225.490,00	80,69	2.509.573.782,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.474.955.600,00</b>	<b>10.126.560.516,00</b>	<b>96,67</b>	<b>36.198.159.704,00</b>
Belanja Tidak Terduga	10.474.955.600,00	10.126.560.516,00	96,67	36.198.159.704,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>257.194.808.600,00</b>	<b>257.194.808.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>267.903.766.500,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	257.194.808.600,00	257.194.808.600,00	100,00	267.903.766.500,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Diolah dari data BPKPAD Kabupaten Tapanuli Utara

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan SKPD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut.

**Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan SKPD Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	(%)
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>1.003.661.503.356,00</b>	<b>901.874.168.126,45</b>	<b>(101.787.335.229,55)</b>	<b>89,86</b>
<b>1.01</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>464.747.030.729,00</b>	<b>412.566.722.034,69</b>	<b>(52.180.308.694,31)</b>	<b>88,77</b>
1.01.01	Dinas Pendidikan	464.747.030.729,00	412.566.722.034,69	(52.180.308.694,31)	88,77
<b>1.02</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>314.074.301.239,00</b>	<b>295.305.858.471,49</b>	<b>(18.768.442.767,51)</b>	<b>94,02</b>
1.02.01	Dinas Kesehatan	190.950.406.102,00	166.078.574.866,49	(24.871.831.235,51)	86,97
1.02.02	RSU Daerah Tarutung	123.123.895.137,00	129.227.283.605,00	6.103.388.468,00	104,96
<b>1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>151.403.829.449,00</b>	<b>123.746.457.663,06</b>	<b>(27.657.371.785,94)</b>	<b>81,73</b>
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.035.499.022,00	110.758.144.824,10	(27.277.354.197,90)	80,24
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.368.330.427,00	12.988.312.838,96	(380.017.588,04)	97,16
<b>1.04</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>	<b>45.825.081.511,00</b>	<b>44.155.161.561,75</b>	<b>(1.669.919.949,25)</b>	<b>96,36</b>
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45.825.081.511,00	44.155.161.561,75	(1.669.919.949,25)	96,36
<b>1.05</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>22.477.548.169,00</b>	<b>21.309.993.538,46</b>	<b>(1.167.554.630,54)</b>	<b>94,81</b>
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	11.985.508.850,00	11.589.800.795,40	(395.708.054,60)	96,70
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.119.036.600,00	2.916.329.668,00	(202.706.932,00)	93,50
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.373.002.719,00	6.803.863.075,06	(569.139.643,94)	92,28
<b>1.06</b>	<b>Sosial</b>	<b>5.133.712.259,00</b>	<b>4.789.974.857,00</b>	<b>(343.737.402,00)</b>	<b>93,30</b>
1.06.01	Dinas Sosial	5.133.712.259,00	4.789.974.857,00	(343.737.402,00)	93,30
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>87.700.211.447,00</b>	<b>79.951.241.233,57</b>	<b>(7.748.970.213,43)</b>	<b>91,16</b>
<b>2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>3.695.888.450,00</b>	<b>3.352.192.652,00</b>	<b>(343.695.798,00)</b>	<b>90,70</b>
2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan	3.695.888.450,00	3.352.192.652,00	(343.695.798,00)	90,70
<b>2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>419.735.800,00</b>	<b>414.997.800,00</b>	<b>(4.738.000,00)</b>	<b>98,87</b>
2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	419.735.800,00	414.997.800,00	(4.738.000,00)	98,87
<b>2.03</b>	<b>Pangan</b>	<b>4.582.416.247,00</b>	<b>4.374.922.354,00</b>	<b>(207.493.893,00)</b>	<b>95,47</b>
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.582.416.247,00	4.374.922.354,00	(207.493.893,00)	95,47
<b>2.04</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>6.204.455.862,00</b>	<b>5.426.248.202,00</b>	<b>(778.207.660,00)</b>	<b>87,46</b>
2.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.204.455.862,00	5.426.248.202,00	(778.207.660,00)	87,46
<b>2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>11.875.617.150,00</b>	<b>11.223.880.491,00</b>	<b>(651.736.659,00)</b>	<b>94,51</b>
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	11.875.617.150,00	11.223.880.491,00	(651.736.659,00)	94,51
<b>2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catpil</b>	<b>4.988.819.350,00</b>	<b>4.690.851.578,00</b>	<b>(297.967.772,00)</b>	<b>94,03</b>
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.988.819.350,00	4.690.851.578,00	(297.967.772,00)	94,03
<b>2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>10.115.762.899,00</b>	<b>9.138.645.516,00</b>	<b>(977.117.383,00)</b>	<b>90,34</b>
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.115.762.899,00	9.138.645.516,00	(977.117.383,00)	90,34
<b>2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>12.052.626.700,00</b>	<b>10.853.592.952,00</b>	<b>(1.199.033.748,00)</b>	<b>90,05</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	(%)
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.052.626.700,00	10.853.592.952,00	(1.199.033.748,00)	90,05
<b>2.09</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>4.814.846.112,00</b>	<b>4.547.813.280,07</b>	<b>(267.032.831,93)</b>	<b>94,45</b>
2.09.01	Dinas Perhubungan	4.814.846.112,00	4.547.813.280,07	(267.032.831,93)	94,45
<b>2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>9.595.118.077,00</b>	<b>8.865.692.719,00</b>	<b>(729.425.358,00)</b>	<b>92,40</b>
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	9.595.118.077,00	8.865.692.719,00	(729.425.358,00)	92,40
<b>2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>3.975.928.700,00</b>	<b>3.413.418.224,00</b>	<b>(562.510.476,00)</b>	<b>85,85</b>
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.975.928.700,00	3.413.418.224,00	(562.510.476,00)	85,85
<b>2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>3.683.404.450,00</b>	<b>3.166.868.429,50</b>	<b>(516.536.020,50)</b>	<b>85,98</b>
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.683.404.450,00	3.166.868.429,50	(516.536.020,50)	85,98
<b>2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>6.918.109.200,00</b>	<b>6.255.317.708,00</b>	<b>(662.791.492,00)</b>	<b>90,42</b>
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	6.918.109.200,00	6.255.317.708,00	(662.791.492,00)	90,42
<b>2.14</b>	<b>Statistik</b>	<b>549.873.800,00</b>	<b>459.134.888,00</b>	<b>(90.738.912,00)</b>	<b>83,50</b>
2.14.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	549.873.800,00	459.134.888,00	(90.738.912,00)	83,50
<b>2.15</b>	<b>Persandian</b>	<b>64.290.800,00</b>	<b>58.912.800,00</b>	<b>(5.378.000,00)</b>	<b>91,63</b>
2.15.01	Dinas Komunikasi dan Informasi	64.290.800,00	58.912.800,00	(5.378.000,00)	91,63
<b>2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>315.000.100,00</b>	<b>300.049.700,00</b>	<b>(14.950.400,00)</b>	<b>95,25</b>
2.16.01	Dinas Pendidikan	315.000.100,00	300.049.700,00	(14.950.400,00)	95,25
<b>2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>3.701.437.750,00</b>	<b>3.282.912.758,00</b>	<b>(418.524.992,00)</b>	<b>88,69</b>
2.17.01	Dinas Perpustakaan	3.701.437.750,00	3.282.912.758,00	(418.524.992,00)	88,69
<b>2.18</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>146.880.000,00</b>	<b>125.789.182,00</b>	<b>(21.090.818,00)</b>	<b>85,64</b>
2.18.01	Dinas Perpustakaan	146.880.000,00	125.789.182,00	(21.090.818,00)	85,64
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>85.237.754.288,00</b>	<b>81.159.106.848,97</b>	<b>(4.078.647.439,03)</b>	<b>95,21</b>
<b>3.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>1.942.299.500,00</b>	<b>1.910.660.519,00</b>	<b>(31.638.981,00)</b>	<b>98,37</b>
3.01.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.942.299.500,00	1.910.660.519,00	(31.638.981,00)	98,37
<b>3.02</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>11.149.698.537,00</b>	<b>10.349.292.785,87</b>	<b>(800.405.751,13)</b>	<b>92,82</b>
3.02.01	Dinas Pariwisata	11.149.698.537,00	10.349.292.785,87	(800.405.751,13)	92,82
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>	<b>62.936.884.137,00</b>	<b>60.429.310.198,88</b>	<b>(2.507.573.938,12)</b>	<b>96,02</b>
3.03.01	Dinas Pertanian	62.936.884.137,00	60.429.310.198,88	(2.507.573.938,12)	96,02
<b>3.06</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>2.660.945.950,00</b>	<b>2.259.244.796,22</b>	<b>(401.701.153,78)</b>	<b>84,90</b>
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.660.945.950,00	2.259.244.796,22	(401.701.153,78)	84,90
<b>3.07</b>	<b>Perindustrian</b>	<b>6.547.926.164,00</b>	<b>6.210.598.549,00</b>	<b>(337.327.615,00)</b>	<b>94,85</b>
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.547.926.164,00	6.210.598.549,00	(337.327.615,00)	94,85
<b>4</b>	<b>Unsur pendukung Urusan Pemerintahan</b>	<b>424.067.371.732,00</b>	<b>410.290.082.860,96</b>	<b>(13.777.288.871,04)</b>	<b>96,75</b>
<b>4.01</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>41.816.027.017,00</b>	<b>39.815.911.081,00</b>	<b>(2.000.115.936,00)</b>	<b>95,22</b>
4.01.03	Sekretariat Daerah	41.816.027.017,00	39.815.911.081,00	(2.000.115.936,00)	95,22
<b>4.02</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>9.135.428.597,00</b>	<b>7.436.003.279,00</b>	<b>(1.699.425.318,00)</b>	<b>81,40</b>
4.02.01	Inspektorat	9.135.428.597,00	7.436.003.279,00	(1.699.425.318,00)	81,40
<b>4.03</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>7.222.958.262,00</b>	<b>5.893.928.568,00</b>	<b>(1.329.029.694,00)</b>	<b>81,60</b>
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.222.958.262,00	5.893.928.568,00	(1.329.029.694,00)	81,60
<b>4.04</b>	<b>Keuangan</b>	<b>281.520.131.660,00</b>	<b>279.573.816.716,00</b>	<b>(1.946.314.944,00)</b>	<b>99,31</b>
4.04.05	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	281.520.131.660,00	279.573.816.716,00	(1.946.314.944,00)	99,31
<b>4.05</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>4.476.490.650,00</b>	<b>3.963.350.846,00</b>	<b>(513.139.804,00)</b>	<b>88,54</b>
4.05.06	Badan Kepegawaian Daerah	4.476.490.650,00	3.963.350.846,00	(513.139.804,00)	88,54
<b>4.06</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>906.043.400,00</b>	<b>898.815.000,00</b>	<b>(7.228.400,00)</b>	<b>99,20</b>
4.06.01	Badan Kepegawaian Daerah	906.043.400,00	898.815.000,00	(7.228.400,00)	99,20
<b>4.07</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>118.367.300,00</b>	<b>57.086.000,00</b>	<b>(61.281.300,00)</b>	<b>48,23</b>
4.07.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	118.367.300,00	57.086.000,00	(61.281.300,00)	48,23
<b>4.08</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>34.068.844.954,00</b>	<b>31.313.311.132,00</b>	<b>(2.755.533.822,00)</b>	<b>91,91</b>
4.08.01	Sekretariat DPRD	34.068.844.954,00	31.313.311.132,00	(2.755.533.822,00)	91,91
<b>4.11</b>	<b>Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan</b>	<b>43.156.995.529,00</b>	<b>39.800.795.617,96</b>	<b>(3.356.199.911,04)</b>	<b>92,22</b>
4.11.01	Kantor Kecamatan Tarutung	11.932.772.429,00	11.509.424.328,00	(423.348.101,00)	96,45
4.11.02	Kantor Kecamatan Siatas Barita	1.762.410.500,00	1.642.574.324,00	(119.836.176,00)	93,20
4.11.03	Kantor Kecamatan Adiankoting	1.610.103.850,00	1.476.247.678,00	(133.856.172,00)	91,69
4.11.04	Kantor Kecamatan Sipoholon	3.588.058.475,00	3.346.381.966,02	(241.676.508,98)	93,26
4.11.05	Kantor Kecamatan Pahae Julu	3.546.499.962,00	3.414.653.649,96	(131.846.312,04)	96,28
4.11.06	Kantor Kecamatan Pahae Jae	2.911.227.945,00	2.599.151.309,98	(312.076.635,02)	89,28
4.11.07	Kantor Kecamatan Purbatua	1.525.589.406,00	1.283.371.911,00	(242.217.495,00)	84,12
4.11.08	Kantor Kecamatan Simangumban	1.404.218.002,00	1.169.835.779,00	(234.382.223,00)	83,31
4.11.09	Kantor Kecamatan Sipahutar	2.375.002.700,00	2.149.724.040,00	(225.278.660,00)	90,51
4.11.10	Kantor Kecamatan Pangaribuan	1.777.936.400,00	1.614.127.806,00	(163.808.594,00)	90,79



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	(%)
4.11.11	Kantor Kecamatan Garoga	2.132.095.200,00	1.985.603.644,00	(146.491.556,00)	93,13
4.11.12	Kantor Kecamatan Siborongborong	3.868.511.110,00	3.581.896.669,00	(286.614.441,00)	92,59
4.11.13	Kantor Kecamatan Pagaran	1.570.811.100,00	1.433.674.837,00	(137.136.263,00)	91,27
4.11.14	Kantor Kecamatan Parmonangan	1.425.256.750,00	1.166.902.278,00	(258.354.472,00)	81,87
4.11.15	Kantor Kecamatan Muara	1.726.501.700,00	1.427.225.398,00	(299.276.302,00)	82,67
<b>4.12</b>	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>1.646.084.363,00</b>	<b>1.537.064.621,00</b>	<b>(109.019.742,00)</b>	<b>93,38</b>
4.14.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.646.084.363,00	1.537.064.621,00	(109.019.742,00)	93,38

Untuk realisasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	(%)
<b>1</b>	<b>Pelayanan Umum</b>	<b>437.359.866.293,00</b>	<b>422.641.470.182,96</b>	<b>(14.718.396.110,04)</b>	<b>96,63</b>
1.2.03	Pangan	4.582.416.247,00	4.374.922.354,00	(207.493.893,00)	95,47
1.2.10	Komunikasi dan Informatika	9.595.118.077,00	8.865.692.719,00	(729.425.358,00)	92,40
1.2.14	Statistik	549.873.800,00	459.134.888,00	(90.738.912,00)	83,50
1.2.15	Persandian	64.290.800,00	58.912.800,00	(5.378.000,00)	91,63
1.2.18	Kearsipan	146.880.000,00	125.789.182,00	(21.090.818,00)	85,64
1.4.01	Administrasi Pemerintahan	41.816.027.017,00	39.819.911.081,00	(1.996.115.936,00)	95,23
1.4.02	Pengawasan	9.135.428.597,00	7.436.003.279,00	(1.699.425.318,00)	81,40
1.4.03	Perencanaan	7.222.958.262,00	5.893.928.568,00	(1.329.029.694,00)	81,60
1.4.04	Keuangan	281.520.131.660,00	279.573.816.716,00	(1.946.314.944,00)	99,31
1.4.05	Kepegawaian	4.476.490.650,00	3.963.350.846,00	(513.139.804,00)	88,54
1.4.06	Pendidikan dan Pelatihan	906.043.400,00	898.815.000,00	(7.228.400,00)	99,20
1.4.07	Penelitian dan Pengembangan	118.367.300,00	57.086.000,00	(61.281.300,00)	48,23
1.4.08	Sekretariat DPRD	34.068.844.954,00	31.313.311.132,00	(2.755.533.822,00)	91,91
1.4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	43.156.995.529,00	39.800.795.617,96	(3.356.199.911,04)	92,22
<b>2</b>	<b>Ketertiban dan Keamanan</b>	<b>24.123.632.532,00</b>	<b>22.847.058.159,46</b>	<b>(1.276.574.372,54)</b>	<b>94,71</b>
3.1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.477.548.169,00	21.309.993.538,46	(1.167.554.630,54)	94,81
3.4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	1.646.084.363,00	1.537.064.621,00	(109.019.742,00)	93,38
<b>3</b>	<b>Ekonomi</b>	<b>100.373.886.362,00</b>	<b>94.428.752.164,67</b>	<b>(5.945.134.197,33)</b>	<b>94,08</b>
4.2.01	Tenaga Kerja	3.695.888.450,00	3.352.192.652,00	(343.695.798,00)	90,70
4.2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.115.762.899,00	9.138.645.516,00	(977.117.383,00)	90,34
4.2.09	Perhubungan	4.814.846.112,00	4.547.813.280,07	(267.032.831,93)	94,45
4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.975.928.700,00	3.413.418.224,00	(562.510.476,00)	85,85
4.2.12	Penanaman Modal	3.683.404.450,00	3.166.868.429,50	(516.536.020,50)	85,98
4.3.01	Kelautan dan Perikanan	1.942.299.500,00	1.910.660.519,00	(31.638.981,00)	98,37
4.3.03	Pertanian	62.936.884.137,00	60.429.310.198,88	(2.507.573.938,12)	96,02
4.3.06	Perdagangan	2.660.945.950,00	2.259.244.796,22	(401.701.153,78)	84,90
4.3.07	Perindustrian	6.547.926.164,00	6.210.598.549,00	(337.327.615,00)	94,85
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>18.080.073.012,00</b>	<b>16.650.128.693,00</b>	<b>(1.429.944.319,00)</b>	<b>92,09</b>
5.2.04	Pertanahan	6.204.455.862,00	5.426.248.202,00	(778.207.660,00)	87,46
5.2.05	Lingkungan Hidup	11.875.617.150,00	11.223.880.491,00	(651.736.659,00)	94,51
<b>6</b>	<b>Perumahan dan Fasilitas Umum</b>	<b>197.228.910.960,00</b>	<b>167.901.619.224,81</b>	<b>(29.327.291.735,19)</b>	<b>85,13</b>
6.1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.403.829.449,00	123.746.457.663,06	(27.657.371.785,94)	81,73
6.1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	45.825.081.511,00	44.155.161.561,75	(1.669.919.949,25)	96,36
<b>7</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>326.126.927.939,00</b>	<b>306.159.451.423,49</b>	<b>(19.967.476.515,51)</b>	<b>93,88</b>
7.1.02	Kesehatan	314.074.301.239,00	295.305.858.471,49	(18.768.442.767,51)	94,02
7.2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.052.626.700,00	10.853.592.952,00	(1.199.033.748,00)	90,05
<b>8</b>	<b>Pariwisata dan Budaya</b>	<b>11.464.698.637,00</b>	<b>10.649.342.485,87</b>	<b>(815.356.151,13)</b>	<b>92,89</b>
8.2.16	Kebudayaan	315.000.100,00	300.049.700,00	(14.950.400,00)	95,25
8.3.02	Pariwisata	11.149.698.537,00	10.349.292.785,87	(800.405.751,13)	92,82
<b>10</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>475.366.577.679,00</b>	<b>422.104.952.500,69</b>	<b>(53.261.625.178,31)</b>	<b>88,80</b>
10.1.01	Pendidikan	464.747.030.729,00	412.566.722.034,69	(52.180.308.694,31)	88,77



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Uraian Fungsi, Urusan dan Bidang	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Bertambah/berkurang	(%)
10.2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.918.109.200,00	6.255.317.708,00	(662.791.492,00)	90,42
10.2.17	Perpustakaan	3.701.437.750,00	3.282.912.758,00	(418.524.992,00)	88,69
<b>11</b>	<b>Perlindungan Sosial</b>	<b>10.542.267.409,00</b>	<b>9.895.824.235,00</b>	<b>(646.443.174,00)</b>	<b>93,87</b>
11.1.06	Sosial	5.133.712.259,00	4.789.974.857,00	(343.737.402,00)	93,30
11.2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	419.735.800,00	414.997.800,00	(4.738.000,00)	98,87
11.2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.988.819.350,00	4.690.851.578,00	(297.967.772,00)	94,03
<b>JUMLAH</b>		<b>1.600.666.840.823,00</b>	<b>1.473.278.599.069,95</b>	<b>(127.388.241.753,05)</b>	<b>92,04</b>

### 3.1.3. Realisasi Pembiayaan.

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp238.451.801.575,30 atau 91,52% dari anggaran sebesar Rp260.549.552.399,20 sedangkan realisasi Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp11.319.571.175,45 atau 99,22% dari anggaran sebesar Rp11.408.017.314,00 Rincian lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5 Rincian Realisasi Anggaran Pembiayaan TA 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>260.549.552.399,20</b>	<b>238.451.801.575,30</b>	<b>91,52</b>	<b>298.724.851.129,08</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	96.682.361.598,20	96.583.610.774,30	99,90	70.055.851.129,08
Pinjaman Dalam Negeri	163.867.190.801,00	141.868.190.801,00	86,58	228.669.000.000,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>11.408.017.314,00</b>	<b>11.319.571.175,45</b>	<b>99,22</b>	<b>6.559.428.709,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.536.977.814,00	7.536.977.814,00	100,00	6.559.428.709,00
Pembayaran Utang Beban	3.871.039.500,00	3.782.593.361,45	97,72	0,00

## 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target.

### 3.2.1. Pendapatan Daerah.

Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Transfer masih mendominasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara dengan kontribusi terbanyak yaitu 83,13%, disusul Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,48% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah memberikan kontribusi sebesar 5,39% dari total pendapatan. Sedangkan rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Dana Perimbangan hanya sebesar 17,94%. Dengan kata lain ketergantungan finansial Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terhadap sumber pendanaan dari pendapatan dana perimbangan masih sangat tinggi.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain:

- Pemutaharan data PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan;
- Subjek/objek/petugas pemungut pajak/retribusi daerah belum jujur dalam mengisi potensi pajak/retribusi daerah;
- Penetapan target penerimaan dari pajak/retribusi daerah masih ditetapkan dengan perkiraan yang tidak terukur;
- Sering terjadi keterlambatan penyeteroran PAD ke Kas Daerah.

### 3.2.2. Belanja Daerah.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait penanganan pandemi Covid-19 diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

corona virus disease-19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh suatu daerah, beberapa hal tersebut yaitu:

- a. Melakukan pengutamakan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2021. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid-19 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
- b. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia
- c. Sejak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) ditetapkan sebagai bencana nasional, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan *refocusing*, realokasi anggaran untuk mendanai penanganan Covid-19 dan juga melakukan *refocusing* untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan demikian anggaran belanja difokuskan untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) serta pemulihan ekonomi nasional untuk menggairahkan kembali usaha masyarakat pada semua lini;
- d. Sumber Pendapatan transfer pusat yang beberapa kali mengalami *refocussing*, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan *realokasi* anggaran sehingga beberapa kegiatan yang prioritas mengalami penundaan pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2020;
- e. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang memiliki RSUD yang merupakan salah satu Rumah Sakit Rujukan Penanganan Covid-19 harus menyediakan anggaran yang lebih banyak pada saat pandemi Covid-19 yang difokuskan untuk pembenahan sarana dan prasarana RSUD Tarutung;
- f. Belum semua aparat pengelola keuangan khususnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) memahami dengan baik mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat keterlambatan baik dalam proses pencairan keuangan maupun penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, adanya berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat teknis maupun administratif yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan;
- g. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, sebagian besar SKPD masih mengalami kendala dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual tersebut. Seperti proses jurnal, pemahaman antara beban dan belanja, pengakuan aset tetap, penyusutan aset tetap, pencatatan persediaan dan lainnya;





- h. Sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan fisik belum optimal, sehingga berdampak pada penyelesaian kegiatan yang mengalami kemunduran dari jadwal. Selain itu akan berakibat pada terlambatnya proses penatausahaan dan pelaporan.
- i. Kurang tersedianya informasi keuangan yang cepat dan akurat, misalnya informasi tentang jenis penerimaan pada pos-pos pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ketika dananya diterima pada kas daerah, informasi tentang jenis penerimaan baru diterima setelah beberapa minggu. Hal ini menjadi kendala dalam penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) serta kendala dalam penyerapan anggaran serta penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yang cepat dan akurat;
- j. Kurangnya kesadaran masyarakat dan lembaga penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam mempertanggungjawabkan dana yang sudah diterima dan dikelolanya, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran;
- k. Kapasitas dukungan infrastruktur yang belum terukur, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, terutama antar desa/kecamatan yang memiliki potensi yang tinggi serta pengembangan akses ke lokasi wisata;
- l. Belum maksimalnya revitalisasi pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan serta kecukupan pangan termasuk di dalam agropolitan dan minapolitan;
- m. Risiko bencana alam;
- n. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih belum sesuai dengan rencana tata ruang.

### 3.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dimana pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendapatkan Pinjaman Daerah untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, dimana sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 78 Tanggal 17 September 2021 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp73.330.000.000,00.

Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan, sedangkan Bunga pinjaman sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah.

Struktur akuntansi pemerintahan daerah sesuai Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 189 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara meliputi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor.

Tabel 4.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	1.01.1	Dinas Pendidikan
2	1.02.1	Dinas Kesehatan
3	1.02.2	RSU Daerah Tarutung
4	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.04.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	1.05.1	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.05.2	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8	1.06.1	Dinas Sosial
9	2.01.1	Dinas Ketenagakerjaan
10	2.03.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
11	2.05.1	Dinas Lingkungan Hidup
12	2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	2.08.1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	2.09.1	Dinas Perhubungan
16	2.10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	2.11.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
19	2.13.1	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	2.17.1	Dinas Perpustakaan
21	3.02.1	Dinas Pariwisata
22	3.03.1	Dinas Pertanian
23	3.04.7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24	4.01.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	4.01.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Kode	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
26	4.01.3	Sekretariat Daerah
27	4.01.4	Sekretariat DPRD
28	4.01.9	Kantor Kecamatan Tarutung
29	4.01.10	Kantor Kecamatan Siatas Barita
30	4.01.11	Kantor Kecamatan Adiankoting
31	4.01.12	Kantor Kecamatan Sipoholon
32	4.01.13	Kantor Kecamatan Pahae Julu
33	4.01.14	Kantor Kecamatan Pahae Jae
34	4.01.15	Kantor Kecamatan Purbatua
35	4.01.16	Kantor Kecamatan Simangumban
36	4.01.17	Kantor Kecamatan Sipahutar
37	4.01.18	Kantor Kecamatan Pangaribuan
38	4.01.19	Kantor Kecamatan Garoga
39	4.01.20	Kantor Kecamatan Siborongborong
40	4.01.21	Kantor Kecamatan Pagaran
41	4.01.22	Kantor Kecamatan Parmonangan
42	4.01.23	Kantor Kecamatan Muara
43	4.01.24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44	4.02.1	Inspektorat
45	4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
46	4.04.5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
47	4.05.1	Badan Kepegawaian Daerah

Laporan Keuangan yang dibuat oleh SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD sebagai BUD yang dilakukan oleh entitas pelaporan pemerintah daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Produk dari entitas pelaporan ini adalah laporan keuangan konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan daerah adalah ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

##### **a. Basis Akuntansi.**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akruaI, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Namun demikian dalam hal penyusunan anggaran dan penyusunan LRA disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Historis.

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi.

Bagi Pemerintah Daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal.

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

e. Prinsip Periodisitas.

Kegiatan akuntansi dan pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama



yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi.

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau CaLK.

h. Prinsip Penyajian Wajar.

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

#### 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran.

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA;
- b) Belanja;



- c) Surplus/Defisit-LRA;
- d) Pembiayaan; dan
- e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Entitas akuntansi/pelaporan menyajikan LRA sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a) SAL awal;
- b) Penggunaan SAL;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) SAL akhir.

Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam CaLK. Format LPSAL mengacu pada contoh format perubahan SAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, namun demikian format tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan apabila ada transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format laporan tersebut.

c. Neraca.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) aset tetap;
- g) aset lainnya
- h) kewajiban jangka pendek;
- i) kewajiban jangka panjang; dan
- j) ekuitas.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Format Neraca mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format neraca dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format neraca tersebut.

d. Laporan Operasional.

LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos tidak terduga, pos tidak terduga, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) cakupan entitas pelaporan;
- c) periode yang dicakup;
- d) mata uang pelaporan; dan
- e) satuan angka yang digunakan.

LO menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b) Beban dari kegiatan operasional;
- c) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus/defisit sebelum Pos Tidak Terduga;
- f) Pos Tidak Terduga, dan
- g) Surplus/defisit-LO.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.

Format LO mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi-transaksi yang belum terakomodir dalam format tersebut.

e. Laporan Arus Kas.

LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris.

a) Aktivitas Operasi.

- (1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- (2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- (a) Penerimaan Pajak Daerah;



- (b) Penerimaan Retribusi Daerah;
  - (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - (d) Penerimaan Transfer;
  - (e) Penerimaan Hibah;
  - (f) Penerimaan Dana Darurat; dan
  - (g) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Tidak Terduga.
- (3) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
- (a) Belanja Pegawai;
  - (b) Belanja Barang dan Jasa;
  - (c) Belanja Bunga;
  - (d) Belanja Subsidi;
  - (e) Belanja Hibah;
  - (f) Belanja Bantuan Sosial
  - (g) Belanja Lain-lain/Tidak Terduga; dan
  - (h) Belanja Transfer.
- b) Aktivitas Investasi
- Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- (a) Penjualan Aset Tetap; dan
  - (b) Penjualan Aset Lainnya.
- Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- (a) Perolehan Aset Tetap; dan
  - (b) Perolehan Aset Lainnya.
- c) Aktivitas Pembiayaan
- Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
- (a) penerimaan Utang Luar Negeri;
  - (b) penerimaan Utang Obligasi;
  - (c) pencairan Dana Cadangan;
  - (d) penerimaan Divestasi;
  - (e) penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas;
  - (f) penerimaan kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
  - (g) penerimaan kembali pinjaman kepada Perusahaan Negara.
- Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain
- (a) pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
  - (b) pembayaran Pokok Utang Obligasi;
  - (c) pembentukan Dana Cadangan;
  - (d) penyertaan Modal Pemerintah;
  - (e) pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas;
  - (f) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan pemerintah daerah;
  - (g) pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.





d) **Aktivitas Transitoris**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan.

Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran Non Anggaran seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Format LAK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang tidak terakomodir dalam format tersebut.

f. **Laporan Perubahan Ekuitas.**

LPE menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Format LPE mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.

g. **Catatan atas Laporan Keuangan.**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a) informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b) kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; dan
- c) ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya.
- d) kebijakan akuntansi yang penting:
  - 1) entitas akuntansi/pelaporan;
  - 2) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - 3) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan SAP oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
- 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- e) Penjelasan pos-pos laporan keuangan memuat tentang:
  - 1) rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan; dan
  - 2) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- 3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam CaLK meliputi akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) pengakuan pendapatan-LRA;
- 2) pengakuan pendapatan-LO
- 3) pengakuan belanja;
- 4) pengakuan beban;
- 5) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 6) Investasi;
- 7) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 8) kontrak-kontrak konstruksi;
- 9) kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 10) kemitraan dengan pihak ketiga;
- 11) biaya penelitian dan pengembangan.
- 12) persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 13) dana cadangan; dan
- 14) penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Format laporan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, namun demikian format dapat diubah sesuai dengan kebutuhan apabila terdapat transaksi yang belum terakomodasi dalam format tersebut.



#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

##### 1. Kebijakan Akuntansi Aset.

###### a. Tujuan.

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam Laporan Keuangan.

###### b. Ruang Lingkup.

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

###### c. Definisi.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertiannya:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 3) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

##### 2. Aset Lancar.

###### a. Kas dan Setara Kas.

###### 1) Definisi Kas dan Setara Kas.

- a) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
  - c) Kas terdiri dari:
    - (1) kas di Kas Daerah;
    - (2) kas di Bendahara Penerimaan;
    - (3) kas di Bendahara Pengeluaran;
    - (4) kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
    - (5) kas lainnya.
  - d) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
  - e) Setara kas terdiri dari:
    - (1) simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
    - (2) investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
  - f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas
- a) Secara umum pengakuan Kas dan Setara Kas dilakukan:
    - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
    - (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
  - b) Atas dasar butir a) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
  - c) Kas di BLUD merupakan kas di Bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  - d) Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.
- 3) Pengukuran Kas dan Setara Kas.
- Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi Rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
- a) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
  - b) rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.



b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

- a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- c) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam BAS.

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - (1) manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
  - (2) nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
- b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.
- c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
  - (1) investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    - (a) apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    - (c) apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (2) investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
- a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
  - b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
    - (1) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
    - (2) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
    - (3) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
    - (4) penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
    - (5) perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).
- c. Piutang
- 1) Definisi Piutang
    - a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
    - b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
    - c) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.
    - d) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.
  - 2) Pengakuan Piutang
    - a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
      - (1) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
      - (2) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
    - b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - (2) jumlah piutang dapat diukur.
  - c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
  - d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
  - e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
  - f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
    - (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
    - (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
  - g) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
  - h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
  - i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
  - j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM)/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP-TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP-TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- 3) Pengukuran Piutang
- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- (1) Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - (2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - (3) Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan- ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - (4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
  - (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
  - (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*)  
Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- g) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- (1) kualitas Piutang Lancar;
  - (2) kualitas Piutang Kurang Lancar;
  - (3) kualitas Piutang Diragukan; dan
  - (4) kualitas Piutang Macet.
- i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
  - (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
    - (b) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
    - (d) Wajib Pajak kooperatif;
    - (e) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - (f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
    - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
    - (c) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
    - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
    - (c) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - (d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang diatas 3 tahun;
    - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
    - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- k) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang kurang dari 1 tahun;
    - (b) Wajib Pajak kooperatif;
    - (c) Wajib Pajak likuid; dan/atau
    - (d) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
    - (b) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
  - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
    - (b) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - (c) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - (a) Umur piutang diatas 3 tahun;
    - (b) Wajib Pajak tidak ditemukan;
    - (c) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - (d) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- l) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
  - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
  - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- m) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - (2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - (3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - (4) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- n) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:
- (1) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - (3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - (4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- o) Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
  - p) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 4) Pemberhentian Pengakuan
- a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
  - c) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
  - d) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
  - e) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
  - f) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
    - (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
      - (a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
- (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- g) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan lima milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas lima milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- i) Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
  - (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
  - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
  - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
  - (5) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
  - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan /peraturan *write off* di negara lain.



- (7) dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.
- j) Pengungkapan Piutang
  - (1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
    - (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
    - (b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
    - (c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
    - (d) jaminan atau sita jaminan jika ada.
  - (2) TP-TGR yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
  - (3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
  - (4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- d. Beban Dibayar Dimuka
  - 1) Definisi Beban Dibayar Dimuka  
Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.
  - 2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka  
Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  - 3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka  
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
  - 4) Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka  
Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.
- e. Persediaan
  - 1) Definisi Persediaan
    - a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
    - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
    - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
    - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
    - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
  - c. Klasifikasi persediaan meliputi:
    1. Persediaan Alat Tulis Kantor;
    2. Persediaan Barang Cetak;
    3. Persediaan Obat dan Alat Kesehatan;
    4. Persediaan Hewan dan Tanaman;
    5. Persediaan Aspal; dan
    6. Persediaan Lain-lain.
- 2) Pengakuan Persediaan
- a) Persediaan diakui:
    - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
    - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
  - b) Pengakuan Persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- 3) Pengukuran Persediaan
- a) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir untuk selain obat dan alat kesehatan, sedangkan untuk obat dan alat kesehatan menggunakan FIFO.
  - b) Persediaan disajikan sebesar:
    - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
    - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
    - (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
  - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
  - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
    - (1) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
    - (2) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
- f. Aset Untuk Dikonsolidasikan
  - 1) Defenisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik akuntansi SKPD dan entitas akuntansi SKPKD. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan SKPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi SKPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
  - 2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
  - 3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
  - 4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.
3. Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

  - a. Investasi Jangka Panjang
    - 1) Definisi Investasi Jangka Panjang
      - a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
      - b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
      - c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
  - e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
  - f) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang
- a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
    - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
  - b) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
    - (1) deviden tunai;
    - (2) deviden saham; dan
    - (3) bagian laba.
  - c) Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
  - d) Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
  - e) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - (1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
    - (2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
- a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
  - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- (2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- (3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- (4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- (6) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- (7) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
  - (1) metode biaya;
  - (2) metode ekuitas; dan
  - (3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK. Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- a) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
- (1) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
  - (2) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
  - (3) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir mengacu pada Peraturan Bupati.
  - (4) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan angsuran pengembalian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Penyisihan investasi non permanen berdasarkan angsuran

Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Angsuran				
	Tidak melampaui jatuh tempo	Jatuh tempo 0-3 bulan	Jatuh Tempo 4-9 bulan	Jatuh Tempo 10-12 bulan	Jatuh Tempo Lebih dari 12 bulan
Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0%	20%	50%	75%	100%

- (5) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.



4. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah:
  - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
  - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
  - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
  - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.



- m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
  - o) Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
  - p) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam BAS.
- 2) Pengakuan Aset Tetap
- a) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
  - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
    - (1) Berwujud;
    - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
    - (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
    - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
  - c) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
  - d) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
  - e) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  - f) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 3) Pengukuran Aset Tetap
- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

- g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
- h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat



diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

- i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 4) Penilaian Awal Aset Tetap  
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- 5) Perolehan Secara Gabungan  
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- 6) Aset Tetap Digunakan Bersama
  - a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.
- 7) Aset Perjanjian Kerja sama Fasos Fasum
  - a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
  - b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
- 8) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
  - a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/ diserahkan.
  - c) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
  - d) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai- bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.



Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

- 9) Aset Donasi
  - a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
  - c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
  - d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- 10) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
  - a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
  - b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
    - (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
      - (a) bertambah ekonomis/efisien;
      - (b) bertambah umur ekonomis;
      - (c) bertambah volume; dan/atau
      - (d) bertambah kapasitas produksi.
    - (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
  - c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- d) Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*)

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin ( <i>over haul</i> )	Selain angkutan darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh termasuk turun mesin ( <i>over haul</i> )	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian /kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam pengerjaan		Tidak dibatasi

11) Penyusutan

- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan.
- b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- (1) Nilai residu 0;
- (2) Ada nilai residu konsekuensi dengan peraturan bupati penilaian barang.
- c) Untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.
- d) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 4.5 Masa manfaat aset tetap

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	5
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	3
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	3
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	5
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu – Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan dan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara / Perambuan	40
	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu / Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30
1	3	5			Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	2		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1	3	5	2	1	Barang Bercorak Kesenian	4

- e) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Buku-buku Perpustakaan, Hewan ternak, dan Tanaman.
- f) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- h) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Penambahan Masa manfaat aset tetap

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	6
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
		>65% s.d 100%	5
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>20% s.d 40%	2
		>40% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
<b>Alat laboratorium</b>			
Unit Alat laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	5
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
<b>Alat Persenjataan</b>			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
<b>Komputer</b>			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
<b>Alat Eksplorasi</b>			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
<b>Alat Pengeboran</b>			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	2
<b>Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian</b>			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	8
<b>Alat Bantu Explorasi</b>			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d 100%	7
<b>Alat keselamatan Kerja</b>			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d 100%	2
Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d 100%	6
<b>Alat Peraga</b>			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d 100%	6
<b>Peralatan Proses / Produksi</b>			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	5
<b>Rambu-rambu</b>			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d 100%	9
<b>Peralatan Olah Raga</b>			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
<b>Bangunan Gedung</b>			
Bangunan Gedung tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
<b>Monumen</b>			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
<b>Bangunan Menara</b>			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
<b>Tugu Titik Kontrol / Prasasti</b>			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
<b>Jalan dan Jembatan</b>			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	15
<b>Bangunan Air</b>			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
<b>Instalasi</b>			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	7
Instalasi Pembangkit	Renovasi	>0% s.d. 30%	5



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Listrik		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
		>65% s.d 100%	10
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	20
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
		>65% s.d 100%	5
<b>Jaringan</b>			
Jaringan air Minum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	25
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
		>65% s.d 100%	15
<b>Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan/ Olahraga</b>			
Barang Bercorak Kesenian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
<b>Aset Tetap Dalam Renovasi</b>			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan	<i>Renovasi</i>	>0% s.d. 30%	5



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
dalam renovasi		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
		>65% s.d 100%	35
Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

12) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

13) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
- b) Laporan Keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
    - (a) penambahan;
    - (b) pelepasan;
    - (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
    - (d) mutasi aset tetap lainnya.
  - (3) informasi penyusutan, meliputi:
    - (a) nilai penyusutan;
    - (b) metode penyusutan yang digunakan;
    - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
- (1) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - (2) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
  - (3) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
  - (4) Pemerintah Daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di Neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam CaLK.
  - (5) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap Lainnya.
  - (6) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
  - (7) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
  - (8) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
  - (9) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
5. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan
- 1) Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan
    - a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- 2) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
    - (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
  - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
  - c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
- 3) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
  - b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
    - (1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
    - (2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
    - (3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
  - c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
    - (1) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
    - (2) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
    - (3) biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
    - (4) biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
    - (5) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
  - d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
    - (1) asuransi;
    - (2) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
    - (3) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 4) Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  - d) uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e) retensi.
6. Dana Cadangan
- 1) Definisi Dana Cadangan
    - a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
    - b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
    - c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
  - 2) Pengakuan Dana Cadangan  
Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
  - 3) Pengukuran Dana Cadangan
    - a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
    - b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
    - c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
    - d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
  - 4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
    - a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
    - b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam CaLK.
7. Aset Lainnya
- 1) Definisi Aset Lainnya
    - a) Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
    - b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
      - (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - (4) Aset Tidak Berwujud; dan
  - (5) Aset Lain-lain.
- c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah Tagihan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. TP-TGR diakui ketika keputusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa SKP2K.
- e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- (1) Aset Kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama /kemitraan.
  - (2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.
  - (3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
  - (4) Kerja sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
  - (5) Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.
- f) Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
- (1) Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.



- (2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
  - (3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
  - (4) *Software*. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
  - (5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
  - (6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
  - (7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
  - (8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
  - h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
  - i) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
  - b) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- c) Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
- (1) telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
  - (2) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
- (1) aset kerja sama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
  - (2) aset kerja sama/kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
  - (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya utang kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
  - (4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
  - (5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
  - (6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
  - (7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- e) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:  
Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- f) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- 3) Pengukuran Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
  - (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - (2) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
  - (3) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    - (a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - (b) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
    - (c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  - (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.



- (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
  - h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
  - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
  - j) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
  - k) Proses penghapusan terhadap aset lain – lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
  - b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitor.
  - c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
  - d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun CaLK disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
  - e) Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:
    - (1) masa manfaat dan metode amortisasi;
    - (2) nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud; dan
    - (3) penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
  - f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
  - g) Berdasarkan masa manfaat, Aset Tidak Berwujud dapat dibedakan menjadi:
    - (1) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) yaitu Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi, Hasil Kajian, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan dengan;
    - (2) Aset Tidak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu Goodwill.



8. Amortisasi

1) Definisi

- a) Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
- b) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

2) Pengakuan Amortisasi

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

3) Pengukuran Amortisasi

- a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

Tabel 4.7 Masa manfaat aset tidak berwujud

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

4) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

5) Penyajian Amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud".

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Tujuan

Tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah yang menyajikan Laporan Keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.



- 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:
  - a) akuntansi kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri; dan
  - b) perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.
  - c) Definisi Kewajiban
    - 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
    - 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
    - 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Kewajiban Jangka Pendek
  - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
    - 1) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
      - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
      - b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan Iuran BPJS Kesehatan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
    - 2) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
    - 3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
    - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
      - a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
      - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada Laporan Keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
- 1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
    - a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
    - b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
  - 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
  - 3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
  - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- c. Utang Jangka Pendek Lainnya
- 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.
  - 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
  - 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
  - 4) Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.



- d. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
- 1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan:
    - a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara SKPKD yang dikelola oleh PPKD dan SKPD.
    - b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPKD atau Rekening Koran SKPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
    - c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
    - d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
  - 2) Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan  
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
  - 3) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan
    - a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
    - b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi
  - 4) Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan  
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada SKPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
- e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.
  - 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
    - a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
    - b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).



- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Nilai yang dicantumkan di Neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
  - 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka
- 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka  
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.
  - 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka  
Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
  - 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka  
Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
  - 4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka  
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam CaLK.
- g. Utang Beban
- 1) Definisi Utang Beban  
Utang Beban adalah utang Pemerintah Daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).  
Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
    - a) adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
    - b) pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telepon oleh masing-





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - d) pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Pengakuan Utang Beban
- Utang Beban diakui pada saat:
- a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 3) Pengukuran Utang Beban
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal Neraca.
- 4) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban
- Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.
- h. Utang Jangka Pendek Lainnya
- 1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

  - 2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

  - 3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam Neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal Neraca.

  - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.



11. Kewajiban Jangka Panjang
  - a. Utang Dalam Negeri
    - 1) Definisi Utang Dalam Negeri  
Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.  
Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
      - a) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;
      - b) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;
      - c) Utang Dalam Negeri-obligasi;
      - d) Utang Pemerintah Pusat;
      - e) Utang Pemerintah Provinsi; dan
      - f) Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
    - 2) Pengakuan Utang Dalam Negeri
      - a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
      - b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
    - 3) Pengukuran Utang Dalam Negeri
      - a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
      - b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
      - c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
    - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri  
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di CaLK berdasarkan pemberi pinjaman.
  - b. Utang Luar Negeri  
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.



Dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

- 1) Definisi Utang Luar Negeri.
  - a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
  - b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
  - c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
  - d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
  - e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
- 2) Pengakuan Utang Luar Negeri.

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- 3) Pengukuran Utang Luar Negeri.
  - a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
  - b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri.
  - a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
  - b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
  - c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos- pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih



kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

c. Utang Jangka Panjang Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan.
- b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
- e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya

- a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
- b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Ruang Lingkup  
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
  - c. Definisi Ekuitas
    - 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
    - 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
    - 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
    - 4) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
    - 5) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K SKPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
    - 6) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.
  - d. Pengakuan Ekuitas  
Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.
  - e. Pengukuran Ekuitas  
Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.
  - f. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas  
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.
13. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA
- a. Tujuan  
Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.  
Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Ruang Lingkup
    - 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan LRA.
    - 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
  - c. Pendapatan LRA
    - 1) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.



- 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 3) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 4) Pendapatan LRA terdiri dari:
  - a) Pendapatan Asli Daerah – LRA;
  - b) Pendapatan Transfer – LRA; dan
  - c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.
- d. Pengakuan Pendapatan LRA.
  - 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP Nomor 02 Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya.
  - 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
    - a) kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
    - b) kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
    - c) kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - d) kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
    - e) kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- e. Pengukuran Pendapatan LRA
  - 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA
  - 1) Pendapatan – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  - 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:
    - a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d) informasi lainnya yang dianggap perlu.
14. Pendapatan Asli Daerah–LRA (PAD – LRA)
- a. Definisi PAD – LRA.
    - 1) PAD – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
    - 2) PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).
  - b. Pengakuan PAD – LRA.

PAD – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.
  - c. Pengukuran PAD – LRA.

PAD – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.
  - d. Penyajian dan Pengungkapan PAD – LRA.

PAD – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
15. Pendapatan Transfer–LRA
- a. Definisi Pendapatan Transfer –LRA.

Pendapatan Transfer – LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  - b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA.
    - 1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada RKUD. Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
    - 2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di BUD atau dicatat oleh SKPKD.
  - c. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA.

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
  - d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA.

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



16. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
- a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA.  
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA.  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
    - 1) Pendapatan Hibah – LRA;
    - 2) Dana Darurat – LRA; dan
    - 3) Pendapatan Lainnya – LRA.
  - b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA
    - 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada RKUD.
    - 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh SKPKD.
  - c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA  
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada RKUD.
  - d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA  
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
17. Kebijakan Akuntansi Belanja
- a. Tujuan  
Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - b. Ruang Lingkup  
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
  - c. Definisi Belanja
    - 1) Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
    - 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.
    - 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
    - 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
    - 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang bukan berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
  - 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
  - 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
  - 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  - 12) Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
  - 13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - 14) Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
    - a) klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD Pengguna Anggaran; dan
    - b) klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
  - 15) Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam BAS.
- d. Pengakuan Belanja
- Belanja diakui pada saat:
- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.



- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D GU/TU Nihil.
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- e. Pengukuran Belanja
  - 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
  - 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- f. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja
  - 1) Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    - a) Belanja Operasi;
    - b) Belanja Modal;
    - c) Belanja Tidak Terduga; dan
    - d) Belanja Transfer.
  - 2) Belanja disajikan dalam mata uang Rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  - 3) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
18. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
  - a. Tujuan
    - 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
    - 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
  - b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
  - c. Definisi Pembiayaan
    - 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



- 2) Pembiayaan terdiri dari :
  - a) Penerimaan pembiayaan; dan
  - b) Pengeluaran pembiayaan.
19. Penerimaan Pembiayaan
  - a. Definisi Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
    - 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD dan BLUD.
  - b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
  - c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
20. Pengeluaran Pembiayaan
  - a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
    - 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPPKD dan BLUD
  - b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.
  - c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
  - d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
  - e. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir
    - 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
    - 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
    - 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.



- 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
  - 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
21. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
    - 1) SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
    - 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
    - 3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
    - 4) SAL terdiri dari:
      - a) Surplus/Defisit – LRA;
      - b) Pembiayaan Netto;
      - c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan d) Perubahan SAL.
    - 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
    - 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
    - 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
    - 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan LRA dan LPSAL.
  - b. Pengakuan SAL
    - 1) Akun SAL diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
    - 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
  - c. Penyajian dan Pengungkapan SAL

SAL merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan LRA dan LPSAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.



22. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam LO untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Pendapatan-Lo

1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Pengakuan Pendapatan-Lo

1) Pendapatan-LO diakui pada saat:

a) timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

2) Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

a) tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;

b) ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;

c) dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.

d) sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).

e) sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

4) Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Pencatatan pendapatan pada saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan dua kondisi:
- (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.  
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
  - (2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.  
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan- LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- 5) Pengukuran Pendapatan-LO.
- a) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
  - c) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 6) Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan-Lo
- a) Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
  - b) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
    - (1) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
    - (2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
    - (3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
    - (4) informasi lainnya yang dianggap perlu.



23. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.
- 3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Tranfer, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang tidak berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- 7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,



perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- 10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- 12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 15) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) Beban Tidak Terduga adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- 17) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

d. Pengakuan Beban

- 1) Beban diakui pada:
  - (a) Saat timbulnya kewajiban;
  - (b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - (c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- 3) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 5) Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (a) beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - (b) beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - (c) beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
  - 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
  - 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
  - 9) Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
  - 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  - 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  - 12) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    - (a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
    - (b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun



- masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - (d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
  - (e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan Laporan Keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
  - (f) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- e. Pengukuran Beban  
Beban diukur sesuai dengan:
- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- f. Penyajian dan Pengungkapan Beban
- 1) Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    - (a) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Transfer dan Beban lain-lain;
    - (b) Beban Non Operasional; dan
    - (c) Beban Tidak Terduga.
  - 2) Pos Tidak Terduga disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
  - 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    - (a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
    - (b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
    - (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
24. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang tidak dilanjutkan.



- a. Tujuan  
Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- b. Ruang Lingkup
  - 1) Dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
  - 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- c. Defenisi
  - 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
  - 2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
  - 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
  - 4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
  - 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
  - 6) Laporan Keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- d. Koreksi Kesalahan
  - 1) Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
  - 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
  - 3) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
    - a) kesalahan yang tidak berulang; dan
    - b) kesalahan yang berulang dan sistemik.
  - 4) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:



- a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;  
dan
  - b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 5) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
  - 6) Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - 7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
  - 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
  - 10) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
  - 11) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun SAL.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas.  
Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.



- d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
- 12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.  
Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 13) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.  
Contoh koreksi kesalahan beban:
- a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain- lain-LO.
- b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- 14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.  
Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
- a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
- (a) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- (b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah SAL.
- 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a) yang menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
    - (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
    - (b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- 16) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL.
- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
  - b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
  - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SAL.
- 17) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 18) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.  
Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi
- 19) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 20) Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
25. Perubahan Kebijakan Akuntansi
- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
  - b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
  - c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian Laporan Keuangan entitas.
  - d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
    - 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
  - e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
  - f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.



27. Perubahan Estimasi Akuntansi
  - a. Agar memperoleh laporan keuangan yang handal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
  - b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
  - c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
28. Operasi yang tidak dilanjutkan:
  - a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
  - b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
  - d. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
  - e. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
  - e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
    - 1) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
    - 2) fungsi tersebut tetap ada.
    - 3) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
    - 4) menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
29. Peristiwa Luar Biasa.
  - a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa





- hanyalah peristiwa- peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
  - c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
  - d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
  - e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
  - f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
    - 1) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
    - 2) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
    - 3) berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
    - 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
  - g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

#### 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada.

Pada dasarnya seluruh kebijakan akuntansi dijelaskan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan- kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, Kurs. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai akun-akun yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Pernyataan Standar ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang penting, sedapat mungkin menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi atas elemen-elemen utama laporan keuangan seperti pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan akuntansi yang hendak dijelaskan pada intinya adalah penjelasan mengenai basis dan kebijakan akuntansi yang mendasari pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang menghasilkan Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang perlu dijelaskan adalah kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengakui, mencatat dan melaporkan seluruh hal yang terkait dalam Laporan Keuangan. Contoh penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas adalah sebagai berikut:

- a) Pengakuan Pendapatan pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah
- b) Pengakuan Belanja pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah
- c) Pengakuan Pembiayaan pada saat kas diterima pada/keluar dari Kas Umum Daerah.
- d) Jenis-jenis sumber daya/kekayaan yang dapat dikelompokkan sebagai aset secara umum dan aset secara khusus yang terdiri dari aset lancar, investasi, aset tetap, dana cadangan.

Selain itu, dalam bagian ini pun diuraikan cara penilaiannya. Tentang Aset Tetap misalnya, bagian ini menguraikan bahwa Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Jenis-jenis kewajiban yang dapat dikelompokkan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Mengingat instrumen keuangan yang berkaitan dengan kewajiban jangka panjang mengandung kompleksitas yang masih belum banyak diketahui awam, bagian ini perlu ditambahi dengan penjelasan mengenai aspek-aspek khusus yang berkaitan dengan berbagai instrumen hutang jangka panjang seperti obligasi dan lain-lain.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**5.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2021. Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, realisasi atas jumlah pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit) dan pembiayaan adalah sebagai berikut:

**5.1.1. Pendapatan Daerah – LRA**

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp1.418.077.322.328,40	Rp1.290.868.909.824,44

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.418.077.322.328,40 atau 104,92% dari anggaran sebesar Rp1.351.525.305.737,80 yang terdiri dari:

**A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA**

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp162.791.620.432,40	Rp133.375.094.965,44

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp162.791.620.432,40 atau 126,66% dari target sebesar Rp128.523.313.999,80 atau lebih realisasi sebesar Rp34.268.306.432,60 dengan rincian sebagai berikut:

**A.1. Pajak Daerah - LRA**

Realisasi pajak daerah sebesar Rp21.703.779.853,00 atau 113,23% dari target sebesar Rp19.167.598.082,00 atau lebih realisasi sebesar Rp2.536.181.771,00 dengan rincian dalam Tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1 Daftar Rincian Pajak Daerah TA 2021**

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	156.000.000,00	192.672.653,00	106.863.332,00
2	Pajak Restoran	2.220.826.370,00	3.855.189.002,00	2.282.392.325,00
3	Pajak Hiburan	3.500.000,00	2.050.000,00	2.830.000,00
4	Pajak Reklame	930.000.000,00	666.395.885,00	346.733.453,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5.650.000.000,00	6.135.083.562,00	5.674.480.457,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.243.969.779,00	2.594.405.263,00	4.949.339.625,83
7	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.400.000.000,00	4.051.797.650,00	2.993.439.900,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	4.263.301.933,00	4.059.658.588,00	3.150.956.706,00
9	Pajak Parkir	50.000.000,00	75.382.250,00	66.516.400,00
10	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	71.145.000,00	104.548.507,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.167.598.082,00</b>	<b>21.703.779.853,00</b>	<b>19.678.100.705,83</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

#### A.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi retribusi daerah sebesar Rp5.470.983.860,00 atau 85,11% dari target sebesar Rp6.427.857.200,00 atau kurang realisasi sebesar Rp956.873.340,00 dengan rincian pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Daftar Rincian Retribusi Daerah TA 2021

No.	Jenis Retribusi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Retribusi Jasa Umum	2.863.000.000,00	2.037.167.100,00	1.187.605.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.109.857.200,00	1.303.581.660,00	1.376.817.094,83
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.455.000.000,00	2.130.235.100,00	2.037.131.762,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.427.857.200,00</b>	<b>5.470.983.860,00</b>	<b>4.601.554.356,83</b>

Daftar rincian masing-masing retribusi tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

#### A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.961.082.639,00 atau 98,24% dari target sebesar Rp7.086.082.639,00 dengan rincian dalam Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Daftar Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No.	Nama BUMD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PDAM Mual Natio	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Pertanian	150.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
3.	PT Bank SUMUT (Dividen)	6.886.082.639,00	6.886.082.639,00	7.407.286.367,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.086.082.639,00</b>	<b>6.961.082.639,00</b>	<b>7.557.286.367,00</b>

#### A.4. Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp128.655.774.080,40 atau 134,24% dari target sebesar Rp95.841.776.078,80 atau lebih realisasi sebesar Rp32.813.998.001,60 dengan rincian dalam Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Penerimaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	300.000.000,00	344.209.100,00	349.230.165,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA	1.300.000.000,00	3.677.118.015,00	1.439.893.683,00
3	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	5.500.000.000,00	3.708.333.330,00	5.635.416.660,00
4	Hasil dari Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan - LRA	290.000.000,00	536.306.040,00	2.521.987.460,00
5	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	13.873.000.000,00	11.432.280.075,00	11.621.923.788,00
6	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	0,00	0,00	178.403.740,00
7	Angsuran Pengembalian Kios dan Balairung- LRA	0,00	0,00	7.538.000,00
8	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	71.128.776.078,80	103.765.397.756,00	76.744.325.431,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LRA	1.000.000.000,00	3.295.560.095,06	979.015.645,49
10	Pendapatan dari Pengembalian- LRA	1.310.000.000,00	1.718.534.669,34	2.059.398.013,29
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	1.020.950,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Penerimaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
12.	Hasil Kerja Sama Daerah	100.000.000,00	178.035.000,00	0,00
13.	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	40.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>95.841.776.078,80</b>	<b>128.655.774.080,40</b>	<b>101.538.153.535,78</b>

Dapat dijelaskan bahwa Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.718.534.669,34, merupakan pengembalian-pengembalian atas keterlanjuran penghasilan, pengembalian atas belanja, pengembalian TGR. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada **lampiran 2**.

**B. Pendapatan Transfer - LRA**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp1.178.811.365.743,00	Rp1.078.788.903.404,00

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat, pemerintah pusat lainnya, pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Transfer ke daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 menjadi dasar acuan penganggaran penerimaan transfer pada APBD 2021. Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.178.811.365.743,00 atau 102,25% dari target sebesar Rp1.152.845.449.056,00 dengan rincian:

**B.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA**

Realisasi dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp907.453.944.060,00 atau 102,64% dari target sebesar Rp884.115.485.306,00 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 5.5 berikut.

**Tabel 5.5 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan**

No	Penerimaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dana Perimbangan	884.115.485.306,00	907.453.944.060,00	809.570.224.807,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	29.706.794.000,00	29.706.794.000,00	32.361.990.000,00
3	Dana Desa	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00	192.016.817.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.105.839.096.306,00</b>	<b>1.129.177.555.060,00</b>	<b>1.033.949.031.807,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan sebesar Rp907.453.944.060,00, terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) realisasi sebesar Rp109.744.869.923,00 atau 163,35% dari anggaran sebesar Rp67.181.908.306,00.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi sebesar Rp597.636.159.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp597.636.159.000,00.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik realisasi sebesar Rp85.995.517.019,00 atau 90,75% dari anggaran sebesar Rp94.755.681.000.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik realisasi sebesar Rp114.077.398.118,00 atau 91,60% dari anggaran sebesar Rp124.541.737.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dialokasikan kepada 241 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara, dimana rincian alokasi Dana Desa per desa dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

**B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA**

Realisasi Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp49.633.810.683,00 atau 105,59% dari target sebesar Rp47.006.352.750,00,00. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah merupakan dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/814/KPTS/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Rincian Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sesuai Tabel 5.6 berikut.

**Tabel 5.6 Realisasi Transfer Antar Daerah**

No	Penerimaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.075.132.118,00	13.217.342.334,00	12.092.188.730,00
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	6.501.588.237,00	6.916.944.472,00	5.907.776.330,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	11.816.862.663,00	11.403.297.897,00	10.830.276.297,00
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	895.708.360,00	224.330.310,00	313.571.939,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.717.061.372,00	17.871.895.670,00	15.696.058.301,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.006.352.750,00</b>	<b>49.633.810.683,00</b>	<b>44.839.871.597,00</b>

**C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LRA**

**Tahun Anggaran 2021**

Rp76.474.336.153,00

**Tahun Anggaran 2020**

Rp78.704.911.455,00

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp76.474.336.153,00 atau sebesar 109,01% dari target sebesar Rp70.156.542.682,00 atau lebih realisasi sebesar Rp6.317.793.471,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Realisasi Lain-Lain Pendapatan daerah yang Sah**

No	Penerimaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	12.745.942.682,00	16.140.380.025,00	67.751.162.621,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	57.410.600.000,00	60.333.956.128,00	16.745.942.682,00
	<b>Jumlah</b>	<b>70.156.542.682,00</b>	<b>76.474.336.153,00</b>	<b>84.497.105.303,00</b>

Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp16.140.380.025,00 merupakan Pendapatan Bonus Produksi panas bumi dari PT SOL sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp13.974.380.025,00 dan Hibah Air Minum Perkotaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.166.000.000,00.

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pendapatan Belanja Operasional Sekolah (BOS) yang mekanismenya hanya sebagai pencatatan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, karena Transfer dari RKUD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke masing-masing Rekening Sekolah penerima Dana BOS atau ke masing-masing satuan pendidikan sebesar Rp60.333.956.128,00.

**5.1.2. Belanja.**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2021</b>
Rp1.473.274.599.069,95	Rp1.486.351.970.646,22

Realisasi belanja tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.473.274.599.069,95 atau 92,04% dari anggaran sebesar Rp1.600.666.840.823,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp127.392.241.753,05. Capaian belanja dirinci menjadi:

**A. Belanja Operasi.**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp918.034.972.259,75	Rp843.090.065.102,86

Realisasi belanja operasi sebesar Rp918.034.972.259,75 atau 91,11% dari anggaran sebesar Rp1.007.654.617.305,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp89.619.645.045,25 dengan rincian dalam Tabel 5.8.

**Tabel 5.8. Realisasi Belanja Operasi**

No	Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	591.682.021.081,00	521.578.901.088,90	491.483.123.408,00
2	Belanja Barang dan Jasa	345.973.012.604,00	326.238.489.421,85	341.115.892.680,86
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	604.339.500,00
4	Belanja Hibah	68.228.072.820,00	68.565.971.013,00	9.202.176.914,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.771.510.800,00	1.651.610.736,00	684.532.600,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.007.654.617.305,00</b>	<b>918.034.972.259,75</b>	<b>843.090.065.102,86</b>

**A.1. Belanja Pegawai**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp521.578.901.088,90	Rp491.483.123.408,00

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp521.578.901.088,90 atau 88,15% dari anggaran sebesar Rp591.682.021.081,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp70.103.119.992,10 Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada Tabel 5.9.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.9. Rincian Belanja Pegawai per Objek

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Gaji dan Tunjangan	374.453.292.743,00	334.607.690.621,90	355.376.650.177,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	72.040.705.679,00	56.972.437.647,00	134.686.777.328,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	864.150.000,00	575.280.000,00	383.174.100,00
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	128.380.290.600,00	115.032.682.743,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.933.593.992,00	13.228.158.165,00	0,00
6	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.041.820,00	172.685.243,00	0,00
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.275.957.447,00	786.029.565,00	622.340.661,00
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	539.988.800,00	203.937.104,00	238.114.142,00
9	Uang Lembur	0,00	0,00	123.987.000,00
10	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	52.080.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>591.682.021.081,00</b>	<b>521.578.901.088,90</b>	<b>491.483.123.408,00</b>

A.2. Belanja Barang dan Jasa.

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp326.238.489.421,85	Rp341.115.892.680,86

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp326.238.489.421,85 atau 94,30% dari anggaran sebesar Rp345.973.012.604,00 kurang realisasi sebesar Rp19.734.523.182,15. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rincian Belanja Barang dan Jasa per Objek

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Barang	115.683.911.685,00	106.902.727.657,98	186.872.157.144,00
2	Belanja Jasa	172.535.869.816,00	171.311.502.362,87	65.638.839.056,00
3	Belanja Pemeliharaan	3.924.529.777,00	3.351.002.188,00	6.394.069.389,00
4	Belana Perjalanan Dinas	40.840.242.626,00	34.364.826.073,00	39.820.405.597,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.988.458.700,00	10.308.431.140,00	42.390.421.494,86
	<b>Jumlah</b>	<b>345.973.012.604,00</b>	<b>326.238.489.421,85</b>	<b>341.115.892.680,86</b>

untuk belanja barang sebesar Rp115.683.911.685,00 merupakan belanja barang pakai habis sebesar Rp106.902.007.657,98 dan belanja barang tidak pakai habis sebesar Rp720.000,00.

Untuk belanja jasa dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Jasa Kantor sebesar Rp78.825.848.045,00.
- Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebesar Rp262.085.635,87.
- Belanja sewa tanah sebesar Rp7.000.000,00.
- Belanja sewa peralatan mesin sebesar Rp1.050.308.139,00.
- Belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp864.651.860,00.
- Belanja sewa asset tetap lainnya sebesar Rp4.000.000,00.
- Belanja Jasa Konsultansi konstruksi sebesar Rp5.200.237.854,00.
- Belanja Jasa Konsultansi Non konstruksi sebesar Rp587.419.000,00.





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Avalibility Payment*) sebesar Rp82.382.467.829,00 yang merupakan belanja pada BLUD RSUD Tarutung
- j. Belanja kursus/ pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp2.127.484.000,00.

Sedangkan belanja pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.153.762.588,00.
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp164.014.600,00.
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp33.225.000,00.

Belanja perjalanan pada Tahun Anggaran 2021 realisasi sebesar Rp34.364.826.073, yang dipergunakan untuk Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp21.649.707.673,00 dan Belanja Perjalanan Dinas dalam kota sebesar Rp12.715.118.400,00.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan belanja yang diberikan kepada pihak lain yaitu:

- a. Belanja Beasiswa sebesar Rp85.000.000,00.
- b. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp414.000.000,00.
- c. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp9.364.810.940,00.
- d. Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp444.620.000,00.

**A.3. Belanja Bunga**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp0,00	Rp604.339.500,00

Realisasi belanja bunga Tahun Anggaran 2021 adalah nihil

**A.4. Belanja Hibah**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp68.565.971.013,00	Rp9.202.176.914,00

Realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.565.971.013,00 merupakan belanja hibah yang dikelola oleh OPD pengelola hibah dimana realisasi belanja hibah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp100.000.000,00.
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp67.638.686.092,00, dari realisasi tersebut sebesar



Rp60.381.786.092,00 merupakan realisasi Belanja Operasional Sekolah (BOS).

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp827.284.921,00.

Rincian realisasi Belanja Hibah pada lampiran 4.

#### A.5. Belanja Bantuan Sosial.

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp1.651.610.736,00	Rp684.532.600,00

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp1.651.610.736,00 atau 93,23% dari anggaran sebesar Rp1.771.510.800,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp119.900.064,00, terdiri dari:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu realisasi sebesar Rp506.838.586,00 atau 95,00% dari anggaran sebesar Rp533.510.800,00.
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga realisasi sebesar Rp552.772.150,00 atau 86,64% dari anggaran sebesar Rp638.000.000,00.
3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat realisasi sebesar Rp562.000.000 atau 98,60% dari anggaran sebesar Rp570.000.000,00.
4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00.

Untuk keterangan yang lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 5.

#### B. Belanja Modal

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp287.918.257.694,20	Rp339.159.979.339,36

Realisasi belanja modal sebesar Rp287.918.257.694,20 atau 88,50% dari anggaran sebesar Rp325.342.459.318,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp37.420.201.623,80 dengan rincian dalam Tabel 5.11. Sedangkan rekapitulasi belanja modal per SKPD dapat dilihat dalam lampiran 6.

Tabel 5.11 Realisasi Belanja Modal

No	Belanja	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Tanah	5.617.168.962,00	5.032.098.143,00	1.691.144.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	45.867.814.863,00	41.376.791.335,91	51.036.494.674,60
3	Belanja Bangunan dan Gedung	107.635.148.114,00	102.883.849.131,30	57.823.060.309,86
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	165.556.513.979,00	138.088.293.593,99	226.099.706.572,90
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	665.813.400,00	537.225.490,00	2.509.573.782,00
	<b>Jumlah</b>	<b>325.342.459.318,00</b>	<b>287.918.257.694,20</b>	<b>339.159.979.339,36</b>

#### B.1. Belanja Modal Tanah

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp5.032.098.143,00	Rp1.691.144.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp5.032.098.143,00 atau 89,58% dari anggaran sebesar Rp5.617.168.962,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp585.070.819,00. Realisasi belanja modal tanah terdiri dari Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp4.853.563.303,00,00 dan Pengadaan Tanah lapangan olahraga sebesar Rp178.534.840,00.

**B.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp41.376.791.335,91	Rp51.036.494.674,60

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp41.376.791.335,91 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp45.867.814.863,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp4.491.023.527,09, rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel 5.12 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	137.261.200,00	136.557.200,00	4.660.100,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	7.577.922.000,00	7.286.845.798,90	4.506.370.100,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel bermesin	889.968.800,00	887.000.000,00	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	2.373.746.100,00	2.324.087.700,00	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	179.087.310,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.649.699.358,00	7.601.990.330,01	1.019.429.875,00
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	1.000.263.680,00
8	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.222.985.200,00	4.449.073.162,00	4.190.962.699,00
9	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	0,00	0,00	69.889.100,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	398.416.900,00	184.109.000,00	96.625.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	13.760.162.535,00	11.878.427.745,00	9.456.601.438,00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat peraga/ praktek sekolah	45.952.570,00	42.143.600,00	29.144.443.040,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	0,00	0,60	1.066.028.332,60
15	Pengadaan Unit-unit Laboratorium	6.158.948.700,00	5.970.575.100,00	302.134.000,00
16	Belanja Modal Alat Eksplorasi	512.267.000,00	477.602.000,00	0,00
17	Belanja Modal Rambu-Rambu	62.174.000,00	60.250.000,00	0,00
18	Belanja Modal Peralatan Olahraga	78.310.500,00	78.129.700,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>45.867.814.863,00</b>	<b>41.376.791.335,91</b>	<b>51.036.494.674,60</b>

**B.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp102.883.849.131,30	Rp57.823.060.309,86

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan berupa pembangunan konstruksi gedung kantor, gudang, gedung sekolah, bangunan pasar, sebesar Rp102.883.849.131,30 atau 95,99% dari anggaran sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp107.635.148.114,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp4.751.298.982,70. Untuk rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada Tabel 5.13.

**Tabel 5.13 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021**

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Kerja	107.048.334.065,00	102.396.827.372,30	56.990.652.109,86
2	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	493.938.500,00
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Bangunan Tugu Titik Kontrol/ Pasti	586.814.049,00	487.021.759,00	253.931.200,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	0,00	0,00	37.307.500,00
6.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	47.231.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>107.635.148.114,00</b>	<b>102.883.849.131,30</b>	<b>57.823.060.309,86</b>

**B.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**Tahun Anggaran 2021**

Rp138.088.293.593,99

**Tahun Anggaran 2020**

Rp226.099.706.572,90

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp138.088.293.593,99 atau 83,41% dari anggaran sebesar Rp165.556.513.979,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp27.468.220.385,01 sesuai Tabel 5.14.

**Tabel 5.14 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	128.651.311.503,00	104.722.458.070,10	200.032.302.753,51
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	9.733.769.714,00	9.183.508.708,18	1.358.798.569,39
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	12.534.625.997,00	10.260.145.197,15	15.533.127.400,00
4	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	968.005.778,00	965.340.793,00	4.875.895.350,00
5	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	861.865.000,00	848.596.999,00	99.480.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air kotor	0,00	0,00	279.314.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	9.754.097.100,00	9.752.358.500,00	3.920.788.500,00
8	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	402.560.901,00	397.579.200,00	0,00
9	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	2.650.277.986,00	1.958.306.126,56	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>165.556.513.979,00</b>	<b>138.088.293.593,99</b>	<b>226.099.706.572,90</b>

**B.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

**Tahun Anggaran 2021**

Rp537.225.490,00,00

**Tahun Anggaran 2020**

Rp2.509.573.782,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya berupa pengadaan buku, barang bercorak kebudayaan dan aset tak berwujud sebesar Rp537.225.490,00,00 atau 80,69% dari anggaran sebesar Rp665.813.400,00 sehingga kurang realisasi sebesar Rp68.407.418,00. Rincian belanja modal aset tetap lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.15.



Tabel 5.15 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	409.363.400,00	346.310.490,00	1.112.181.182,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	45.000.000,00	45.000.000,00	1.207.490.900,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tanamn	0,00	0,00	44.951.700,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Olahraga	0,00	0,00	144.950.000,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	211.450.000,00	145.915.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>665.813.400,00</b>	<b>537.225.490,00</b>	<b>2.509.573.782,00</b>

C. Belanja Tak Terduga

**Tahun Anggaran 2021**

Rp10.126.560.516,00

**Tahun Anggaran 2020**

Rp36.198.159.704,00

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa misalnya untuk penanggulangan bencana alam, dimana pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalokasikan sebagian besar Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan Pandemi COVID-19 serta penanganan Bencana yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp10.126.560.516,00 atau 96,67% dari anggaran sebesar Rp10.474.955.600,00, sehingga kurang realisasi sebesar Rp348.395.084,00 dengan rincian dapat dilihat pada lampiran 7.

D. Belanja Transfer

**Tahun Anggaran 2021**

Rp257.194.808.600,00

**Tahun Anggaran 2020**

Rp267.903.766.500,00

Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, dimana untuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD sebesar Rp65.177.991.600,00 sedangkan realisasi dana desa yang bersumber dari APBN berdasarkan transfer dari Pusat untuk tahun 2021 sebesar Rp192.016.817.000,00, sampai dengan 31 Desember 2021 sisa dana desa yang masih terdapat di rekening desa adalah sebesar Rp6.422.949.005,00, rincian dana desa terdapat pada lampiran 3.

5.1.3. Pembiayaan Netto

**Tahun Anggaran 2021**

Rp227.132.230.399,85

**Tahun Anggaran 2020**

Rp292.165.422.420,08

Pembiayaan netto sebesar Rp227.132.230.399,85 adalah selisih antara realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp238.451.801.575,30 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp11.319.571.175,45.

A. Penerimaan Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp238.451.801.575,30 atau 91,52% dari anggaran sebesar Rp260.549.552.399,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**B. Pengeluaran Pembiayaan.**

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang merupakan Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut, PDAM Muat Na Tio dan pembayaran biaya provisi dan biaya pengelolaan, dengan rincian dalam tabel berikut:

**Tabel 5.16 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD PT Bank Sumut	2.536.977.814,00	2.536.977.814,00	1.559.428.709,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada PDAM Muat Natio	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.871.039.500,00	3.782.593.361,45	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.408.017.314,00</b>	<b>11.319.571.175,45</b>	<b>6.559.428.709,00</b>

**5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp171.934.953.658,30	Rp96.682.361.598,30

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp171.934.953.658,30. Hal ini disebabkan adanya defisit APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2021 sebesar Rp(55.197.276.741,55) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp227.132.230.399,85.

**5.2. Rincian Dan Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

**5.2.1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp96.682.361.598,20 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2020 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp96.682.361.598,20.

Pada tahun anggaran 2021 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan menjadi sebesar Rp96.583.610.774,30.

**5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021**

Berdasarkan realisasi defisit APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2021 sebesar Rp(55.197.276.741,55) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp227.132.230.399,85 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp171.934.953.658,30. SiLPA Tahun Anggaran 2021 tersebut berasal dari



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pelampauan target pendapatan, sisa anggaran belanja, transfer dan kelebihan pembiayaan netto, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- A. Kelebihan target pendapatan sebesar Rp66.552.016.590,60
- B. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.600.666.840.823,00 realisasinya sebesar Rp1.473.274.599.069,95 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp127.392.241.753,05. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
  - a. Sisa anggaran belanja operasi sebesar Rp89.619.645.045,25 yang terdiri atas:
    - Sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp70.103.119.992,10.
    - Sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp19.734.523.182,15.
    - Sisa anggaran belanja bantuan sosial Rp119.900.046,00.
  - b. Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp37.424.201.623,80.
  - c. Sisa anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp348.395.084,00.
- C. Terdapat kelebihan pembiayaan netto sebesar Rp227.132.230.399,85 yang berasal dari selisih penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp238.451.801.575,30 dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp11.319.571.175,45.

**5.2.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL)**

Jumlah SAL per 31 Desember 2021 sebesar Rp171.934.953.658,30.

**5.3. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca.**

**5.3.1. Aset Lancar.**

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp216.596.561.134,87	Rp134.834.797.483,61

Saldo Aset Lancar senilai Rp216.596.561.134,87, terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, Kas Dana Kapitasi pada FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang dan Persediaan per 31 Desember 2021.

**A. Kas**

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp171.934.953.658,30	Rp96.938.264.321,30

Saldo kas sebesar Rp171.934.953.658,30, terdiri dari:

**A.1. Kas di Kas Daerah.**

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp147.997.984.794,50	Rp91.139.652.656,50

Jumlah Kas Di Kas Daerah adalah sebesar Rp147.997.984.794,50 yang merupakan saldo giro bank milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 dan sisa dana kapitasi BPJS pada FKTP, rincian kas di kas daerah dapat dilihat pada Tabel 5.17.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.17 Daftar Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021**

	Nama Bank	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000266-0	146.114.877.459,50	87.023.756.583,50
2	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.000001-0	0,00	1.100.000,00
3	Bank Sumut Cabang Tarutung AC. 320.01.02.004268-9	0,00	0,00
4	Bank BRI Cabang Tarutung AC. 0099.01.000027.30.2	281.250,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>146.115.158.709,50</b>	<b>87.024.856.583,50</b>
2	Sisa Dana Kapitasi BPJS Tahun 2020+ BMHP/Obat (Jurnal Koreksi)	1.882.826.085,00	4.114.796.073,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.882.826.085,00</b>	<b>4.114.796.073,00</b>
	<b>Jumlah Kas di Kas Daerah</b>	<b>147.997.984.794,50</b>	<b>91.139.652.656,50</b>

Kas di Bendahara FKTP Dana BPJS merupakan sisa Dana Kapitasi BPJS yang masih berada pada Bendahara Dana JKN pada Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (4) bahwa Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara mengelola kegiatan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS). Hal tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ tanggal 05 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Kapitasi BPJS digunakan untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebesar 60%, Alokasi Dana Kapitasi Dukungan Operasional seperti Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai sebesar 40%.

Berdasarkan Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tercatat Laporan Realisasi Dana Kapitasi BPJS di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

**Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi BPJS Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021**

No	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1.	Puskesmas Silangit	AC.0099-01-007950-53-0	125.865.938,00	476.777.400,00	553.393.514,00	49.249.824,00
2.	Puskesmas Siatas Barita	AC.0099-01-007941-53-1	106.088.914,00	557.061.200,00	633.325.893,00	29.824.221,00
3.	Puskesmas Hutabaginda	AC.0099-01-007934-53-4	817.442.468,00	1.527.288.600,00	2.021.524.898,00	323.206.170,00
4.	Puskesmas Parsingkaman	AC.0099-01-007944-53-9	221.097.074,00	655.858.350,00	762.280.122,00	114.675.302,00





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	FKTP	Rekening Bank	Saldo Awal	Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
5.	Puskesmas Sarulla	AC.0099-01-007936-53-6	155.807.981,00	433.180.650,00	503.311.851,00	85.676.780,00
6.	Puskesmas Janji Angkola	AC.0099-01-007939-53-4	101.213.001,00	325.195.500,00	371.640.190,00	54.768.311,00
7.	Puskesmas Onan Hasang	AC.0099-01-007949-53-9	182.722.144,00	606.432.375,00	739.317.863,00	49.836.656,00
8.	Puskesmas Lumban Sinaga	AC.0099-01-007932-53-2	124.371.223,00	506.318.025,00	590.902.128,00	39.787.120,00
9.	Puskesmas Pangaribuan	AC.0099-01-007940-53-5	188.471.267,00	442.228.575,00	515.911.040,00	114.788.802,00
10.	Puskesmas Garoga	AC.0099-01-007947-53-7	237.307.944,00	648.175.850,00	813.933.411,00	71.550.383,00
11.	Puskesmas Sipoholon	AC.0099-01-007931-53-6	176.894.061,00	626.650.100,00	680.922.889,00	122.621.272,00
12.	Puskesmas Sitada-tada	AC.0099-01-007945-53-5	137.702.246,00	391.284.800,00	454.730.158,00	74.256.888,00
13.	Puskesmas Siborong-borong	AC.0099-01-007943-53-3	470.270.035,00	1.261.609.375,00	1.500.634.685,00	231.244.725,00
14.	Puskesmas Butar	AC.0099-01-007933-53-8	156.973.066,00	441.355.575,00	520.562.082,00	77.766.559,00
15.	Puskesmas Sipahutar	AC.0099-01-007946-53-1	415.454.690,00	938.969.025,00	1.158.871.379,00	195.552.336,00
16.	Puskesmas Muara	AC.0099-01-007935-53-0	147.163.929,00	520.859.400,00	581.900.168,00	86.123.161,00
17.	Puskesmas Aek Raja	AC.0099-01-007937-53-2	116.572.402,00	324.465.550,00	340.514.874,00	100.523.078,00
18.	Puskesmas Parmonangan	AC.0099-01-007942-53-7	86.355.732,00	255.511.425,00	327.463.873,00	14.403.284,00
19.	Puskesmas Simangumban	AC.0099-01-007948-53-3	138.997.574,00	315.136.200,00	417.309.323,00	36.824.451,00
20.	Puskesmas Sipultak	AC.0099-01-000787-30-0	8.024.384,00	165.023.700,00	163.567.237,00	9.480.847,00
21.	Puskesmas Paniaran	AC.0099-01-001284-30-5	0,00	12.877.200,00	12.232.485,00	665.915,00
Jumlah			4.114.796.073,00	11.432.258.875,00	13.664.250.063,00	1.882.826.085,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara

A.2. Kas di Bendahara Penerimaan.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp0,00	Rp34.456.000,00

Saldo kas yang ada di bendahara penerimaan SKPD per 31 Desember 2021 adalah Nihil.

A.3. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp5.391.500,00	Rp64.294.824,00

Saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran SKPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.391.500,00. Kas ini merupakan UYHD, yakni Kurang Setor Pengembalian sisa TU Pengelolaan Limbah Medis pada Dinas Kesehatan sebesar Rp500,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tanggal 25 Februari 2022, Kurang setor sisa TU Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.391.000,00 yang disetor ke Kas Daerah pada tanggal 18 Januari 2022 dan pengembalian kelebihan belanja pada Bagian Umum Setdakab. Tapanuli Utara sebesar Rp4.000.000,00 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 21 Januari 2022.

A.4. Kas di BLUD.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp22.945.373.571,00	Rp4.409.924.361,00

Saldo kas di BLUD RSU Daerah Tarutung Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.945.373.571,00. Kas ini merupakan selisih antara pendapatan dan belanja pada BLUD RSU Daerah Tarutung yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Melina Pangaribuan, MM, CPA Nomor 00009/2.0763/AU.2/11/0255-1/1/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A.5. Kas di Bendahara BOS.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp986.203.792,80	Rp1.034.033.756,80

Rincian sisa dana di Bendahara Dana BOS dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.19 Silpa Dana BOS per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal	1.034.033.756,80
2	Pendapatan Dana BOS	60.333.956.128,00
3	Belanja Dana BOS	60.381.786.092,00
	Sisa Tahun 2021	986.203.792,80

Lebih rinci terkait dengan alokasi dana BOS tingkat SD terdapat pada lampiran 8 dan SMP terdapat pada lampiran 9.

A.6. Kas Lainnya.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp260.224.003,00	Rp255.902.723,00

Saldo Kas Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar Rp260.224.003,00 merupakan kas yang ada di Bendahara Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibuka berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Pelaksana Harian, Bendahara, dan Nomor Rekening Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 dengan Nomor Rekening 32002040176400 pada Bank Sumut Cabang Tarutung.

Dana yang masuk ke rekening gugus tugas berasal dari sumbangan pihak ketiga, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, serta bunga rekening dimana saldo awal tahun 2021 sebesar Rp255.902.723,00. Dan saldo akhir sebesar Rp260.224.003,00 kenaikan saldo ini merupakan adanya selisih penerimaan Bunga Tabungan dengan Administrasi Bank sebesar Rp5.514.104,00 dikurangi dengan Administrasi Bank dan Pajak Tabungan sebesar Rp1.192.824,00.

B. Piutang Pajak Daerah.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp22.076.117.734,00	Rp17.209.957.326,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.076.117.734,00 dengan rincian dalam Tabel 5.20 berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.20 Daftar Piutang Pendapatan TA 2021

No.	Nama Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020
1	Pajak Hotel	44.255.200,00	44.255.200,00
2	Pajak Restoran	322.126.437,00	330.376.437,00
3	Pajak Hiburan	18.561.200,00	18.561.200,00
4	PPJU	117.318.896,00	0,00
5	DBH Provinsi Sumatera Utara	11.794.505.604,00	8.356.365.557,00
6	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.779.350.397,00	8.460.398.932,00
	<b>Jumlah</b>	<b>22.076.117.734,00</b>	<b>17.209.957.326,00</b>

Keterangan lebih rinci terdapat pada **Lampiran 11**.

C. Piutang Retribusi Daerah.

Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020

Rp910.395.013,13 Rp772.005.865,25

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp910.395.013,13. Keterangan lebih rinci pada **Lampiran 12**.

D. Piutang Lain-lain PAD yang Sah.

Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020

Rp11.776.844.000,00 Rp8.523.258.200,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.776.844.000,00 yang merupakan piutang pendapatan BLUD RSUD Tarutung, dengan rincian Piutang Asuransi BPJS Kesehatan sebesar Rp7.600.000.000,00 dan Piutang Usaha dari Jasa Layanan Umum BPJS-Pasien Covid-19 sebesar Rp4.176.844.000,00.

E. Piutang Lainnya

Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020

Rp3.174.729.249,29 Rp3.226.920.794,61

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.174.729.249,29, piutang ini merupakan TGR Kerugian Daerah yang telah ditetapkan statusnya pada Tahun 2005 s.d 2020, dimana periode pelaporan sesuai dengan kondisi Semester II Tahun 2021 dengan rincian dalam Tabel 5.21 berikut

Tabel 5.21 Daftar Piutang Lain-lain TA 2021

No.	Nama Piutang	Saldo 2021	Saldo 2020
1	TGR Kerugian Daerah sampai dengan Semester II Tahun 2021	3.174.729.249,29	3.226.920.794,61
	<b>Jumlah</b>	<b>3.174.729.249,29</b>	<b>3.226.920.794,61</b>

Rincian TGR Kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2021 dapat dilihat pada **lampiran 10**.

F. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020

Rp5.335.679.731,15 Rp4.065.046.414,18



Perhitungan penyisihan piutang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir.

Penyisihan piutang pajak daerah daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan penyisihan pajak daerah sebesar Rp4.645.687.800,47 (rincian pada lampiran 11) dan Penyisihan Retribusi daerah sebesar Rp689.991.930,68 (rincian pada lampiran 12).

G. Persediaan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp11.798.977.208,30	Rp12.229.437.390,63

Jumlah saldo persediaan barang habis pakai yang dikelola oleh pengguna barang melalui bendahara barang daerah pada tiap SKPD per 31 Desember 2021 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun sebesar Rp11.798.977.208,30. Rincian pada lampiran 14.

5.3.2. Investasi Jangka Panjang.

Jumlah investasi jangka panjang sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp85.146.845.312,00 yang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang dapat dilihat pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22 Daftar Investasi Jangka Panjang TA 2021

Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	3.522.788.739,00	3.522.788.739,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	81.624.056.573,00	74.174.838.822,00
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>85.146.845.312,00</b>	<b>77.697.627.561,00</b>

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp3.522.788.739,00	Rp3.522.788.739,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Investasi Non Permanen lainnya per 31 Desember 2021 yang merupakan investasi dalam bentuk dana bergulir dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 yang diberikan kepada masyarakat, LSM dan Badan Usaha lainnya sebesar Rp3.522.788.739,00, dengan rincian:

- Dana Bergulir UKM dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Rp2.462.656.220,00
- Dana Bergulir Bona Pasogit dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tap. Utara dimana penyalurannya melalui PT Bank Sumut	Rp1.060.132.519,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp3.522.788.739,00</b>

Sejak Tahun 2010, Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya tidak pernah digulirkan kembali. Uraian di atas dapat dijelaskan dalam Tabel 5.23 berikut.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.23 Dana Bergulir**

No.	Tahun Anggaran	Dana Bergulir	Bona Pasogit	Jumlah
1	2002	382.656.220,00	500.000.000,00	882.656.220,00
2	2003	540.000.000,00	500.000.000,00	1.040.000.000,00
3	2004	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
4	2005	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
5	2006	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
6	2007	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
7	2008	290.000.000,00	0,00	290.000.000,00
Bunga yang menjadi pokok dana bergulir		0,00	60.132.519,00	60.132.519,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.462.656.220,00</b>	<b>1.060.132.519,00</b>	<b>3.522.788.739,00</b>
Dana yang digulirkan kembali				
8	2006	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
9	2007	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
10	2008	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00
11	2009	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00
12	2010	194.000.000,00	0,00	194.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>583.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.000.000,00</b>

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara.

Pengelolaan Dana Bergulir UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan semula adalah sebesar Rp2.530.000.000,00 namun ada pengembalian pokok angsuran Tahun Anggaran 2002 yang disetor ke Kas Daerah Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp67.343.780,00 sehingga saldo dana bergulir menjadi Rp2.462.656.220,00 (Rp2.530.000.000,00 - Rp67.343.780,00).

**2. Investasi Permanen**

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp81.624.056.573,00	Rp74.174.838.822,00

Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu:

- PDAM Mual Na Tio	Rp33.780.175.580,00
- PD Pertanian	Rp14.785.296.424,00
- PT Bank Sumut	Rp32.665.980.000,00
- PD Pertambangan	Rp392.604.569,00
Jumlah	Rp81.624.056.573,00

**B.1. Penyertaan Modal kepada PDAM Mual Na Tio.**

Jumlah penyertaan modal kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara 100,00% kepada PDAM Mual Na Tio sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp35.193.280.528,00, jumlah tersebut termasuk jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan statusnya Rp3.923.670.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 268/DCKP/2012 Nomor: 6905151/PDAM/2012. Untuk posisi penyertaan modal pada PDAM Mual Natio sampai dengan posisi 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.24.

**Tabel 5.24 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Natio**

No	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor s.d. 31 Desember 2020 (termasuk Rp3.923.670.000,00)	30.193.280.528,00
2	Penyertaan Modal 2021	5.000.000.000,00
2	Modal Pemerintah Pusat	2.814.498.342,00
3	Laba (rugi) s.d tahun 2021	(4.298.220.011,00)
4	Laba (rugi) tahun 2021	70.616.721,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.780.175.580,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**B.2. Penyertaan Modal PD Pertanian.**

Jumlah penyertaan modal Pemda Taput s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp15.500.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PD Tahun 1997 sebesar Rp100.000.000,00 dan Tahun 2001 sebesar Rp400.000.000,00, dan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memprogramkan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Pertanian sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00. PD Pertanian 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method*.

Selama tahun buku 2021 PD Pertanian mengalami Laba sebesar Rp185.473.567,00 sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.785.296.424,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.25 Penyertaan Modal pada PD Pertanian**

No.	Keterangan	Nilai
1	Modal Disetor Tahun 1997	100.000.000,00
2	Modal Disetor Tahun 2001	400.000.000,00
3	Modal Disetor Tahun 2015	5.000.000.000,00
4	Modal Disetor Tahun 2016	5.000.000.000,00
5	Modal Disetor Tahun 2017	5.000.000.000,00
6	Akumulasi Kerugian	(900.177.143,00)
7	Saldo Laba	185.473.567,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.785.296.424,00</b>

**B.3. Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut.**

Jumlah penyertaan modal ke PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp32.665.890.000,00 dengan jumlah lembar saham sebanyak 3.012.891 lembar dan harga per saham @Rp10.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diinvestasikan ke dalam saham PT Bank Sumut sampai dengan Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 5.26 Daftar Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut**

No.	Hasil RUPS	% Kepemilikan	Tanggal	Jumlah Saham (lembar)	Nilai
1	No.008/DIR/DPEMTS/SKS/2001	0,3	28-Jun-01	132.017	1.320.170.000,00
2	No.008/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	26.632	266.320.000,00
3	No.036/DIR/DTS-TS/SKS/2005	0,79	21-Mar-05	10.000	100.000.000,00
4	No.005/DIR/DTS-TS/SKS/2006	3,63	24-Mar-06	116.919	1.169.190.000,00
5	No.007/DIR/DTS-TS/SKS/2007	0,91	14-Feb-07	76.001	760.010.000,00
6	No.029/DIR/DTSPPI/SKS/2007	3,18	12-Nov-07	299.240	2.992.400.000,00
7	No.005/DIR/DTSPPI/SKS/2008	3,28	30-Dec-08	75.503	755.030.000,00
8	No.006/DIR/DTSPPI/SKS/2009	2,38	23-Okt-09	60.000	600.000.000,00
9	No.006/DIR/DTSPDI/SKS/2011	1,84	28-Mar-11	396.688	3.966.880.000,00
10	No.008/Dir/DTS-PDI/SKS/2013	1,62	08-Feb-13	349.471	3.494.710.000,00
11	No.2767/RC1Z-PN/HRS/2013	1,72	24-Dec-13	143.545	1.435.450.000,00
12	No.007/SP-SPr/SKS/2017	1,60	21-Mar-17	217.062	2.170.620.000,00
13	No.039/SP-SPr/SKS/2017	1,69	08-Mar-18	314.952	3.149.520.000,00
14	No.006/Dir/SP-SPr/SKS/2019	1,76	18-Mar-19	348.820	3.488.200.000,00
15	No.004/Dir/SP-SPr/SKS/2020	1,5	24-Feb-20	290.098	2.900.980.000,00
16	No.001/Dir/SP-SPr/SKS/2021	1,45	04-Mar-21	155.943	1.559.430.000,00
17	No.004/Dir/SP-SPr/SKS/2022	1,42	02-Mar-22	253.698	2.536.980.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.266.589</b>	<b>32.665.890.000,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selama kurun waktu Tahun 2001 s.d 2021 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut telah mencapai Rp32.665.895.433,00. Untuk lebih rinci daftar modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada PT Bank Sumut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.27 Daftar Modal disetor Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada PT Bank Sumut**

No.	Tahun Anggaran	Penyertaan Modal
1	2001	1.320.170.000,00
2	2005	366.320.000,00
3	2006	1.169.190.000,00
4	2007	3.752.410.000,00
5	2008	755.030.000,00
6	2009	600.000.000,00
7	2011	3.966.880.000,00
8	2012	3.494.710.000,00
9	2013	1.435.450.000,00
10	2016	2.170.620.000,00
11	2017	3.149.529.251,00
12	2018	3.488.198.234,00
13	2019	2.900.981.425,00
14	2020	1.559.428.709,00
15	2021	2.536.977.814,00
<b>Jumlah</b>		<b>32.665.895.433,00</b>

**B.4. Penyertaan Modal PD Industri dan Pertambangan.**

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Perusahaan Daerah Pertambangan s.d. 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00. PD Industri dan Pertambangan 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sehingga perhitungan nilai penyertaan modal adalah menggunakan *equity method*. Selama tahun buku 2021 PD Industri dan Pertambangan mengalami kerugian, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp392.604.569,00. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.28 Penyertaan Modal pada PD Industri dan Pertambangan**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Modal Disetor sampai tahun 2021	5.000.000.000,00
2	Laba (Rugi) ditahan	(3.960.621.781,00)
3	Laba (Rugi) tahun berjalan	(646.773.650,00)
<b>Jumlah</b>		<b>392.604.569,00</b>

Laporan Keuangan Perusahaan Daerah dapat dilihat dalam **lampiran 29**

**5.3.3. Aset Tetap**

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp2.295.541.664.511,42	Rp2.184.182.718.213,91

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.295.541.664.511,42 sudah mencakup saldo awal aset tetap ditambah dengan belanja modal pada tahun



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

berjalan, mutasi penambahan dan mutasi pengurangan atas aset tetap Tahun 2021. Rekapitulasi aset tetap pada **lampiran 15**, dan daftar saldo aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 16**.

Saldo Aset Tetap terdiri dari:

1. Tanah

	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
	Rp825.123.244.227,00	Rp814.466.289.342,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp825.123.244.227,000 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut. Rincian aset tetap tanah tercantum dalam **lampiran 17** dan daftar aset tanah yang masih sengketa terdapat pada **lampiran 17a**.

**Tabel 5.29 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah**

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
814.466.289.342,00	12.700.170.062,00	2.043.215.177,00	825.123.244.227

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap Tanah dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal			814.466.289.342,00
Mutasi Bertambah :			12.700.170.062,00
- Belanja Modal		5.032.098.143,00	
- Mutasi antar SKPD		1.320.494.900,00	
- Biaya Umum		432.956.149,00	
- Hibah 2021		5.914.620.870,00	
Mutasi Berkurang :			2.043.215.177,00
- Mutasi antar OPD		1.320.494.900,00	
- Penghapusan 2021		9.105.437,00	
- Hibah 2021		535.080.000,00	
- Reklasifikasi ke Beban	Belanja	178.534.840,00	
<b>Saldo akhir</b>			<b>825.123.244.227,00</b>

2. Peralatan dan Mesin

	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
	Rp379.857.751.686,78	Rp341.871.326.921,37

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp379.857.751.686,78 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

**Tabel 5.30 Penambahan/Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin**

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
341.871.326.921,37	54.164.708.692,41	16.178.283.937,00	379.857.751.686,78

Jumlah tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 mencakup saldo awal aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp341.871.326.931,37 penambahan sebesar Rp54.164.708.692,41 dan pengurangan sebesar Rp16.178.283.937,00. Rincian aset Peralatan dan Mesin per SKPD tercantum dalam **lampiran 18**.

Rekapitulasi mutasi peralatan dan mesin dapat dilihat berikut ini:





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo Awal		<b>341.871.326.921,37</b>
Mutasi Bertambah :		<b>54.164.708.692,41</b>
- Belanja Modal	41.376.791.335,91	
- Biaya Umum	48.008.943,00	
- Dana BOS	3.727.113.000,00	
- Pengadaan JKN dan BOK	989.961.968,00	
- Hibah	1.905.652.975,00	
- Reklasifikasi dari KIB D	414.488.839,00	
- Reklasifikasi dari KIB C Ke KIB B	192.667.567,51	
- Reklasifikasi KIB E Intra ke KIB B	241.550.000,00	
- Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa/ Persediaan ke KIB B	1.234.677.186,00	
- Mutasi antar OPD	753.789.778,00	
- Hibah	3.280.008.000,00	
Mutasi Berkurang :		<b>16.178.283.937,00</b>
- Mutasi Antar OPD	709.789.778,00	
- Reklasifikasi Aset Ke BHP	3.425.513.807,00	
- Rusak Berat Tahun 2021	9.075.860.990,00	
- Reklasifikasi Aset Yg Merupakan Beban Lain lain	28.910.000,00	
- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Ke Ekstrakomtabel	1.626.443.495,00	
- Reklasifikasi B Ke KIB E	28.000.000,00	
- Hibah 2021	44.946.727,00	
- Mutasi Ke Aset Lainnya	220.220.000,00	
- Pengurangan	1.018.599.140,00	
<b>Saldo akhir</b>		<b>379.857.751.686,78</b>

3. Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
<u>Rp742.136.090.397,87</u>	<u>Rp683.625.448.612,95</u>

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp742.136.090.397,87 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 5.31 Penambahan/Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan**

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
683.625.448.612,95	115.164.576.061,29	56.653.934.275,17	742.136.090.397,87

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp742.136.090.397,87 mencakup saldo awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp683.625.448.612,95, penambahan sebesar Rp115.164.576.061,29 dan pengurangan sebesar Rp56.653.934.275,17. Rincian aset tetap gedung dan bangunan per SKPD tercantum dalam lampiran 19.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rekapitulasi mutasi gedung dan bangunan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		683.625.448.612,95
Mutasi Bertambah :		115.164.576.061,29
- Belanja Modal	102.831.848.030,62	
- Biaya Umum	279.554.206,67	
- Hibah	3.737.610.941,00	
- Kapitalisasi/Rehab	311.260.000,00	
- Reklas Dari Barang Habis Pakai	2.177.642.797,00	
- Reklas Dari KIB D	118.827.600,00	
- Mutasi Antar OPD	5.707.832.486,00	
Mutasi Berkurang :		56.653.934.275,17
- Pembayaran Hutang PEN	45.173.922.578,00	
- Reklas Menjadi Biaya Beban	378.800.950,00	
- Kapitalisasi Threshold	901.615.426,66	
- Mutasi Antar OPD	4.636.682.370,00	
- Reklasifikasi Aset C Ke D	4.308.880.418,00	
- Reklasifikasi Aset C Ke B	192.667.567,51	
- Reklasifikasi Ke KIB F	1.061.364.965,00	
Saldo akhir		742.136.090.397,87

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp1.515.761.562.332,62	Rp1.391.191.425.712,03

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.515.761.562.332,62 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Penambahan/Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
1.391.191.425.712,03	162.348.888.045,87	37.778.751.425,28	1.515.761.562.332,62

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.515.761.562.332,62 mencakup saldo awal aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp1.391.191.425.712,03, penambahan sebesar Rp162.348.888.045,87 dan pengurangan sebesar Rp37.778.751.425,28. Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD tercantum dalam lampiran 20.

Rekapitulasi mutasi jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat berikut ini:

Saldo Awal		1.391.191.425.712,03
Mutasi Bertambah :		162.348.888.045,87
- Belanja Modal	138.088.293.591,80	
- Belanja Dana TT	9.387.436.290,30	
- Biaya Umum	466.567.242,33	
- Reklasifikasi Aset Dari C Ke KIB D	4.308.880.418,00	
- Reklas Dari Barang Pakai Habis	1.338.510.056,98	
- Mutasi Antar OPD	8.759.200.446,46	
Mutasi Berkurang :		37.778.751.425,28
- Kapitalisasi Treshold	1.586.264.136,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Reklasifikasi KIB D Menjadi KIB B Intra	414.488.839,00	
- Hibah	1.915.595.877,33	
- Reklas Ke KIB F	3.727.607.360,95	
- Reklas Ke KIB C	118.827.600,00	
- Pembayaran Hutang PEN 2020	20.237.617.050,00	
- Mutasi Antar OPD	9.778.350.562,00	
<b>Saldo akhir</b>		<b>1.515.761.562.332,62</b>

5. Aset Tetap Lainnya.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp14.256.093.354,00	Rp13.127.158.558,00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.256.093.354,00 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

Tabel 5.33 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
13.127.158.558,00	6.546.540.390,00	5.417.605.594,00	14.256.093.354,00

Jumlah tersebut merupakan saldo buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan dan kesenian per 31 Desember 2021, mencakup saldo awal aset tetap lainnya sebesar Rp13.127.158.558,00, penambahan sebesar Rp6.546.540.390,00 dan pengurangan sebesar Rp5.417.605.594,00. Rincian nilai aset tetap lainnya per SKPD tercantum dalam lampiran 21.

Rekapitulasi mutasi aset tetap lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal		<b>13.127.158.558,00</b>
Mutasi Bertambah :		<b>6.546.540.390,00</b>
- Belanja Modal	537.225.490,00	
- Pengadaan BOS Reguler 2021	5.981.314.900,00	
- Reklasifikasi Dari Kib B	28.000.000,00	
Mutasi Berkurang :		<b>5.417.605.594,00</b>
- Rusak Berat 2021	552.044.694,00	
- Mutasi Ke Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)	80.465.000,00	
- Reklasifikasi Ke E Ekstra	4.478.095.900,00	
- Reklas Ke Belanja Beban	65.450.000,00	
- Reklas Ke Kib B Intra	241.550.000,00	
<b>Saldo akhir</b>		<b>14.256.093.354,00</b>

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp4.788.972.325,95	Rp0,00

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.788.972.325,95, dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.34 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Awal	Penambahan	(Pengurangan)	Saldo Akhir
0,00	4.788.972.325,95	0,00	4.788.972.325,95

Rincian KDP per SKPD tercantum dalam lampiran 22.

Rekapitulasi mutasi konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

Saldo Awal		0,00
Mutasi Bertambah :		4.788.972.325,95
- Reklasifikasi Aset Dari C Ke KDP	4.788.972.325,95	
Mutasi Berkurang :		0,00
Saldo akhir		4.788.972.325,95

7. Akumulasi Penyusutan.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp1.186.382.049.812,80	Rp1.060.098.930.932,44

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.186.382.049.812,80 dengan uraian penambahan dan pengurangan sebagai berikut.

**Tabel 5.35 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 dan 2020**

NO	URAIAN	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan Tahun 2020	Penambahan/Pengurangan
1	Peralatan dan Mesin	247.424.323.906,02	216.657.359.541,22	30.766.964.364,80
2	Gedung dan Bangunan	165.468.560.870,04	149.905.565.921,94	15.562.994.948,10
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	768.784.735.921,39	689.253.679.339,70	79.531.056.581,69
4	Aset Tetap Lainnya	4.704.429.115,35	4.282.326.129,58	422.102.985,77
	<b>Jumlah</b>	<b>1.186.382.049.812,80</b>	<b>1.060.098.930.932,44</b>	<b>126.283.118.880,36</b>

Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 merupakan akumulasi penyusutan dari aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta saldo awal akumulasi penyusutan aset tahun 2020.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagaimana telah dijelaskan diatas tidak termasuk aset ekstrakompetabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya dibawah kapitalisasi, dengan rincian berikut:

**Tabel 5.36 Rekapitulasi Aset Ekstrakompetabel**

KODE UPB	NAMA UPB	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BAIK	RUSAK BERAT	
1.1.1.1	Sekretariat DPRD	181.574.364,00	5.872.500,00	187.446.864,00
4.1.1.1	SEKRETARIAT DAERAH	2.266.199.783,00	67.454.206,00	2.333.653.989,00
5.1.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.848.531,00	5.940.000,00	142.788.531,00
5.2.1.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	20.506.874.531,00	4.063.248,00	20.510.937.779,00
6.1.1.1	Dinas Perhubungan	60.308.381,00	13.359.191,00	73.667.572,00
6.2.1.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	218.639.820,00	3.122.276,00	221.762.096,00
7.1.1.1	DINAS KESEHATAN	4.353.456.678,00	922.739.288,00	5.276.195.966,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KODE UPB	NAMA UPB	JUMLAH		JUMLAH TOTAL
		BAIK	RUSAK BERAT	
7.2.1.1	Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung	1.398.263.314,00	98.275.644,00	1.496.538.958,00
8.1.1.1	Dinas Pendidikan	130.951.371.716,00	7.909.032.232,00	138.860.403.948,00
8.2.1.1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	13.059.200,00	0,00	13.059.200,00
9.1.1.1	Dinas Sosial	20.064.800,00	3.600.000,00	23.664.800,00
9.2.1.1	Dinas Ketenagakerjaan	78.343.469,00	299.999,00	78.643.468,00
10.1.1.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.499.859,00	10.215.426,00	26.715.285,00
10.2.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.080.000,00	1.855.972,00	8.935.972,00
10.3.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.012.380.264,00	15.392.000,00	1.027.772.264,00
11.1.1.1	Dinas Pertanian	184.640.879,00	124.177.449,00	308.818.328,00
11.2.1.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	445.450.365,00	150.440.444,00	595.890.809,00
12.1.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46.927.610,00	0,00	46.927.610,00
12.2.1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	310.368.342,00	4.091.100,00	314.459.442,00
13.1.1.1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	177.297.829,00	2.787.600,00	180.085.429,00
14.1.1.1	Inspektorat	9.026.368,00	6.148.381,00	15.174.749,00
15.1.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41.084.290,00	437.160,00	41.521.450,00
16.1.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	445.415.789,00	21.563.156,00	466.978.945,00
17.1.1.1	Dinas Pariwisata	1.600.663.021,00	19.247.664,00	1.619.910.685,00
18.1.1.1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	10.895.635,00	1.812.500,00	12.708.135,00
18.2.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja	132.610.387,00	27.084.025,00	159.694.412,00
19.1.1.1	Badan Kepegawaian Daerah	67.086.739,00	7.078.193,00	74.164.932,00
20.1.1.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79.252.144,00	8.795.000,00	88.047.144,00
20.2.1.1	Kantor Kecamatan Tarutung	212.954.700,00	5.066.180,00	218.020.880,00
20.3.1.1	Kantor Kecamatan Adiankoting	18.901.191,00	1.000.000,00	19.901.191,00
20.4.1.1	Kantor Kecamatan Siatas Barita	46.070.000,00	12.140.000,00	58.210.000,00
20.5.1.1	Kantor Kecamatan Pahae Julu	37.800.412,00	0,00	37.800.412,00
20.6.1.1	Kantor Kecamatan Pahae Jae	39.667.220,00	1.600.000,00	41.267.220,00
20.7.1.1	Kantor Kecamatan Purbatua	29.361.690,00	5.929.940,00	35.291.630,00
20.8.1.1	Kantor Kecamatan Simangumban	24.554.800,00	14.220.975,00	38.775.775,00
20.9.1.1	Kantor Kecamatan Sipoholon	12.748.180,00	18.330.470,00	31.078.650,00
20.10.1.1	Kantor Kecamatan Parmonangan	28.508.745,00	2.215.630,00	30.724.375,00
20.11.1.1	Kantor Kecamatan Pagaran	12.647.026,00	0,00	12.647.026,00
20.12.1.1	Kantor Kecamatan Siborong-borong	99.800.206,00	1.000.000,00	100.800.206,00
20.13.1.1	Kantor Kecamatan Muara	25.106.911,00	0,00	25.106.911,00
20.14.1.1	Kantor Kecamatan Sipahutar	13.814.588,00	4.786.940,00	18.601.528,00
20.15.1.1	Kantor Kecamatan Pangaribuan	21.659.232,00	1.600.000,00	23.259.232,00
20.16.1.1	Kantor Kecamatan Garoga	56.614.301,00	280.000,00	56.894.301,00
21.1.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	9.901.380,00	0,00	9.901.380,00
21.2.1.1	Dinas Perpustakaan	1.357.118.140,00	0,00	1.357.118.140,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>166.818.912.830,00</b>	<b>9.503.054.789,00</b>	<b>176.321.967.619,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.3.4. Aset Lainnya.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp63.915.900.124,00	Rp58.953.843.625,00

Jumlah saldo aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.915.900.124,00 merupakan Aset lain-lain berupa aset rusak berat, dan juga terdapat aset lain-lain sebesar Rp4.102.711.265,00. Rincian daftar Aset Lainnya tercantum di lampiran 23.

5.3.5. Aset Tidak Berwujud.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp737.051.408,28	Rp642.070.392,00

Jumlah saldo aset tidak berwujud setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp737.051.408,28, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Saldo Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Amortisasi s.d Tahun ini	Nilai Buku
Aset tidak berwujud berbentuk <i>software</i> pada:			
BPKPAD	363.818.400,00	363.818.400,00	-
BPPTPM	89.280.000,00	89.280.000,00	-
RSUD TARUTUNG	1.221.648.795,00	612.141.557,93	609.507.237,07
DINAS PERHUBUNGAN	114.404.417,00	36.621.583,67	77.782.833,33
SEKRETARIAT DAERAH	13.135.602,00	13.135.602,00	-
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	79.450.000,00	79.450.000,00	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39.950.000,00	37.286.666,67	2.663.333,33
DINAS PERTANIAN	49.918.000,00	45.758.166,67	4.159.833,33
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	74.833.000,00	72.755.283,33	2.077.716,67
DINAS PENDIDIKAN	86.760.000,00	45.899.545,45	40.860.454,55
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2.133.198.214,00</b>	<b>1.396.146.805,72</b>	<b>737.051.408,28</b>

Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 tercantum dalam lampiran 24.

5.3.6. Kewajiban.

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp387.955.532.843,36, yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rincian Kewajiban dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.38 Nilai Kewajiban Tahun 2021

Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020
Kewajiban Jangka Pendek	13.431.673.873,56	104.009.866.939,86
Kewajiban Jangka Panjang	374.523.858.969,80	232.655.668.168,80
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>387.955.532.843,36</b>	<b>336.665.535.108,66</b>

A. Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp13.431.673.873,56	Rp104.009.866.939,86



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.431.673.873,56, dengan rincian sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Diterima dimuka

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp13.300.000,00	Rp18.900.000,00

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung untuk 3 (tiga) pendapatan diterima dimuka yakni: Perjanjian Sewa Menyewa Tanah untuk Lokasi ATM PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero), Perjanjian kerjasama antara RSUD Daerah Tarutung dengan Rita Panjaitan untuk sewa Bangunan RSUD untuk Kantin dan Perjanjian Kerjasama antar RSUD Tarutung dengan Koperasi Kepemudaan Satahi Saoloan a.n Saut Lumbantobing untuk sewa bangunan kantin Pujasera RSUD Tarutung sebesar Rp13.300.000,00.

A.2. Utang Beban

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp13.208.212.422,00	Rp37.861.945.561,00

Saldo utang beban per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.208.212.422,00 merupakan utang beban yang dianggarkan pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Nilai Utang Beban Tahun 2021

NO	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
1.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan IV TA 2020, dibayarkan pada TA 2021	453.532.106,00	509.131.576,00	67.942.409,00
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan IV TA 2020, dibayarkan pada TA 2021.	109.085.573,00	73.836.621,00	(37.848.184,00)
3.	Beban Utang pada BLUD RSUD Tarutung	0,00	12.852.025.764,00	(12.852.025.764,00)
4.	Pembayaran Barang Obat pada RSUD Tarutung	3.935.106.000,00	0,00	3.935.106.000,00
5.	Pembayaran BHP Medis pada RSUD Tarutung	5.011.265.132,00	0,00	5.011.265.132,00
6.	Biaya Pemakaian Oksigen (BLUD)	255.993.200,00	0,00	255.993.200,00
7.	Utang Usaha-Bahan Makanan Pasien (BLUD)	21.918.712,00	0,00	21.918.712,00
8.	Utang Usaha-Makan Minuman Kegiatan Covid-19	77.311.699,00	0,00	77.311.699,00
9.	Utang Jasa Pelayanan Medis Pasien JKN (BLUD)	1.839.200.000,00	0,00	1.839.200.000,00
10.	Utang Jasa Manajemen (BLUD)	1.504.800.000,00	0,00	1.504.800.000,00
11.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	126.271.600,00	(126.271.600,00)
12.	Dinas Pertanian	0,00	24.300.680.000,00	(24.300.680.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>13.208.212.422,00</b>	<b>37.861.945.561,00</b>	<b>(24.603.288.396,00)</b>

A.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp210.161.451,56	Rp66.129.021.378,86

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 adalah utang jangka pendek yang masuk kepada pihak ketiga dengan



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penganggarnya pada jenis belanja modal sebesar Rp210.161.451,56 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp125.819.999,93 yaitu kegiatan Pembangunan MCK di Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar;
2. Utang Pembangunan PAUD di kecamatan Pangaribuan yang bersumber dari dana BKPSU Tahun 2014 yang tidak disalurkan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp84.341.451,63.

**B. Kewajiban Jangka Panjang**

<u>Per 31 Desember 2021</u>	<u>Per 31 Desember 2020</u>
Rp374.523.858.969,80	Rp232.655.668.168,80

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 kepada 2 (dua) kreditur dengan 3 (tiga) pinjaman yaitu:

1. Kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia atas Pembangunan Pusat Pasar Tarutung yang telah rusak total akibat gempa bumi tahun 1987 sebesar Rp3.986.668.168,80. Utang pembangunan Pasar Harungguan Tarutung dari PT Bank Dagang Negara Cabang Sibolga telah diusulkan oleh Bupati Tapanuli Utara untuk dihapuskan sesuai dengan surat permohonan Nomor 900/3833/1999 tanggal 8 Juli 1999 kepada Menteri Keuangan, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini. Sejak tahun 1988 utang pokok dan bunga tidak pernah diangsur. Lokasi Pasar Harungguan Tarutung telah menjadi bangunan perkantoran SKPD. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengajukan permohonan penghapusan kredit investasi sesuai dengan Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 900/1962/Dipenloka.III/2016 tanggal 06 Desember 2016 perihal Permohonan Penghapusan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Utara dengan Bank Dagang Negara Cabang Sibolga, namun belum ada jawaban sampai dengan saat ini.
2. Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pinjaman Daerah untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, dimana sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 29 Tanggal 23 Oktober 2020 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp326.670.000.000,00 untuk kegiatan yang dibiayai sebagai berikut:
  - a) Pengembangan Infrastruktur Jalan sebesar Rp115.670.000.000,00;
  - b) Pengembangan Infrastruktur SDA dan Irigasi sebesar Rp5.250.000.000,00;
  - c) Perbaikan Jalan Lingkungan dan PSU Pasar sebesar Rp65.500.000.000,00;
  - d) Pembangunan Pagar Puskesmas Pembantu sebesar Rp420.000.000,00;
  - e) Revitalisasi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan sebesar Rp210.000.000,00;





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f) Revitalisasi Poskesdes/polindes sebesar Rp12.750.000.000,00;
- g) Revitalisasi Puskesmas sebesar Rp2.520.000.000,00;
- h) Revitalisasi Puskesmas Pembantu sebesar Rp7.350.000.000,00;
- i) Rehabilitasi/Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD sebesar Rp33.930.750.000,00;
- j) Rehabilitasi/Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP sebesar Rp16.069.250.000,00;
- k) Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebesar Rp34.000.000.000,00;
- l) Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar Rp16.000.000.000,00;
- m) Pengembangan Kawasan Objek Wisata Salib Kasih sebesar Rp3.000.000.000,00;
- n) Revitalisasi Pasar sebesar Rp3.000.000.000,00;
- o) Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Saluran Irigasi sebesar Rp11.000.000.000,00.

Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 8 (delapan) tahun dengan masa tenggang selama 2 (dua) tahun, sedangkan bunga pinjaman sebesar 0% (nol persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun dan yang disalurkan pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) tahap dengan nilai penyaluran sebesar Rp228.669.000.000,00 kemudian disalurkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp90.537.190.801,00.

- 3. Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Tahun 2021, dimana sesuai Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor 78 Tanggal 17 September 2021 telah ditandatangani Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp73.330.000.000,00 untuk kegiatan yang dibiayai sebagai berikut:

- a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119 (seratus sembilan belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp62.800.000.000,00;
- b) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 17 (tujuh belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00;
- c) Dinas Pendidikan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan pagu sebesar Rp3.000.000.000,00;
- d) Dinas Pertanian 15 (lima belas) kegiatan dengan pagu sebesar Rp2.500.000.000,00;
- e) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 (dua) kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.030.000.000,00;
- f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 5 (lima) kegiatan dengan pagu sebesar Rp1.000.000.000,00.

Adapun jangka waktu pinjaman yang ditetapkan adalah 5 (lima) tahun dengan masa tenggang selama 6 (enam) bulan, sedangkan bunga pinjaman sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen) dan biaya provisi sebesar 1% yang dibayarkan satu kali serta biaya pengelolaan sebesar 0,185% per tahun dan yang disalurkan pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) tahap dengan nilai penyaluran sebesar Rp 51.331.000.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.3.7. Ekuitas.**

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/ dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp2.119.645.522.166,86
Surplus/ (defisit)-LO	Rp94.313.761.557,92
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp60.023.205.922,43
Ekuitas Akhir	Rp2.273.982.489.647,21

Surplus/ (defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

**5.4. Penjelasan Atas Laporan Operasional.**

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional.

Penyajian LO Komparatif TA 2021.

**5.4.1. Pendapatan - LO.**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp1.429.572.874.138,96	Rp1.092.994.775.025,99

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.40 Pendapatan - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	167.569.024.195,96	118.647.333.670,99	48.921.690.524,97	41,23
2	Pendapatan Transfer	1.182.249.505.790,00	895.128.451.961,00	287.121.053.829,00	32,08
3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	79.754.344.153,00	79.218.989.394,00	535.354.759,00	0,68
	<b>Jumlah</b>	<b>1.429.572.874.138,96</b>	<b>1.092.994.775.025,99</b>	<b>336.578.099.112,97</b>	<b>30,79</b>

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**A. Pendapatan Asli Daerah – LO.**

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
<b>Rp167.569.024.195,96</b>	<b>Rp118.647.333.670,99</b>

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2021 dan TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.41 Pendapatan Asli Daerah - LO**

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan) (Rp)	%
1	Pajak Daerah	23.131.800.214,00	21.416.666.354,33	1.715.133.859,67	8,01
2	Retribusi Daerah	5.609.373.007,88	4.551.433.218,88	1.057.939.789,00	23,24
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.961.082.639,00	7.557.286.367,00	(596.203.728,00)	(7,89)
4	Lain-lain PAD yang Sah	131.866.768.335,08	85.121.947.730,78	46.744.820.604,30	54,92
	<b>Jumlah</b>	<b>167.569.024.195,96</b>	<b>118.647.333.670,99</b>	<b>48.921.690.524,97</b>	<b>41,23</b>

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2021 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

**A.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO.**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pajak Hotel	192.672.653,00	99.743.332,00	92.929.321,00	93,17
2	Pajak Restoran	2.716.334.935,00	2.279.292.325,00	437.042.610,00	19,17
3	Pajak Hiburan	2.050.000,00	2.830.000,00	(780.000,00)	(27,56)
4	Pajak Reklame	503.349.072,00	346.733.453,00	156.615.619,00	45,17
5	Pajak Penerangan Jalan	6.252.402.458,00	5.674.480.457,00	577.922.001,00	10,18
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.594.405.263,00	4.949.339.625,83	(2.354.934.362,83)	(47,58)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.378.610.053,00	4.899.742.354,50	478.867.698,50	9,77
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.051.797.650,00	2.993.439.900,00	1.058.357.750,00	35,36
9	Pajak Parkir	75.382.250,00	66.516.400,00	8.865.850,00	13,33
10	Pajak Air Tanah	71.145.000,00	104.548.507,00	(33.403.507,00)	(31,95)
11	Pajak Reklame Kain	163.046.813,00	0,00	163.046.813,00	100,00
12	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	806.062.500,00	0,00	806.062.500,00	100,00
13	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	324.541.567,00	0,00	324.541.567,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.131.800.214,00</b>	<b>21.416.666.354,33</b>	<b>1.715.133.859,67</b>	<b>8,01</b>

**A.2. Pendapatan Retribusi Daerah – LO.**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2021 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.43 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.938.100,00	60.488.500,00	20.449.600,00	33,81
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	258.663.000,00	260.270.000,00	(1.607.000,00)	(0,62)
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	17.925.000,00	14.040.000,00	3.885.000,00	27,67
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	92.802.000,00	102.900.000,00	(10.098.000,00)	(9,81)
5	Retribusi Pelayanan Pasar	791.671.000,00	638.775.000,00	152.896.000,00	23,94
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.570.000,00	1.500.000,00	1.070.000,00	71,33
7	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	20.090.000,00	13.000.000,00	7.090.000,00	54,54
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	594.240.000,00	504.000.000,00	90.240.000,00	17,90
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.056.029.807,88	1.060.040.456,88	(4.010.649,00)	(0,38)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	9.070.000,00	7.165.000,00	1.905.000,00	26,59
11	Retribusi Terminal	36.437.000,00	18.450.000,00	17.987.000,00	97,49
12	Retribusi Tempat Penginapan/ Prasanggahan/Villa	6.000.000,00	5.400.000,00	600.000,00	11,11
13	Retribusi Rumah Potong Hewan	7.950.000,00	9.740.500,00	(1.790.500,00)	(18,38)
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	7.230.000,00	6.986.000,00	244.000,00	3,49
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	316.684.000,00	204.414.000,00	112.270.000,00	54,92
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.121.465.100,00	1.511.846.762,00	609.618.338,00	40,32
18	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	6.670.000,00	18.585.000,00	(11.915.000,00)	(64,11)
19	Retribusi Izin Trayek	2.100.000,00	2.700.000,00	(600.000,00)	(22,22)
20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	179.188.000,00	111.132.000,00	68.056.000,00	61,24
21	Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.609.373.007,88</b>	<b>4.551.433.218,88</b>	<b>1.057.939.789,00</b>	<b>23,24</b>

**A.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO.**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi sebesar Rp6.961.082.639,00, merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas Penyertaan pada Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari Perusahaan penyertaan modal pada PT Bank Sumut dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan investasi atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Realisasi hasil investasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.665.980.000,00 dengan deviden tahun 2021 sebesar Rp6.886.082.639,00, dan Setoran laba dari PD Pertanian sebesar Rp75.000.000,00.

**A.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO.**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.44 Rincian Lain-lain PAD yang sah – LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	343.894.100,00	349.230.165,00	(5.336.065,00)	(1,53)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	3.677.118.015,00	1.439.893.683,00	2.237.224.332,00	155,37
3	Pendapatan Bunga - LO	3.708.333.330,00	5.641.094.468,00	(1.932.761.138,00)	(34,26)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	3.295.560.095,06	979.015.645,49	2.316.544.449,57	236,62
5	Pendapatan dari Pengembalian, Sisa Dana TU, GU, UP, Keterlanjuran dan Pengembalian – LO	1.722.534.669,34	2.058.282.113,29	(335.747.443,95)	(16,31)
6	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	2.521.987.460,00	(2.521.987.460,00)	(100,00)
7	Pendapatan Denda Pajak	0,00	63.477.062,00	(63.477.062,00)	(100,00)
8	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	11.432.280.075,00	11.621.923.788,00	(189.643.713,00)	(1,63)
9	Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga – LO	0,00	178.403.740,00	(178.403.740,00)	(100,00)
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	107.024.583.556,00	51.745.909.331,00	55.278.674.225,00	106,83
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0,00	2.126.050,00	(2.126.050,00)	(100,00)
12	Angsuran Pengembalian Kios dan Balairung	0,00	7.538.000,00	(7.538.000,00)	(100,00)
13	Pendapatan BLUD - LO	0,00	8.523.258.200,00	(8.523.258.200,00)	(100,00)
14	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	(52.191.545,32)	(10.191.975,00)	(41.999.570,32)	412,08
15	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
16	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD	536.306.040,00	0,00	536.306.040,00	100,00
17	Hasil Kerjasama Daerah	178.035.000,00	0,00	178.035.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>131.866.768.335,08</b>	<b>85.121.947.730,78</b>	<b>46.744.820.604,30</b>	<b>54,92</b>

**B. Pendapatan Transfer – LO.**

**Tahun Anggaran 2021**

Rp1.182.249.505.790,00

**Tahun Anggaran 2020**

Rp895.128.451.961,00

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, namun ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.129.177.555.060,00	841.932.214.807,00	287.245.340.253,00	34,12
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah –LO	53.071.950.730,00	53.196.237.154,00	(124.286.424,00)	(0,23)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.182.249.505.790,00</b>	<b>895.128.451.961,00</b>	<b>287.121.053.829,00</b>	<b>32,08</b>

**B.1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO.**

Rincian Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel 5.46 berikut:

**Tabel 5.46 Rincian Transfer Pemerintah Pusat - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) – LO	109.744.869.923,00	25.689.499.043,00	84.055.370.880,00	327,20
2	Dana Alokasi Umum – LO	597.636.159.000,00	606.062.527.000,00	(8.426.368.000,00)	(1,39)
3	Dana Alokasi Khusus – LO	200.072.915.137,00	177.818.198.764,00	22.254.716.373,00	12,52
4	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	29.706.794.000,00	32.361.990.000,00	(2.655.196.000,00)	-8,20
5	Dana Desa –LO	192.016.817.000,00	0,00	192.016.817.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.129.177.555.060,00</b>	<b>841.932.214.807,00</b>	<b>287.245.340.253,00</b>	<b>34,12</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a. Bagi Hasil Pajak – LO.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan	22.707.800,00	505.837.082,00	(483.129.282,00)	(95,51)
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan	1.018.987.564,00	40.992.912,00	977.994.652,00	2385,77
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	8.988.833.497,00	9.499.537.911,00	(510.704.414,00)	(5,38)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	972.807.465,00	942.117.753,00	30.689.712,00	3,26
5	Bagi Hasil Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Pusat	0,00	230.043.635,00	(230.043.635,00)	(100,00)
6	Bagi hasil PBB Bagian Pusat yang dikembalikan ke Daerah	91.186.535.844,00	11.023.666.091,00	80.162.869.753,00	727,19
7	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah sector lainnya	0,00	20.326.454,00	(20.326.454,00)	(100,00)
8	Bagi Hasil SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	251.183.239,00	0,00	251.183.239,00	100,00
9	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara-Royalti-LO	5.833.356.259,00	0,00	5.833.356.259,00	100,00
10	Bagi Hasil SDA Perikanan-LO	1.470.458.255,00	0,00	1.470.458.255,00	100,00
11	Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	597.133.222,00	(597.133.222,00)	(100,00)
12	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	0,00	788.276.289,00	(788.276.289,00)	(100,00)
13	Pertambangan Minyak Bumi	0,00	86.913.644,00	(86.913.644,00)	(100,00)
14	Pertambangan Gas Bumi	0,00	152.843.713,00	(152.843.713,00)	(100,00)
15	Pertambangan Panas Bumi	0,00	134.870.850,00	(134.870.850,00)	(100,00)
16	Sumber Daya Alam Pertambangan Umum	0,00	1.666.939.487,00	(1.666.939.487,00)	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>109.744.869.923,00</b>	<b>25.689.499.043,00</b>	<b>84.055.370.880,00</b>	<b>327,20</b>

b. Dana Alokasi Umum (DAU).

DAU sebesar Rp597.636.159.000,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 untuk Kabupaten Tapanuli Utara telah diterima sebesar 100,00% dari yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp597.636.159.000,00.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK sebesar Rp200.072.915.137,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat dirinci menjadi 2 (dua) bagian yaitu DAK NON Fisik sebesar Rp114.077.398.118,00 dan DAK Fisik sebesar Rp85.995.517.019,00

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Dana Insentif Daerah (DID)

DID Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp29.706.794.000,00 merupakan insentif kepada Daerah atas peningkatan kinerja pengelolaan keuangan.

e. Dana Desa

Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp192.016.817.000,00 dimana penyaluran Dana desa dengan mekanisme Transfer dari Pusat dari RKUN ke Rekening Kas Desa (RKD), sehingga pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara hanya pencatatan.

B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Merupakan Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.071.950.730,00 merupakan penerimaan Tahun Anggaran 2021 telah disalurkan dari Pemerintah Provinsi ke kas daerah tahun anggaran 2021. Dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.617.181.719,00, terdiri dari Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp4.860.976.777,00 ditambah Piutang sebesar Rp2.756.204.942,00.
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.017.973.990,00, terdiri dari Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp6.916.944.472,00 ditambah Piutang sebesar Rp2.101.029.518,00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp16.440.803.452,00, terdiri dari Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp11.403.297.897,00 ditambah Piutang sebesar Rp5.037.505.555,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp503.659.940,00, terdiri dari Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp224.330.310,00 ditambah Piutang sebesar Rp279.329.630,00.
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp19.492.331.629,00, terdiri dari Penerimaan tahun 2021 sebesar Rp17.871.895.670,00 ditambah Piutang sebesar Rp1.620.435.959,00.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp79.754.344.153,00	Rp79.218.989.394,00

Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp79.754.344.153,00 merupakan Hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dikelola oleh PDAM Mual Na Tio sebesar Rp2.166.000.000,00 dan pendapatan lainnya yakni Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi dari PT SOL sebesar Rp13.974.380.025,00, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat langsung ke Sekolah-sekolah sebesar Rp3.280.008.000,00 dan Pendapatan Lainnya yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.333.956.128,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.4.2. Beban.**

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp1.325.044.792.002,04	Rp1.041.757.282.828,67

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.48 Rincian Beban - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Pegawai - LO	521.558.550.570,90	491.507.688.671,00	30.050.861.899,90	6,11
2	Beban Barang dan Jasa	339.314.544.347,18	349.351.346.678,45	(10.036.802.331,27)	(2,87)
3	Beban Bunga	0,00	604.339.500,00	(604.339.500,00)	(100,00)
4	Beban Hibah	68.565.971.013,00	9.248.723.114,00	59.317.247.899,00	641,36
5	Beban Bantuan Sosial	1.651.610.736,00	684.532.600,00	967.078.136,00	141,28
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	135.362.853.418,06	111.897.763.287,18	23.465.090.130,88	20,97
7	Beban Penyisihan Piutang	1.270.633.316,97	1.991.147.555,21	(720.514.238,24)	(36,19)
8	Beban Lain-lain	125.819.999,93	584.791.922,83	(458.971.922,90)	(78,48)
9	Beban Transfer	257.194.808.600,00	75.886.949.500,00	181.307.859.100,00	238,92
	<b>Jumlah</b>	<b>1.325.044.792.002,04</b>	<b>1.041.757.282.828,67</b>	<b>283.287.509.173,37</b>	<b>27,19</b>

Rincian lebih lanjut mengenai Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban luar Biasa adalah sebagai berikut:

**A. Beban Pegawai -LO**

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp521.558.550.570,90	Rp491.507.688.671,00

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

**Tabel 5.49 Rincian Beban Pegawai - LO**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	334.607.690.621,90	355.371.121.215,00	(20.763.430.593,10)	(5,84)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	56.972.437.647,00	134.686.777.328,00	(77.714.339.681,00)	(57,70)
3	Beban Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	575.280.000,00	383.174.100,00	192.105.900,00	50,14
4	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	656.593.474,00	690.283.070,00	(690.283.070,00)	(100,00)
5	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	313.022.677,00	200.265.958,00	(200.265.958,00)	(100,00)
6	Beban Uang Lembur	0,00	123.987.000,00	(123.987.000,00)	(100,00)
7	Beban Belanja Pegawai BLUD	0,00	52.080.000,00	(52.080.000,00)	(100,00)
8	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	115.032.682.743,00	0,00	116.002.298.894,00	100,00
9	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.228.158.165,00	0,00	13.228.158.165,00	100,00
10	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.685.243,00	0,00	172.685.243,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>521.558.550.570,90</b>	<b>491.507.688.671,00</b>	<b>30.050.861.899,90</b>	<b>6,11</b>

**B. Beban Barang dan Jasa**

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp339.314.544.347,18	Rp349.351.346.678,45

Beban Barang dan Jasa terdiri atas beban sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.50 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

No.	URAIAN	Rp.
	<b>Beban Persediaan</b>	
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	6.510.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.979.253.798,00
3	Beban Bahan-Bahan Baku	854.438.682,08
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.340.646.500,00
5	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	73.924.400,00
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.090.861.850,00
7	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.200.928.955,24
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.531.578.416,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	18.599.500,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	213.260.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	150.900.200,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.479.147.042,52
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.975.000,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.217.575.934,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	164.374.200,00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	842.722.760,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	632.738.100,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.520.085.310,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	2.254.926.462,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	10.948.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.483.325.015,00
22	Beban Obat-Obatan-Obat	9.696.716.679,74
23	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	260.000.439,85
24	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	42.078.844.823,98
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	59.396.550,00
26	Beban Natura dan Pakan-Natura	13.493.216.844,03
27	Beban Natura dan Pakan-Pakan	511.940.344,48
28	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	(35.898.800,00)
29	Beban Makanan dan Minuman Rapat	2.934.012.500,00
30	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.101.000,00
31	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.600.000,00
32	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	30.000.000,00
33	Beban Komponen-Komponen Lainnya	5.174.703.133,39
34	Beban Pipa-Pipa Baja	6.114.200,00
35	Beban Pipa-Pipa Lainnya	720.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>107.333.187.840,31</b>
	<b>Beban Jasa</b>	
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	115.773.700,00
2	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	73.132.800,00
3	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.376.500.000,00
4	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.328.847.479,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.242.000.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	7.958.100.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	24.637.394.142,00
8	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	74.361.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	526.906.000,00
10	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	268.250.000,00
11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	370.740.000,00
12	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	48.000.000,00
13	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	73.250.200,00
14	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.000.000,00
15	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	20.112.828.498,00
16	Beban Jasa Tenaga Ahli	162.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	Rp.
17	Beban Jasa Tenaga Keamanan	150.000.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Supir	480.000.000,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	33.109.562,00
20	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.600.000,00
21	Beban Jasa Kalibrasi	19.190.000,00
22	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.469.668.000,00
23	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	849.386.200,00
24	Beban Tagihan Telepon	48.246.311,00
25	Beban Tagihan Air	380.276.768,00
26	Beban Tagihan Listrik	6.697.680.910,00
27	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	609.969.700,00
28	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.066.045.607,00
29	Beban Paket/Pengiriman	151.106.125,00
30	Beban Registrasi/Keanggotaan	153.571.740,00
31	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.126.208,00
32	Beban Pengolahan Air Limbah	265.483.317,00
33	Beban Lembur	123.993.000,00
34	Beban Medical Check Up	247.240.778,00
35	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	686.320.000,00
36	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	91.540.800,00
37	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	43.797.902,51
38	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	47.640.633,36
39	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	79.106.300,00
40	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.000.000,00
41	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	87.800.000,00
42	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	701.984.135,00
43	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	130.096.000,00
44	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	66.438.000,00
45	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	15.490.004,00
46	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00
47	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	37.500.000,00
48	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	5.000.000,00
49	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	292.274.000,00
50	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	193.900.000,00
51	Beban Sewa Hotel	326.477.860,00
52	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	52.000.000,00
53	Beban Sewa Audio Visual	4.000.000,00
54	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	481.924.854,00
55	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	145.235.000,00
56	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	95.000.000,00
57	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.690.921.500,00
58	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	530.995.300,00
59	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	265.990.000,00
60	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	56.000.000,00
61	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	789.763.200,00
62	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	144.408.000,00
63	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	119.840.000,00
64	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	278.577.000,00
65	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	189.002.000,00
66	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	82.382.467.829,00
67	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	2.127.484.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	Rp.
68	Beban Beasiswa	85.000.000,00
69	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	414.000.000,00
70	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.364.810.940,00
71	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	444.620.200,00
72	Beban Barang dan Jasa BLUD	12.645.594.743,00
<b>JUMLAH</b>		<b>194.265.528.245,87</b>
<b>Beban Pemeliharaan</b>		
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	10.000.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.165.054.056,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.134.471.478,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	149.219.804,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	24.887.500,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	604.644.750,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.880.000,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.150.000,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	16.455.000,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	164.014.600,00
11	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	33.225.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>3.351.002.188,00</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.649.707.673,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.715.118.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>34.364.826.073,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>339.314.544.347,18</b>

C. Beban Bunga

Tahun Anggaran 2021

Tahun Anggaran 2020

Rp0,00

Rp604.339.500,00

Beban Bunga Tahun Anggaran 2021 adalah nihil.

D. Beban Hibah.

Tahun Anggaran 2021

Tahun Anggaran 2020

Rp68.565.971.013,00

Rp9.248.723.114,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara atas pemberian Hibah yang telah diprogramkan pada APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021, dimana beban hibah pada masing-masing OPD yang mengelola belanja hibah daerah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
 (dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 5.51 Rincian Beban Hibah**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Hibah kepada kelompok/ anggota masyarakat	1.919.500.000,00	521.000.000,00	1.398.500.000,00	268,43
2	Beban Hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi/ Dana BOS	64.350.186.092,00	1.196.000.000,00	63.154.186.092,00	5280,45
3	Beban Hibah kepada Pemerintah	100.000.000,00	6.547.900.791,00	(6.447.900.791,00)	(98,47)
4	Beban Hibah kepada Partai Politik	827.284.921,00	937.276.123,00	(109.991.202,00)	(11,74)
5	Beban Hibah dari Kelompok Masyarakat	1.219.000.000,00	46.546.200,00	1.172.453.800,00	2518,90
6	Hibah Uang kepada Koperasi	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>68.565.971.013,00</b>	<b>9.248.723.114,00</b>	<b>59.317.247.899,00</b>	<b>641,36</b>

**E. Beban Bantuan Sosial.**

**Tahun Anggaran 2021**

Rp1.651.610.736,00

**Tahun Anggaran 2020**

Rp684.532.600,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.52 Rincian Beban Bantuan Sosial**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.651.610.736,00	684.532.600,00	(56.484.400,00)	(7,62)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.651.610.736,00</b>	<b>684.532.600,00</b>	<b>(56.484.400,00)</b>	<b>(7,62)</b>

**F. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

**Tahun Anggaran 2021**

Rp135.362.853.418,06

**Tahun Anggaran 2020**

Rp111.897.763.287,18

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap TA 2021, yang terdiri atas:

**Tabel 5.53 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39.654.947.241,80	34.926.243.937,64	4.728.703.304,16	13,54
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.420.167.931,41	13.442.115.053,59	1.978.052.877,83	14,72
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.531.056.581,72	62.781.557.728,63	16.749.498.853,09	26,68
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	550.977.679,77	466.097.746,60	84.879.933,17	18,21
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	205.703.983,36	281.748.820,72	(76.044.837,36)	(26,99)
	<b>Jumlah</b>	<b>135.362.853.418,06</b>	<b>111.897.763.287,18</b>	<b>23.465.090.130,88</b>	<b>20,97</b>



Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2021, dilakukan dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut:

- Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
- Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu. Untuk aset tetap yang diperoleh pada pertengahan tahun, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai bulan pertama perolehan.

G. Beban Penyisihan Piutang.

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp1.270.633.316,97	Rp1.991.147.555,21

Beban penyisihan piutang merupakan penyisihan piutang tak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada TA 2015, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban penyisihan piutang Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.270.633.316,97 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp1.198.868.683,88 dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp71.764.633,09. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 13.

H. Beban Lain-lain

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp125.819.999,93	Rp584.791.922,83

Beban Lain-lain pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp125.819.999,93 yang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atau utang jangka pendek yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, kegiatan Pembangunan MCK di Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar sebesar Rp125.819.999,93.

I. Beban Transfer

<b>Tahun Anggaran 2021</b>	<b>Tahun Anggaran 2020</b>
Rp257.194.808.600,00	Rp75.886.949.500,00

Beban transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Transfer terdiri atas Bantuan Keuangan ke Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.54 Rincian Beban Transfer – LO

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	257.194.808.600,00	75.886.949.500,00	181.307.859.100,00	238,92
	<b>Jumlah</b>	<b>257.194.808.600,00</b>	<b>75.886.949.500,00</b>	<b>181.307.859.100,00</b>	<b>238,92</b>

5.4.3. Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasi.

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp104.528.082.136,92	Rp51.237.492.197,32

Surplus dari Kegiatan Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp104.528.082.136,92 yang merupakan selisih lebih dari Pendapatan-LO sebesar Rp1.429.572.874.138,96 dengan Beban sebesar Rp1.325.044.792.002,04 sehingga dibandingkan dengan kegiatan operasi tahun 2020, terdapat peningkatan kegiatan operasional pada tahun 2021 sebesar Rp53.290.589.939,60 atau 104,01%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Surplus dan Defisit dari Kegiatan Operasi – LO

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Pendapatan-LO	1.429.572.874.138,96	1.092.994.775.025,99	336.578.099.112,97	30,79
2	Beban	1.325.044.792.002,04	1.041.757.282.828,67	283.287.509.173,37	27,19
	<b>Surplus/ Defisit dari Operasi</b>	<b>104.528.082.136,92</b>	<b>51.237.492.197,32</b>	<b>53.290.589.939,60</b>	<b>104,01</b>

5.4.4. Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp87.760.063,00	Rp911.501.110,00

Sedangkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.760.063,00 merupakan selisih koreksi dari investasi jangka panjang permanen penyertaan modal pemerintah daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Koreksi Kegiatan Non Operasional Dari Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Saldo Akhir 2020	Pertambahan 2021	Total Penyertaan Modal	Penyesuaian	Investasi
1	PDAM Mual Na Tio	28.709.558.859,00	5.000.000.000,00	33.709.558.859,00	33.780.175.580,00	70.616.721,00
2	PT Bank SUMUT	30.128.910.000,00	2.536.977.814,00	32.665.887.814,00	32.665.980.000,00	92.186,00
3	PD Pertanian	14.599.822.857,00	0,00	14.599.822.857,00	14.785.296.424,00	185.473.567,00
4	PD Pertambangan	736.547.106,00	0,00	736.547.106,00	392.604.569,00	(343.942.537,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>74.174.838.822,00</b>	<b>7.536.977.814,00</b>	<b>81.711.816.636,00</b>	<b>81.624.056.573,00</b>	<b>(87.760.063,00)</b>

5.4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar Rp104.440.322.073,92 (surplus/defisit dari kegiatan operasi Rp104.528.082.136,92 – defisit dari kegiatan non operasional Rp87.760.063,00).



#### 5.4.6. Pos Luar Biasa

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp10.126.560.516,00	Rp0,00

Pos luar biasa terdiri dari:

- Pendapatan Luar Biasa – LO sebesar Rp0,00.
- Beban Luar Biasa – LO sebesar Rp10.126.560.516,00.

#### 5.4.7. Surplus/ Defisit LO.

Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Rp94.313.761.557,92	Rp50.325.991.087,32

Surplus/defisit LO TA 2021 adalah sebesar Rp94.313.761.557,92 (surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp104.440.322.073,92 + pos luar biasa Rp(10.126.560.516,00)). Dibandingkan dengan surplus Laporan Operasional Tahun 2020 sebesar Rp50.325.991.087,32 maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami peningkatan surplus-LO laporan operasional Tahun 2021 sebesar Rp43.987.770.470,60 atau sebesar 87,41%.

### 5.5. Rincian dan Penjelasan Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Laporan arus kas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan kas sebesar Rp75.252.592.060,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2021

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	228.938.387.591,20	143.327.688.352,58
2	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(295.455.235.508,20)	(345.370.177.883,36)
3	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	141.868.190.801,00	228.669.000.000,00
4	Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(98.750.824,00)	(859.157.297,20)
<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>		<b>75.252.592.060,00</b>	<b>25.767.353.172,02</b>

#### 5.5.1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp228.938.387.591,20	Rp143.327.688.352,58

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah dan belanja tidak terduga dan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. Arus Kas Masuk.

Rincian arus kas masuk dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.58 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	21.703.779.853,00	19.678.100.705,83
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.470.983.860,00	4.601.554.356,83
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA	6.961.082.639,00	7.557.286.367,00
4	Lain-lain PAD yang sah-LRA	128.655.774.080,40	101.188.923.370,78
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.129.177.555.060,00	809.570.224.807,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	0,00	224.378.807.000,00
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	49.633.810.683,00	44.839.871.597,00
8	Pendapatan Hibah-LRA	16.140.380.025,00	69.863.645.716,00
9	Pendapatan Lainnya-LRA	60.333.956.128,00	8.841.265.739,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.418.077.322.328,40</b>	<b>1.290.519.679.659,44</b>

B. Arus Kas Keluar

Rincian arus kas keluar dari aktifitas operasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.59 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Belanja Pegawai	521.578.901.088,90	491.483.123.408,00
2	Belanja Barang dan Jasa	326.238.489.421,85	341.115.892.680,86
3	Belanja Bunga	0,00	604.339.500,00
4	Belanja Hibah	68.565.971.013,00	9.202.176.914,00
5	Bantuan Sosial	1.651.610.736,00	684.532.600,00
6	Belanja Tidak Terduga	10.126.560.516,00	36.198.159.704,00
7	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	257.194.808.600,00	267.903.766.500,00
8	Pembayaran Cicilan Pokok Utang	3.782.593.361,45	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.189.138.934.737,20</b>	<b>1.147.191.991.306,86</b>

Dengan demikian, jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp228.938.365.491,20, dimana arus kas masuk sebesar Rp1.418.077.322.328,40 dikurangi jumlah arus kas keluar sebesar Rp1.189.138.934.737,20.

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
(Rp295.455.235.508,20)	(Rp345.370.177.883,36)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan publik.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa dalam Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan penambahan aset untuk pelayanan publik senilai Rp295.455.235.508,20. Perincian atas aktivitas investasi Tahun 2021 sebagai berikut:





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 5.60 Arus Kas dari Aktifitas Investasi

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>349.230.165,00</b>
	a) Hasil Penjualan Peralatan/ Mesin-LRA	0,00	349.230.165,00
	b) Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	<b>Arus Kas Keluar:</b>	<b>295.455.235.508,20</b>	<b>345.719.408.048,36</b>
	a) Belanja Modal Tanah	5.032.098.143,00	1.691.144.000,00
	b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.376.791.335,91	51.036.494.674,60
	c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.883.849.131,30	57.823.060.309,86
	d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.088.293.593,99	226.099.706.572,90
	e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	537.225.490,00	2.509.573.782,00
	f) Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	7.536.977.814,00	6.559.428.709,00
	<b>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(295.455.235.508,20)</b>	<b>(345.370.177.883,36)</b>

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp141.868.190.801,00	Rp228.669.000.000,00

Arus kas dari aktivitas Pendanaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat dengan Pengelolaan PT SMI (Persero), dari Perjanjian yang telah diikat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan PT SMI (Persero) sebesar Rp326.670.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2020 dan sebesar Rp73.330.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2021 dan telah disalurkan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp228.669.000.000,00 dan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp141.868.190.801,00.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp(98.750.824,00)	Rp(859.157.297,20)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara selama Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.61 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	<b>Arus Kas Masuk:</b>	<b>38.697.521.641,41</b>	<b>65.183.430.962,50</b>
	a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.697.521.641,41	65.183.430.962,50
	b) Pendapatan yang ditangguhkan	0,00	0,00
2	<b>Arus Kas Keluar:</b>	<b>38.796.272.465,41</b>	<b>66.042.588.259,70</b>
	a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	38.697.521.641,41	65.183.430.962,50
	b) Koreksi Silpa	98.750.824,00	859.157.297,20
	c) Pengeluaran utang pihak ketiga	0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(98.750.824,00)</b>	<b>(859.157.297,20)</b>

Penerimaan perhitungan pihak ketiga sudah termasuk penerimaan dari pemotongan PPh dan PPN dari pembayaran SP2D untuk pihak ketiga. Pemungutan PPh dan PPN atas pembayaran kepada pihak ketiga melalui mekanisme SP2D LS kepada rekanan dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD dengan memotong dan menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara atas pajak yang dipotong.



### 5.5.5. Saldo Akhir Kas.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp172.195.177.661,30	Rp96.938.264.321,30

Saldo akhir kas adalah merupakan saldo akhir kas di BUD, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya, seperti dirinci pada Tabel 5.63.

Tabel 5.62 Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	Per 31 Des 2021	Per 31 Des 2020
1	Kenaikan/ (Penurunan) Kas	75.252.592.060,00	25.767.353.172,02
2	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan	96.682.361.598,30	70.915.008.426,28
3	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas BLUD, Kas Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS	171.934.953.658,30	96.682.361.598,30
	Kas di BUD	146.115.158.709,50	87.024.856.583,50
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	34.456.000,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.391.500,00	64.294.824,00
	Kas di BLUD	22.945.373.571,00	4.409.924.361,00
	Kas di Bendahara FKTP	1.882.826.085,00	4.114.796.073,00
	Kas di Bendahara Dana BOS	986.203.792,80	1.034.033.756,80
	Kas Lainnya	260.224.003,00	255.902.723,00
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>172.195.177.661,30</b>	<b>96.938.264.321,30</b>

### 5.6. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun Anggaran 2021 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020.

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan jumlah kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten merupakan konsolidasi dari Laporan Perubahan Ekuitas pada Seluruh SKPD di Kabupaten Tapanuli Utara. Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.63 Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020	Peningkatan/ (Penurunan)	(%)
1.	Ekuitas Awal	2.119.645.522.166,86	2.100.407.779.843,03	19.237.742.323,83	0,92
2.	Surplus/ Defisit-LO	94.313.761.557,92	50.325.991.087,32	43.987.770.470,60	87,41
3.	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	60.023.205.922,43	(31.088.248.763,49)	91.111.454.685,92	(293,07)
	<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>2.273.982.489.647,21</b>	<b>2.119.645.522.166,86</b>	<b>154.336.967.480,35</b>	<b>7,28</b>

#### 5.6.1. Ekuitas Awal.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp2.119.645.522.166,86	Rp2.100.407.779.843,03



Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.119.645.522.166,86 yang merupakan ekuitas akhir per 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp2.100.407.779.843,03, mengalami kenaikan sebesar Rp19.237.742.323,83 atau 0,92% bila dibandingkan Saldo Ekuitas awal Tahun 2020 sebesar Rp2.100.407.779.843,03.

#### 5.6.2. Surplus/Defisit –LO.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp94.313.761.557,92	Rp50.325.991.087,32

Operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp94.313.761.557,92 yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Pada Tahun Anggaran 2020 operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami surplus sebesar Rp50.325.991.087,32.

#### 5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp60.023.205.922,43	Rp(31.088.248.763,49)

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp60.023.205.922,43 dan Rp(31.088.248.763,49), mengalami peningkatan sebesar Rp91.111.454.685,92 atau 293,07%.

#### 5.6.4. Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
Rp2.273.982.489.647,21	Rp2.119.645.522.166,86

Saldo ekuitas akhir Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.273.982.489.647,21 dan Rp2.119.645.522.166,86, atau mengalami kenaikan sebesar Rp154.336.967.480,35 atau 7,28%. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp2.119.645.522.166,86 ditambah surplus/ defisit-LO sebesar Rp94.313.761.557,92 dan ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp60.023.205.922,43.



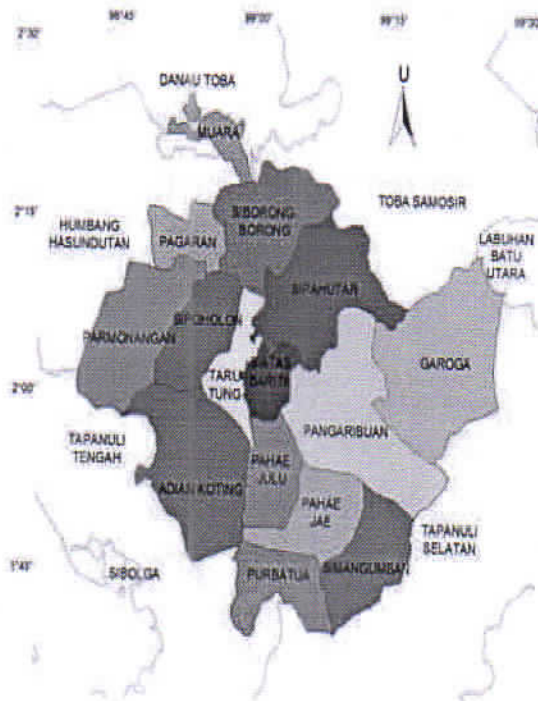
## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

### 6.1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Tapanuli Utara

Kabupaten Tapanuli Utara dan pemekernya dibentuk berdasarkan Undang-undang:

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

### 6.2. Letak Geografis



Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Utara, 1°20'00" - 2°41'00" Lintang Utara dan 98°05'-99°16' Bujur Timur dengan luas wilayah 3.800,31 km<sup>2</sup> (sudah termasuk perairan Danau Toba yang berada di Kecamatan Muara seluas 6,60 km<sup>2</sup>) dengan jumlah penduduk 284.148 jiwa. Kabupaten Tapanuli Utara dikelilingi oleh lima kabupaten, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir, sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara administratif, Kabupaten Tapanuli Utara terbagi dalam 15 kecamatan 241 Desa dan 11 Kelurahan. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Garoga dengan luas sekitar 567,58 Km<sup>2</sup> atau 14,96 persen dari luas Kabupaten Tapanuli Utara, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Muara dengan luas sekitar 79,75 Km<sup>2</sup> atau 2,10 persen.



Tabel 6.1 Luas Wilayah per Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Total (%)
Parmonangan	257,35	6,78
Adiankoting	502,90	13,26
Sipoholon	189,20	4,99
Tarutung	107,68	2,84
Siatas Barita	92,92	2,45
Pahae Julu	165,90	4,37
Pahae Jae	203,20	5,36
Purbatua	191,80	5,06
Simangumban	150,00	3,95
Pangaribuan	459,25	12,10
Garoga	567,58	14,96
Sipahutar	408,22	10,76
Siborongborong	279,91	7,38
Pagaran	138,05	3,64
Muara	79,75	2,10
<b>Tapanuli Utara</b>	<b>3.793,71</b>	<b>100,00</b>

Topografi dan kontur tanah Kabupaten Tapanuli Utara beraneka ragam yaitu yang tergolong datar (3,16 persen), landai (26,86 persen), miring (25,63 persen) dan terjal (44,35 persen).

Berdasarkan topografinya daerah ini berada di jajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang, hanya sekitar 9,66 % dari keseluruhan luas wilayah yang berbentuk datar dan berada pada ketinggian 300-2.000 m di atas permukaan laut.

Menurut ketinggian di atas permukaan laut (dpl)

1	300 – 500 m	: 13.784 Ha	3,63 %
2	500 – 1.000 m	: 148.072 Ha	39,03 %
3	1.000 – 1.500 m	: 216.919 Ha	57,18 %
4	1.500 m – keatas	: 596 Ha	0,16 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Menurut kemiringan/kelerengan tanah

1	Datar (0 s.d. 2 %)	: 11.976 Ha	3,16 %
2	Landai (2 s.d. 5 %)	: 101.903 Ha	26,86 %
3	Miring (15 s.d. 40 %)	: 97.230 Ha	25,63 %
4	Terjal (45 %)	: 168.262 Ha	44,35 %
	Jumlah	: 379.371 Ha	100 %

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah dengan potensi alam antara lain luasnya lahan kering untuk dijadikan persawahan baru dengan membangun irigasi. Sebagian perairan Danau Toba yang dimiliki dan sungai yang cukup banyak untuk dimanfaatkan potensinya untuk irigasi, pengembangan perikanan maupun pembangkit tenaga listrik. Keindahan alam dengan panorama, khususnya Pulau Sibidang di kawasan Danau Toba di Kecamatan Muara dan wisata rohani Salib Kasih. Kekayaan seni budaya asli merupakan potensi daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan nasional. Potensi lain terdapat berbagai jenis mineral, seperti kaolin, batu gamping, belerang, batu besi, mika, batubara, panas bumi, dan sebagainya.



### 6.3. Visi dan Misi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi "*Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata*" serta implementasi dari misi Kabupaten Tapanuli Utara, yakni:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan;
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal;
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan;
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani, dan agrowisata;
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan system *e-government*.

### 6.4. Organisasi dan Personalia.

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meliputi 29 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 Bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 3 Bidang Urusan Pilihan dan 8 Bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang meliputi 45 Unit Organisasi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai berikut:

#### 6.4.1. Urusan dan Bidang.

Tabel 6.2 Urusan dan Bidang

Kode	Urusan dan Bidang
<b>1</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>
1 . 01	Pendidikan
1 . 02	Kesehatan
1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 . 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1 . 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 . 06	Sosial
<b>2</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>
2 . 01	Tenaga Kerja
2 . 03	Pangan
2 . 05	Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Urusan dan Bidang
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.09	Perhubungan
2.10	Komunikasi dan Informatika
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12	Penanaman Modal
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga
2.17	Perpustakaan
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>
3.02	Pariwisata
3.03	Pertanian
3.07	Perindustrian
<b>4</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>
4.01	Administrasi Pemerintahan
4.02	Pengawasan
4.03	Perencanaan
4.04	Keuangan
4.05	Kepegawaian
4.06	Sekretariat DPRD
4.07	Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
4.08	Kesatuan Bangsa dan Politik

6.4.2. Unit Organisasi (OPD).

Tabel 6.3. Unit Organisasi (OPD)

No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
7	Dinas Sosial
8	Dinas Ketenagakerjaan
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10	Dinas Lingkungan Hidup
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Dinas Perhubungan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga
19	Dinas Perpustakaan
20	Dinas Pariwisata
21	Dinas Pertanian
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah
25	Sekretariat DPRD
26	Kantor Kecamatan Tarutung
27	Kantor Kecamatan Siatas Barita
28	Kantor Kecamatan Adiankoting



No.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
29	Kantor Kecamatan Sipoholon
30	Kantor Kecamatan Pahae Julu
31	Kantor Kecamatan Pahae Jae
32	Kantor Kecamatan Purbatua
33	Kantor Kecamatan Simangumban
34	Kantor Kecamatan Sipahutar
35	Kantor Kecamatan Pangaribuan
36	Kantor Kecamatan Garoga
37	Kantor Kecamatan Siborongborong
38	Kantor Kecamatan Pagaran
39	Kantor Kecamatan Parmonangan
40	Kantor Kecamatan Muara
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
42	Inspektorat
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
44	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
45	Badan Kepegawaian Daerah

#### 6.4.3. Pejabat Pemerintah Daerah.

##### a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 35 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Ketua DPRD : Ir. Poltak Pakpahan
2. Wakil Ketua : Fatimah Hutabarat, SE
3. Wakil Ketua : Ir. Reguel Simanjuntak
4. Ketua Komisi A : Ombun Simanjuntak
5. Ketua Komisi B : Mangoloi Pardede, SE
6. Ketua Komisi C : Royal Parulian Simanjuntak, ST

##### b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KdH/WKdH).

Untuk periode 2019 sampai dengan 2024, Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh Bupati Drs. Nikson Nababan, M.Si dan Wakil Bupati Sarlandy Hutabarat, SH, MM yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018.

#### 6.5. Informasi Tambahan Penyajian Laporan Keuangan.

##### 1. Penyajian Nilai Jaminan Pemeliharaan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Perubahan Keempat), pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah jadi dari Pihak Ketiga, dapat dilakukan melalui dua (2) cara yaitu:

- a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan.
- b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai 8 program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.





## 2. Penyajian Nilai Aset

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan penilaian terhadap aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2021 telah melaksanakan penyusutan sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, guna mengimplementasikan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menerbitkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Nilai aset tetap yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ini merupakan Saldo Awal TA. 2021 ditambah nilai perolehan aset tetap pada Tahun Anggaran 2021, penambahan aset tetap juga terjadi dikarenakan adanya reklasifikasi dan inventarisasi aset. Sedangkan pengurangan nilai aset tetap akibat terbitnya:

- a. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tetap Lainnya berupa Ternak Babi pada Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021.
- b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021.
- c. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah Dermaga Muara Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021.
- d. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada 19 (sembilan belas) UPT Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021.
- e. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada 12 (dua belas) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang melibatkan seluruh pengurus barang pengguna SKPD yang akan dilanjutkan pengentrian melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada masing-masing SKPD.

Beberapa hal yang menyebabkan penambahan dan pengurangan nilai aset tetap adalah:

1. Penambahan nilai aset tetap disebabkan adanya:
  - a. pengadaan belanja modal aset tetap Tahun Anggaran 2021;
  - b. mutasi pencatatan antar SKPD;



- c. nilai pencatatan rincian aset yang belum tercatat pada buku inventaris aset Tahun Anggaran 2021;
- d. Hibah dari pihak ketiga.
2. Pengurangan nilai aset tetap disebabkan adanya:
  - a. penghapusan nilai aset tetap sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 16 Tahun 2021, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 21 Tahun 2021, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2021, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2021;
  - b. koreksi nilai aset tetap atas keadaan fisik yang sebenarnya;
  - c. koreksi nilai aset tetap atas pencatatan berulang;
  - d. koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset tetap;
  - e. pengelompokan aset tetap yang rusak berat dicatat menjadi nilai aset lainnya;
  - f. pencatatan mutasi antar SKPD.

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM).

Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil per akhir Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4.974 orang dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan IV	=	1.063 Orang
- Golongan III	=	2.729 Orang
- Golongan II	=	1.143 Orang
- Golongan I	=	<u>39 Orang</u>
- Jumlah		4.974 Orang

### 4. Kebijakan Yang Ditempuh Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Organisasi.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas secara sinergis, baik di lingkungan unit kerja maupun antar SKPD, maka dalam Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengangkat dan menetapkan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian sampai pertanggungjawaban anggaran, yang penetapannya, dilaksanakan dengan menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
- b. Mengangkat dan menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai kebutuhan, serta Bendahara Barang SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tapanuli Utara atas usul masing-masing Kepala SKPD;



- c. Merumuskan dan melaksanakan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas-tugas operasional pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan masing-masing Kepala SKPD;
- d. Merumuskan dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, khusus untuk beberapa SKPD yang secara ketentuan diwajibkan menetapkan standar pelayanan minimal kepada masyarakat.



## BAB VII PENUTUP

Dari uraian diatas, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.418.077.322.328,40 atau 104,92% dari target sebesar Rp1.351.525.305.737,80 lebih realisasi sebesar Rp66.552.016.590,60 atau 4,92%;
2. Realisasi belanja sebesar Rp1.473.274.599.069,95 atau 92,04% dari anggaran sebesar Rp1.600.666.840.823,00 kurang realisasi sebesar Rp127.392.241.753,05 atau 7,96%;
3. Realisasi pembiayaan neto sebesar Rp227.132.230.399,85 dari anggaran sebesar Rp249.141.535.085,20 atau 91,17%;
4. Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2021 sebesar Rp171.934.953.658,30;
5. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.661.938.022.490,57 dibandingkan dengan jumlah aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.456.311.057.275,52 mengalami kenaikan sebesar Rp205.626.965.215,05 atau 8,37% dari tahun sebelumnya;
6. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.292.541.664.511,42 dibandingkan dengan jumlah aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.184.182.718.213,91 mengalami kenaikan sebesar Rp111.358.946.297,51 atau 5,10% dari tahun sebelumnya;
7. Surplus/defisit LO Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp94.313.761.557,92 (surplus sebelum pos luar biasa - surplus/defisit dari pos luar biasa (Rp104.440.322.073,92- Rp10.126.560.516,00));
8. Ekuitas Akhir sebesar Rp2.273.982.489.647,21 (Ekuitas Awal sebesar Rp2.119.645.522.166,86 + surplus LO sebesar Rp94.313.761.557,92 + Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp60.023.205.922,43);
9. Saldo Akhir Kas adalah Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara Dana BOS dan Kas Lainnya Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp172.195.177.661,30;
10. Selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan kas sebesar Rp75.252.592.060,00 sedangkan pada tahun 2020 kenaikan kas sebesar Rp25.767.353.172,02.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kinerja APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2021 tidak terlalu banyak terpengaruh oleh perlambatan pertumbuhan perekonomian akibat adanya *refocusing* baik akibat adanya pengalokasian belanja untuk penanganan Covid-19



maupun akibat adanya penurunan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maupun Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu Daerah di Indonesia yang mendapat Dana Pinjaman Daerah untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah yang bersumber dari APBN, dimana dana tersebut diperuntukkan pada kegiatan padat karya yang menggunakan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak.

Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam penanganan dampak pandemic Covid-19 antara lain:

- a. Mendukung Program Vaksinasi Nasional dengan kondisi pada 28 Desember 2021 capaian Vaksinasi di Kabupaten Tapanuli Utara:
  - Target Sasaran Vaksinasi 235.526 orang
  - 207.648 orang Vaksinasi Dosis I atau 88,16%
  - 170.875 orang Vaksinasi Dosis II atau 72,55%
  - 1.490 orang Vaksinasi Dosis III atau 0,63%
- b. Menghentikan Proses Belajar Mengajar di Sekolah yang sangat rentan dengan penyebaran Covid-19, pembatasan pengunjung rumah ibadah dan melakukan *tracing* pada pintu masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara bagi semua orang yang keluar masuk, dengan melakukan Protokol Kesehatan (Prokes) yakni pengecekan suhu tubuh;
- c. Pembenahan sarana dan prasarana RSUD Tarutung, dimana RSUD Tarutung sebagai Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara baik pembenahan bangunan/ruangan isolasi maupun pengadaan alat laboratorium *swab PCR*.

Data Konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 (Data per 28 Desember 2021) adalah sebagai berikut:

- Total Kasus Konfirmasi/Positif: 4.190 orang;
- Total Kasus Aktif/Isolasi: 0 orang;
- Total Sembuh sebanyak 4.113 orang;
- Kasus Meninggal RT-PCR (+) sebanyak 77 orang;
- Kasus Meninggal Probable sebanyak 18 orang.

(Sumber data: Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 28 Desember 2021).

Dari data - data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 tidak terlalu signifikan berdampak dalam bidang perekonomian dan sosial di Kabupaten Tapanuli Utara.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020  
(dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penyusunan Laporan Keuangan ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan juga mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Tarutung, 27-04-2022

**BUPATI TAPANULI UTARA**



**Drs. NIKSON NABABAN, M.Si**

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>	
	Jumlah					

Tarutung, Agustus 2022  
Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

**KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13
1	Tahun 2022	PT. Bank Sumut	-	Saham	32.665.887.948,00	32.665.887.948,00	3.051.648.695,00	35.717.536.643,00	-	-	-	35.717.536.643,00
2	Tahun 2022	PDAM Mual Natio	-	Non Saham	33.709.558.859,00	33.709.558.859,00	-	33.709.558.859,00	-	-	-	33.709.558.859,00
3	Tahun 2017	Perusda Pertanian	-	Non Saham	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	15.500.000.000,00	-	-	-	15.500.000.000,00
4	Tahun 2017	Perusda Pertambangan dan Aneka Industri	-	Non Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	5.000.000.000,00	-	-	-	5.000.000.000,00
Jumlah					86.875.446.807,00	86.875.446.807,00	3.051.648.695,00	89.927.095.502,00	-	-	-	89.927.095.502,00

Tarutung, Agustus 2022  
Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si



Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara  
Nomor : TAHUN 2022  
Tanggal : Agustus 2022

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET DAERAH**

(Dalam rupiah)

<b>NO.</b>	<b>NAMA ASET</b>	<b>SALDO PADA AKHIR TAHUN 2020</b>	<b>PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2021</b>	<b>PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2021</b>	<b>PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021</b>
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	814.466.289.342,00	5.032.098.143,00	5.359.905.437,00	814.138.482.048,00
2	PERALATAN DAN MESIN	341.871.326.921,37	40.645.579.378,00	6.006.659.753,00	376.510.246.546,37
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	683.625.448.612,95	99.960.604.908,00	0,00	783.586.053.520,95
4	JALAN, IRIGASI DAN BANGUNAN	1.391.191.425.712,03	133.650.474.682,00	0,00	1.524.841.900.394,03
5	ASET TETAP LAINNYA	13.127.158.558,00	400.915.000,00	188.802.257,00	13.339.271.301,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J U M L A H</b>		<b>3.244.281.649.146,35</b>	<b>279.689.672.111,00</b>	<b>11.555.367.447,00</b>	<b>3.512.415.953.810,35</b>

Tarutung, Agustus 2022  
Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTI YEARS);  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	<b>Pembangunan Jalan</b>	Pembangunan jalan Pancur Batu - Lobu Haminjon (No. Ruas 396) (PEN) Kec. Adiankoting	-	120.000.000	110.277.126,71	680.000.000	-
			Pembangunan Jalan Pembangunan Huta Julu - Huta Julu Parbalik (PEN) Kec. Parmonangan	-	75.000.000	73.912.499,99	425.000.000	-
			Pembangunan jalan Najumambe - Lobu Sonak (PEN) Kec. Pangaribuan	-	180.000.000	155.359.659,25	1.020.000.000	-
			Pembangunan Jalan Pantis - Sopo Raru (PEN) Kec. Pahae julu	-	210.000.000	202.508.695,47	1.190.000.000	-
		<b>Rekonstruksi Jalan</b>	Rekonstruksi jalan Onan Sabtu - Sibudil (No. Ruas 022) (PEN) Kec. Pangaribuan	-	555.000.000	544.455.000,00	3.145.000.000	-
			Rekonstruksi jalan Sp. Bulu Payung - Sibargot (No. Ruas 351) (PEN) Kec. Garoga	-	227.651.400	170.098.379,49	1.290.024.600	-

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rekonstruksi jalan Parsosoran-Hadataran (No. Ruas 388) (PEN) Kec. Garoga	-	193.740.000	154.992.000,00	1.097.860.000	-
			Rekonstruksi jalan Bulu Payung - Pea Ombun (No. Ruas 032) (PEN) Kec. Garoga	-	163.650.000	122.126.343,23	927.350.000	-
			Rekonstruksi jalan Pargawahan - Lobu Tonga (No. Ruas 350) (PEN) Kec. Garoga	-	138.750.000	138.045.000,56	786.250.000	-
			Rekonstruksi jalan Lumban Pinasa - Gonting Hopo - Sibio bio - Padang Siandomang (No. Ruas 326) (PEN) Kec. Garoga	-	204.600.000	178.820.400,00	1.159.400.000	-
			Rekonstruksi jalan Parinsoran - Pangorian (No. Ruas 155) (PEN) Kec. Garoga	-	225.000.000	223.229.100,00	1.275.000.000	-
			Rekonstruksi jalan Simp. Paranginan - Sirumambe - Hadataran (PEN) Kec. Garoga	-	70.312.500	69.364.503,81	398.437.500	-
			Rekonstruksi jalan Sp. Hariara – Rappa (No. Ruas 117) (PEN) Kec. Parmonangan	-	300.000.000	255.000.062,34	1.700.000.000	-

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rekonstruksi jalan Simardangiang - Pasir Nauli (PEN) Kec. Pahae julu	-	180.000.000	177.246.000,00	1.020.000.000	-
			Rekonstruksi jalan Panongkalan - Simp. Muara Tolang (No. Ruas 435) (PEN) Kec. Simangumban	-	600.000.000	594.000.000,00	3.400.000.000	-
		<b>Rehabilitasi Jalan</b>	Rehabilitasi Jalan Rappa - Tumus - Hajoran (PEN) Kec. Parmonangan	-	75.000.000	-	425.000.000	-
		<b>Pembangunan Jembatan</b>	Pembangunan Jembatan Aek Julu Desa Pancur Napitu (PEN) Kec. Siatas Barita	-	81.562.500	73.376.410,02	462.187.500	-
Jumlah.....				-	3.600.266.400	3.242.811.181	20.401.509.600	-

Tarutung, Agustus 2022  
Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>		<b>I</b>		<b>L</b>	
	Jumlah							

Tarutung, Agustus 2022  
Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si

KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persenta se bunga pinjama n %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. BANK Dagang Negara Cabang Sibolga	Perjanjian No. Cnb/24/02/Invest	09 Juni 1983	2.561.157.000,00	10 Tahun	13,50%	Pembangunan Pusat Pasar Tarutung	0	0	1.863.127.087,75	2.123.541.081,05
2	PT. Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO)	Akta Perjanjian Pinjaman Daerah No. 29	23 Oktober 2020	326.670.000.000,00	8 Tahun	0%	Pemulihan Ekonomi Nasional	0	0	319.206.190.801,00	-
3	PT. Sarana Multi Infrastruktur (PERSERO)	Akta Perjanjian Pinjaman Daerah No. 78	17 September 2021	73.330.000.000,00	5 Tahun	5,66%	Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	14.666.000.000,00	4.150.478.000,00	58.664.000.000,00	16.601.912.000,00

Tarutung, Agustus 2022  
 Bupati Tapanuli Utara

Drs. NIKSON NABABAN, M.Si